PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

PERATURAN DAERAH

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2025 - 2029





BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TANA TIDUNG

BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANA TIDUNG

dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen RPJMD sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ PD yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ PD untuk mencapai sasaran.
14. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
15. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung dimasa yang akan datang.

16. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh PD disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMN.

BAB II

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

(1) RPJMD disusun dengan sistematika sebbagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
BAB V : PENUTUP.

(2) Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi hasil terhadap pelaksanaan RPJMD secara berkala.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
   c. terjadi perubahan yang mendasar, meliputi terjadinya :
      1. bencana alam;
      2. goncangan politik;
      3. krisis ekonomi;
      4. konflik sosial budaya;
      5. gangungan keamanan;
      6. pemekaran Daerah; atau
      7. perubahan kebijakan nasional.
(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra PD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale,
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI TANA TIDUNG

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

HERSONSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (74/2/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan program-program pembangunan Daerah tidak lepas dari perencanaan pembangunan Daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber dayanya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejateraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Tahapan perencanaan Daerah tersebut meliputi tahapan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Salah satu bentuk perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah RPJMD. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati.

Sesuai amanat ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh PD disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra PD bagi PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kerangka Pendanaan” adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati dan wakil Bupati serta target pembangunan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 2

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2025 - 2029





BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TANA TIDUNG

DAFTAR ISI

BAB I	**PENDAHULUAN**	**I**	1
	1.1 Latar Belakang	I	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I	2
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I	5
	1.4 Maksud dan Tujuan	I	9
	1.5 Sistematika Penulisan	I	10
BAB II	**GAMBARAN UMUM DAERAH**	**II**	**1**
	2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II	1
	2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi	II	1
	2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II	33
	2.1.3 Aspek Daya Saing	II	48
	2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II	63
	2.2 Gambaran Umum Keuangan Daerah	II	81
	2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	II	82
	2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	II	121
	2.2.3 Kerangka Pendanaan	II	128
	2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	II	151
	2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	II	157
	2.3.2 Isu Strategis	II	167
BAB III	**VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**	**III**	**1**
	3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	III	1
	3.1.1 Visi	III	2
	3.1.2 Misi	III	4
	3.1.3 Tujuan dan Sasaran	III	8
	3.2 Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program Pembangunan Daerah	III	14
	3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029		
	3.2.2 Program-program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III	36
	3.2.3 Program-program Unggulan Kepala Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tana Tidung	III	49
	3.2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	III	56
BAB IV	**PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**	**IV**	**1**
	4.1 Program Perangkat Daerah	IV	1
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV	42
	4.2.1 Indikator Kinerja Makro	IV	42
	4.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV	43
	4.2.3 Indikator Utama Pembangunan	IV	45
	4.2.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD)	IV	51
	4.2.5 Indikator Kinerja Kunci	IV	58

BAB V PENUTUP **V 1**
5.1 Pedoman Transisi V 1
5.2 Pengendalian dan Evaluasi V 2
5.3 Kaidah Pelaksanaan

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I	6
Gambar II.1	Peta Administrasi Kabupaten Tana Tidung	II	3
Gambar II.2	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)	II	16
Gambar II.3	Peta Wilayah Fungsional	II	16
Gambar II.4	Jasa Lingkungan Penyedia Pangan	II	18
Gambar II.5	Proporsi Jasling Penyedia Pangan	II	18
Gambar II.6	Grafik proporsi jasling penyediaan air bersih	II	20
Gambar II.7	Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih	II	20
Gambar II.8	Peta Daya Dukung Persebaran Air	II	21
Gambar II.9	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	22
Gambar II.10	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	23
Gambar II.11	Peta Sebaran Rawan Bencana Kabupaten Tana Tidung	II	28
Gambar II.12	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	29
Gambar II.13	Piramida Penduduk Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024	II	32
Gambar II.14	PDRB per Kapita (Juta Rp./Kapita) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	38
Gambar II.15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	38
Gambar II.16	Indeks Gini pada 2020-2024	II	40
Gambar II.17	Angka Harapan Hidup Kabupaten Tana Tidung 2020-2024	II	42
Gambar II.18	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Tidung 2020-2024	II	43
Gambar II.19	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tana Tidung 2020-2024	II	44
Gambar II.20	Indeks Pendidikan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	44
Gambar II.21	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2023	II	52
Gambar II.22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	53
Gambar II.23	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tana Tidung 2021-2024	II	54
Gambar II.24	Laju Pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Tana Tidung 2020-2024	II	56
Gambar II.25	Indeks Desa Membangun Kabupaten Tana Tidung 2020-2024	II	60

Gambar II.26	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2022	II	61
Gambar II.27	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	64
Gambar II.28	Angka Kriminalitas Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2022	II	65
Gambar II.29.	Indeks Rasa Aman Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2023		66
Gambar II.30.	Pilar Penyusun Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024	II	67
Gambar II.31.	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)	II	81
Gambar II.32.	Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	81
Gambar II.33.	Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (%)	II	83
Gambar II.34.	Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (%)	II	84
Gambar II.35.	Komponen Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (%)	II	85
Gambar II.36.	Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (%)	II	86
Gambar II.37.	Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (%)	II	87
Gambar II.38.	Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	87
Gambar II.39.	Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	88
Gambar II.40.	Perkembangan Belanja Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	93
Gambar II.41.	Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	94
Gambar II.42.	Rata-rata Struktur Belanja Operasi Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	95
Gambar II.43.	Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kab Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	95
Gambar II.44.	Perkembangan Struktur Belanja Modal Kab Tana Tidung Tahun 2020-202	II	97
Gambar II.45.	Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	98
Gambar II.46.	Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	101
Gambar II.47.	Target Komposisi PAD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030	II	131

Gambar II.48.	Target Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030	II	132
Gambar II.49.	Target Belanja Operasi Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030 (dalam juta)	II	136
Gambar II.50.	Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030	II	137
Gambar II.51.	Target Alokasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030 (dalam juta)	II	138
Gambar II.52.	Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung	II	154
Gambar II.53.	Isu Global	II	164
Gambar II.54.	Isu Nasional	II	166
Gambar II.55.	Ilustrasi Zonning Map sebagai arah rencana, pemanfaatan dan pêngendalian ruang	II	181
Gambar II.56.	Alur integrasi RTRW sebagai produk rencana spasial ke dalam rencana Pembangunan	II	182
Gambar II.57.	Kerangka Tujuan RTRW Kabupaten Tana Tidung	II	183
Gambar II.58.	Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tana Tidung	II	185
Gambar II.59.	Kawasan Konservasi Kabupaten Tana Tidung	II	187
Gambar II.60.	Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Tana Tidung	II	188
Gambar II.61.	Peta Rencana Pola Ruang Kabupate Tana Tidung	II	192
Gambar III.1.	Keterkaitan 8 Misi Asta Cita RPJMN 2025-2029 dengan Misi Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029	III	4
Gambar III.2.	Tema Pembangunan Per Tahun Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029	III	26
Gambar III.3.	Program Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029	III	49
Gambar III.4.	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Tana Tidung	III	57
Gambar III.5.	Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Utara	III	60
Gambar III.6.	Kerangka Tujuan RTRW Kabupaten Tana Tidung	III	61
Gambar III.7.	Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tana Tidung	III	62
Gambar III.8.	Kawasan Konservasi Kabupaten Tana Tidung	III	63
Gambar III.9.	Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Tana Tidung	III	64
Gambar III.10.	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tana Tidung	III	65
Gambar III.11.	Pengembangan Kewilayahan di Kalimantan Utara Pada RPJMN 2025-2029	III	66

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Data Kecamatan, Jumlah Pulau, dan Jumlah Kelurahan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024	II	3
Tabel II.2	Tinggi Wilayah dan Jarak Setiap Kecamatan ke Ibukota di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024	II	3
Tabel II.3	Kelas Ketinggian, tempat, dan Luasnya di Kabupaten Tana Tidung	II	4
Tabel II.4	Kelas Kemiringan Lahan (rata-rata) Kabupaten Tana Tidung	II	5
Tabel II.5	Nama Pulau dan luasnya di Kabupaten Tana Tidung	II	5
Tabel II.6	Keadaan Iklim di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024	II	7
Tabel II.7	Nama dan Luas DAS di Kabupaten Tana Tidung	II	8
Tabel II.8	Penggunaan Lahan di Kabupaten Tana Tidung Pada Tahun Dasar Perencanaan Tata Ruang (Tahun 2020)	II	8
Tabel II.9	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Menurut Ekoregion	II	17
Tabel II.10	Luas Potensi Jasling Penyediaan Pangan Tiap Kecamatan	II	19
Tabel II.11	Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Menurut Ekoregion	II	19
Tabel II.12	Luas potensi jasling penyediaan air bersih tiap kecamatan	II	21
Tabel II.13	Uraian Ketahanan Air Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	24
Tabel II.14	Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Tana Tidung, 2022-2024	II	25
Tabel II.15	Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	25
Tabel II.16	Jumlah Desa yang Mengalami Bencana Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2023	II	26
Tabel II.17	Jumlah Desa yang Mengalami Bencana Gempa Bumi Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2023	II	27
Tabel II.18	Jumlah Penduduk per Kecamatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020–2024	II	29
Tabel II.19	Kepadatan Penduduk Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	30
Tabel II.20	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023-2024	II	31
Tabel II.21	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024	II	31

Tabel II.22	Proyeksi Penduduk Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029	II	33
Tabel II.23	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Lapangan Usaha Di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	34
Tabel II.24	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 – 2024	II	36
Tabel II.25	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020–2024	II	36
Tabel II.26	Indikator Pembentuk Manusia Kabupaten Tana Tidung menurut Indikator Pembentuk Tahun 2020-2024	II	41
Tabel II.27	Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	48
Tabel II.28	Penduduk 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2024	II	48
Tabel II.29	Penduduk Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020- 2024	II	49
Tabel II.30	Produk Domestik Bruto (PDRB) Kategori Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	51
Tabel II.31	Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	53
Tabel II.32	Capaian Perekonomian Sektor Pertanian Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	55
Tabel II.33	Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	58
Tabel II.34	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau di Provinsi Kalimantan Utara 2023-2024 (Persen)	II	59
Tabel II.35	Kondisi Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2024	II	62
Tabel II.36	Kondisi Infrastruktur Kesehatan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019-2023	II	62
Tabel II.37	Rasio Pajak terhadap PDRB Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	63
Tabel II.38	Indikator Kinerja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	67
Tabel II.39	Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	74
Tabel II.40	Skala interval Otonomi Fiskal	II	79
Tabel II.41	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	II	79

	Kabupaten Tana Tidung, Tahun 2020-2024		
Tabel II.42	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)	II	91
Tabel II.43	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (dalam juta)	II	100
Tabel II.44	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (Dalam Jutaan)	II	102
Tabel II.45	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	108
Tabel II.46.	Rasio Lancar Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	113
Tabel II.47.	Rasio Hutang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	114
Tabel II.48.	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	115
Tabel II.49.	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	117
Tabel II.50.	Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024	II	116
Tabel II.51.	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019-2023 (dalam Jutaan)	II	118
Tabel II.52.	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	121
Tabel II.53.	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	123
Tabel II.54.	Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	124
Tabel II.55.	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030 (dalam jutaan)	II	132
Tabel II.56.	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030 (dalam juta)	II	139
Tabel II.57.	Proyeksi APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030 (dalam juta)	II	142
Tabel II.58.	Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)	II	147
Tabel II.59.	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)	II	150
Tabel II.60.	Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)	II	151
Tabel II.61.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030	II	152

Tabel II.62.	Permasalahan Perurusan Kabupaten Tana Tidung	II	160
Tabel II.63.	*Highlight* Indikasi Intervensi Wilayah Kalimantan Utara	II	170
Tabel II.64.	Arahan Strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara terhadap Kabupaten Tana Tidung	II	174
Tabel II.65.	Relevansi Isu RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2025-2029 dengan Isu RPJPD Kabupaten Tana Tidung 2025-2045	II	177
Tabel II.66.	Relevansi Isu KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2025-2029 dengan Isu RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2025-2029	II	179
Tabel II.67.	Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tana Tidung	II	184
Tabel II.68.	Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tana Tidung	II	186
Tabel II.69.	Teknik Merumuskan Isu Strategis Kabupaten Tana Tidung	II	195
Tabel III.1.	Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Kab. Tana Tidung Tahun 2025-2029	III	7
Tabel III.2.	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030	III	10
Tabel III.3.	Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029	III	28
Tabel III.4.	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029	III	29
Tabel III.5.	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029	III	37
Tabel III.6.	Keselarasan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 dengan Program Nomenklatur	III	50
Tabel III.7.	Keselarasan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 dengan Program Nomenklatur	III	62
Tabel III.8.	Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tana Tidung	III	63
Tabel IV.1	Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026–2030	IV	2
Tabel IV.2	Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2030		42
Tabel IV.3	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2030	IV	44
Tabel IV.4	Penetapan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2030	IV	46
Tabel IV.5	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2030	IV	52
Tabel IV.6	Penetapan Indikator Kinerja Kunci	IV	59

BAB 1
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Kabupaten Tana Tidung, yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara, memiliki keunggulan geografis dan sumber daya alam yang menjadikannya salah satu wilayah dengan prospek tinggi di Indonesia. Dengan hutan tropis yang subur, aliran sungai yang jernih, serta panorama alam yang menawan, wilayah ini memiliki daya tarik utama untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Selain itu, kearifan budaya lokal dengan tradisi unik dan seni khas masyarakat setempat memberikan identitas yang kuat serta peluang besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Letaknya yang strategis sebagai gerbang menuju kawasan perbatasan semakin menambah nilai penting Tana Tidung dalam memperkuat konektivitas regional.

Sektor ekonomi Kabupaten Tana Tidung juga menunjukkan potensi yang signifikan, terutama melalui dominasi perkebunan kelapa sawit. Dengan luas lahan dan tingkat produktivitas yang tinggi, sektor ini menjadi penyumbang utama pendapatan daerah. Selain itu, sektor perikanan juga menjanjikan, dengan hasil laut melimpah seperti ikan dan udang yang dapat dioptimalkan melalui kombinasi perikanan tangkap dan budidaya. Pengelolaan berkelanjutan terhadap sektor unggulan ini tidak hanya berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga membantu menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Penyusunan dokumen RPJMD dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-bawah dan bawah-atas, Holistik-tematik, Integratif, dan Spasial. Dasar hukum yang mendukung proses perencanaan pembangunan daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan mulai dari jangka panjang hingga menengah, dengan RPJMD sebagai pedoman utama dalam merumuskan program kerja strategis.

Dengan telah dilantiknya Bapak Ibrahim Ali sebagai Bupati dan Bapak Sabri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025–2029, Pemerintah Kabupaten akan segera memulai proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Dokumen ini merupakan tahap awal dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memiliki peran strategis dalam mewujudkan arah serta tujuan pembangunan daerah secara bertahap dan terarah. Sebagai panduan pembangunan lima tahunan, RPJMD diharapkan mampu merumuskan strategi yang efektif dan adaptif, serta mengintegrasikan lintas sektor pembangunan guna memperkuat sinergi antarprogram dan antar-perangkat daerah. Penyusunan dokumen ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk memastikan konsistensi arah kebijakan pembangunan, serta menjamin keberhasilan dan keberlanjutan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.Sebagai salah satu daerah yang sedang

berkembang, Kabupaten Tana Tidung menunjukkan dinamika pembangunan yang relatif tinggi, maka perlu adanya upaya mewujudkan pembangunan melalui pengembangan infrastruktur seperti jalan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pendekatan yang seimbang antara modernisasi dan pelestarian budaya lokal menjadi kunci dalam membangun daerah yang kompetitif. Dengan kerja sama seluruh pihak, Kabupaten Tana Tidung diharapkan mampu melaksanakan pembangunan berbasis potensi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Menyadari hal tersebut, RPJMD memiliki peran krusial dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan perencanaan yang komprehensif dan strategis, pembangunan daerah dapat disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan lokal secara optimal. Upaya ini mencakup penguatan infrastruktur, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan serta pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor-sektor unggulan daerah. Dengan pelibatan seluruh proses tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tana Tidung secara menyeluruh.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang¬Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

16 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;

17 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan;

18 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan;

19 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran;

20 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optmalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

21 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahaan Merah Putih;

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

29 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

30 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);

31 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 Nomor 5);

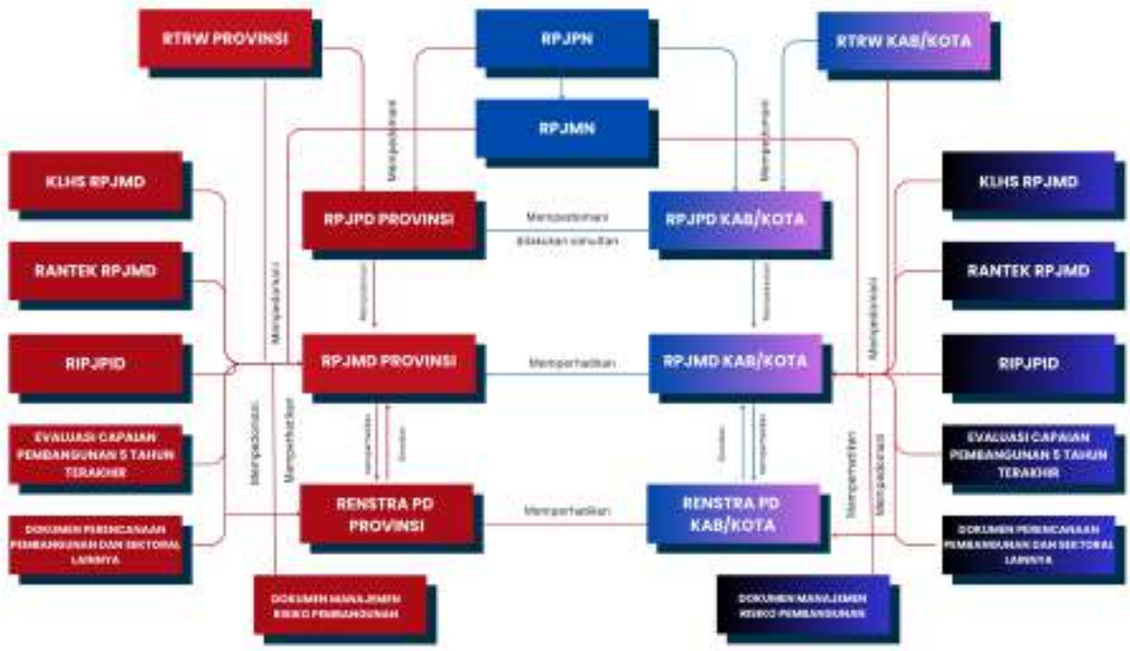
32 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 4);.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Keterkaitan ini memastikan keselarasan dan sinergi antara program-program pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan. RPJMD harus mencerminkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, sehingga penyusunannya melibatkan penjabaran aspirasi tersebut ke dalam rencana pembangunan yang konkret. Proses ini juga melibatkan acuan pada dokumen-dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMD Provinsi). Dengan demikian, RPJMD berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan nasional dan provinsi dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di tingkat daerah. Berikut merupakan sinergisitas dan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut:

Gambar I.1.
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan

Sektoral Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, terlihat keterkaitan yang erat antara RPJMD dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hubungan ini menunjukkan adanya keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan agar arah pembangunan daerah selaras dengan kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih luas. Berikut merupakan penjabaran lebih lanjut terkait hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya :

a. Hubungan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hubungan keduanya terletak pada keterpaduan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional, terutama dalam mendorong pembangunan wilayah perbatasan, penguatan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) di perbatasan Kalimantan Utara, Tana Tidung memiliki peran penting dalam mendukung agenda nasional seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang diamanatkan dalam RPJMN.

Selain itu, RPJMD Tana Tidung akan menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa prioritas lokal, seperti pengembangan sektor perkebunan, perikanan, dan pariwisata, berjalan seiring dengan target-target RPJMN. Sinergi ini diwujudkan melalui penyelarasan indikator pembangunan, program prioritas, dan alokasi sumber daya, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dengan pendekatan ini, Tana Tidung diharapkan

mampu memperkuat posisinya sebagai daerah strategis yang mendukung visi pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

b. Hubungan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kalimantan Utara tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari upaya penyelarasan kebijakan pembangunan antara tingkat kabupaten dan provinsi. Hubungan ini terletak pada sinkronisasi prioritas pembangunan, seperti penguatan sektor ekonomi unggulan, pengembangan wilayah perbatasan, dan peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat. Sebagai kabupaten yang memiliki potensi besar di sektor perkebunan, perikanan, dan pariwisata, Tana Tidung berperan mendukung realisasi target provinsi dalam memperkuat daya saing wilayah, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Tana Tidung juga menjadi implementasi spesifik dari visi pembangunan Kalimantan Utara dengan fokus pada pembangunan infrastruktur strategis, pemerataan layanan publik, dan pengurangan ketimpangan antarwilayah. Sinergi ini diwujudkan melalui penyelarasan program prioritas, pengintegrasian kebijakan pembangunan, dan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Dengan kolaborasi ini, Tana Tidung tidak hanya mendukung pencapaian target RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah provinsi.

c. Hubungan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2045

RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 merupakan tahapan strategis dalam mewujudkan visi jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2045. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD berfungsi sebagai kerangka operasional untuk menetapkan program prioritas dan sasaran pembangunan yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Dalam konteks ini, RPJMD 2025-2029 fokus pada pembangunan fondasi ekonomi berbasis potensi lokal seperti perkebunan, perikanan, dan pariwisata, serta penguatan infrastruktur dasar yang menjadi landasan menuju transformasi wilayah sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang.

Hubungan antara RPJMD dan RPJPD juga terwujud dalam upaya penyelarasan visi dan misi pembangunan daerah. RPJMD 2025-2029 diarahkan untuk mempersiapkan Kabupaten Tana Tidung menuju tahap pengembangan yang lebih maju, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan pengelolaan lingkungan yang optimal. Dengan memastikan kesinambungan antara sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang, RPJMD ini menjadi instrumen penting untuk menjaga konsistensi pembangunan sehingga visi RPJPD 2025-2045 dapat terwujud secara bertahap dan terukur.

d. Hubungan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023-2043

RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 memiliki hubungan strategis dengan RTRW Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023-2043 sebagai kerangka acuan dalam perencanaan tata ruang wilayah. RTRW memberikan pedoman spasial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam RPJMD, seperti penetapan lokasi untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan ekonomi, serta pelestarian lingkungan. Dengan demikian, RPJMD 2025-2029 mengacu pada arahan RTRW untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah sejalan dengan pola ruang yang telah ditetapkan, sehingga tercipta harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Selain itu, hubungan ini tercermin dalam penyelarasan prioritas pembangunan wilayah, seperti pengembangan kawasan strategis, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan optimalisasi ruang untuk sektor unggulan seperti perkebunan, perikanan, dan pariwisata. RPJMD 2025-2029 mengintegrasikan kebijakan RTRW dalam setiap program untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, mengurangi konflik pemanfaatan ruang, dan mendukung pencapaian visi tata ruang jangka panjang. Dengan sinergi ini, Kabupaten Tana Tidung dapat memaksimalkan potensi wilayahnya sekaligus menjaga keseimbangan ekologis dan sosial di masa depan.

e. Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

f. Hubungan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki keterkaitan erat dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan lingkungan. KLHS berfungsi untuk mengintegrasikan isu-isu lingkungan hidup ke dalam proses perencanaan RPJMD sejak tahap awal, agar arah pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan sosial, tetapi juga menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan demikian, KLHS menjadi landasan analitis yang membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko dan potensi dampak lingkungan dari strategi pembangunan yang direncanakan.

Integrasi KLHS dalam penyusunan RPJMD memberikan nilai tambah strategis melalui pendekatan yang lebih holistik dan preventif dalam pengambilan keputusan pembangunan. Hasil kajian KLHS memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan berkelanjutan yang wajib diadopsi dalam

dokumen RPJMD, sehingga mendorong terwujudnya pembangunan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berketahanan terhadap perubahan iklim. Melalui sinergi antara KLHS dan RPJMD, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin ketersediaan sumber daya dan kualitas lingkungan bagi generasi yang akan datang.

g. Hubungan RPJMD dengan Dokumen perencanaan sektoral

RPJMD memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan sektoral karena keduanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah secara holistik. RPJMD berfungsi sebagai dokumen strategis yang mengarahkan visi, misi, dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah, sementara dokumen perencanaan sektoral, seperti Renstra OPD dan rencana induk bidang tertentu, memberikan rincian program, kegiatan, serta target yang lebih spesifik sesuai sektor masing-masing. Hubungan ini memastikan adanya sinkronisasi antara kebijakan strategis yang ditetapkan di tingkat makro dengan implementasi teknis di setiap sektor, sehingga seluruh elemen perencanaan berjalan harmonis, efisien, dan efektif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung dimaksudkan untuk menjadi dokumen perencanaan strategis yang memberikan arahan pembangunan daerah selama periode lima tahun (2026-2030). Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, serta sebagai alat koordinasi antar-perangkat daerah dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 :

1) Menyusun prioritas pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal, mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.
2) Mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan untuk memastikan keselarasan dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3) Mengarahkan pelaksanaan pembangunan untuk merealisasikan visi dan misi kepala daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.
4) Memberikan dasar hukum yang jelas untuk pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
5) Memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya bertujuan jangka pendek, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan dan keseimbangan sosial untuk keberlanjutan jangka panjang.
6) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan melalui perencanaan yang terukur dan berbasis data.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dasar-dasar penyusunan RPJMD, meliputi latar belakang, dasar hukum, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen peencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika dokumen yang akan dibahas.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menyajikan kondisi dan karakteristik Kabupaten Tana Tidung sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan pembangunan daerah. Aspek-aspek meliputi kondisi geografis, demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan umum. Pada bab ini juga menjelaskan kondisi atau gambaran keuangan daerah dan permasalahan serta isu-isu strategis yang menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Tana Tidung.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan visi dan misi Bupati Tana Tidung, yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah. Selanjutnya, bab ini juga menjelaskan arah kebijakan pembangunan, strategi yang akan diterapkan, serta program-program prioritas yang menjadi fokus utama dalam kurun waktu RPJMD Tahun 2025–2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menyajikan rencana program dan kegiatan dari masing-masing perangkat daerah, yang dilengkapi dengan indikator kinerja, target pencapaian, serta kebutuhan anggaran yang direncanakan. Selain itu, bab ini juga menyajikan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pengukuran Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Utama Pembangunan (IUP), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan berbasis hasil.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Panduan ini dirancang agar pelaksanaan RPJMD 2025-2029 tetap konsisten dan berkelanjutan sesuai rencana.



BAB 2
GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah proses yang kompleks dimana bertujuan untuk mempedomani serta mengelola pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah dalam berbagai aspek. Esensi perencanaan pembangunan suatu daerah sendiri meliputi berbagai aspek yang penting guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek. Sehubungan dengan hal tersebut, perencanaan memiliki kekuatan dalam mewujudkan tujuan pembangunan suatu daerah dengan berpijak pada analisis hasil kebijakan pembangunan yang perlu dipahami dan dikaji secara mendalam sebagai gambaran umum daerah.

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah memberikan deskripsi dan analisis sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan dapat dikembangkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah serta aspek pelayanan umum dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, perlu melihat berbagai capaian pembangunan daerah pada periode sebelumnya baik capaian positif maupun negatif beserta permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Diharapkan dengan analisis yang komprehensif dan valid pada gambaran umum kondisi daerah ini, mampu menjadi acuan dalam menyusun strategi pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata di Kabupaten Tana Tidung.

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Kondisi geografi dan demografi merupakan dua faktor penting dan mendasar yang menentukan keberhasilan pembangunan. Kondisi geografi akan akan memberikan gambaran menyeluruh tentang karakteristik wilayah Kabupaten Tana Tidung, termasuk luas dan batas wilayah, letak geografis, topografi, dan klimatologi. Selain itu, analisis ini akan mencakup berbagai potensi pengembangan wilayah yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Tana Tidung. Sedangkan, posisi aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Tana Tidung akan memaparkan ukuran, struktur, serta distribusi/persebaran penduduk, baik dalam konteks series maupun kewilayahan. Analisis demografi ini sangat penting mengingat penduduk adalah pelaksana utama pembangunan sekaligus objek pembangunan. Oleh karena itu, keterkaitan antara demografi dan aspek-aspek lain perlu diperhatikan dengan

seksama untuk memastikan perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tana Tidung dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, dan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Kabupaten ini kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 Juli 2007 dan Kabupaten Tana Tidung resmi menjadi Kabupaten ke-10 atau Daerah Otonom ke-14 di Provinsi Kalimantan Timur, dengan dilantiknya Pejabat Bupati Tana Tidung pada tanggal 18 Desember 2007. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012 tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, maka Kabupaten Tana Tidung menjadi salah satu kabupaten pada wilayah pemekaran Provinsi Kalimantan Utara tersebut.

Luas wilayah Kabupaten Tana Tidung yaitu 3.858,31 km^2. Adapun batas wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tana Tidung yaitu:

1. Sebelah utara dengan Kabupaten Nunukan
2. Sebelah timur dengan laut Sulawesi, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan
3. Sebelah selatan dengan Kabupaten Bulungan
4. Sebelah barat dengan Kabupaten Malinau

Secara administratif wilayah Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 5 kecamatan, dan 32 desa, setiap desa dalam kecamatan tersebut yaitu:

1. Kecamatan Muruk Rian, tediri dari Desa Belayan Ari, Seputuk, Rian, Kapuak, Rian Rayo, Sapari.
2. Kecamatan Sesayap tediri dari Desa Sedulun, Limbu Sedulun, Gunawan, Tideng Pale, Tideng Pale Timur, Sebidai, Sebawang
3. Kecamatan Betayau tediri dari Desa Mendupo, Periuk, Bebakung, Kujau, Maning, Buang Baru
4. Kecamatan Sesayap Hilir tediri dari Desa Seludau, Sesayap, Sepala Dalung, Bandan Bikis, Bebatu, Sengkong, Menjelutung, Sesayap Selor
5. Kecamatan Tana Lia tediri dari Desa Tanah Merah, Sambungan, Tengku dacing, Tanah Merah Barat, Sambungan Selatan

Berikut penyajian luas wilayah setiap kecamatan, jumlah pulau, dan jumlah desa yang ada di setiap kecamatan:

Tabel II.1
Data Kecamatan, Jumlah Pulau, dan Jumlah Kelurahan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024

Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Pulau
Muruk Rian	439,58	1
Sesayap	393,92	2
Betayu	578,22	-
Sesayap Hilir	1.678,69	17

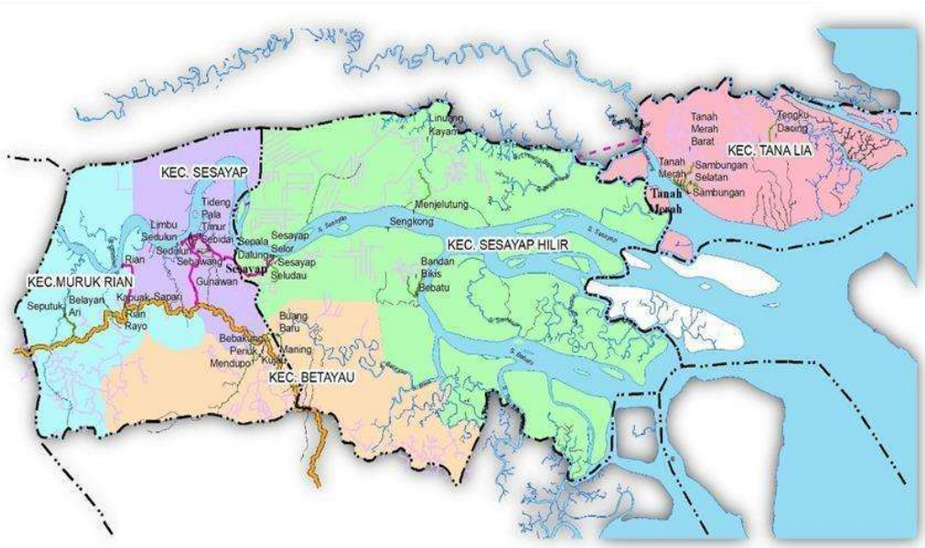
Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Pulau
Tana Lia	767,90	25
Jumlah	**3.858,31**	**45**

Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2025*

B. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Tana Tidung merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kalimantan Utara, secara astronomi terletak diantara 116°42´ 50" - 117°49' 50" Bujur Timur dan 3°12´02" - 3°46´41" Lintang Utara. Kabupaten Tana Tidung berada di tengah-tengah antara Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan yang merupakan jalur strategis perekonomian. Berada pada jalur poros tengah wilayah utara yang menghubungkan Tarakan, Bulungan, Tana Tidung, dan Nunukan. Gambaran karakteristik wilayah Kabupaten Tana Tidung dapat dideskripsikan berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada. Wilayah Kabupaten Tana Tidung terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu: kawasan perbukitan dan kawasan non perbukitan. Kawasan perbukitan termasuk hutan, hutan lindung, dan kawasan-kawasan lain yang sejenis.

Gambar II.1
Peta Administrasi Kabupaten Tana Tidung



Sumber: *RKPD Kabupaten Tana Tidung tahun 2025*

Tabel II.2
Tinggi Wilayah dan Jarak Setiap Kecamatan ke Ibukota di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024

Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
Muruk Rian	9,24
Sesayap	0,87
Batayau	15,06
Sesayap Hilir	11,44
Tana Lia	70,76

Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2025*

Kawasan Non perbukitan meliputi daerah pemukiman penduduk, zona pertanian, dan kawasan-kawasan lain yang sejenis. Sedangkan karakteristik dasar Kabupaten Tana Tidung dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Kabupaten Tana Tidung merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam (minyak bumi) dan gas, batubara, emas, sumber daya hutan, ketersediaan lahan perkebunan, dan wilayah perairan yang luas);
b. Kabupaten Tana Tidung berada diantara Kota Tarakan, Kab. Bulungan dan Kab. Malinau yang merupakan jalur perekonomian yang strategis; dan
c. Kabupaten Tana Tidung berada pada jalur poros tengah wilayah utara yang menghubungkan Tarakan, Bulungan, Tana Tidung dan Nunukan (Serawak-Sabah).

C. Topografi

Secara umum, Kabupaten Tana Tidung merupakan wilayah administratif yang terdiri dari beberapa pulau dan dialiri oleh puluhan sungai besar dan kecil. Topografi wilayah ini bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan dengan kemiringan lereng yang beragam, dari landai hingga terjal. Ibu Kota Kabupaten Tana Tidung terletak di Tideng Pale, Kecamatan Sesayap. Pulau terluas di wilayah ini adalah Pulau Mandul dengan luas mencapai 35.291,76 hektare, sedangkan sungai terpanjang adalah Sungai Sesayap dengan panjang sekitar 270 km. Wilayah dengan elevasi tertinggi berada di Gunung Rian, Kecamatan Muruk Rian, dengan ketinggian mencapai 250 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Berdasarkan data kelas ketinggian, Kabupaten Tana Tidung memiliki variasi elevasi mulai dari 0 mdpl hingga lebih dari 300 mdpl. Sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 10–30 mdpl (42,67%) dan 5–10 mdpl (30,04%), yang menunjukkan dominasi kawasan dataran rendah. Sementara itu, wilayah dengan ketinggian lebih dari 90 mdpl hanya mencakup sebagian kecil dari total luas wilayah, dengan akumulasi kurang dari 7% (termasuk kelas 90–120 mdpl, 120–150 mdpl, 150–200 mdpl, 200–250 mdpl, 250–300 mdpl, dan >300 mdpl). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat area perbukitan dan daerah berbukit terjal, seperti di sekitar Gunung Rian, sebagian besar wilayah Tana Tidung merupakan dataran yang relatif landai.

Tabel II.3
Kelas Ketinggian dan Luasnya di Kabupaten Tana Tidung

Kelas Ketinggian	Luas hamparan (Ha)	%
0 mdpl	5.154,55	1,27
0-5 mdpl	12.338,45	3,04
5-10 mdpl	121.923,35	30,04
10-30 mdpl	173.184,73	42,67
30-50 mdpl	41.439,33	10,21
50-90 mdpl	25.610,40	6,31
90-120 mdpl	8.766,79	2,16
120-150 mdpl	6.656,27	1,64
150-200 mdpl	5.682,18	1,40

Kelas Ketinggian	Luas hamparan (Ha)	%
200-250 mdpl	2.232,29	0,55
250-300 mdpl	1.095,85	0,27
>300 mdpl	1.826,42	0,45
Jumlah	**405.870,00**	**100**

Sumber: *KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung 2025*

Tabel II.4
Kelas Kemiringan Lahan (rata-rata) Kabupaten Tana Tidung

No	Bentuk Lahan	Kemiringan	Luas (Km²)	Persentase (%)
1	Datar-landai	0 - 2 %	182.901,76	45,06%
2	Datar-landai	2 - 5 %	66.837,79	16,47%
3	Datar-landai	5 – 8 %	30.544,86	7,53%
4	Berombak	8 – 15 %	29.742,98	7,33%
5	Bergelombang	15 - 20 %	12.924,97	3,18%
6	Berbukit	25 – 40 %	7.871,84	1,94%
7	Bergunung	>40 %	3.410,94	0,84%
8	Berair	Perairan	71.634,87	17,65%
Jumlah			**405.870,00**	**100,00**

Sumber: *KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung 2025*

D. Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa pulau yang dialiri beberapa sungai besar dan sungai kecil. Terdapat 2 buah gunung di Kabupaten Tana Tidung, yaitu Gunung Rian dan Gunung Aung. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung terutama didominasi oleh Ultisol, Inceptisol, Entisol dan Spodosol. Di Kabupaten Tana Tidung terdapat 39 pulau, dengan luas pulau terkecil sebesar 13,61 Ha yaitu Pulau Sepakang, sedangkan pulau terluas adalah Pulau Sida, dengan luas 4.598,80 Ha. Berikut data rincian pulau dan luasnya:

Tabel II.5
Nama Pulau dan luasnya di Kabupaten Tana Tidung

No	Nama Pulau	Luas (Ha)
1	Baru	92,78
2	Baru Lumot	81,95
3	Bekaro	102,8
4	Bengkalung	184,65
5	Fani	264,02
6	Ijap	2.883,18
7	Iting–iting	972,08
8	Kranggasan Barat	355,4
9	Kranggasan Timur	331,24
10	Linuang Bujung	1.908,88
11	Lisan	17,72
12	Mandul	35.291,76
13	Mandul Lumot	3.397,90

No	Nama Pulau	Luas (Ha)
14	Mangkudulis Besar	26.127,22
15	Mangkudulis Kecil	3.942,14
16	Mengkasak	1.696,90
17	Mensatul	851,9
18	Saka	19,5
19	Sapunti	147,88
20	Sebidai	173,16
21	Sebidai Selatan	46,08
22	Sebidai Utara	18,96
23	Sekabat	51,5
24	Sekapal	84,46
25	Sengato	3.484,85
26	Sengato Tengah	88,47
27	Sepakang	13,61
28	Sesayap	119,83
29	Siambun	74,53
30	Sida	4.598,80
31	Singa	78,19
32	Sumbing	76,83
33	Tembalang	220,58
34	Tembangan	1.150,86
35	Tempudus	48,91
36	Tengku Dacing	1.760,39
37	Tiga	516,86
38	Tiram	29,84
39	Umbus	38,2

Sumber: *RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025*

Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa pulau yang dialiri beberapa sungai besar dan sungai kecil serta topografi memiliki sebagian daratan yang berbukit-bukit. Terdapat 2 buah gunung di Kecamatan Sesayap, yaitu Gunung Rian dan Gunung Aung.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung terutama didominasi oleh Ultisol, Inceptisol, Entisol dan Spodosol. Ultisol adalah tanah yang sudah tua dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah serta memiliki batuan mudah lapuk yang iskin hara. Inceptisol adalah tanah sedang berkembang, biasanya berwarna coklat kemerahan dan relatif agak subur, Entisol adalah tanah yang belum berkembang dan merupakan hasil pengendapan dan doposisi longsoran tanah lainnya. Spodosol adalah tanah yang memiliki horison spodik yang bersifat masam dengan kesuburan tanah yang rendah.

Kondisi geologi di Kabupaten Tana Tidung memperlihatkan satuan batuan yang terdapat dalam beberapa formasi terdiri dari kelompok batuan sedimen, batuan termalihkan dan batuan hasil prodak gunung api ataupun batuan terobosan dari yang berumur tua sampai muda. Struktur geologi yang berkembang di wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah lipatan dan sesar. Struktur lipatan, berupa antiklin dan sinklin, dengan arah utama sumbu lipatan tenggara–barat

laut, serta struktur sesar normal yang dijumpai pada Formasi Sembakung searah dengan sumbu lipatan. Peran struktur geologi sangat signifikan dalam keterdapatan sumber daya mineral. Proses ini dapat terjadi baik dalam keterdapatan logam seperti emas yang akan terangkat melalui celah-celah retakan akibat struktur geologi yang terjadi seperti patahan, kekar dan lipatan. Khusus terhadap akumulasi minyak bumi, peran struktur lipatan dan patahan sangat penting untuk terakumulasinya minyak dan gas bumi. Dengan kondisi tersebut Kabupaten Tana Tidung mempunyai potensi adanya indikasi keterdapatan minyak bumi dengan bentuk struktur bawah permukaan pada lapisan sedimen di cekungan Tarakan/Sub Tidung.

E. Kondisi Klimatologi

Seperti iklim wilayah Indonesia pada umumnya, Kabupaten Tana Tidung beriklim tropik dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan tertentu. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kondisi klimatologi di Kabupaten Tana Tidung tahun 2023 memiliki rata-rata suhu udara adalah 27,7°C dengan rata-rata kelembapan udara sebanyak 84,71 persen, tekanan udara sebesar 1.009,34 mb dengan kecepatan angin 1,5 knot dan penyinaran matahari mencapai 4,8 jam.

Tabel II.6
Keadaan Iklim di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024

No	Bulan	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Jumlah Curah Hujan	Penyinaran Matahari (jam)
1	Januari	27,40	85,00	1,00	1010,90	279,00	50,00
2	Februari	27,70	82,00	2,00	1012,00	162,00	52,00
3	Maret	27,70	84,00	1,00	1011,00	266,00	47,00
4	April	28,30	83,00	2,00	1009,20	212,00	60,00
5	Mei	28,30	85,00	2,00	1008,80	389,00	56,00
6	Juni	27,70	85,00	2,00	1010,00	361,00	50,00
7	Juli	27,70	84,00	2,00	1009,40	383,00	55,00
8	Agustus	27,50	86,00	1,00	1009,80	272,00	44,00
9	September	28,60	78,00	3,00	1008,60	147,00	69,00
10	Oktober	28,30	82,00	2,00	1009,10	184,00	53,00
11	November	27,60	85,00	1,00	1008,60	223,00	53,00
12	Desember	27,50	86,00	1,00	1008,20	294,00	25,00

Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2025*

F. Hidrologi

Berdasarkan kondisi hidrologinya Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 3 daerah aliran sungai utama, yaitu DAS Linuang Kayam, DAS Betayau dan DAS Sesayap dengan panjang sungai yang bervariasi. Sungai terbesar adalah sungai sesayap yang mengalir arah hampir Barat-Timur dengan ukuran lebar antara 5–

500 m. Kabupaten Tana Tidung terdapat 3 buah sungai yaitu Sungai Sesayap dengan panjang 270 km (termasuk yang berada di wilayah Tana Tidung), Sungai Bandan panjang 70 km, dan sungai Betayau.

Tabel II.7
Nama dan Luas DAS di Kabupaten Tana Tidung

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	Kerang - Segendang	86.809,24
2	Sembakung	92.370,33
3	Sesayap	145.510,24

Sumber: *KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung 2025*

G. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan tanah pada hakekatnya adalah gambaran ruang dari hasil jenis usaha dan tingkat teknologi, jumlah manusia dan keadaan fisik daerah, sehingga pola pembangunan tanah di suatu daerah dapat mencerminkan kegiatan manusia yang berada di daerah tersebut. Penggunaan tanah bersifat dinamis, artinya penggunaan tanah dapat berubah tergantung dari dinamika pembangunan yang ada. Alokasi kegiatan terkait penggunaan tanah direncanakan sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah karena pada dasarnya penggunaan tanah ini terkait dengan penguasaan tanahnya. Berdasarkan hal tersebut maka data luas dan letak penggunaan tanah menjadi sangat penting, terutama mengetahui berapa tanah yang masih tersedia untuk suatu kegiatan.

Sumberdaya lahan di Kabupaten Tana Tidung tentang status kawasan hutan, berdasarkan SK. 6631/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 seluas 172.240,92 Ha meliputi hutan produksi terbatas (HPT) seluas 9.090,52 Ha, hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 9.690,13 Ha, hutan produksi tetap seluas 153.460,27 Ha.

Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah hutan, karena itu dari penggunaan lahan di Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh sektor kehutanan. Sekitar 53 persen adalah hutan dan sebagian digunakan untuk pertanian melalui pola pengelolaan konsesi. Disamping peruntukan tersebut, peruntukan lahan digunakan sebagai pemukiman perkotaan dan pedesaan, kawasan konservasi, pusat pemerintahan dan lain-lain. Selain digunakan kawasan pertanian dan perkebunan, lahan di Kabupaten Tana Tidung juga digunakan sebagai pembangunan infrastruktur dan pemukiman warga.

Tabel II.8
Penggunaan Lahan di Kabupaten Tana Tidung Pada Tahun Dasar Perencanaan Tata Ruang Tahun 2019

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Danau/Situ	215,63	0,05
2	Gardu Induk	1,87	0,00
3	Hutan Lahan Kering Primer	5.587,15	1,38
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	82.970,26	20,44
5	Hutan Mangrove Primer	13.461,17	3,32
6	Hutan Mangrove Sekunder	140,48	0,03

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
7	Hutan Rawa Primer	18.962,22	4,67
8	Hutan Rawa Sekunder	58.734,44	14,47
9	Hutan Tanaman	7.111,83	1,75
10	Perkebunan/Kebun	66.875,52	16,48
11	Sawah	153,69	0,04
12	Semak Belukar	20.856,04	5,14
13	Sungai	72.549,04	17,87
14	Taman Hutan Raya	8.834,80	2,18
15	Tambak	42.866,98	10,56
16	Tambang	4.490,85	1,11
17	Tanah Kosong/Gundul	263,89	0,07
18	Tegalan/Ladang	805,04	0,20
19	Permukiman dan Tempat Kegiatan	989,49	0,24

Sumber: *RTRW Kab. Tana Tidung 2023-2043*

Kondisi permukiman di Kabupaten Tana Tidung yang tersebar di Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kecamatan Tana Lia, Kecamatan Muruk Rian, Kecamatan Betayau baik yang dikategorikan sebagai kawasan permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan.

Perkembangan permukiman di Kabupaten Tana Tidung terlihat padat pada ibukota kecamatan dan desa sekitarnya, kanan kiri ruas jalan dan di pinggir sungai. Ke depan, harus ada penataan dan pembatasan pemukiman pada kawasan pinggir sungai. Adapun jenis pemukiman di Kabupaten Tana Tidung meliputi pemukiman umum, pemukiman nelayan, pemukiman transmigrasi, dan pemukiman pengembang yang terdapat di permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan.

Pengembangan permukiman perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dapat mendorong terjadinya keseimbangan perkembangan wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan secara lebih merata. Kawasan permukiman dikembangkan sesuai potensi masing-masing akan dapat mempercepat pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta wilayah sekitarnya.

Dari sisi lahan pertanian yang merupakan sektor ekonomi dominan di Tana Tidung, maka terlihat bahwa dominasi lahan adalah lahan pertanian perkebunan. Sebagai daerah pemekaran, kondisi awal Kabupaten Tana Tidung masih sangat terbatas terutama dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana yang mendukung pada pelayanan masyarakat, antara lain belumnya terbangun kantor pemerintahan yang representatif, sarana dan prasarana transportasi darat dengan status lahan masih pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sulitnya mendapatkan lahan produktif untuk aktivitas pertanian masyarakat, serta status kepemilikan lahan yang secara riil dimiliki masyarakat belum mempunyai aspek legalitas.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah didukung dari berbagai kegiatan ekonomi dari beberapa sektor. Kegiatan ekonomi yang bervariasi baik yang menghasilkan barang atau jasa, mendorong setiap daerah Kabupaten atau Kota untuk mengembangkan potensi ekonominya. Oleh karena itu pembangunan daerah perlu diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga internasional GIZ mengungkapkan bahwa luas mangrove yang berpotensi dimanfaatkan untuk perdagangan karbon di Kabupaten Tana Tidung mencapai lebih dari 54.000 hektare. Ini merupakan angka yang sangat signifikan, mengingat nilai ekonomi karbon dari hutan mangrove jauh lebih tinggi dibandingkan hutan tropis daratan karena kemampuannya menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar, baik di biomassa tanaman maupun di tanahnya.

Ekosistem mangrove juga mendukung sektor ekonomi lainnya, seperti perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata berbasis alam, serta perlindungan kawasan pesisir dari abrasi dan bencana alam. Sinergi antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi landasan penting bagi pengembangan ekonomi daerah ke depan.

A. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Tana Tidung, didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023-2043, agar terjadi sinkronisasi tata ruang dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Adapun potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut:

1. Sistem Pusat Pelayanan: potensi pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Tana Tidung bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dengan adanya ketersediaan fasilitas. Pusat pelayanan tersebut yang akan menentukan hirarki pusat pelayanan sesuai dengan konsepsi perwilayahan dan visi pembangunan kabupaten. Orientasi pusat pelayanan permukiman adalah ke wilayah Tideng Pale, Sedulun dan Tideng Pale Timur. Pemekaran Kabupaten Tana Tidung secara langsung diikuti pembangunan sarana prasarana pendukung dan akan menarik pertumbuhan permukiman baru
2. Sistem Perwilayahan Pembangunan: potensi Penentuan sistem perwilayahan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi yang besar untuk mencapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Dengan adanya pembagian Wilayah Pengembangan (WP) yang tersebar merata mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung, maka distribusi fasilitas pelayanan umum tidak hanya akan terpusat di salah satu wilayah saja, namun dapat merata ke semua Wilayah Pengembangan (WP) yang melingkupi beberapa kecamatan di dalamnya. Kelengkapan fasilitas sosial ekonomi di tiap sub satuan wilayah pengembangan berpotensi meningkatkan aktivitas masyarakat di dalam wilayah tersebut. Pembentukan wilayah

pengembangan (WP) barat mutlak dilakukan mengingat wilayah ini merupakan jantung Kabupaten Tana Tidung dengan fungsi utamanya sebagai pusat pemerintahan serta pusat perekonomian (jasa dan perdagangan).

3. Secara hirarki WP ini terdiri dari kota-kota hirarki I dan hirarki II, yang diharapkan dapat menjadi pemicu terhadap perkembangan WP lainya, karena memiliki dukungan infrastruktur yang memadai. Orientasi kegiatan lainya pada wilayah pengembangan ini adalah pertanian, pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata. Untuk Tengah dan Timur disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang berorientasi pada kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata. Penetapan pusat pertumbuhan utama tersebut diharapkan dapat menciptakan pemerataan perkembangan menuju setiap bagian wilayah.
4. Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan: potensi Kawasan Ibu kota Kabupaten Tana Tidung merupakan permukiman dengan segala aktivitasnya. Pusat-pusat permukiman akan membentuk desa simpul wilayah yang akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan pelayanan sosial ekonomi. Pusat permukiman di Kabupaten Tana Tidung baik permukiman perdesaan maupun permukiman perkotaan memiliki potensi sebagai kawasan permukiman yang berkembang memiliki skala pelayanan dan hirarki tertentu. Permukiman perdesaan memiliki pusat pelayanan mulai dari Pusat Desa, Desa Pusat pertumbuhan, dan perkotaan terdapat perkotaan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL).
5. Pengembangan prasarana wilayah yang dilihat dari aspek transportasi darat, sungai/laut, telekomunikasi, prasarana lingkungan, air bersih dan prasarana irigasi. Adapun potensi tersebut yaitu : Prasarana transportasi untuk akses masuk kedalam dan ke luar Kabupaten Tana Tidung dapat dilakukan dengan dua alternatif, yaitu
    a. Jalur darat (jalan raya). Transportasi darat dengan potensi : adanya jaringan jalan arteri primer sebagai Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan beberapa daerah, yang terbentang dari perbatasan Kecamatan Sesayap dan Sesayap Hilir, ke arah barat menuju Kabupaten Malinau-Simanggaris dan ke arah selatan menuju Tanjung Selor-Samarinda. Adanya jaringan jalan tersebut menjadi penghubung antar wilayah sebagai transformasi aliran barang dan penumpang yang mempunyai komposisi sebagai pembuka keterhubungan antar kawasan.
    b. Jalur perairan (sungai). Transportasi Laut/ Perairan dengan potensi : Angkutan laut dan sungai mempunyai peranan penting dalam hal transportasi di Kabupaten Tana Tidung. Hal tersebut dikarenakan akses angkutan laut dan sungai lebih mudah dari pada melalui darat. Adanya Pelabuhan Tideng Pale memudahkan penduduk untuk mengakses daerah lain.Adanya pelabuhan tersebut didukung pula oleh aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Tideng Pale cukup

tinggi. Adanya potensi tersebut, maka perlu pengembangan agar akses ke suatu wilayah dengan transportasi sungai /laut ditingkatkan.

6. Prasarana Energi/Listrik: potensi wilayah Kabupaten Tana Tidung telah terlayani oleh jaringan listrik, terutama pada kawasan permukiman dan sarana umum. Prasarana kelistrikan dibutuhkan untuk menunjang berbagai aktivitas dan kegiatan, seperti penerangan, kegiatan industri, dan lain sebagainya. Sambungan listrik di Kabupaten Tana Tidung menggunakan listrik PLN dan non-PLN. Selain itu, adanya PLTD akan membantu dalam pemenuhan kebutuhan listrik Kabupaten Tana Tidung.
7. Prasarana Air Bersih: potensi pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Tana Tidung dengan memanfaatkan air permukaan (sungai) sebagai sumber air baku yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Tana Tidung. Potensi sumber daya air di Kabupaten Tana Tidung terutama sungai relatif berlimpah. Hal tersebut memberikan alternatif pemanfaatan sumber daya air yang relatif murah. Sistem perpipaan yang telah ada membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya sehingga kuantitas air bersih telah tercukupi. Selain itu, masyarakat juga menampung air di tandon-tandon untuk mengantisipasi kekurangan air.
8. Prasarana Irigasi: potensi luas tanah sawah di Kabupaten Tana Tidung relatif kecil yaitu sebesar 335 hektar, dari luas lahan tersebut sebesar 55 hektar beririgasi setengah teknis. Jenis pengairan yang masih mendominasi adalah sawah pasang surut. Walaupun jumlah sawahnya yang relatif kecil, prasarana irigasi tersebut memiliki potensi bagi produksi pertanian sebagai pendukung sektor pertanian di Kabupaten Tana Tidung. Selain itu, adanya sungai di Kabupaten Tana Tidung membantu untuk mengairi tanah pertanian sawah.
9. Prasarana Telekomunikasi: potensi sarana komunikasi yang tersedia di Kabupaten Tana Tidung yaitu kantor pos dan giro. Selain itu, adanya sambungan telepon kabel, telepon seluler memudahkan masyarakat untuk melakukan komunikasi ke daerah lain. Mengingat, kegiatan masyarakat dalam hal bisnis dan orientasi kegiatan masyarakat pada sektor-sektor tertentu juga tinggi. Ketersediaan jaringan telekomunikasi tersebut akan berdampak pada aktivitas masyarakat.
10. Prasarana Lingkungan: potensi pengembangan prasarana lingkungan yaitu dengan peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, limbah padat berupa persampahan harus ditanggulangi, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat. Seluruh produksi sampahnya harus dikelola secara terpadu, yaitu melalui mekanisme pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan peran serta masyarakat. Selain itu prinsip 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) harus disosialisasikan ke masyarakat yaitu menggunakan kembali bahan-bahan sisa yang dapat dimanfaatkan kembali (seperti plastik pembungkus, kertas – kertas untuk pembungkus), mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa menimbulkan sampah serta mendaur ulang sampah (pengolahan sampah organik untuk kompos).

11. Pola ruang Kawasan Lindung: memiliki potensi untuk perlindungan, pengawetan, konservasi dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan.
12. Kawasan Perlindungan Bawahannya: Kawasan perlindungan bawahan di Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi untuk melindungi atau memperkecil bahaya tanah longsor atau banjir menuju kawasan bawahannya, melalui peresapan air ke dalam tanah dapat meningkatkan volume air tanah, dan melindungi flora dan fauna yang masih berkembang untuk menghindari kepunahan. Adanya kawasan hutan lindung di Kabupaten Tana Tidung akan memberi perlindungan pada kawasan bawahannya.
13. Kawasan Perlindungan Setempat: Potensi Kawasan perlindungan setempat terdiri dari perlindungan kawasan-kawasan sekitar sempadan sungai, dan sempadan pantai. Pengamanan sekitar sempadan sungai dan pantai akan mengurangi erosi dan abrasi yang apabila didiamkan akan menimbulkan bencana bagi wilayah tersebut.
14. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya: Potensi Kawasan suaka alam dan cagar budaya di Kabupaten Tana Tidung meliputi kawasan pantai berhutan bakau (mangrove). Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada peri kehidupan pantai dan lautan. Ekosistem mangrove mempunyai makna dan peranan dalam perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan garis pantai, dan sumber daya pantai yang terkait termasuk perikanan, dan melalui produk yang dihasilkan dari ekosistem tersebut sebagai suatu sumber pendapatan bagi negara dan masyarakat setempat yang tinggal di dalam dan di sekitar Kawasan Rawan Bencana Potensi : Bencana alam di daerah rawan sering terjadi akibat kurang memperhatikan wawasan lingkungan, potensi bencana di area kawasan lindung seperti terjadinya banjir atau longsor. Potensi rawan banjir terjadi pada daerah-daerah yang memiliki ketinggian lebih rendah dari permukaan sungai jika terjadi luapan sungai yang besar pada musim hujan. Kawasan ini dijumpai pada kawasan hutan rawa gambut sekitar Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap dan daerah bantaran Sungai Sesayap. Kawasan longsor rawan terjadi pada daerah-daerah yang memiliki kemiringan lahan 40% yang seharusnya merupakan kawasan non budidaya, seperti pada kawasan perbukitan di Tidung Pale. Apabila terjadi penebangan hutan akan membawa akibat terhadap lingkungan yang lebih luas.
15. Kawasan Budidaya Hutan Produksi: Potensi kehutanan merupakan potensi yang amat menonjol di Kabupaten Tana Tidung, disamping potensi pertambangan. Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi kehutanan yang cukup besar dan memiliki areal yang sangat potensial, baik ditinjau dari segi luas maupun dari segi kualitas hasil hutan.

16. Pertanian: Potensi Pengembangan lahan pertanian tanaman dikembangkan sesuai dengan kondisi jaringan irigasi. Walau, luas lahan pertanian relatif kecil, Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi pertanian untuk pengembangan sektor pertanian, sehingga memiliki produksi pertanian yang mendukung sektor pertanian Kabupaten Tana Tidung.
17. Perkebunan: Potensi Kondisi fisik di Kabupaten Tana Tidung yang terdiri atas dataran tinggi dan dataran rendah menjadikan Tana Tidung secara alamiah memiliki potensi besar untuk pengembangan perkebunan, seperti kelapa, kopi, kakao, dan lada.
18. Peternakan: Potensi Potensi ternak besar, kecil maupun unggas juga ada di Kabupaten Tana Tidung. Peternakan ini memiliki potensi untuk diolah menjadi komoditas yang bernilai ekonomis tinggi.Peran serta masyarakat dan pelaku ekonomi bidang ternak menjadikan ternak memiliki potensi untuk berkembang di Tana Tidung.
19. Perikanan: Potensi Perikanan di Kabupaten Tana Tidung mencakup potensi budidaya air tawar, air payau, budidaya laut, dan perikanan tangkap. Potensi tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Kabupaten Tana Tidung yang dilalui sungai yang memiliki lebar permukaan terpanjang di Kalimantan mencapai 2,5 km. Komoditas perikanan yaitu udang windu, ikan bandeng, dan kepiting bakau.Dari Segi kontribusi produksi perikanan budidaya Kab. Tana Tidung menduduki peringkat ketiga (1,73%), namun untuk nilai produksi menduduki peringkat pertama dengan persentase kontribusi 34,42. Artinya kegiatan budidaya tambak di Tana Tidung menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sub lapangan usaha perikanan di Provinsi Kaltara yang perlu mendapat perhatian.
20. Pertambangan: Potensi Sektor pertambangan merupakan sektor yang berperan cukup besar sebagai sumber penerimaan devisa terutama yang datang dari pendapatan ekspor minyak dan gas,batu bara, serta methanol.Kawasan pertambangan yang terbesar yaitu tambang batu bara yang tersebar.
21. Permukiman: Potensi Pengmbangan permukiman perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dapat mendorong terjadinya keseimbangan perkembangan wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan secara lebih merata. Kawasan permukiman dikembangkan sesuai potensi masing-masing akan dapat mempercepat pengembangan Kawasan perkotaan dan pedesaan serta wilayah sekitarnya.
22. Industri: Potensi Adanya industri pemotongan kayu juga menyumbang kontribusi bagi PDRB Kabupaten Tana Tidung. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Tana Tidung, maka pada dasarnya setiap wilayah akan dikembangkan kawasan industri sesuai dengan potensi setiap kawasan. Sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan adalah industri pertanian, industri perikanan, dan industri pertambangan.
23. Potensi kawasan pariwisata di Kabupaten Tana Tidung dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu wisata pantai, wisata alam, dan wisata budaya. Wisata pantai terdapat di Kecamatan Tana Lia, wisata alam berada di

kawasan Gunung Rian, sedangkan wisata budaya tersebar di seluruh kecamatan dengan kekayaan tradisi, kearifan lokal, dan seni budaya masyarakat. Keberadaan sektor pariwisata tersebut memiliki peluang besar untuk dikembangkan guna memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Namun demikian, pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Tana Tidung masih menghadapi sejumlah permasalahan, salah satunya adalah keterbatasan tenaga kerja di bidang kepariwisataan yang memiliki kompetensi dan keahlian profesional. Minimnya sumber daya manusia yang terlatih, baik dalam aspek pelayanan, pemanduan wisata, manajemen destinasi, maupun pemasaran digital, menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas layanan pariwisata. Hal ini berdampak pada belum optimalnya daya tarik dan daya saing destinasi wisata daerah, sehingga belum mampu menarik kunjungan wisatawan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM pariwisata secara berkelanjutan melalui pelatihan, sertifikasi, dan kerja sama lintas sektor guna mendukung pengembangan pariwisata yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung.

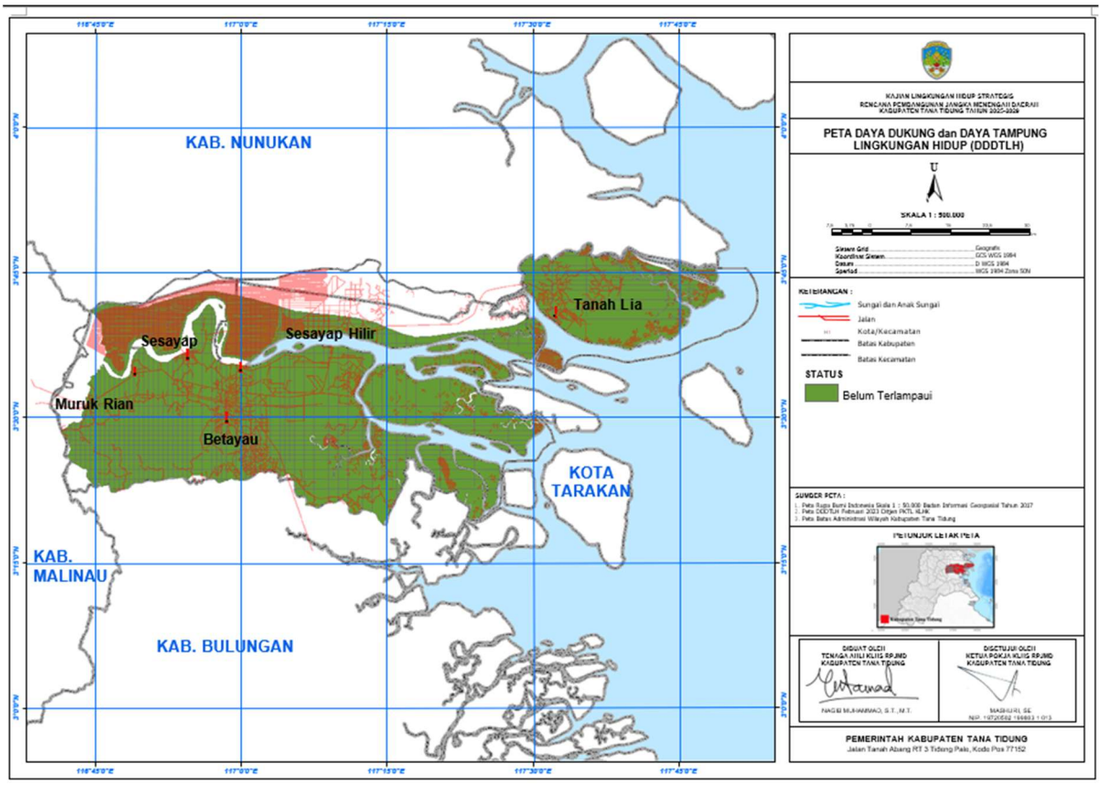
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimandatkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang ditetapkan melalui Pemerintah Daerah, yang salah satu muatannya adalah Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Wilayah fungsional terdiri dari ekoregion Kompleks Pegunungan Denudasional Vulkanik Bukit Jumak dengan luas bentang 914.150,73 Ha, ekoregion Kompleks Dataran Pantai Tanjung Selor hingga Tarakan dengan luas bentang 361.654,86 Ha, ekoregion kompleks dataran gambut S. Sembakung dengan luas bentang 389.499,66 Ha, dan ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Meratus dengan luas bentang 1.217.040,24 Ha.

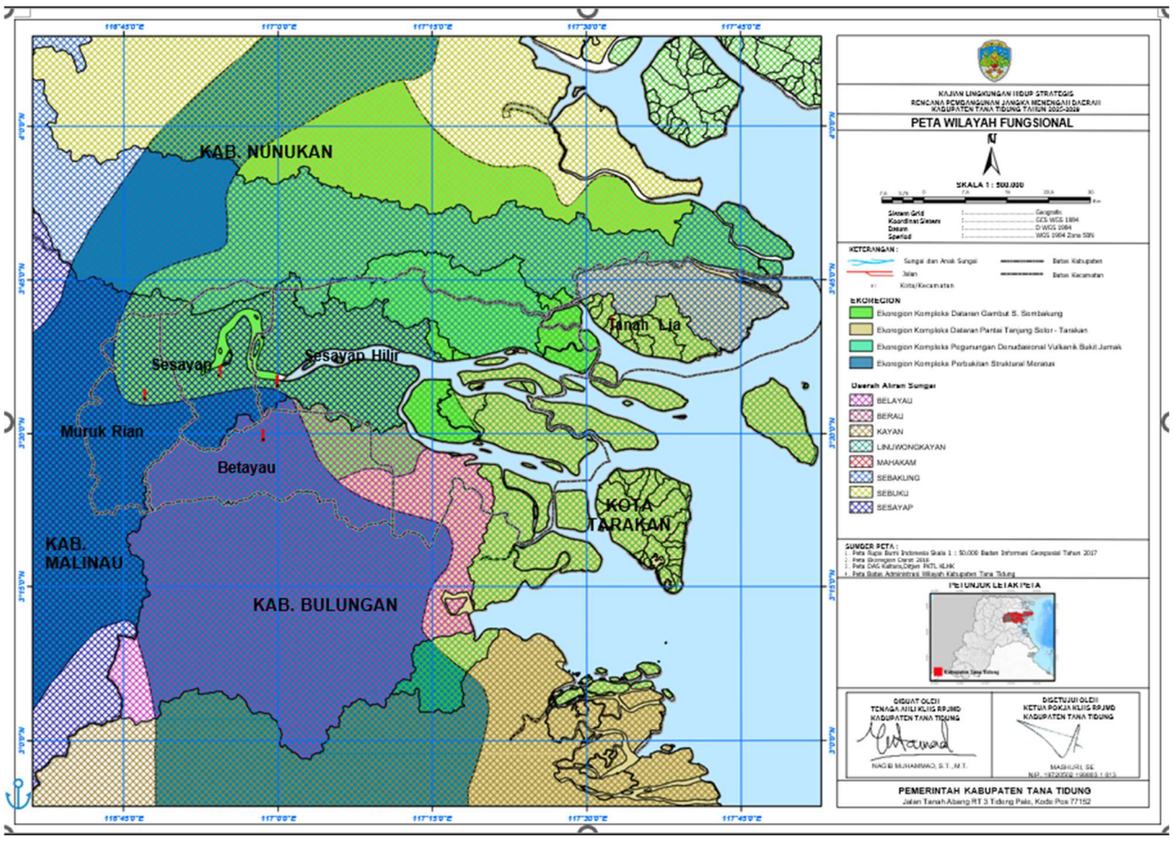
Sedangkan untuk luas daerah aliran sungai pada wilayah fungsional terdiri atas DAS Sesayap 1.600.798,46 Ha, DAS Sebuku dengan luas 468.380,49 Ha, DAS Kayan dengan luas 3.300.876,31 Ha, DAS Linuwongkayan dengan luas 44.793,9 Ha, DAS Sebakung dengan luas 539.933,84 Ha, DAS Mahakam dengan luas 7.816.327,35 Ha, DAS Belayau dengan luas 296.748,46 Ha, DAS Berau dengan luas 1.690.443,07 Ha.

Gambar II.2 .
Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)



Sumber: *KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung 2025*

Gambar II.3 .
Peta Wilayah Fungsional



Sumber: *KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung 2025*

Karakteristik wilayah berdasarkan muatan wajib KLHS salahsatunya adalah Jasa Ekosistem yang termasuk didalamnya adalah wilayah Ekoregio, Karakteristik Bentang Alam, dan Karakteristik Vegetasi Alami.

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki karakteristik ekologi tertentu, termasuk jenis tumbuhan dan hewan yang khas, serta faktor-faktor lingkungan lainnya. Wilayah ini dibatasi oleh fitur geografis seperti pegunungan, sungai dan iklim yang mempengaruhi pola distribusi organisme hidup di dalamnya. Ekoregion dibentuk oleh Karakteristik Bentang Alam (KBA) dan Karakteristik Vegetasi Alami (KVA).

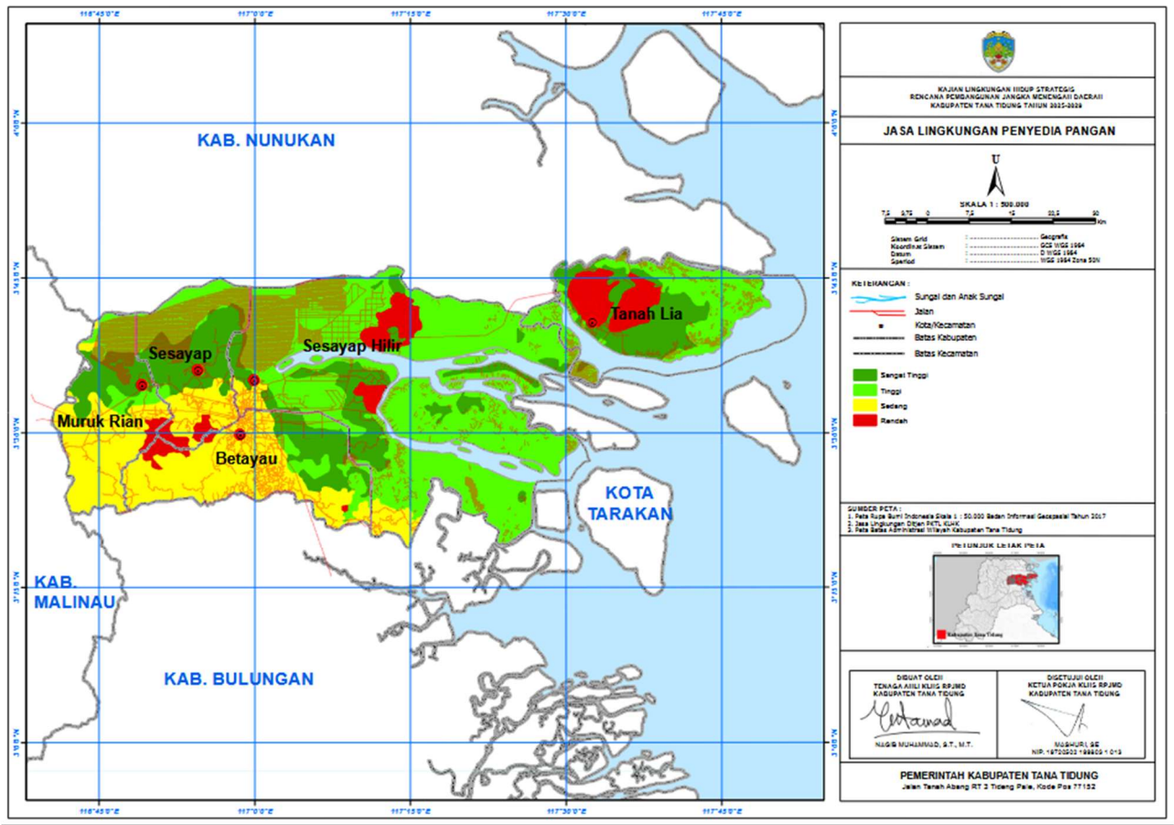
Kabupaten Tana Tidung dapat dibagi menjadi beberapa ekoregion sesuai dengan ciri-ciri dan kenampakan alamiah lahannya. Masing-masing ekoregion memiliki ciri khas yang berbeda termasuk dalam penyediaan pangan bagi manusia. Secara umum di Kabupaten Tana Tidung yang mampu menyediakan bahan pangan dibagi menjadi lahan berpotensi tinggi, sedang dan rendah. Lahan yang berpotensi tinggi menyediakan bahan pangan memiliki luas 153.457,88 hektar atau sekitar 66,54 persen dari keseluruhan lahan yang ada di Kabupaten Tana Tidung. Lahan yang berpotensi sedang dalam penyediaan bahan pangan memiliki luas 69.650,5 hektar atau 30,20 persen dan yang memiliki potensi rendah dalam penyediaan bahan pangan seluas 7.512,86 hektar atau sekitar 3,26 persen dari seluruh luas Kabupaten Tana Tidung.

Tabel II.9
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Menurut Ekoregion

Ekoregion	Sangat Rendah-Rendah		Sedang		Tinggi-Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Fluvial Kalimantan	0	0,00	61.904,5	48,85	64.827,16	51,15
Dataran Pantai Kalimantan	116,35	0,20	0	0	58.295,6	99,80
Pegunungan Struktural Kompleks Meratus	2.422,51	38,48	3.873,01	61,52	0	0
Perbukitan Struktural Kompleks Meratus	2.422,51	38,48	3.873,01	61,52	0	0
Dataran Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam	2.551,49	7,76	0	0	30.335,12	92,24
Total	**7.512,86**	**3,26**	**69.650,5**	**30,20**	**153.457,88**	**66,54**

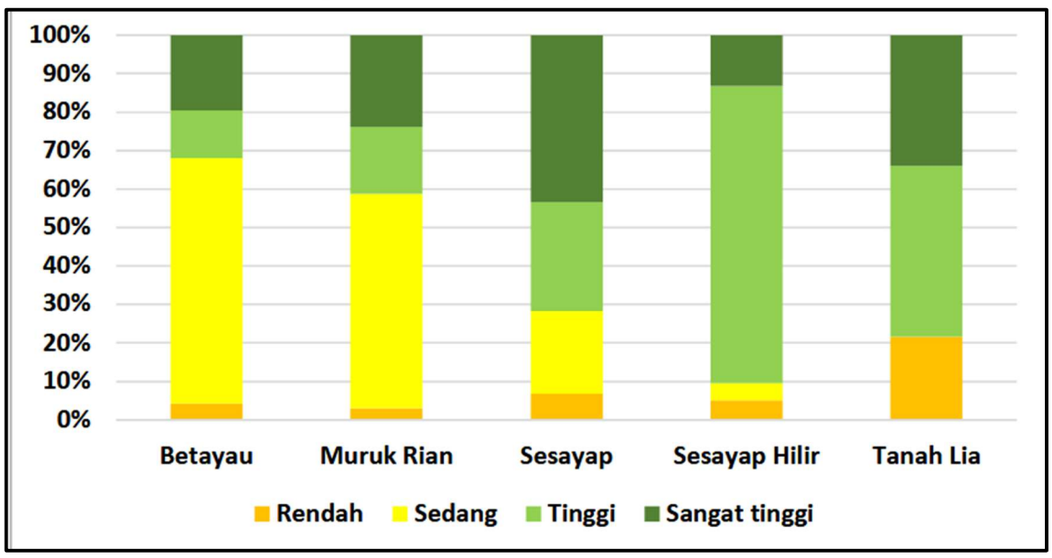
Sumber: *KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung 2025*

Gambar II.4
Jasa Lingkungan Penyedia Pangan



Sumber: *KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung 2025*

Gambar II.5
Proporsi Jasling Penyedia Pangan



Sumber: *KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung 2025*

Tabel II.10
Luas Potensi Jasling Penyediaan Pangan Tiap Kecamatan

Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi
Betayau	2,453.91	36,946.28	7,153.34	11,266.78
Muruk Rian	1,318.70	24,138.97	7,465.58	10,345.89
Sesayap	2,650.71	8,476.74	11,045.21	17,038.44
Sesayap Hilir	8,116.04	6,941.64	122,330.52	20,980
Tanah Lia	11,562.16		23,840.51	18,255.80
Jumlah	**26,101.52**	**76,503.62**	**171,835.15**	**77,886.91**

Sumber: *KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung 2025*

Berdasarkan data KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2025, luas potensi jasa lingkungan (jasling) penyediaan pangan di setiap kecamatan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kecamatan Tanah Lia mendominasi pada kategori rendah dengan luas 11.562,16 hektar, sementara Kecamatan Sesayap Hilir menempati porsi terbesar pada kategori tinggi dengan luas mencapai 122.330,52 hektar. Pada kategori sedang, Kecamatan Betayau memiliki luasan terbesar yaitu 36.946,28 hektar, sedangkan pada kategori sangat tinggi, Kecamatan Sesayap mendominasi dengan 17.038,44 hektar. Secara total, potensi jasling penyediaan pangan di Kabupaten Tana Tidung tercatat seluas 26.101,52 hektar untuk kategori rendah, 76.503,62 hektar kategori sedang, 171.835,15 hektar kategori tinggi, dan 77.886,91 hektar kategori sangat tinggi. Data ini menggambarkan bahwa ketersediaan jasa lingkungan untuk penyediaan pangan di Kabupaten Tana Tidung relatif besar, dengan konsentrasi tertinggi pada kategori tinggi.

Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan utama selain bahan pangan. Ekosistem dapat memberikan manfaat dalam penyediaan air bersih. Secara alami air bersih dapat berasal dari air permukaan seperti sungai, danau dan air tanah. Semua ekoregion di Kabupaten Tana Tidung dapat menyediakan air bersih. Secara umum di Kabupaten Tana Tidung lahan yang mampu menyediakan air bersih dapat dikelompokan dalam lahan berpotensi tinggi, sedang dan rendah. Lahan yang berpotensi tinggi dalam penyediaan air bersih memiliki luasan 145.718,44 hektar atau sekitar 44,21 % dari total luas Kabupaten Tana Tidung. Lahan yang berpotensi sedang dan rendah seluas 115.175,51 hektar (36,52%) dan 54.475,43 hektar (17,27%) dari total luas Kabupaten Tana Tidung.

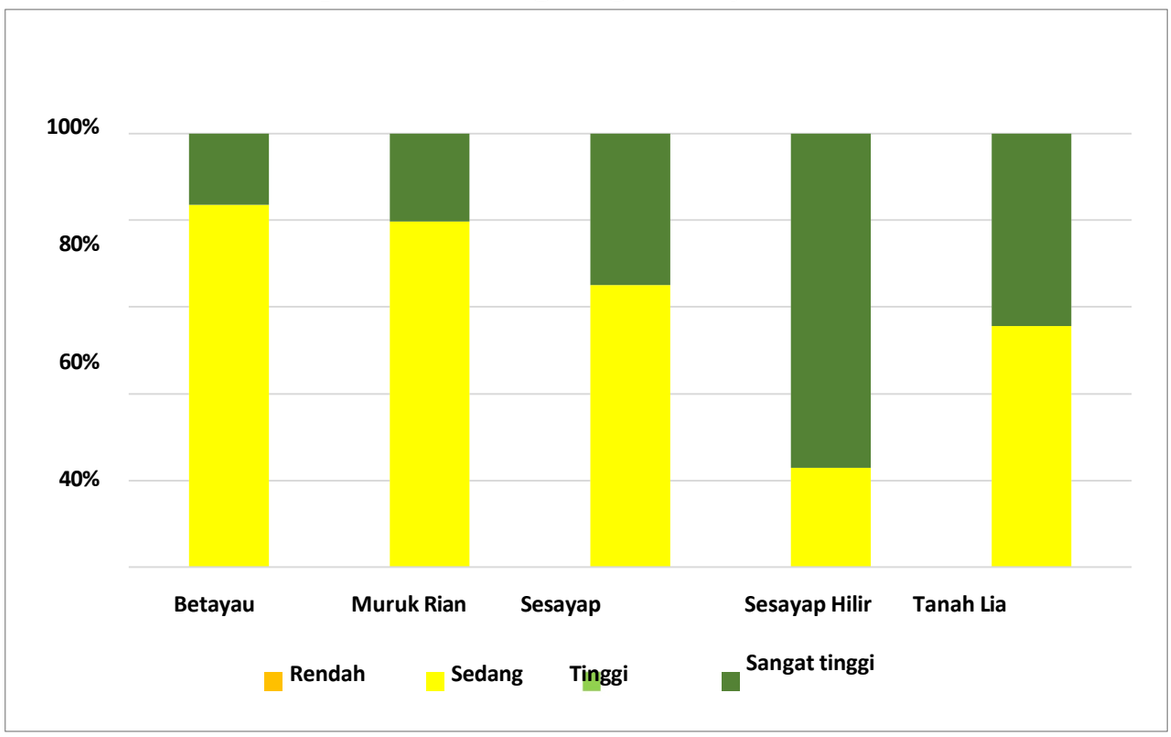
Tabel II.11
Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Menurut Ekoregion

Ekoregion	Sangat Rendah-Rendah		Sedang		Tinggi-Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Fluvial Kalimantan	35.732,30	30,01	84.922,4	73,73	18.492,1	15,53
Dataran Pantai Kalimantan	1.423,54	2,17	0	0	64.188,8	97,83
Pegunungan Struktural Kompleks Meratus	0	0	0	0	6.295,52	100
Perbukitan Struktural	17.319,59	24,25	27.059,6	23,49	27.048,96	37,87

Ekoregion	Sangat Rendah-Rendah		Sedang		Tinggi-Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Kompleks Meratus						
Dataran Gambut Kompleks Kahayan- Kapuas-Mahakam	0	0	3.193,45	2,78	29.693,16	90,29
Total	**54.475,43**	**17,27**	**115.175,51**	**36,52**	**145.718,44**	**46,21**

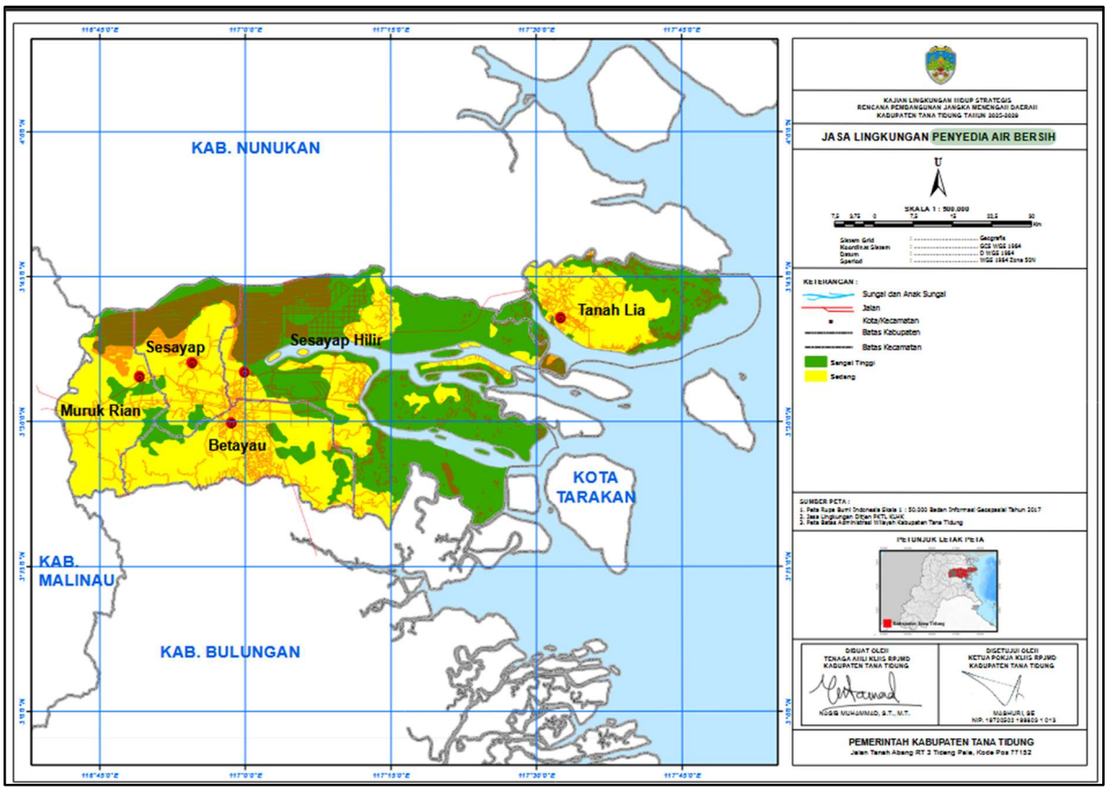
Sumber: *KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung 2025*

Gambar II.6
Grafik Proporsi Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih



Sumber: *KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung 2025*

Gambar II.7
Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih



Sumber: *KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung 2025*

Tabel II.12
Luas Potensi Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih Tiap Kecamatan

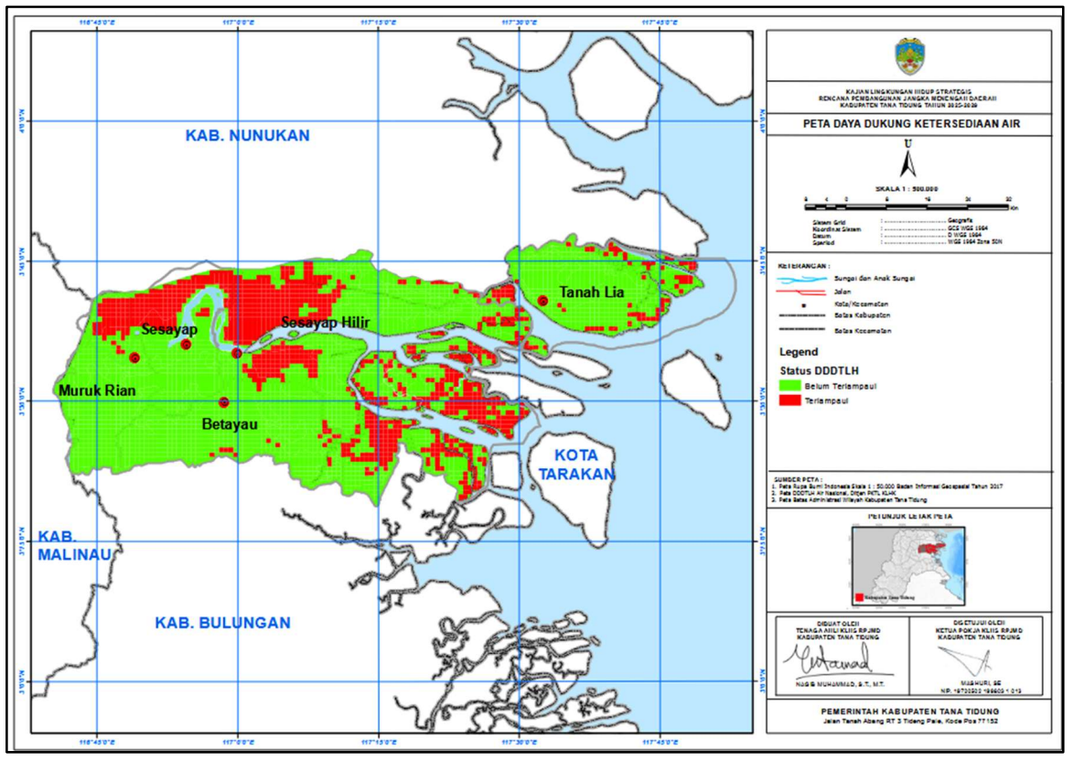
Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi
Betayau	0	48.346,00	0	9.474,31
Muruk Rian	0	34.484,86	0	8.784,28
Sesayap	0	25.515,17	0	13.695,91
Sesayap Hilir	0	36.266,33	0	122.101,87
Tanah Lia	0	29.817,97	0	23.840,51
Jumlah	**0**	**174.430,32**	**0**	**177.896,89**

Sumber : KLHK

Wilayah yang terindikasi jasa lingkungan penyedia air bersihnya tinggi menunjukkan kondisi tutupan lahan yang baik dalam meresapkan air hujan (> 80 persen dari hujan yang turun), sehingga mengisi rongga-rongga tanah yang dapat mensuplai mata air atau danau (*water storage*).

Kabupaten Tana Tidung dengan wilayah yang didominasi oleh tutupan hutan yang menyimpan banyak cadangan karbon di permukaan cukup tinggi, juga sebagian merupakan hutan rawa gambut sekitar 30% yang menyimpan cadangan karbon di bawah permukaan dalam jumlah besar juga berpotensi menyimpan cadangan air dalam jumlah besar.

Gambar II.8.
Peta Daya Dukung Persebaran Air



Sumber: *KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung 2025*

Dengan melihat potensi tersebut, Kabupaten Tana Tidung dapat memanfaatkan sumber daya air bersih yang dimiliki dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan suplai air bersih. Air bersih merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan dalam menjamin keberlangsungan dan kualitas hidup.

Berdasarkan hasil pemetaan daya dukung ketersediaan air yang dilakukan oleh Kementerian LHK tahun 2019, sebagian besar daya dukungnya belum terlampaui. Beberapa wilayah saja yang terindikasi daya dukungnya sudah terlampaui. Wilayah yang terindikasi terlampaui daya dukung ketersediaan airnya paling luas adalah Kecamatan Sesayap Hilir yaitu 14% dari luas kabupaten Tana Tidung.

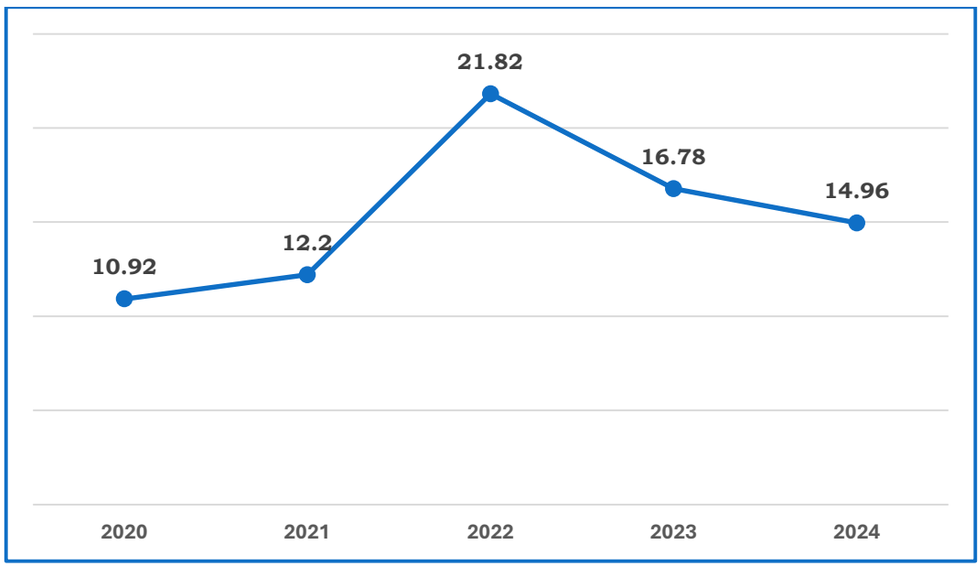
2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan merupakan tiga pilar strategis yang saling berkaitan dan sangat menentukan stabilitas serta keberlanjutan pembangunan suatu daerah. Kemandirian pangan mengacu pada kemampuan daerah dalam mencukupi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat melalui produksi lokal secara berkelanjutan. Pencapaian ini tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas produksi, tetapi juga dari sisi akses, distribusi, nilai gizi, dan stabilitas harga.

Salah satu indikator yang memperlihatkan kondisi ketahanan pangan suatu daerah adalah Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*). Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan

produktif. Secara umum, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Tana Tidung mengalami penurunan dimana pada tahun 2022 sempat mencapai 21,82 persen dan menurun di tahun 2023 dan 2024 hingga mencapai 16,78 persen dan 14,96 persen. Meskipun menurun, namun kondisi ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk mampu menyediakan dan memastikan masyarakat Tana Tidung dapat mengakses makanan yang sehat dan bergizi untuk meningkatkan aktivitas pembangunan daerah.

Gambar II.9 .
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024



Sumber: *Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, 2025*

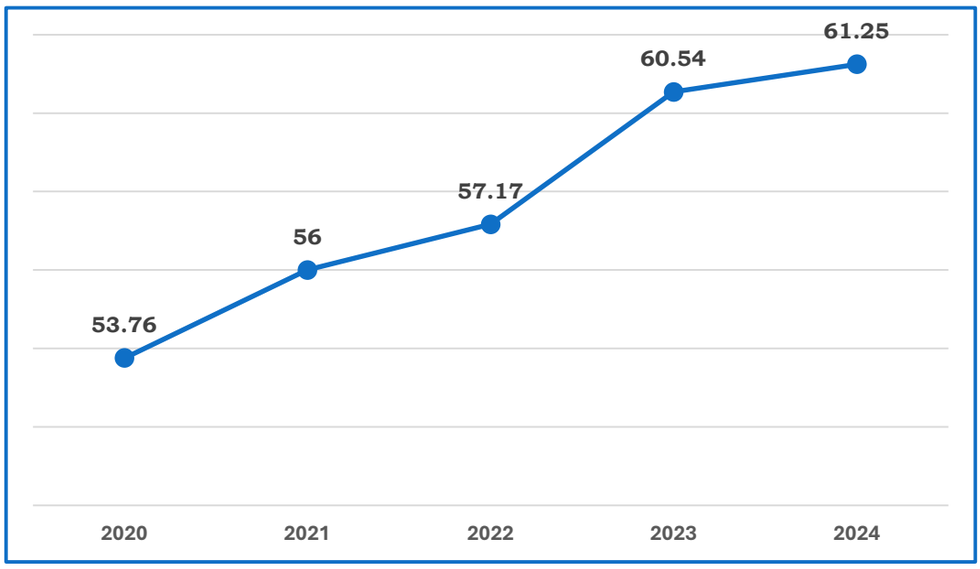
Selain prevalensi ketidakcukupan pangan, terdapat pula Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Tana Tidung yang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, IKP tercatat sebesar 53,76 dan terus mengalami perbaikan hingga mencapai 61,25 pada tahun 2024.

Peningkatan IKP ini mencerminkan semakin membaiknya kondisi ketahanan pangan daerah, baik dari aspek ketersediaan, keterjangkauan, maupun pemanfaatan pangan. Capaian IKP sebesar 60,54 pada tahun 2023 menandai tonggak penting karena telah melampaui ambang batas indeks kategori "tahan pangan" menurut kriteria nasional. Selanjutnya, pada tahun 2024, indeks kembali meningkat menjadi 61,25, yang mengindikasikan penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Perbaikan IKP ini tidak lepas dari berbagai program strategis pemerintah daerah dalam mendukung produksi pangan lokal, memperluas akses distribusi pangan, serta meningkatkan kualitas gizi dan pola konsumsi masyarakat. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan yang kokoh di Kabupaten Tana Tidung.

Gambar II.10
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024



Sumber: *Badan Pangan, 2025*

Ketahanan air menjadi aspek fundamental yang menopang kehidupan, pertanian, dan aktivitas ekonomi lainnya. Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga sangat penting dalam menjaga produktivitas sektor pertanian dan industri. Oleh karena itu, perlindungan terhadap daerah tangkapan air, pengelolaan sumber daya air terpadu, serta investasi pada sistem irigasi dan penyediaan air minum menjadi prioritas utama dalam memastikan keberlanjutan sumber daya air di tengah ancaman degradasi lingkungan dan perubahan iklim.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, upaya peningkatan ketahanan air di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan tren yang positif. Jumlah pelanggan layanan air mengalami peningkatan yang signifikan, dari 1.093 pelanggan pada tahun 2020 menjadi 2.776 pelanggan pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perluasan jangkauan layanan air bersih kepada masyarakat.

Volume air yang disalurkan juga menunjukkan lonjakan tajam, dari 126.329 meter kubik pada tahun 2020 menjadi 542.163 meter kubik pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya peningkatan kapasitas distribusi air yang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dan jumlah pelanggan.

Tabel II.13

Uraian Ketahanan Air Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Pelanggan	Air disalurkan	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (Persen)
2020	1.093	126.329	81,23
2021	1.161	310.162	85,88
2022	2.175	406.579	93,15
2023	2.161	484.097	95,61
2024	2.776	542.163	N/A

Sumber: *BPS Kaltara, 2020-2025, (diolah)*

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum

layak turut mengalami peningkatan signifikan, dari 81,23 persen pada tahun 2020 menjadi 95,61 persen pada tahun 2023. Data untuk tahun 2024 belum tersedia, namun tren sebelumnya menunjukkan bahwa capaian tersebut kemungkinan terus meningkat.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah melakukan langkah-langkah strategis dan efektif dalam memperluas akses air minum layak bagi masyarakat, yang merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan di sektor infrastruktur dasar.

Ketahanan energi mencerminkan kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan dan aksesibilitas sumber energi secara berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat dan sektor ekonomi. Selama periode tahun 2022 hingga 2024, distribusi listrik oleh PT. PLN (Persero) di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan peningkatan yang konsisten, baik dari sisi kapasitas daya, volume produksi, maupun jumlah pelanggan. Daya terpasang mengalami pertumbuhan dari 146.114.050 VA pada tahun 2022 menjadi 183.873.250 VA pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perluasan kapasitas kelistrikan untuk mendukung pertumbuhan kebutuhan energi listrik di wilayah tersebut.

Produksi listrik juga mengalami peningkatan signifikan, dari 15.175.918 KWh pada tahun 2022 menjadi 18.934.951.758 KWh pada tahun 2024. Sejalan dengan itu, volume listrik yang terjual kepada pelanggan meningkat dari 19.732.386.000 KWh menjadi 24.966.727.767 KWh dalam kurun waktu yang sama. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan konsumsi listrik masyarakat dan sektor ekonomi di daerah. Jumlah pelanggan listrik juga terus bertambah, dari 6.784 pelanggan pada tahun 2022 menjadi 7.635 pelanggan pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa jangkauan layanan listrik PLN semakin meluas, serta diikuti oleh peningkatan akses masyarakat terhadap energi listrik yang andal.

Tabel II.14
Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Tana Tidung, 2022-2024

Tahun	Daya Terpasang	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Jumlah Pelanggan Listrik
2022	146.114.050	15.175.918	19.732.386.000	6.784
2023	161.277.250	15.256.656.508	21.907.184.017	7.235
2024	183.873.250	18.934.951.758	24.966.727.767	7.635

Sumber: *Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2025*

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa upaya PLN dalam memperkuat infrastruktur dan layanan kelistrikan di Kabupaten Tana Tidung telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akses dan konsumsi listrik masyarakat, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan daerah.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Pembangunan berbasis lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan dari

pembangunan berkelanjutan yang harus diimplementasikan setiap daerah dalam menjaga keberlanjutan kualitas lingkungan hidup demi masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pembangunan jangka panjang diarahkan pada pembangunan berkelanjutan di berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial budaya.

Tabel II.15
Kualitas Lingkungan Hidup
di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	72,97	70,38	71,80	75,12	76,16
2	Indeks Kualitas Air	52,22	53,68	48,33	50,00	NA
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	72,80	69,79	71,79	NA	NA

Sumber: *RKPD Kabupaten Tana Tidung, 2025*

Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tana Tidung tahun 2020–2024, terlihat bahwa kualitas lingkungan secara umum mengalami tren perbaikan setelah sempat menurun. Nilai IKLH tercatat sebesar 72,97 pada tahun 2020, menurun ke 70,38 pada tahun 2021, namun kembali meningkat menjadi 71,80 di tahun 2022, dan terus membaik hingga mencapai 76,16 pada tahun 2024. Peningkatan IKLH ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara keseluruhan, yang mencakup aspek kualitas air, tutupan lahan, dan kualitas udara.

Secara keseluruhan, meskipun IKLH Kabupaten Tana Tidung menunjukkan tren positif, perbaikan kualitas lingkungan perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan terintegrasi. Pemerintah daerah perlu memperkuat upaya pengendalian pencemaran air, perlindungan tutupan hutan dan lahan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan agar keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat dapat terus terjaga.

2.1.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Analisis wilayah rawan bencana di Kabupaten Tana Tidung diidentifikasi dari informasi data yang diolah oleh BNPB yaitu nilai indeks rawan bencana. Hasil analisis indeks rawan bencana BNPB yang disinkronisasi dengan data karakteristik wilayah, maka wilayah Kabupaten Tana Tidung termasuk potensi rawan bencana longsor, banjir dan kebakaran skala ringan. Daerah tertentu merupakan daerah rawan bencana skala menengah. Longsor kemungkinan

terjadinya berskala kecil terutama pada tebing sungai akibat erosi lateral sungai Daerah rawan bencana tanah longsor skala menengah lebih banyak oleh aktivitas manusia seperti potongan lereng tanpa perhitungan dan perubahan batas peralihan litologi karena adanya penggundulan hutan dan terjadi di musim hujan diatas normal.

Berdasarkan peta potensi bencana Kabupaten Tana Tidung terdapat kawasan potensi bencana tanah longsor dan banjir

a. Kawasan potensi bencana longsor, meliputi kawasan yang berada di sekitar Kecamatan Sesayap dan Kawasan Gunung Rian dan sekitarnya
b. Kawasan potensi banjir, meliputi Desa Sengkong, Bandan Bikis, Bebatu dan Menjelutung.

Tabel II.16
Jumlah Desa yang Mengalami Bencana Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2023

Kecamatan	Banjir			
	2020	2021	2022	2023
Muruk Rian	1	1	Na	Na
Sesayap	-	2	Na	Na
Betayau	-	4	Na	Na
Sesayap Hilir	-	-	Na	Na
Tana Lia	-	-	Na	Na
Total	**1**	**7**	**6**	**6**

Sumber: *KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung 2025, Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2024*

Tabel II.17
Jumlah Desa yang Mengalami Bencana Gempa Bumi Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2023

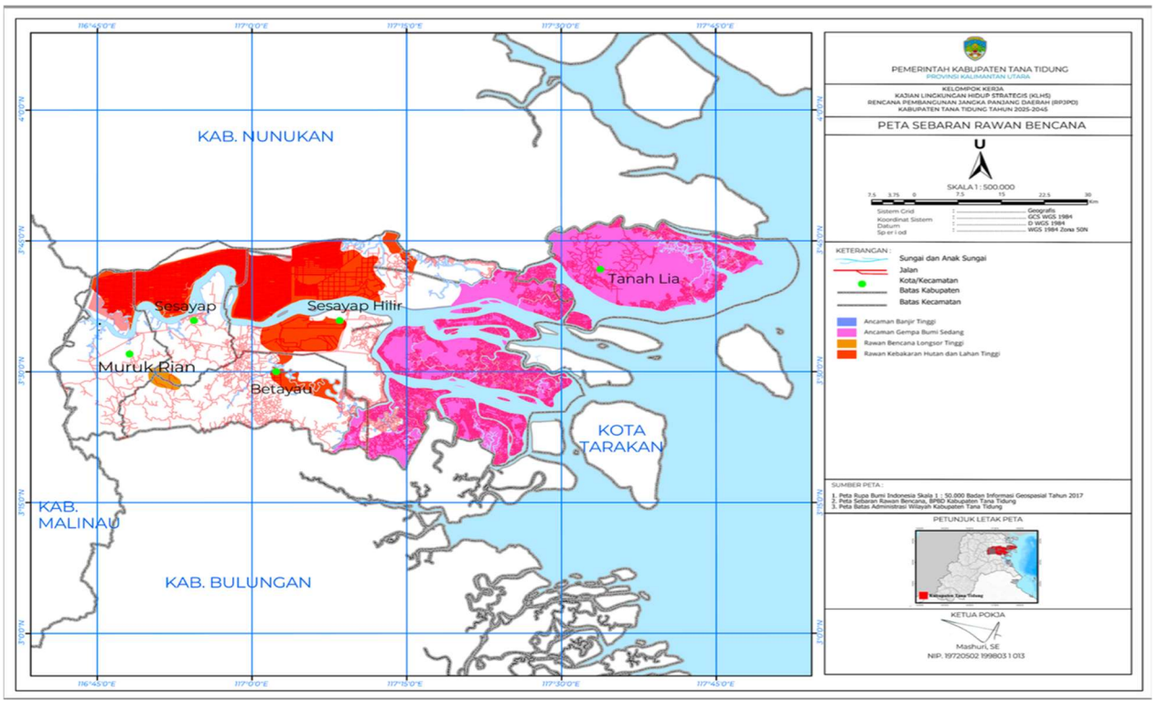
Kecamatan	Gempa Bumi			
	2020	2021	2022	2023
Muruk Rian	-	-	-	-
Sesayap	-	5	-	-
Betayau	-	-	-	-
Sesayap Hilir	-	-	-	-
Tana Lia	-	-	-	-
Total	**-**	**5**	**-**	**-**

Sumber: *KLHS RPJMD Kab. Tana Tidung 2025, Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2024*

Banjir lebih dominan di landform group gambut dan sebagian group fluviomarin atau lebih spesifik di daerah delta dengan kejadian di musim hujan (curah hujan diatas normal). Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Tarakan menyebutkan bahwa gempa bumi yang terjadi merupakan aktivitas gempa bumi kerak dangkal (*shallow crustal earthquake*) jenis intraplate dengan hiposenter dangkal. Itu terjadi karena sesar yang aktif, yang merupakan patahan mendatar (strike-slip fault). Kondisi tektonik di bagian timur Pulau Kalimantan yang cukup kompleks, sehingga zona ini merupakan kawasan paling rawan gempa bumi di Pulau Kalimantan. Selain disebabkan adanya beberapa struktur geologi

sesar turun kerawanan, gempa bumi di zona ini juga terjadi karena adanya beberapa struktur sesar mendatar. Zona Nunukan-Tarakan dan sekitarnya secara tektonik diapit tiga sistem sesar mendatar. Di sebelah selatan terdapat dua sistem sesar yang berarah barat daya-tenggara, yaitu zona Sesar Mangkalihat (Mangkalihat fault zone) dan zona Sesar Maratua (Maratua fault zone). Zona Sesar Mangkalihat merupakan sesar kelanjutan dari Sesar Palu-Koro yang melintas dekat Kota Tanjung Redeb. Keberadaan zona Sesar Maratua juga tidak kalah penting untuk diperhatikan karena ujung sesar ini terletak di lautan yang lokasinya berdekatan dengan Kota Tanjung Selor. Adapun di sebelah utara Pulau Tarakan juga terdapat zona Sesar Sempurna (Sempurna fault zone) yang melintas dari Laut Sulawesi hingga Sabah Malaysia, dan melintasi kawasan yang berdekatan dengan Pulau Sebatik.

Gambar II.9
Peta Sebaran Rawan Bencana Kabupaten Tana Tidung



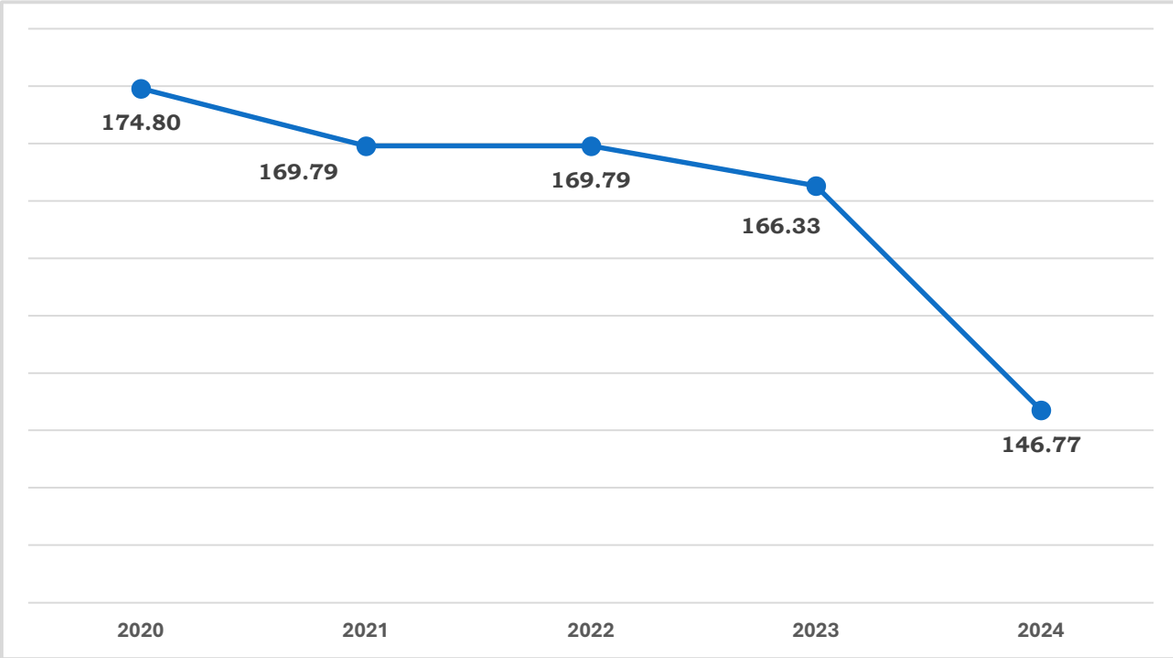
Sumber: *KLHS RPJPD Kab. Tana Tidung 2023*

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tana Tidung pada periode 2020–2024 menunjukkan tren penurunan secara bertahap, yang mencerminkan perbaikan dalam kapasitas pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di daerah tersebut. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 174,80, kemudian menurun menjadi 169,79 pada tahun 2021 dan stabil pada angka yang sama di tahun 2022. Penurunan berlanjut pada tahun 2023 menjadi 166,33, dan mencapai titik terendah pada tahun 2024 dengan indeks sebesar 146,77.

Penurunan indeks ini mengindikasikan adanya peningkatan kesiapsiagaan, sistem mitigasi yang lebih baik, serta peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan wilayah terhadap ancaman bencana. Meski demikian, nilai indeks yang masih tergolong tinggi menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung tetap berada dalam kategori risiko sedang hingga tinggi, sehingga dibutuhkan penguatan lanjutan, baik dalam bentuk perencanaan tata

ruang yang responsif terhadap risiko bencana, pembangunan infrastruktur tangguh, maupun peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga lokal dalam manajemen risiko bencana.

Gambar II.10
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024



Sumber: *BNPB Tahun 2025*

Tabel II.18
Laporan Kejadian Bencana
di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023

No	Jenis Bencana	KERUSAKAN					
		Terdampak (Jiwa)	Rmh RB (unit)	Rmh RR (unit)	Rumah Terandam (unit)	Sekolah/Sarana Pendidikan (unit)	Lain-lain (jembatan, sawah, jalan)
1	Banjir	173	-	-	10	10	1
2	Banjir dan Longsor	-	-	-	-	-	1
3	Kebakaran Bangunan	9	3	-	-	-	-
4	Tanah Longsor	-	-	-	-	-	1
5	Puting Beliung	2	-	2		-	-

Sumber : Bappeda Litbang KTT, diolah

Berdasarkan data Laporan Kejadian Bencana di Kabupaten Tana Tidung tahun 2023, tercatat beberapa jenis bencana dengan tingkat kerusakan yang bervariasi. Bencana banjir mendominasi dengan jumlah terdampak sebanyak 173 jiwa, disertai kerusakan pada 10 rumah terandam, 10 unit sarana pendidikan, serta 1 kerusakan lain berupa infrastruktur. Selain itu, banjir dan longsor juga tercatat meski tanpa korban terdampak, namun menyebabkan kerusakan pada satu infrastruktur lain. Kebakaran bangunan mengakibatkan 9 jiwa terdampak dan kerusakan 3 unit rumah rusak berat. Sementara itu, tanah longsor

menimbulkan kerusakan pada 1 infrastruktur, dan puting beliung berdampak pada 2 jiwa dengan kerusakan 2 unit rumah rusak ringan. Hal ini menunjukkan bahwa banjir merupakan bencana dengan dampak paling besar di wilayah tersebut sepanjang tahun 2023.

2.1.1.7 Demografi

A. Kependudukan

Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan, selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan masalah pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan bila disertai dengan kualitas yang baik dan tinggi, sebaliknya jika memiliki kualitas yang rendah maka penduduk akan menjadi beban pembangunan. Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah penduduk yang semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Pertambahan tersebut tidak hanya disebabkan faktor alami pertumbuhan penduduk yakni kelahiran dan kematian tetapi juga faktor lain yang tidak kalah pentingnya yakni migrasi. Indikator perkembangan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui kebutuhan dasar penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2024 berdasarkan hasil sensus penduduk tercatat sebesar 30.036 jiwa.

Tabel II.19
Jumlah Penduduk per Kecamatan Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2020–2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Muruk Rian	1.483	1.512	1.551	1.590	1.911
2.	Sesayap	10.489	10.685	10.958	11.227	12.364
3.	Betayau	2.843	2.894	2.975	3.056	3.966
4.	Sesayap Hilir	7.441	7.620	7.855	8.090	8.230
5.	Tana Lia	3.337	3.379	3.444	3.507	3.565
Jumlah		**25.584**	**26.090**	**26.783**	**27.470**	**30.036**

Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2025*

Sebagaimana disebutkan dari sebaran penduduk per kecamatan dan luas wilayah, Kabupaten Tana Tidung mengalami pemutakhiran data luasan pada tahun 2022. Berdasarkan data tersebut, kepadatan rata-rata Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2024 yaitu 7,78 jiwa/km^2. Kepadatan tertinggi berada di wilayah Kecamatan Sesayap (31,39 jiwa/km^2). Tingkat kepadatannya mencapai lebih dari tujuh kali lipat kepadatan Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Sesayap Hilir yang merupakan kecamatan terendah kepadatannya di Kabupaten Tana Tidung (4,35 jiwa/km^2). Hal ini dapat dijelaskan karena Kecamatan Sesayap merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota dari Kabupaten Tana Tidung sehingga menarik minat kaum urban bermukim di daerah tersebut, sedangkan Kecamatan Sesayap Hilir merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Tana Tidung, yakni dengan luas wilayah 1.678,69 km^2 dari luas wilayah Kabupaten Tana Tidung sehingga kepadatan penduduknya rendah.

Tabel II.19
Kepadatan Penduduk Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

Tahun	Luas (Km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan ($jiwa/Km^2$)
2024	**3.858,31**	**30.036**	**7,78**
2023	**4.058,71**	**27.470**	**6,77**
2022	**4.058,71**	**27.571**	**5,77**
2021	**4.058,70**	**26.447**	**6,52**
2020	**4.058,70**	**25.584**	**6,30**

Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2025*

Tabel II.20
Kepadatan Penduduk Kabupaten Tana Tidung
Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan ($jiwa/Km^2$)
1.	Muruk Rian	439,58	1.911	4,35
2.	Sesayap	393,92	12.364	31,39
3.	Betayau	578,22	3.966	6,86
4.	Sesayap Hilir	1.678,69	8.230	4,90
5.	Tana Lia	767,90	3.565	4,64

Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2025*

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas publik dan infrastruktur lainnya. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tana Tidung dimana capaian pertumbuhan penduduk meningkat dari 1,92 persen pada tahun 2023 menjadi 2,52 persen pada tahun 2024.

Tabel II.21
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
		2023	2024	2023	2024
1.	Muruk Rian	1.590	1.911	1,88	NA
2.	Sesayap	11.227	12.364	1,84	NA
3.	Betayau	3.056	3.966	2,04	NA
4.	Sesayap Hilir	8.090	8.230	2,24	NA
5.	Tana Lia	3.507	3.565	1,37	NA
Tana Tidung		**27.470**	**30.036**	**1,92**	**2,52**

Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2025*

B. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Indikator *sex ratio* berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Tana Tidung selama lima tahun terakhir selalu lebih banyak daripada perempuan, dengan *sex ratio* di atas 110. Artinya, terdapat sekitar 110-114 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan pada tahun 2020 hingga 2024.

Tabel II.22
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

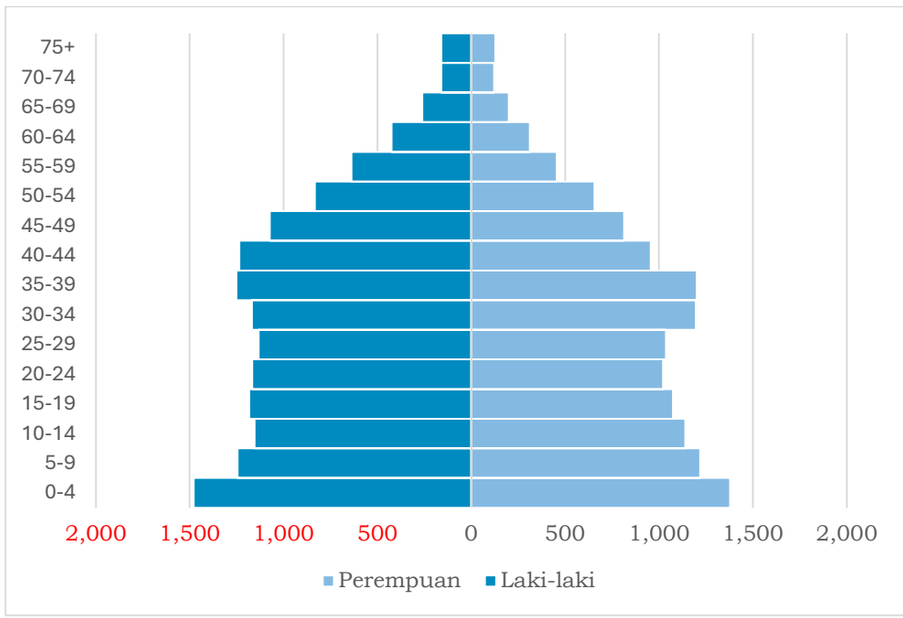
No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)	Sex Ratio
1	2024	15.762	14.274	30.036	110
2	2023	14.567	12.903	27.470	113
3	2022	14.678	12.893	26.783	114
4	2021	14.099	12.348	26.090	114
5	2020	13.656	11.928	25.584	114

Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2025*

C. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Piramida penduduk Kabupaten Tana Tidung cenderung berkarakteristik stasioner yaitu jumlah penduduk di tiap kelompok umur hampir sama. Hal ini mengindikasikan bahwa pengendalian laju pertumbuhan penduduk di masa lalu sudah cukup baik. Meskipun demikian, terjadi tren kenaikan jumlah penduduk pada kelompok umur muda (0-14 tahun) dalam beberapa tahun terakhir. Keadaan ini perlu disikapi agar beban tanggungan penduduk tidak semakin bertambah. Adapun pencapaian angka ketergantungan Kabupaten Tana Tidung berada di bawah 50 yang mengindikasikan pada beberapa tahun terakhir memasuki kondisi bonus demografi sebagai kondisi dimana merupakan peluang dalam akselerasi pembangunan di suatu wilayah jika dapat dimanfaatkan dengan optimal.

Gambar II.11
Piramida Penduduk Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024



Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2025*

D. Proyeksi Demografi Kabupaten Tana Tidung

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan tentang bagaimana jumlah penduduk suatu wilayah akan berubah dari waktu ke waktu, berdasarkan tren demografis yang ada pada saat ini. Proyeksi penduduk juga merupakan upaya untuk memprediksi bagaimana struktur umur dan ukuran populasi suatu wilayah sehingga dapat dijadikan acuan penyusunan kebijakan khususnya dalam hal perencanaan kebijakan publik, infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan dan kesehatan.

Penduduk Kabupaten Tana Tidung diproyeksikan mengalami peningkatan di setiap tahunnya selama tahun 2025-2029 dengan capaian akhir di tahun 2029 mencapai 31,46 ribu jiwa. Kenaikan ini tentu saja berdampak pada kepadatan penduduk yang semakin meningkat pula dimana pada tahun 2029 kepadatan penduduk mencapai 7-8 jiwa per km^2. Kenaikan penduduk di Kabupaten Tana Tidung terjadi baik pada penduduk berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan dimana dominasi jumlah penduduk terbanyak masih pada penduduk laki-laki dimana rasio jenis kelamin mencapai 110,15 yang mengindikasikan di setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 110 jiwa penduduk laki-laki. Selain itu, terlihat adanya penurunan rasio jenis kelamin mendekati 100 meskipun tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah penduduk laki-laki lebih lambat dibandingkan kenaikan jumlah penduduk perempuan.

Pada indikator rasio ketergantungan mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan dimana pada tahun 2029 mencapai 47,89. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Secara umum, seluruh kelompok umur mengalami kenaikan dimana penduduk usia muda sebanyak 8,67 ribu jiwa, penduduk usia produktif sebanyak 21,28 ribu jiwa dan penduduk usia tua sebanyak 1,52 ribu jiwa pada tahun 2029. Rasio ketergantungan di bawah 50 ini mengindikasikan pula bahwa Kabupaten

Tana Tidung berada pada jendela bonus demografi sehingga perlu adanya program prioritas khusus dalam pemberdayaan SDM sehingga mampu mengakselerasi pencapaian pembangunan yang lebih baik.

Tabel II.23
Proyeksi Penduduk Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029

Indikator Proyeksi Penduduk	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	28,83	29,48	30,15	30,81	31,46
Laki-laki	15,23	15,54	15,86	16,18	16,49
Perempuan	13,60	13,94	14,29	14,63	14,97
Rasio Jenis Kelamin	111,99	111,48	110,99	110,59	110,15
Kepadatan Penduduk	7,10	7,26	7,43	7,59	7,75
Rasio Ketergantungan	46,64	46,99	47,34	47,68	47,89
Kelompok Umur (Ribu Jiwa)					
0–14	8,00	8,18	8,35	8,52	8,67
15–64	19,66	20,07	20,47	20,87	21,28
65+	1,17	1,25	1,34	1,43	1,52

Sumber: *Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Tana Tidung, 2024 (diolah)*

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Beberapa kondisi kesejahteraan masyarakat selama tiga tahun terakhir ini cukup rentan sebagai dampak pandemi Covid-19. Hal ini cukup terlihat jelas dari adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga dampak negatif lainnya terhadap masyarakat dari ketenagakerjaan hingga sosial. Namun, pasca penanganan dan pemulihan pandemi, Kabupaten Tana Tidung mampu bangkit dan terus berupaya mengembalikan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Adapun penjabaran kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tana Tidung dapat terlihat sebagai berikut.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Tana Tidung utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Tana Tidung. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Tana Tidung antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju

Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Tana Tidung sempat mencapai angka minus akibat Pandemi COVID-19 yang melanda dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar -0,97 persen. Angka ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi sektor dominan pada distribusi PDRB yakni kategori pertambangan dan penggalian sebesar -4,62 persen pada tahun 2020 akibat perekonomian nasional maupun internasional. Dengan berbagai program penanganan dan pemulihan Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Tana Tidung berangsur membaik hingga tahun 2022 mencapai 5,31 persen. Adapun pencapaian pada tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami perlambatan, dimana pertumbuhan ekonomi Tana Tidung mencapai 4,50 persen pada tahun 2023 dan 3,57 persen pada tahun 2024.

Perlambatan ini dapat dikaitkan dengan berkurangnya efek pemulihan ekonomi pasca pandemi, terbatasnya diversifikasi ekonomi, serta belum optimalnya transformasi sektor produktif dan daya saing daerah. Ketergantungan pada sektor primer membuat struktur ekonomi rentan terhadap tekanan eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim. Oleh karena itu, ke depan perlu didorong strategi yang lebih terarah melalui diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan investasi, hilirisasi hasil produksi sektor unggulan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Tidung dapat kembali meningkat secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel II.24
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Berdasarkan Lapangan Usaha Di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,47	1,79	0,11	-0,09	4,47
B	Pertambangan dan Penggalian	-4,62	7,66	10,21	7,1	-3,11
C	Industri Pengolahan	-2,84	1,93	2,5	0,22	5,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,78	3,51	13,92	13,98	14,41
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,76	2,02	4,26	8,6	8,93
F	Konstruksi	0,22	2,86	4,02	10,38	12,11

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,08	7,25	8,45	3,76	9,52
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,15	-0,5	8,02	1,44	8,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,37	2,18	10	3,5	7,27
J	Informasi dan Komunikasi	6,52	8,71	7,84	7,3	16,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,66	10,14	10,06	15,13	6,01
L	Real Estat	1,67	3,68	4,78	2,63	5,22
M,N	Jasa Perusahaan	-0,74	2,86	6,1	4,07	3,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,16	2,14	5,18	1,62	6,47
P	Jasa Pendidikan	3,16	4,47	6,09	2,48	5,68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,48	8,68	1,4	1,33	4,52
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,44	5,5	9,1	4,06	4,25
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**-0,97**	**4,21**	**5,31**	**4,5**	**3,57**

Sumber: *Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2024*

**angka sementara ** angka sangat sementara*

B. Kemiskinan

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Terdapat berbagai pendekatan dalam mendefinisikan kemiskinan. BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang kemudian batasan dari sisi pengeluaran ini disebut sebagai Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 (tiga) indikator kemiskinan yang digunakan yaitu:

1. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan, yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan;
3. Indeks Keparahan Kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Data persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Tidung selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi ringan yang mencerminkan dinamika sosial-ekonomi masyarakat di tengah masa pemulihan pasca pandemi dan upaya pembangunan. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 4,72 persen, kemudian menurun menjadi 4,18 persen di tahun 2021,

mencerminkan dampak awal dari intervensi pemerintah melalui program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Namun, pada tahun 2022 angka kemiskinan kembali naik menjadi 4,45 persen, dan mengalami kenaikan lebih lanjut menjadi 4,62 persen pada 2023, sebelum pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 4,47 persen.

Tabel II.25
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis kemiskinan (Rp)
2020	25.584	1.340	4,72	406.949
2021	26.447	1.460	4,18	425.348
2022	27.571	1.350	4,45	462.898
2023	27.470	1.470	4,62	490.400
2024	30.036	1.500	4,47	518.696

Sumber: *KTT dalam Angka, 2025*

Kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama dalam *Sustainable Development Goals* (Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan), dimana beberapa program yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk mengentaskan kemiskinan di antaranya: pemberian BASIMDA SD-SMP dan Bansos untuk RTM/Disabilitas/Lansia. Diharapkan berbagai program pengentasan kemiskinan ini mampu menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Tana Tidung di setiap periode pembangunan.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Adapun kondisi indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung cukup fluktuatif dimana capaian tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.

Jika P1 digunakan untuk melihat seberapa dalam rata-rata penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, maka indeks keparahan kemiskinan (P2) dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan di kalangan penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Tana Tidung berhasil menurun dari 0,19 (tahun 2021) menjadi 0,07 di tahun 2024.

Tabel II.26
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020–2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2020	0,33	0,06
2021	0,89	0,19
2022	0,41	0,07
2023	0,14	0,02
2024	0,48	0,07

Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2025*

Strategi penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan tidak hanya pada aspek bantuan sosial semata, tetapi juga pada penguatan ekonomi produktif masyarakat, perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, serta penyediaan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berbasis pemberdayaan, diharapkan tren penurunan kemiskinan dapat kembali berlanjut secara berkelanjutan.

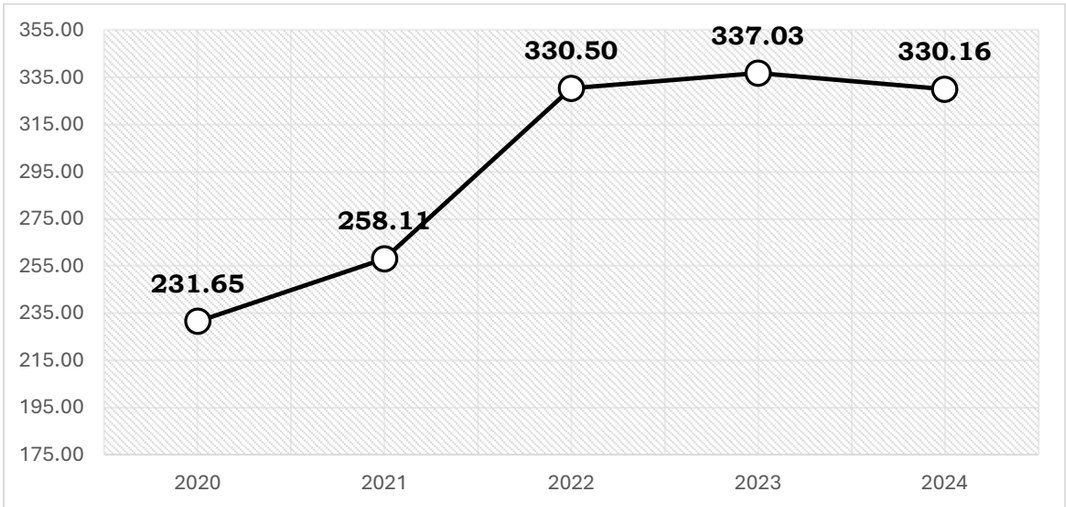
C. PDRB Per Kapita

PDRB merupakan suatu gambaran perekonomian makro suatu wilayah yang identik dengan peningkatan pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat berdasarkan PDRB per kapita, yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro, sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.

Selama periode 2020 hingga 2024, PDRB per kapita Kabupaten Tana Tidung menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, meskipun pada tahun terakhir terjadi sedikit penurunan. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp231,65 juta. Nilai ini terus meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp258,11 juta, kemudian melonjak cukup tajam pada tahun 2022 menjadi Rp330,50 juta. Peningkatan berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian Rp337,03 juta, yang merupakan nilai tertinggi selama periode lima tahun tersebut.

Pada tahun 2024, PDRB per Kapita terjadi sedikit penurunan menjadi Rp330,16 juta. Meskipun demikian, secara keseluruhan tren lima tahunan tetap menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan awal periode. Penurunan ini dapat menjadi indikator perlunya perhatian terhadap faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi kinerja lapangan usaha di daerah tersebut.

Gambar II.12
PDRB per Kapita (Juta Rp./Kapita)
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

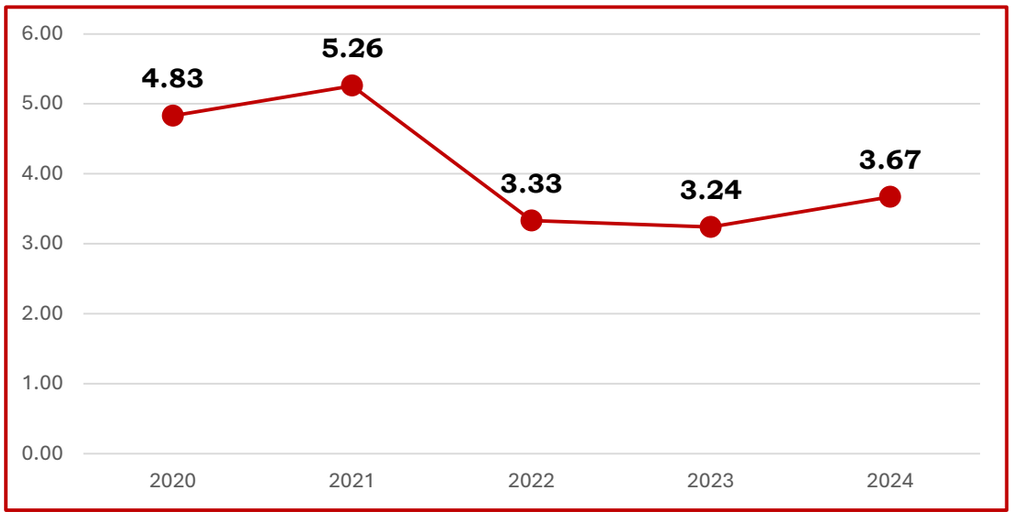


Sumber: *PDRB Kabupaten Tana Tidung Menurut Lapangan Usaha, 2024*

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka adalah Angkatan kerja yang tidak bekerja/tidak mempunyai pekerjaan, yang mencakup angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dan yang dinyatakan dalam persen. Adapun capaian tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tana Tidung dalam 5 tahun terakhir secara umum mengalami penurunan sebagaimana gambar berikut.

Gambar II.13
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024



Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung, 2024*

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2020 tercatat sebesar 4,83 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 5,26 persen, yang dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19 terhadap aktivitas ekonomi dan lapangan kerja. Namun, seiring dengan upaya penanganan dan pemulihan kondisi pascapandemi, aktivitas pembangunan dan perekonomian mulai kembali normal. Hal ini mendorong penurunan angka pengangguran secara bertahap, yaitu menjadi 3,33 persen pada tahun 2022, kemudian turun lagi menjadi 3,24 persen pada tahun 2023, dan sedikit meningkat menjadi 3,67 persen pada tahun 2024. Meskipun terjadi kenaikan di tahun terakhir, secara umum tren pengangguran menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan masa pandemi.

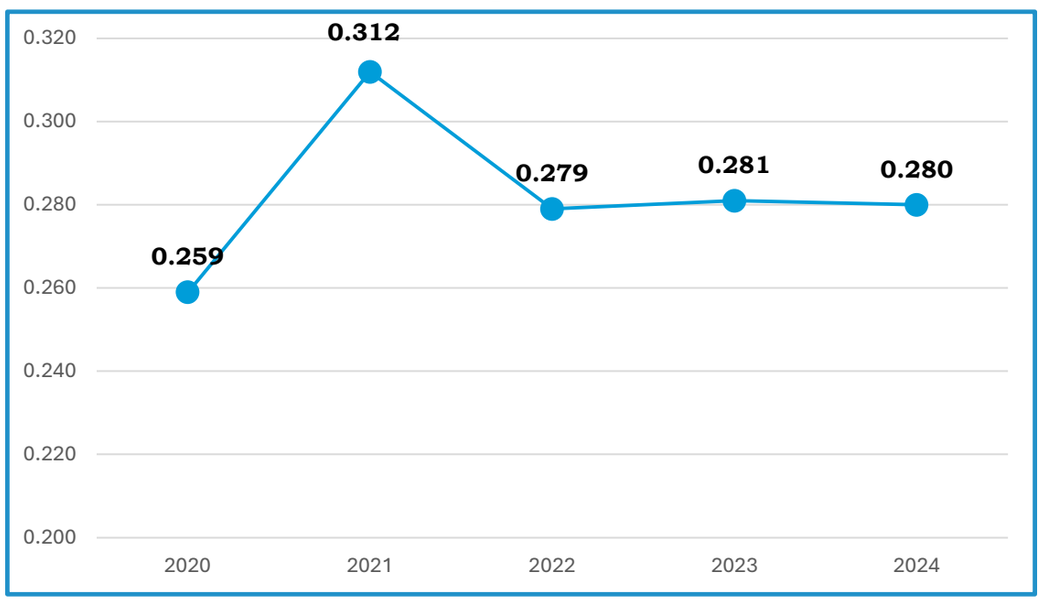
E. Indeks Gini

Pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan Pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemerataan

pembangunan di Kabupaten Tana Tidung adalah sulitnya kondisi geografis wilayah. Selain itu, walaupun pemerataan cukup baik, namun dari segi kualitas masih perlu banyak perbaikan.

Indeks Gini adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu populasi. Skala indeks Gini berada antara 0 dan 1, di mana nilai 0 mengindikasikan distribusi yang sempurna merata (setiap orang memiliki pendapatan yang sama) sementara nilai 1 menunjukkan ketidaksetaraan yang maksimal (salah satu individu memiliki seluruh pendapatan atau kekayaan). Indeks Gini membantu dalam melihat sejauh mana tingkat ketidakmerataan pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks penerapannya, nilai indeks Gini yang lebih rendah menandakan adanya tingkat kesetaraan yang lebih baik dalam distribusi pendapatan, sementara nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketidaksetaraan yang lebih besar di antara individu atau kelompok dalam masyarakat tersebut. Informasi ini membantu para pengambil kebijakan untuk memahami tingkat kesenjangan ekonomi dan mendorong upaya-upaya kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan serta meningkatkan keadilan sosial.

Gambar II.14
Indeks Gini pada 2020-2024



Sumber: *BPS Kab. Tana Tidung, 2025*

Indeks Gini Kabupaten Tana Tidung selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antarpenduduk. Pada tahun 2020, nilai Gini Ratio berada pada angka 0,259, menandakan ketimpangan yang relatif rendah. Namun, pada tahun 2021 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 0,312, yang mengindikasikan meningkatnya kesenjangan ekonomi, kemungkinan akibat dampak tidak merata dari pemulihan ekonomi pasca pandemi atau terbatasnya akses kelompok rentan terhadap sumber pendapatan. Selanjutnya, tren kembali menunjukkan perbaikan pada tahun 2022 dengan penurunan indeks menjadi 0,279, dan relatif stabil pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 0,281 dan 0,280.

Fluktuasi yang terjadi pada indikator indeks gini di Kabupaten Tana Tidung menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah daerah dalam pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Adanya fluktuasi ini memiliki konsekuensi yang cukup signifikan pada stabilitas sosial dan ekonomi, disebabkan karena fluktuasinya ketidaksetaraan pendapatan masyarakat yang terlihat dari distribusi pengeluaran konsumsi. Stabilitas Gini Ratio dalam tiga tahun terakhir menandakan adanya kecenderungan pemulihan ke arah yang lebih merata, meskipun belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, untuk menjaga tren positif ini, perlu didorong penguatan program pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja yang inklusif, dan akses yang lebih adil terhadap pendidikan, kesehatan, serta modal usaha, guna mempersempit kesenjangan antar kelompok masyarakat.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horisontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia, salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tana Tidung terus menunjukkan peningkatan positif sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar 67,79 dan mengalami kenaikan konsisten setiap tahunnya hingga mencapai 70,95 pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat, yang ditopang oleh peningkatan pada komponen pembentuk IPM seperti umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita.

Pasca Pandemi, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tana Tidung kian meningkat, hal ini diimplikasikan pada tahun terakhir, yakni tahun 2023 menunjukkan tren positif mencapai angka 70,06 dimana angka indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan sebesar 2,27 persen dalam 5 tahun terakhir.

Tabel II.27
Indikator Pembentuk Manusia Kabupaten Tana Tidung
menurut Indikator Pembentuk Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,33	73,42	73,44	73,47	73,51
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,21	12,22	12,38	12,39	12,61
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,54	8,80	8,97	9,04	9,24
4	Pengeluaran per kapita	Rp.000	7.38	7.68	8.01	8.39	8.71

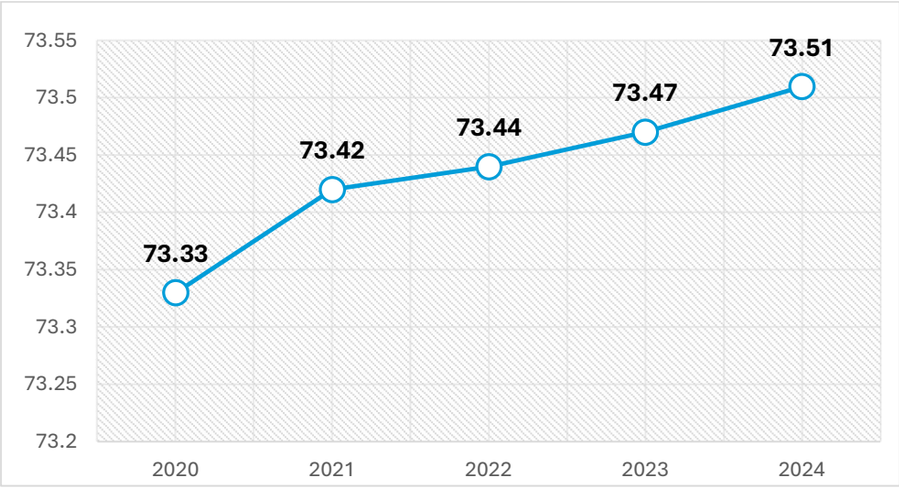
No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
5	**IPM**	**Angka**	**67,79**	**68,59**	**69,45**	**70,06**	**70,95**

Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung, 2025, data diolah*
**2020-2024 menggunakan UHH Hasil Long Form SP2020*

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Gambar II.15
Angka Harapan Hidup Kabupaten Tana Tidung 2020-2024



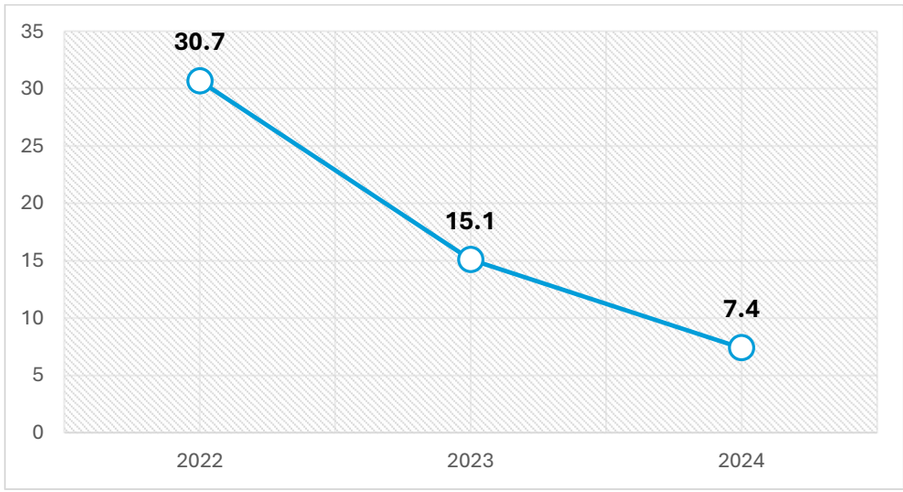
Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung, 2025*

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, AHH tercatat sebesar 73,33 tahun. Angka ini terus mengalami kenaikan, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil setiap tahunnya, mencerminkan peningkatan kualitas hidup dan layanan kesehatan masyarakat. Tahun 2021, AHH naik menjadi 73,42 tahun, lalu meningkat menjadi 73,44 tahun pada 2022. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan angka 73,47 tahun dan mencapai 73,51 tahun pada 2024.

Peningkatan bertahap ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan di bidang kesehatan, gizi, sanitasi, serta edukasi tentang gaya hidup sehat telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan penduduk. Meskipun peningkatannya tidak terlalu tajam, konsistensi tren naik ini menjadi indikator penting dalam keberlanjutan pembangunan manusia di Kabupaten Tana Tidung.

Prevalensi stunting mengacu pada persentase atau jumlah keseluruhan kasus stunting (gangguan pertumbuhan fisik pada anak) yang terjadi pada suatu populasi atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Angka prevalensi stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu daerah atau negara.

Gambar II.16
Prevalensi Stunting Kabupaten Tana Tidung 2020-2024



Sumber : SKI/SSGI

Prevalensi stunting di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, prevalensi stunting tercatat sebesar 30,7 persen, kemudian menurun tajam menjadi 15,1 persen pada tahun 2023. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan angka stunting mencapai 7,4 persen. Capaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai program intervensi gizi, kesehatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan stunting di daerah tersebut.

Selain indikator yang sudah tertera di atas, Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa capaian indikator lain terkait kesehatan seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

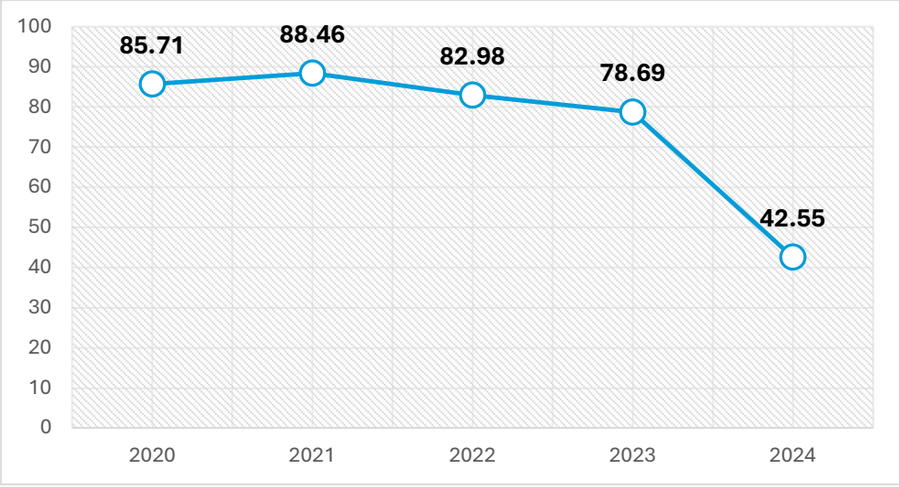
Tabel II.28 .
Uraian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Total Fertility Rate (Angka kelahitan total)	0	0	0	0	1,78
Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	0	0	0	0	0
Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	83,1	103,4	97,39	90,94	95,25
Angka keberhasilan pengobatan TB	85,7	88,46	82,98	78,69	40,43
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	0	0	0	73,63
Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	n/a	n/a	15,82	31,83	40,00

Sumber: Dinas Kesehatan KTT, 2025

Pada tahun 2024, indikator kinerja bidang kesehatan Kabupaten Tana Tidung menunjukkan capaian yang beragam. Angka kelahiran total (TFR) berada pada level 1,78, sementara angka kematian ibu berhasil ditekan hingga 0 per 100.000 KH dan angka kematian balita tercatat sebesar 20 per 1.000 KH. Dari sisi pelayanan, cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis masih 0. Tingkat kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) cukup tinggi, yakni 92,79 persen, mencerminkan akses layanan kesehatan yang luas. Di sisi lain, angka keberhasilan pengobatan TB masih relatif rendah pada 40,43 persen, sementara proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup tercatat 40 persen, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam mendorong gaya hidup sehat di masyarakat.

Gambar II.17
Angka Keberhasilan Pengobatan TB
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan

Angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis (TB) di Kabupaten Tana Tidung dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang naik dan turun dengan kecenderungan menurun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 tingkat keberhasilan tercatat sebesar 85,71 persen dan meningkat menjadi 88,46 persen di tahun 2021, namun kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2024, di mana angka keberhasilan pengobatan TB semakin turun hingga hanya mencapai 42,55 persen. Penurunan signifikan ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam upaya pengendalian TB di Kabupaten Tana Tidung yang perlu segera mendapatkan perhatian dan intervensi lebih intensif.

Tabel II.29
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

Tahun	Kematian Ibu Hamil	Kematian Ibu Melahirkan	Kematian Ibu Nifas	Total Kematian Ibu
2020	1	0	0	1
2021	1	0	1	2
2022	1	0	0	1
2023	0	0	1	1
2024	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan KTT, 2025

Tabel II.30
Jumlah Kematian Neonatal, Bayi, dan balita
di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

Tahun	Kematian Neonatal (0–28 hari)	Kematian Bayi (0–11 bulan)	Kematian Anak Balita (12–59 bulan)	Total Kematian Balita (0–59 bulan)
2020	3	3	1	4
2021	5	10	0	10
2022	11	15	0	15
2023	4	5	2	7
2024	3	6	2	8

Sumber: Dinas Kesehatan KTT, 2025

Berdasarkan data jumlah kematian ibu, bayi, dan balita di Kabupaten Tana Tidung periode 2020–2024, terlihat bahwa angka kematian ibu relatif rendah dengan kisaran 0–2 kasus per tahun dan bahkan tidak tercatat pada tahun 2024. Sementara itu, angka kematian bayi dan balita cenderung fluktuatif dengan puncak tertinggi pada tahun 2022, yaitu 15 kasus balita (0–59 bulan) dan 15 kasus bayi (0–11 bulan). Setelah itu, terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 7 kasus balita dan 5 kasus bayi, meskipun sedikit meningkat kembali pada 2024 dengan 8 kasus balita dan 6 kasus bayi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kematian ibu berhasil ditekan hingga nol, angka kematian bayi dan balita masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Tana Tidung.

Tabel II.31
Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (IDL)
di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

Puskesmas	2020		2021		2022		2023		2024	
	Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%	Capaian	%
Tideng Pale	158	67,2	126	50	204	91,9	121	54,5	117	50,4
Sesayap Hilir	161	100	203	116,7	253	170,9	125	105,1	128	84,8
Tana Lia	40	48,8	41	47,1	58	86,6	64	95,5	65	95,6
Kujau	33	51,6	41	67,2	43	67,2	61	93,8	65	94,2
Muruk Rian	18	43,9	28	65,1	23	65,7	28	80	22	61,1
Total	**410**	**70,3**	**412**	**65,9**	**583**	**108,8**	**429**	**80**	**347**	**62,4**

Sumber: Dinas Kesehatan KTT, 2025

Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (IDL) di Kabupaten Tana Tidung pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang naik dan turun antar tahun maupun antar puskesmas. Pada tahun 2020, capaian total mencapai 70,3% dengan jumlah bayi terimunisasi sebanyak 410, kemudian menurun pada 2021 menjadi 65,9% (412 bayi). Tahun 2022 mencatat capaian tertinggi sebesar 108,8% dengan 583 bayi, namun kembali menurun pada 2024 menjadi 62,4% (347 bayi). Secara per puskesmas, capaian tertinggi terlihat di Puskesmas Sesayap Hilir pada 2021–2023, sedangkan puskesmas lain seperti Tana Lia dan Kujau menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil, berbeda dengan Tideng Pale dan Muruk Rian yang cenderung berfluktuasi dan berada di bawah 70% pada sebagian besar tahun. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun ada pencapaian yang baik di beberapa

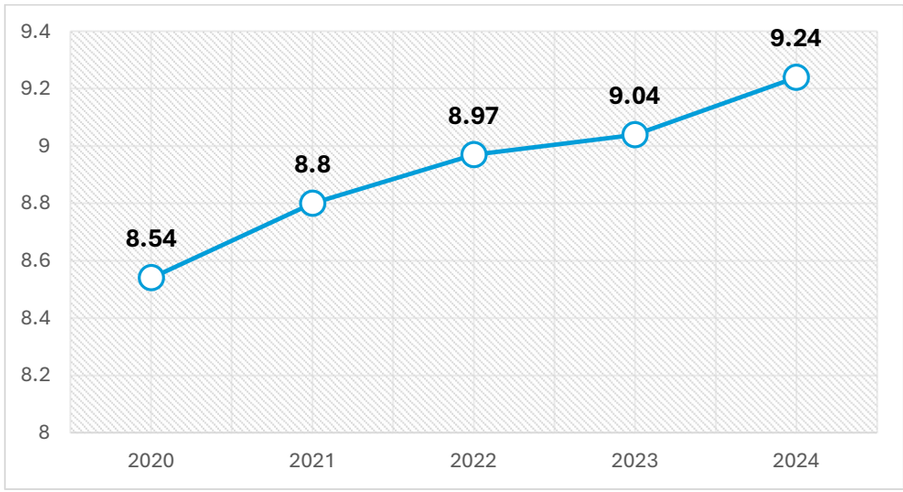
wilayah, masih dibutuhkan upaya lebih kuat untuk menjaga pemerataan dan konsistensi cakupan imunisasi di seluruh puskesmas.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tana Tidung terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, hingga mencapai 9,24 tahun pada tahun 2024. Pada periode 2020 hingga 2021, peningkatan terjadi secara landai, yaitu dari 8,54 menjadi 8,80 tahun. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2024, pertumbuhan menjadi lebih signifikan dengan kenaikan yang konsisten setiap tahunnya, hingga akhirnya melampaui batas program wajib belajar 9 tahun. Capaian ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Tana Tidung yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP kelas 3, bahkan mendekati tingkat pendidikan menengah atas. Meskipun demikian, peningkatan kualitas pendidikan dan akses yang merata tetap menjadi perhatian penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan belajar yang optimal demi mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

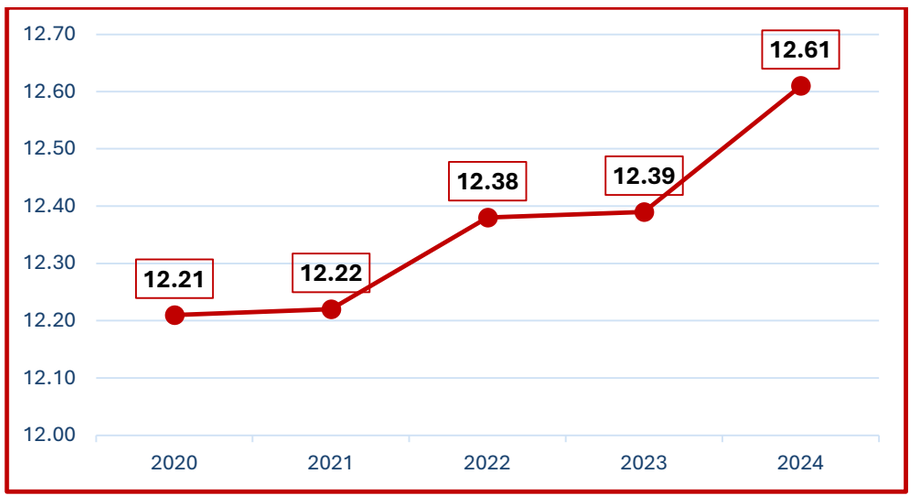
Gambar II.9
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Tidung 2020-2024



Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung, 2025*

Capaian harapan lama sekolah di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, harapan lama sekolah penduduk mencapai 12,61 tahun, meningkat dari 12,21 tahun pada tahun 2020. Kenaikan ini berlangsung secara bertahap, mencerminkan perbaikan akses dan peluang pendidikan bagi generasi muda di daerah tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak usia sekolah (7 tahun) di Kabupaten Tana Tidung memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga setara dengan jenjang SMA kelas 3.

Gambar II.10
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tana Tidung 2020-2024

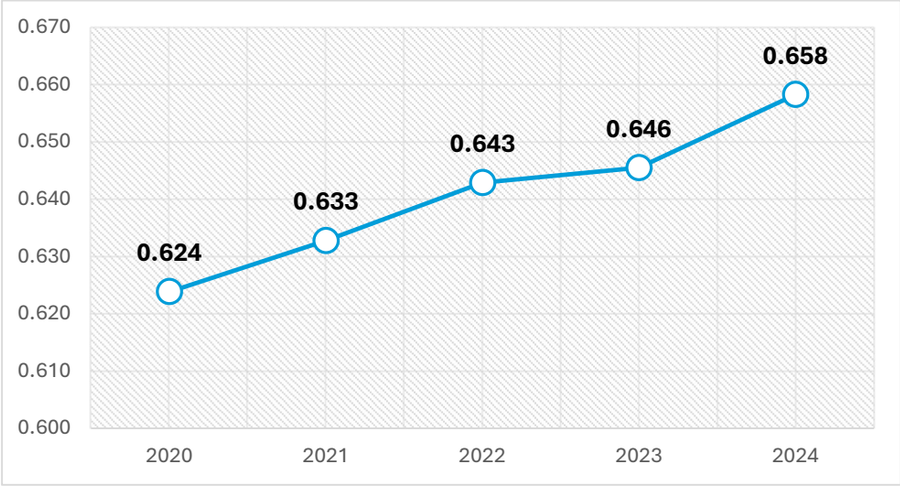


Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung, 2025*

Pencapaian indeks pendidikan di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, seiring dengan pelaksanaan berbagai program pendidikan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2020, indeks pendidikan tercatat sebesar 0,624 dan mengalami kenaikan bertahap setiap tahunnya. Hingga tahun 2024, indeks ini mencapai 0,658. Meskipun mengalami peningkatan yang konsisten, nilai tersebut masih tergolong sedang, sehingga diperlukan upaya

akselerasi dan pemerataan pembangunan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung. Hal ini penting guna mendorong peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di masa mendatang.

Gambar II.11
Indeks Pendidikan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024



Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung, 2020-2024, diolah*

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator yang mengukur tingkat ketersediaan, akses, dan pemanfaatan sumber daya literasi, termasuk fasilitas perpustakaan, bahan bacaan, serta peran aktif masyarakat dalam aktivitas literasi. Turunnya indeks ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan akses masyarakat terhadap fasilitas literasi, rendahnya kegiatan promosi budaya baca, kurang optimalnya program literasi yang berjalan, ataupun dampak dari pergeseran prioritas pembangunan daerah.

IPLM Kabupaten Tana Tidung mengalami penurunan signifikan dalam kurun waktu satu tahun, dari 72,89 pada tahun 2023 menjadi 59,47 pada tahun 2024. Penurunan sebesar 13,42 poin ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam pengembangan dan penguatan budaya literasi di masyarakat. Penurunan ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Upaya pemulihan dan peningkatan IPLM perlu difokuskan pada penguatan ekosistem literasi, peningkatan dukungan infrastruktur seperti perpustakaan desa dan taman baca masyarakat, pelatihan bagi tenaga pengelola literasi, serta mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sekolah, organisasi masyarakat, dan dunia usaha. Membangun budaya literasi yang kuat tidak hanya mendukung kualitas pendidikan, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang berpikir kritis, kreatif, dan adaptif.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Kesejahteraan sosial merujuk pada kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dalam suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan pemberdayaan individu dalam konteks norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 tentu saja

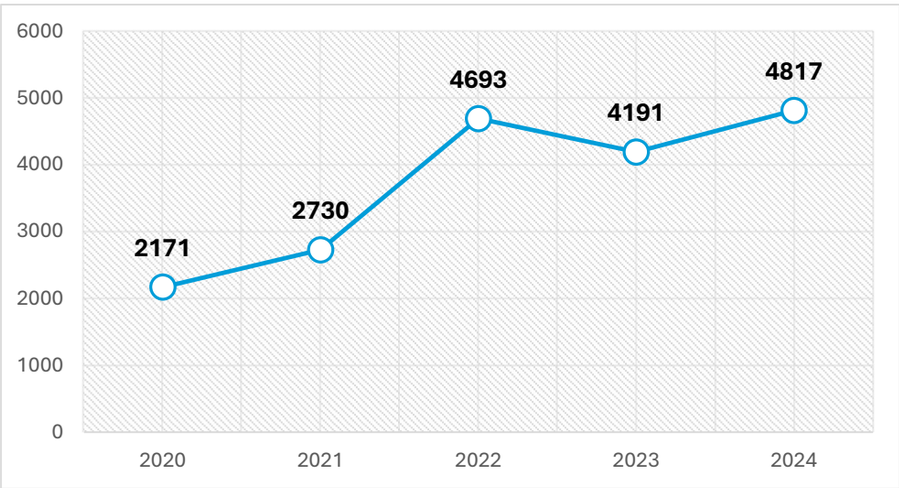
menjadi salah satu titik vital bagi perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat mengingat periode pembangunan tersebut merupakan periode awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang. Pendekatan kesejahteraan sosial budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. Ini mencerminkan pengakuan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya.

Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 51,4 dan berada pada kategori Maju. Capaian ini mencerminkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat yang relatif baik, hasil dari berbagai program pembangunan dan intervensi sosial yang dijalankan pemerintah daerah selama periode 2020–2024. Nilai tersebut menjadi baseline penting untuk menilai keberlanjutan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat ke depan, sekaligus menegaskan bahwa Kabupaten Tana Tidung memiliki fondasi sosial yang cukup kuat dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kepesertaan dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan sosial yang lebih luas. Perlindungan sosial sendiri adalah upaya negara untuk menjamin seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan seperti pekerja, agar terlindungi dari berbagai risiko sosial dan ekonomi yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup mereka.

Dalam konteks tenaga kerja, risiko seperti kecelakaan kerja, sakit, kehilangan pekerjaan, hingga masa tua tanpa penghasilan merupakan hal yang nyata dan bisa terjadi kapan saja. Di sinilah peran Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjadi krusial. Program ini memberikan perlindungan konkret melalui berbagai skema seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Gambar II.12
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024



Sumber : Bappeda Litbang KTT, 2025

Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Tana Tidung (KTT) selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 jumlah peserta tercatat sebanyak 2.171 orang, kemudian meningkat signifikan menjadi 2.730 orang pada 2021, dan melonjak tajam hingga 4.693 orang di 2022. Namun, pada 2023 terjadi sedikit penurunan ke angka 4.191 orang, sebelum kembali naik di 2024 dengan capaian tertinggi selama periode tersebut, yakni 4.817 orang. Perkembangan ini menggambarkan adanya komitmen berkelanjutan dalam memperluas perlindungan sosial bagi tenaga kerja di daerah, meskipun masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi peningkatan jumlah kepesertaan dari tahun ke tahun.

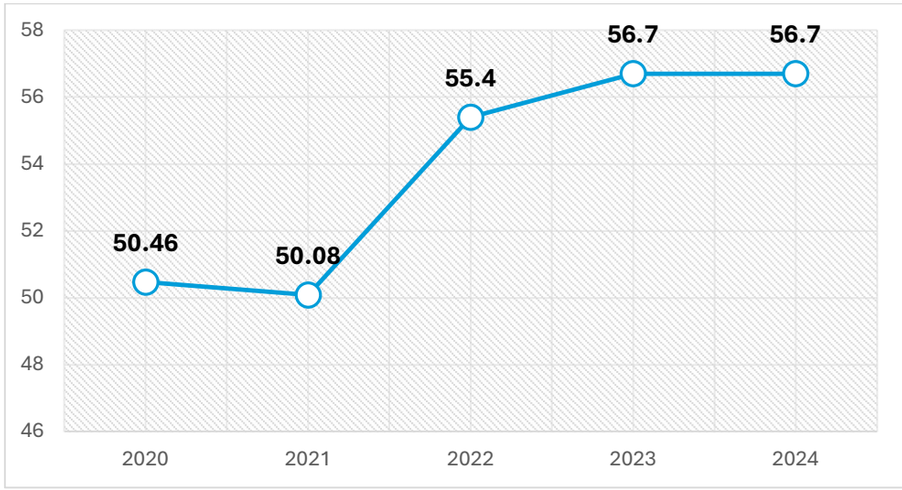
Dengan menjadi peserta, pekerja tidak hanya mendapatkan perlindungan atas risiko pribadi, tetapi juga turut serta dalam menciptakan sistem sosial yang inklusif dan berkeadilan. Program ini juga mendukung stabilitas ekonomi nasional, karena ketika pekerja terlindungi, mereka lebih produktif dan tidak mudah jatuh ke dalam kemiskinan akibat kejadian tak terduga. Oleh karena itu, kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja adalah bentuk nyata dari pelaksanaan perlindungan sosial yang merupakan sebuah komitmen negara untuk menjaga martabat dan kesejahteraan setiap warga negaranya, khususnya mereka yang menggerakkan roda pembangunan.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kesejahteraan sosial budaya di Kabupaten Tana Tidung merujuk pada kondisi kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan budaya yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini melibatkan upaya pemberdayaan individu dan komunitas dalam bingkai nilai-nilai, norma, serta struktur sosial budaya lokal yang telah mengakar. Dalam kerangka pembangunan jangka menengah daerah, aspek sosial budaya menjadi elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah yang kaya akan keanekaragaman budaya dan tradisi masyarakat adat, terutama dari Suku Tidung yang dominan. Suku ini memiliki bahasa, adat istiadat, dan sistem kekerabatan yang kuat, yang mendukung kehidupan sosial yang harmonis dan penuh dengan gotong royong. Upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian dijalankan dengan penuh khidmat dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar II.13
Indeks Pembangunan Kebudayaan
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024



Sumber : Kementerian Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Tana Tidung pada periode 2020–2024 memperlihatkan perkembangan yang cenderung meningkat meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, nilai IPK tercatat sebesar 50,46 dan sedikit menurun menjadi 50,08 di tahun 2021. Namun, sejak 2022 terjadi peningkatan cukup signifikan dengan capaian 55,40, kemudian berlanjut naik ke 56,70 pada 2023, dan bertahan stabil di angka yang sama pada 2024. Perkembangan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Tana Tidung, meski tetap diperlukan langkah strategis untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan kebudayaan secara lebih berkelanjutan.

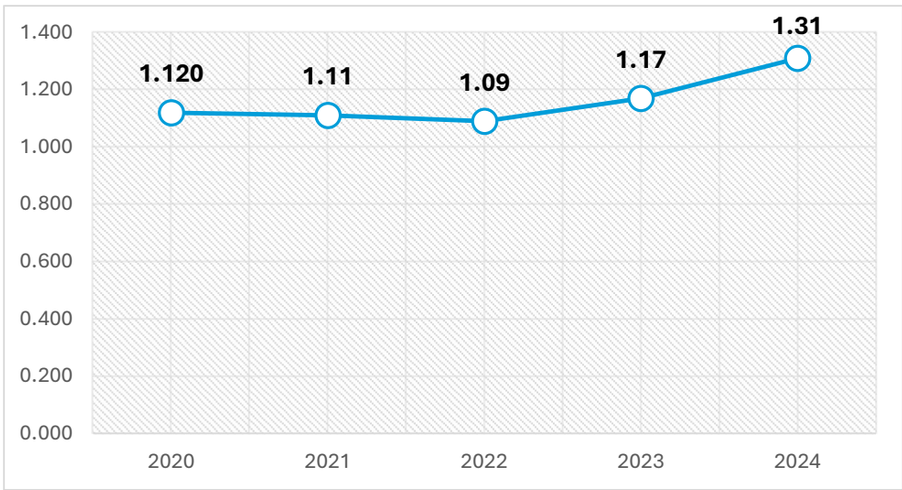
Masyarakat adat Tana Tidung mengandalkan sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka, terutama melalui pertanian, perikanan, dan berburu. Mereka memiliki pengetahuan tradisional tentang pengelolaan sumber daya alam yang diwariskan turun-temurun, yang terbukti efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pengelolaan hutan adat juga menjadi aspek penting dari kearifan lokal mereka, dengan praktik-praktik yang memastikan keseimbangan ekosistem dan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Pada era saat ini, masyarakat adat di Tana Tidung menghadapi tantangan besar dari modernisasi dan pembangunan yang sering kali berdampak negatif pada kehidupan tradisional mereka. Pembangunan infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam bisa mengancam kelangsungan tradisi dan budaya mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi perencanaan pembangunan daerah untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk pengakuan hak atas tanah adat dan dukungan terhadap pelestarian budaya tradisional.

Pendidikan dan penyuluhan yang sensitif terhadap budaya juga menjadi kunci dalam memberdayakan masyarakat adat Tana Tidung. Program pendidikan yang menghargai dan mempertahankan budaya lokal dapat membantu masyarakat adat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas mereka. Dengan dukungan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, masyarakat adat Tana Tidung dapat terus menjaga dan melestarikan warisan budaya mereka, sambil berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, Kabupaten Tana Tidung mengakomodasi indikator-indikator prioritas nasional yang mencakup tiga fokus utama di antaranya penguatan ekonomi syariah, peningkatan inklusi keuangan, dan perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Gambar II.14
Aset Perbankan Syariah/PDRB (%)
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024



Sumber : Bappeda Litbang KTT, 2025

Aset perbankan syariah terhadap PDRB Kalimantan Utara dalam periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung meningkat di akhir periode. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,12 persen, sedikit menurun menjadi 1,11 persen di 2021 dan kembali turun ke titik terendah 1,09 persen pada 2022. Meski demikian, tren positif mulai terlihat pada 2023 dengan kenaikan menjadi 1,17 persen, dan berlanjut pada 2024 yang mencapai 1,31 persen. Peningkatan ini mengindikasikan mulai tumbuhnya peran perbankan syariah dalam perekonomian daerah, sekaligus menunjukkan potensi besar sektor keuangan syariah untuk terus dikembangkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Pembangunan Gender

Pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah. IPG dirancang untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Selama periode 2020–2024, Kabupaten Tana Tidung menunjukkan kemajuan yang cukup konsisten dalam aspek pembangunan dan pemberdayaan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) terus mengalami peningkatan dari 79,40 pada tahun 2020 menjadi 81,40 pada tahun 2024, yang mengindikasikan semakin sempitnya kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga menunjukkan tren yang positif, meningkat dari 59,74 pada tahun 2020 menjadi 61,10 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya partisipasi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan, yang merupakan indikator penting dalam menciptakan kesetaraan dan inklusi sosial.

Tabel II.32
Uraian Capaian Indikator Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender	79,40	80,06	80,61	80,82	81,40
Indeks Pemberdayaan Gender	59,74	60,52	60,82	61,54	61,10
Indeks Ketimpangan Gender	0,536	0,472	0,496	0,480	0,448
Kekerasan Perempuan dan Anak	7	9	7	27	26

Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung, BPS RI, 2025 ; Sinan Data*

Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya secara optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil. Indeks Ketimpangan Gender menggambarkan kerugian/kegagalan (loss) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Indeks Ketimpangan Gender bernilai antara 0 dan 1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang menurun dari 0,536 pada tahun 2020 menjadi 0,448 pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam hal pengurangan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Penurunan nilai IKG mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Tana Tidung semakin menurun, yang merupakan hasil dari peningkatan akses perempuan terhadap layanan dasar dan ruang partisipasi publik.

Dalam mengoptimalisasi pembangunan berbasis kesetaraan gender, diperlukan upaya lanjutan untuk memperkuat kebijakan afirmatif, peningkatan

kapasitas perempuan, serta pengarusutamaan gender dalam setiap program pembangunan. Penguatan sistem perlindungan sosial, akses pendidikan tinggi, serta perluasan kesempatan kerja yang ramah gender juga menjadi strategi kunci guna mempercepat pencapaian kesetaraan dan keadilan gender secara berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung.

2.1.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah diartikan sebagai gambaran kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan tinggi dan berkelanjutan. Berikut penjabaran terkait daya saing daerah Kabupaten Tana Tidung:

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Salah satu komponen terpenting dari pembangunan suatu daerah yaitu sumber daya manusia yang berperan sebagai kelompok sasaran juga sebagai pelaksana pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang terstruktur dan teratur. Hal ini guna memberikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk berkehidupan layak dan berkompetensi unggul.

A. Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu indikator untuk menilai kualitas penduduk bekerja adalah tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan. Berdasarkan data tahun 2024, penduduk bekerja di Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh lulusan jenjang pendidikan dasar (SD/MI), yaitu sebanyak 4.688 orang dari total 14.553 penduduk bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja masih berasal dari kelompok dengan tingkat pendidikan rendah.

Tabel II.33
Penduduk 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2024

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
1.	SD/MI	4.688	68	4.756	98,57
2.	SMP/MTs	1.600	166	1.766	90,6
3.	SMA/SMK/MA	4.540	215	4.755	95,48
4.	Perguruan Tinggi	3.725	105	3.830	97,26
	Jumlah	14.553	554	15.107	96,33

Sumber: *Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2024*

B. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah

penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Ini juga dapat memberikan gambaran tentang kebutuhan akan program-program sosial dan kesejahteraan untuk membantu orang-orang yang tidak bekerja.

Tingkat angka ketergantungan yang tinggi dapat memberikan tekanan pada sistem ekonomi dan sosial, mengingat beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Berdasarkan data tahun 2024, persentase usia produktif di Kabupaten Tana Tidung mencapai 96,49 persen, sementara usia tidak produktif hanya 3,51 persen. Meskipun angka ini menunjukkan dominasi usia produktif, rasio ketergantungan di tahun 2023 sebesar 45,91 berarti setiap 100 orang usia produktif harus menanggung 45-46 orang yang tidak produktif. Hal ini menunjukkan pentingnya pemantauan dan analisis angka ketergantungan untuk merancang kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengurangi beban sosial di masa mendatang.

Pencapaian angka ketergantungan Kabupaten Tana Tidung berada di bawah 50 yang mengindikasikan pada beberapa tahun terakhir memasuki kondisi bonus demografi sebagai kondisi dimana merupakan peluang dalam akselerasi pembangunan di suatu wilayah jika dapat dimanfaatkan dengan optimal. Namun jika kondisi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka banyaknya penduduk usia produktif yang tidak dibarengi dengan naiknya kualitas sumber daya manusia, dapat mengakibatkan tingkat perekonomian masyarakat tidak mengalami eskalasi atau terjebak dalam kondisi *middle income trap.*

Tabel II.34
Penduduk Kabupaten Tana Tidung
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020- 2024

Tahun	Umur 0-14 Tahun (ribu jiwa)	Umur 15-64 Tahun (ribu jiwa)	Umur >65 Tahun (ribu jiwa)	% Usia Produktif	% Usia Tidak Produktif
2024	8.889	22.838	947	96,49	3,51
2023	7.615	18.827	1.028	68,54	31,46
2022	7.343	19.173	1.055	69,54	30,46
2021	7.338	18.155	954	68,65	31,35
2020	7.036	17.670	878	69,07	30,93

Sumber: *Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2020-2024, diolah*

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu

negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Data Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Tana Tidung tahun 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang menarik pada kategori industri pengolahan dan penyediaan akomodasi serta makan dan minum. Secara nominal, nilai PDRB atas dasar harga berlaku sektor industri pengolahan meningkat secara konsisten dari Rp125,25 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp166,16 miliar pada tahun 2024. Demikian pula sektor akomodasi dan makan minum menunjukkan kenaikan dari Rp12,42 miliar menjadi Rp18,11 miliar pada periode yang sama. Kenaikan nilai ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi sektoral secara absolut, meskipun laju pertumbuhan sektoralnya sempat mengalami fluktuasi.

Pertumbuhan ekonomi sektoral pada industri pengolahan menunjukkan tren yang kurang stabil. Setelah mengalami kontraksi sebesar -2,84 persen pada 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19, sektor ini tumbuh positif di tahun-tahun berikutnya, dengan puncaknya pada 2024 sebesar 5,01 persen. Hal ini menunjukkan pemulihan dan mulai bergeraknya aktivitas industri setelah terdampak pandemi, meskipun pada 2023 hanya tumbuh 0,22 persen, menandakan bahwa pemulihan tersebut belum berlangsung merata. Sementara itu, sektor akomodasi dan makan minum tumbuh lebih dinamis. Dari kontraksi -0,37 persen pada 2020, sektor ini mencatatkan lonjakan pertumbuhan sebesar 10,00 persen pada 2022 dan 7,27 persen pada 2024, yang menunjukkan meningkatnya aktivitas konsumsi dan jasa seiring membaiknya mobilitas masyarakat dan wisatawan.

Namun demikian, meskipun terjadi pertumbuhan secara nominal dan sektoral, kontribusi kedua sektor terhadap total PDRB justru menunjukkan penurunan. Industri pengolahan, yang menyumbang 2,13 persen terhadap PDRB pada 2020, terus menurun hingga menjadi 1,79 persen pada 2024. Begitu pula sektor akomodasi dan makan minum, dari 0,21 persen pada 2020 turun menjadi hanya 0,19 persen pada 2024. Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa meskipun sektor-sektor ini tumbuh, laju pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan sektor lainnya dalam struktur ekonomi daerah. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya peran kedua sektor tersebut sebagai penggerak utama ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan perlunya perhatian strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor industri pengolahan serta jasa akomodasi dan makan minum. Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan hilirisasi, pemberdayaan UMKM, serta promosi pariwisata berbasis potensi lokal agar kedua sektor ini dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Tana Tidung secara inklusif dan berkelanjutan.

Tabel II.35

Produk Domestik Bruto (PDRB) Kategori Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1	**Nilai PDRB adh Berlaku**					
	Industri Pengolahan (miliar Rp.)	125,25	136,80	146,54	150,91	166,16
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (miliar Rp.)	12,42	13,31	15,12	16,15	18,11
2	**Pertumbuhan Ekonomi Sektoral**					
	Industri Pengolahan (%)	-2,84	1,93	2,50	0,22	5,01
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	-0,37	2,18	10,00	3,50	7,27
3	**Kontribusi/Rasio terhadap PDRB**					
	Industri Pengolahan (%)	2,13	2,03	1,66	1,63	1,79
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	0,21	0,20	0,17	0,17	0,19

Sumber: *Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2025*

**angka sementara ** angka sangat sementara*

B. Ekonomi Kreatif

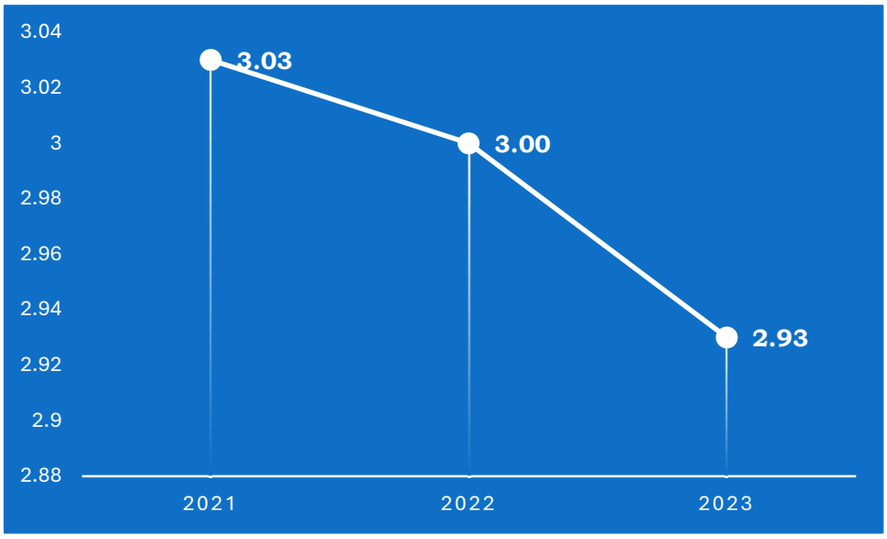
Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang mengandalkan ide, kreativitas, dan inovasi sebagai faktor utama produksi dan penawaran produk serta layanan. Dalam ekonomi kreatif, kreativitas dan ide-ide baru menjadi sumber daya utama, menggantikan sumber daya tradisional seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Ekonomi kreatif mencakup berbagai sektor industri yang memanfaatkan kreativitas individu dan kelompok untuk menghasilkan nilai ekonomi.

Ekonomi kreatif merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing, dan mendorong inovasi. Pemerintah perlu melakukan pengembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu strategi untuk diversifikasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun pencapaian ekonomi kreatif di Kabupaten Tana Tidung belum optimal mengingat progress menurun pada proporsi ekonomi kreatif pada PDRB (struktur ekonomi) Tana Tidung dengan capaian 2,93 persen pada tahun 2023

Penurunan proporsi PDRB ekonomi kreatif mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga daya saing sektor ini. Penurunan tersebut umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain semakin ketatnya persaingan dengan produk-produk industri modern dan impor, rendahnya inovasi serta

pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha lokal, keterbatasan akses permodalan, serta masih minimnya dukungan infrastruktur dan pemasaran yang berkelanjutan. Selain itu, pergeseran pola konsumsi masyarakat yang lebih memilih produk instan dan massal juga turut menekan kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB.

Gambar II.15
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2023



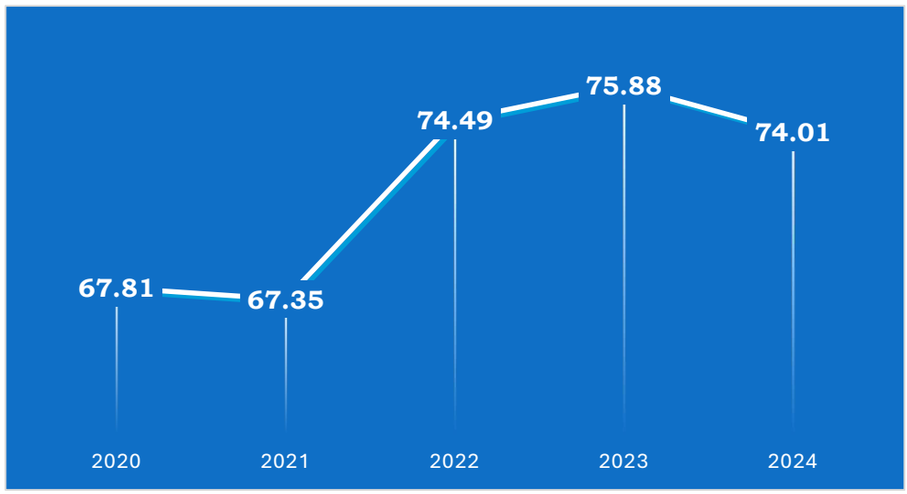
Sumber: *Bappeda Kabupaten Tana Tidung, 2024*

C. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang di dalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Sebaliknya, tingkat yang rendah mungkin mencerminkan tantangan ekonomi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan dalam angkatan kerja. Adapun penduduk yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja di Tana Tidung dalam kurun waktu lima tahun terakhir memiliki trend yang cenderung meningkat apabila dilihat capaian pada tahun 2024 dan dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Pada tahun 2020 tingkat partisipasi angkatan kerja di Tana Tidung mencapai 67,81, sedangkan pada tahun 2024 angka yang dicapai mencapai 74,24. Meskipun dalam lima tahun meningkat, tetapi capaian 2024 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 75,88. Secara umum, kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja yang meningkat dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi mengalami perubahan yang lebih baik. Dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja ini, maka pemerintah perlu menyusun kebijakan stimulus dalam memperluas lapangan usaha baik sebagai pekerja maupun pengusaha.

Gambar II.16
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024



Sumber: *Badan Piusat Statistik Kabupaten Tana Tidung, 2025*

Data tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Tana Tidung periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan pergeseran struktur pendidikan tenaga kerja. Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja meningkat dari 14.181 orang pada tahun 2020 menjadi 15.107 orang pada tahun 2024, meskipun sempat mencapai puncak tertinggi pada tahun 2022 sebanyak 17.283 orang. Kategori terbanyak berasal dari lulusan sekolah menengah atas (SMA), dengan angka relatif stabil, yaitu 4.629 orang pada 2020 dan 4.755 orang pada 2024, menandakan bahwa jenjang SMA masih menjadi salah satu titik dominan pencapaian pendidikan sebelum masuk pasar kerja disamping penduduk yang berpendidikan sampai dengan Sekolah Dasar.

Masih cukup tingginya pendidikan angkatan kerja yang memiliki jenjang pendidikan hanya sampai tingkat SD perlu perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan kurangnya kualitas sumber daya manusia yang akan memasuki pasar kerja dan berdampak pada produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Meskipun begitu, jumlah angkatan kerja dari lulusan perguruan tinggi menunjukkan tren peningkatan dari 2.870 orang pada 2020 menjadi 3.830 orang pada 2024, mencerminkan mulai membaiknya akses terhadap pendidikan tinggi dan potensi peningkatan kualitas SDM di daerah.

Adapun data angkatan kerja di Kabupaten Tana Tidung dari tahun 2020 hingga 2024, sebagai berikut:

Tabel II.36
Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2020-2024

Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja	Angkatan Kerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sampai dengan SD	4.512	4.248	7.970	5.532	4.756
Sekolah Menengah Pertama	2.170	2.091	1.700	1.630	1.766
Sekolah Menengah Atas	4.629	5.306	4.788	4.562	4.755
Perguruan Tinggi	2.870	2.903	2.825	3.407	3.830
Jumlah	**14.181**	**14.848**	**17.283**	**15.131**	**15.107**

Sumber: *Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2021-2025*

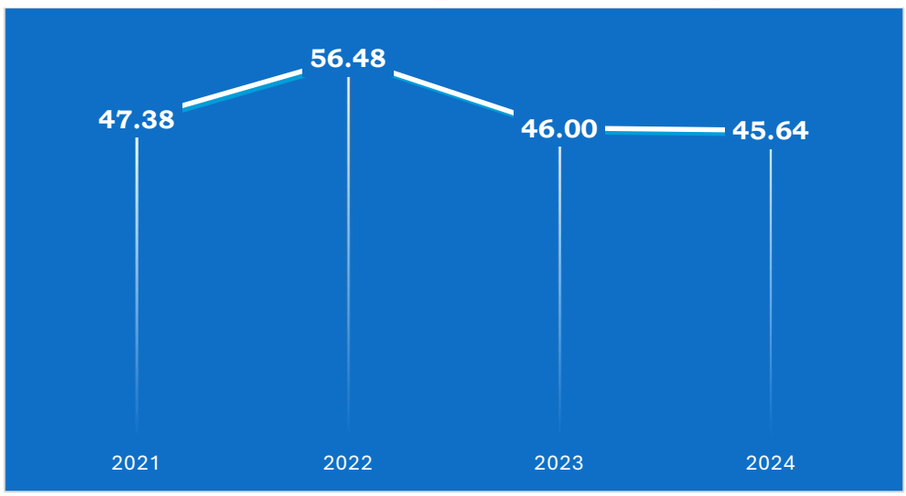
D. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi daerah merupakan kunci strategis dalam mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Di tengah tantangan globalisasi, keterbatasan sumber daya, dan dinamika sosial masyarakat, setiap daerah dituntut untuk tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga mampu menciptakan solusi yang kreatif, efektif, dan sesuai dengan karakteristik lokalnya.

Inovasi daerah dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pelayanan publik berbasis digital, pengembangan ekonomi kreatif, sistem tata kelola yang transparan, hingga pemberdayaan masyarakat melalui teknologi dan partisipasi aktif. Ketika pemerintah daerah mampu membaca kebutuhan warganya dan mengolah potensi lokal menjadi kekuatan pembangunan, maka terciptalah model pembangunan yang responsif, inklusif, dan berdaya saing

Gambar II.17

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tana Tidung 2021-2024



Sumber : Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka 2025

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tana Tidung menunjukkan fluktuasi selama periode 2021 hingga 2024. Setelah mencatat peningkatan signifikan dari 47,38 pada tahun 2021 menjadi 56,48 di tahun 2022, angka tersebut justru mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya, yakni menjadi 46,00 pada 2023 dan sedikit turun lagi ke 45,64 di 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi dan efektivitas upaya inovatif di tingkat daerah, sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap strategi dan implementasi kebijakan inovasi untuk mendorong kemajuan yang lebih berkelanjutan. Beberapa faktor yang memengaruhi penurunan tersebut antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam merancang dan

melaksanakan program inovasi, minimnya alokasi anggaran khusus untuk mendukung kegiatan inovatif, serta belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dengan masyarakat dan dunia usaha.

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Tana Tidung terus diimplementasikan dalam pembangunan perekonomian daerah. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Salah satu penerapan ekonomi hijau dan biru dalam pembangunan di Kabupaten Tana Tidung adalah dengan membangun perekonomian sektor pertanian yang berkelanjutan.

Data capaian perekonomian sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Tana Tidung selama periode 2020–2024 menunjukkan upaya pembangunan yang terus diupayakan yang terlihat dari sisi pertumbuhan sektoral maupun kontribusi/rasio-nya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi sektor ini sempat meningkat dari 0,47 persen pada 2020 menjadi 1,79 persen pada 2021, namun melambat drastis menjadi 0,11 persen pada 2022, bahkan mengalami kontraksi -0,09 persen pada 2023, sebelum kembali pulih dengan pertumbuhan mencapai 4,47 persen pada 2024. Sementara itu, kontribusi sektor ini terhadap PDRB mengalami tren menurun dari 31,11 persen pada 2020 menjadi 23,96 persen pada 2024, meskipun masih menjadi salah satu sektor dominan dalam struktur ekonomi daerah.

Penurunan pembangunan ekonomi yang fluktuasi pada beberapa tahun ini mengindikasikan belum kuatnya pengelolaan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, termasuk tekanan terhadap ekosistem, pola produksi yang belum efisien, dan keterbatasan dalam adopsi teknologi ramah lingkungan. Penurunan kontribusi juga mengindikasikan bahwa sektor ini belum cukup terintegrasi dengan pendekatan ekonomi hijau dan biru, yang menekankan keberlanjutan lingkungan dan efisiensi sumber daya dalam proses produksi.

Dalam konteks ekonomi hijau, diperlukan transformasi sektor pertanian menuju praktik yang rendah emisi, berkelanjutan, dan berbasis konservasi—misalnya melalui pertanian organik, agroforestri, serta pemanfaatan energi terbarukan di lahan pertanian. Sementara itu, pendekatan ekonomi biru dapat diterapkan pada subsektor perikanan dan kelautan melalui praktik perikanan berkelanjutan, budidaya ramah lingkungan, serta perlindungan ekosistem perairan.

Peningkatan pertumbuhan sektor pada tahun 2024 dapat menjadi momentum untuk mendorong kebijakan pembangunan pertanian dan perikanan yang lebih berorientasi pada prinsip keberlanjutan. Dengan mengintegrasikan pendekatan ekonomi hijau dan biru, Kabupaten Tana Tidung tidak hanya dapat memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya alam dan memperluas lapangan kerja berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Tabel II.37

Capaian Sektor Pertanian
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

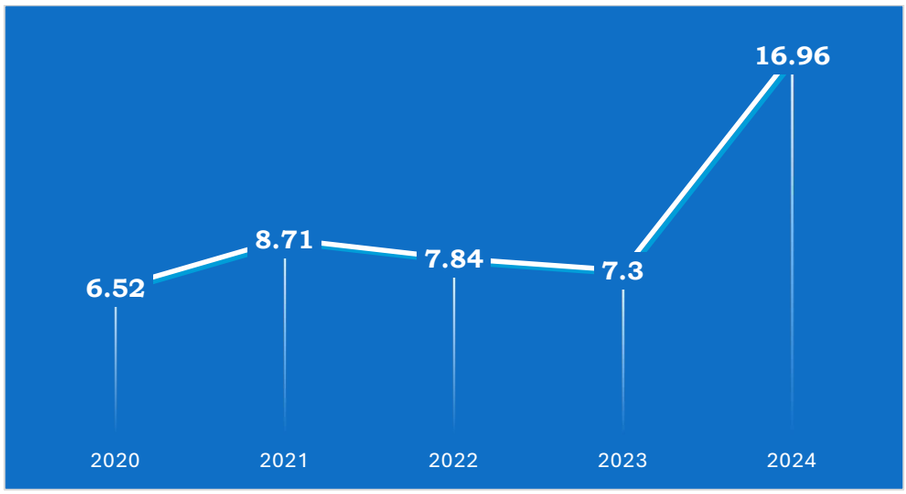
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	0,47	1,79	0,11	-0,09	4,47
Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	31,11	30,05	23,60	22,96	23,96
Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan.	567,1	499	292,03	439,079	406,96

Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung, 2025 ; Data Luas Baku Sawah (LBS) DPPP*

2.1.3.4. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital menjadi langkah strategis dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, yang mencakup pengembangan super platform, percepatan digitalisasi di berbagai sektor, serta produksi talenta digital yang adaptif dan inovatif. Transformasi ini tidak hanya relevan pada skala nasional, tetapi juga sangat penting untuk diterapkan di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Tana Tidung. Sebagai salah satu daerah yang tengah berkembang di Kalimantan Utara, Tana Tidung memiliki potensi besar untuk mempercepat kemajuan melalui pemanfaatan teknologi digital, baik dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, hingga peningkatan sektor ekonomi lokal. Dengan mengembangkan ekosistem digital yang inklusif dan memberdayakan masyarakat melalui peningkatan literasi serta keterampilan digital, Tana Tidung dapat meningkatkan daya saing daerah dan menciptakan SDM yang siap menghadapi tantangan global di era digital ini.

Gambar II.18
Laju Pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi
di Kabupaten Tana Tidung 2020-2024



Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung, 2025*

Laju pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi di Kabupaten Tana Tidung selama periode 2020–2024 menunjukkan tren positif, dengan peningkatan yang signifikan pada tahun terakhir. Pada tahun 2020, sektor ini tumbuh sebesar 6,52 persen, kemudian meningkat menjadi 8,71 persen pada tahun 2021.

Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan menjadi 7,84 persen pada 2022 dan 7,3 persen pada 2023, sektor ini menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 dengan pertumbuhan mencapai 16,96 persen. Peningkatan ini mengindikasikan adanya percepatan transformasi digital di daerah, baik melalui peningkatan infrastruktur telekomunikasi, perluasan jaringan internet, maupun meningkatnya aktivitas ekonomi digital dan layanan daring.

Pertumbuhan pada sektor lapangan usaha ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi layanan publik, pendidikan, serta adopsi teknologi oleh pelaku usaha dan masyarakat. Sektor informasi dan komunikasi menjadi salah satu sektor strategis dalam mendorong efisiensi, inovasi, dan konektivitas antarwilayah, khususnya di daerah pedalaman seperti Tana Tidung. Oleh karena itu, keberlanjutan pertumbuhan sektor ini perlu didukung melalui investasi infrastruktur digital yang merata, penguatan literasi digital masyarakat, serta penciptaan ekosistem ekonomi kreatif dan teknologi berbasis komunitas lokal.

2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi antara ekonomi lokal Kabupaten Tana Tidung dengan perekonomian nasional maupun global menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong pertumbuhan dan peningkatan produktivitas daerah. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem perekonomian yang saling terhubung dan mampu berkontribusi dalam rantai pasok, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan memperkuat keterlibatan Tana Tidung dalam arus perdagangan dan investasi yang lebih luas, diharapkan daya saing ekonomi daerah meningkat secara berkelanjutan.

Dampak dari arah pembangunan ini dapat diukur melalui sejumlah indikator, seperti meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencerminkan pertumbuhan investasi fisik, serta peningkatan ekspor barang dan jasa yang tercermin dalam net ekspor berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran. Indikator-indikator tersebut menjadi cerminan sejauh mana Kabupaten Tana Tidung mampu mengintegrasikan potensi lokalnya dengan dinamika ekonomi yang lebih luas untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi sektoral, laju pertumbuhan PMTB mengalami fluktuasi, dimulai dari 2,15 persen pada tahun 2020, sedikit melambat menjadi 1,87 persen pada 2021, lalu meningkat menjadi 3,28 persen pada 2022, sebesar 8,36 persen pada 2023, dan melambat kembali menjadi 4,91 persen pada 2024. Hal ini menandakan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan investasi fisik, terutama dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan alat produksi, tingkat pertumbuhan belum sepenuhnya stabil dan masih dipengaruhi oleh perubahan investasi publik maupun swasta.

Dari sisi kontribusi terhadap PDRB, PMTB menyumbang rata-rata sekitar 30 persen terhadap struktur PDRB, dengan angka tertinggi sebesar 34,65 persen pada 2020 dan terendah 25,48 persen pada 2022. Angka ini menunjukkan bahwa PMTB tetap menjadi salah satu komponen utama penggerak ekonomi daerah, namun fluktuasi kontribusinya mengindikasikan perlunya strategi penguatan

iklim investasi yang lebih konsisten dan terarah.

Sementara itu, Net Ekspor Barang dan Jasa memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB, yaitu di kisaran 42,73 persen hingga 58,45 persen sepanjang periode 2020–2024. Meski data pertumbuhan sektoral net ekspor tidak tersedia, kontribusi yang tinggi ini menegaskan peran dominan aktivitas perdagangan luar daerah, terutama ekspor komoditas unggulan, dalam mendongkrak ekonomi Tana Tidung. Puncaknya terjadi pada tahun 2022 dengan kontribusi mencapai 58,45 persen, dan tetap kuat pada tahun 2024 dengan 50,33 persen.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Tidung sangat dipengaruhi oleh dua sumber utama: ekspor dan investasi fisik. Oleh karena itu, strategi ke depan perlu difokuskan pada penguatan sektor ekspor berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif, khususnya untuk sektor strategis seperti pertanian, perikanan, industri kecil, dan pariwisata. Dengan demikian, PMTB dan net ekspor dapat terus menjadi motor pertumbuhan yang inklusif dan tahan terhadap tekanan eksternal.

Tabel II.38
Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,15	1,87	3,28	8,36	4,91
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Distribusi PDRB (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	34,65	31,20	25,48	28,03	30,22
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	42,73	48,82	58,45	54,88	50,33

Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung, 2025*

2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan, merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung. Pembangunan kawasan perkotaan diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis, khususnya di sektor jasa dan perdagangan, dengan tetap mengedepankan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan. Sementara itu, wilayah perdesaan didorong untuk tumbuh secara mandiri dengan mengoptimalkan potensi unggulan lokal yang dimiliki, seperti sumber daya alam, pertanian, dan kearifan lokal. Kedua wilayah ini, baik kota maupun desa, perlu mendapatkan perhatian yang seimbang dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, agar tercipta sinergi yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh di seluruh wilayah Tana Tidung.

Kawasan permukiman perkotaan adalah merupakan pusat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi perkotaan, jumlah penduduk yang padat menduduki lahan yang retatif sempit dan dinamika kehidupan yang retatif tinggi dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang

ada pada wilayah sekitarnya. Penggunaan lahan perkotaan (urban) termasuk didalamnya penggunaan lahan untuk perumahan/permukiman, kegiatan perdagangan/jasa, perusahaan/industri dan fasilitas sosial yang terletak di kota kabupaten maupun kota-kota kecamatan. Potensi permukiman perkotaan di Kabupaten Tanah Tidung seluas 8.550,21 Ha. Kawasan Permukiman Perkotaan Kabupaten Tana Tidung terdapat di Perkotaan Betayau, Perkotaan Bebatu, Perkotaan Muruk Rian, Perkotaan Sesayap, Perkotaan Sesayap Hilir dan Perkotaan Tana Lia.

Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada, kawasan dengan ciri dan karakteristik Sifat dan karakteristik lingkungan permukiman yang masih mencirikan tata dan lingkungan kehidupan rural. Luas penggunaan ruang untuk perumahan di lingkungan permukiman pedesaan ini adalah 500 m2. Interaksi pergerakan di lingkungan permukiman masih rendah dan sangat dipengaruhi oleh interaksi hubungan eksternal. Potensi luas permukiman pedesaan di Kabupaten Tanah Tidung sebesar 5.249,48 Ha. Rencana Kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Tana Tidung meliputi Pedesaan Betayau, Pedesaan Bebatu, Pedesaan Muruk Rian, Pedesaan Sesayap, Pedesaan Sesayap Hilir Dan Pedesaan Tana Lia

Tabel II.39

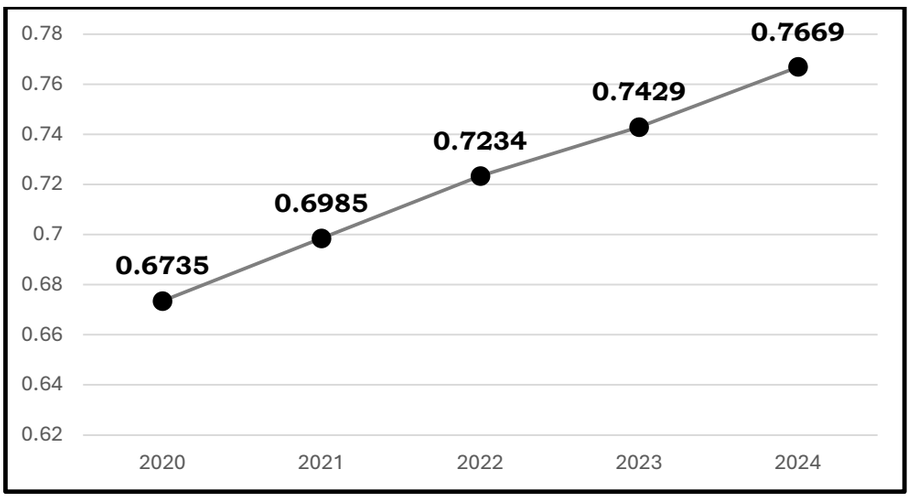
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau di Provinsi Kalimantan Utara 2023-2024 (Persen)

Kabupaten/Kota dan Provinsi	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	
	2023	2024
Malinau	65,16	61,50
Bulungan	69,46	65,55
Tana Tidung	82,30	87,58
Nunukan	65,65	66,49
Tarakan	78,25	74,70
Kalimantan Utara	71,43	69,65

Sumber: *BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025*

Kabupaten Tana Tidung menunjukkan peningkatan signifikan dalam akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, dari 82,30 persen di tahun 2023 menjadi 87,58 persen pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Provinsi Kalimantan Utara, capaian akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau Kabupaten Tana Tidung lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya bahkan secara rata-rata provinsi Kalimantan Utara yang mencapai 69,65 persen.

Gambar II.19
Indeks Desa Membangun Kabupaten Tana Tidung 2020-2024



Sumber: *Kementerian Desa dan PDTT, 2025*

Dalam melaksanakan pembangunan berbasis kawasan, kawasan perkotaan perlu difungsikan sebagai simpul distribusi layanan, pusat perdagangan, jasa, dan inovasi, sedangkan kawasan perdesaan difokuskan sebagai basis produksi, ketahanan pangan, dan keberlanjutan sumber daya alam. Kesinambungan antara kawasan ini sangat penting untuk memastikan distribusi manfaat pembangunan yang adil serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Implementasi hal tersebut menjadikan capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Tana Tidung memiliki tren positif dan konsisten meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai IDM tercatat sebesar 0,6735, kemudian naik menjadi 0,6985 di tahun 2021. Kenaikan ini terus berlanjut dengan nilai 0,7234 di tahun 2022 dan 0,7429 di tahun 2023. Puncaknya, pada tahun 2024, IDM Kabupaten Tana Tidung mencapai 0,7669.

Peningkatan IDM ini mencerminkan adanya perbaikan nyata dalam dimensi pembangunan desa, yang mencakup aspek ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Peningkatan IDM ini juga mengindikasikan bahwa intervensi pembangunan desa, baik melalui program Dana Desa, peningkatan kapasitas aparatur, maupun pembangunan infrastruktur dasar, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan desa-desa di Tana Tidung.

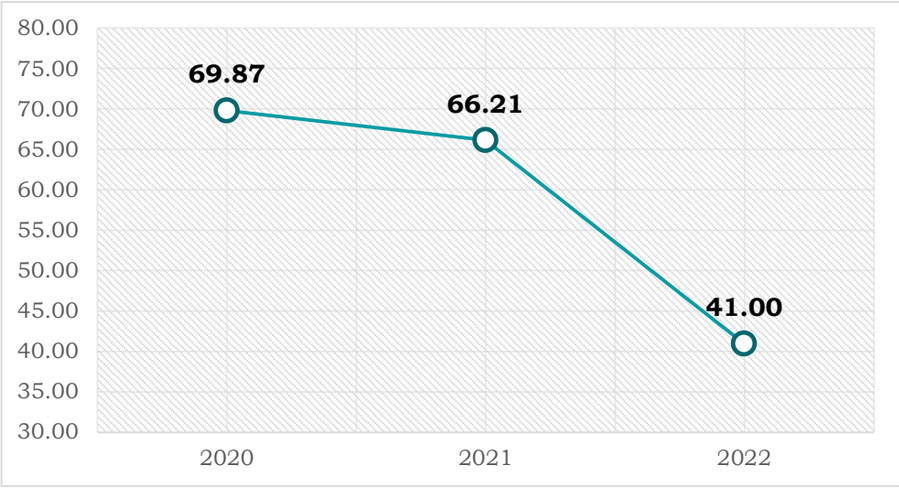
Ke depan, pembangunan kawasan perdesaan perlu terus diperkuat sebagai bagian integral dari sistem wilayah yang lebih luas, dengan pendekatan yang mendorong integrasi antara kawasan perdesaan dan perkotaan dalam satu kesatuan sistem pengembangan wilayah. Salah satunya dengan menginternalisasi RTRW dalam dokumen perencanaan (RPJMD), khususnya integrasi fungsi ruang dengan prioritas pembangunan sektoral. Arah kebijakan ini harus diterjemahkan ke dalam strategi yang mampu meningkatkan pembangunan yang terpadu,

inklusif, dan berkeadilan wilayah, pemerataan infrastruktur dasar, penguatan kapasitas ekonomi lokal, peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah, baik di desa maupun kota, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperkuat keterkaitan antara pusat-pusat pertumbuhan di perkotaan.

Infrastruktur merupakan semua fasilitas berbentuk fisik maupun non fisik yang dibangun guna mendukung kegiatan masyarakat. Infrastruktur berkaitan dengan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras maupun perangkat lunak. Pembangunan infrastruktur diperlukan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan struktur dasar agar pembangunan daerah tercapai.

Dalam menyediakan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Tana Tidung berupaya semaksimal mungkin untuk memuaskan seluruh masyarakat secara merata dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya. Berbagai layanan dihadirkan demi mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan kualitas SDM yang tumbuh dan inklusif. Dalah satu indikator yang mampu mewakili pelaksanaan pelayanan infrastruktur pembangunan adalah Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur. Adapun capaian Kabupaten Tana Tidung masih memerlukan banyak perbaikan kinerja pelayanan publik dimana dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan indeks kualitas layanan infrastruktur hingga mencapai 41,00 pada tahun 2022.

Gambar II.20
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2022



Sumber: *Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung, 2022*

Infrastruktur di bidang pendidikan di Kabupaten Tana Tidung selama tahun 2021-2024 dengan indikator jumlah sekolah mengalami peningkatan. Jumlah guru di kabupaten Tana Tidung pada tahun 2021-2024 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun jumlah murid per tahun 2021-2024 secara umum juga mengalami angka yang terus meningkat. Hal ini didukung oleh upaya peningkatan pemerataan pembangunan pendidikan dari segi fisik untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Tabel II.40
Kondisi Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2021-2024

Indikator	SD/Sederajat				SMP/Sederajat				SMA/Sederajat			
	2021	2022	2023	2024*	2021	2022	2023	2024*	2021	2022	2023	2024*
Jumlah Sekolah	29	30	31	30	10	10	11	10	3	4	5	6
Jumlah Guru	346	349	379	380	172	177	198	186	77	86	109	111
Jumlah Murid	3.234	3.330	4.081	3.487	1.216	1.264	1.376	1.458	925	962	1046	1.051

Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2022-2025*
**tidak termasuk data sekolah dibawah naungan Kementerian Agama*

Berbeda dengan infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan cenderung sama dari tahun 2020-2022, namun terjadi peningkatan jumlah rumah sakit dan juga jumlah tenaga kesehatan di tahun 2023. Seperti pada tabel di bawah, jumlah rumah sakit dari tahun 2020-2022 hanya mempunyai 1 rumah sakit di Kabupaten dan pada tahun 2023 Kabupaten Tana Tidung memiliki 2 unit rumah sakit. Jumlah puskesmas di Kabupaten Tana Tidung sebanyak lima yang memberi pelayanan kesehatan terhadap lima kecamatan.

Tabel II.41
Kondisi Infrastruktur Kesehatan di Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	2	2
	Jumlah Rumah Sakit bersalin	0	0	0	0	0
	Jumlah Posyandu	36	36	36	36	36
	Jumlah Puskesmas	5	5	5	5	5
	Jumlah Klinik	-	-	-	-	-
	Jumlah Puskesmas Pembantu	17	17	-	-	-
2	Jumlah Tenaga Kesehatan	156	156	290	405	373
	Jumlah Dokter	7	7	9	27	NA
	Jumlah Bidan	52	52	87	113	130
	Jumlah Perawat	87	87	141	176	194

Sumber: *BPS Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, 2021-2025*

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro di Kabupaten Tana Tidung diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal, serta mendukung stabilitas moneter dan sektor keuangan daerah dalam kerangka kebijakan yang pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Stabilitas ini menjadi fondasi penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah. Dengan kondisi ekonomi yang terjaga, seperti inflasi yang rendah dan terkendali, pengelolaan fiskal yang sehat, serta kestabilan perdagangan dan nilai tukar di tingkat lokal, Pemerintah

Kabupaten Tana Tidung memiliki ruang yang lebih leluasa dalam merancang dan menjalankan kebijakan pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan. Kondisi tersebut turut menciptakan iklim investasi yang menarik, meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha dan investor lokal maupun eksternal, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah.

Di sisi lain, rasio pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penerimaan pajak daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi di Tana Tidung. Rasio ini mencerminkan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap total nilai tambah ekonomi yang dihasilkan di wilayah tersebut. Semakin tinggi rasio ini, semakin kuat pula kapasitas fiskal Kabupaten Tana Tidung untuk membiayai program prioritas pembangunan seperti peningkatan infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

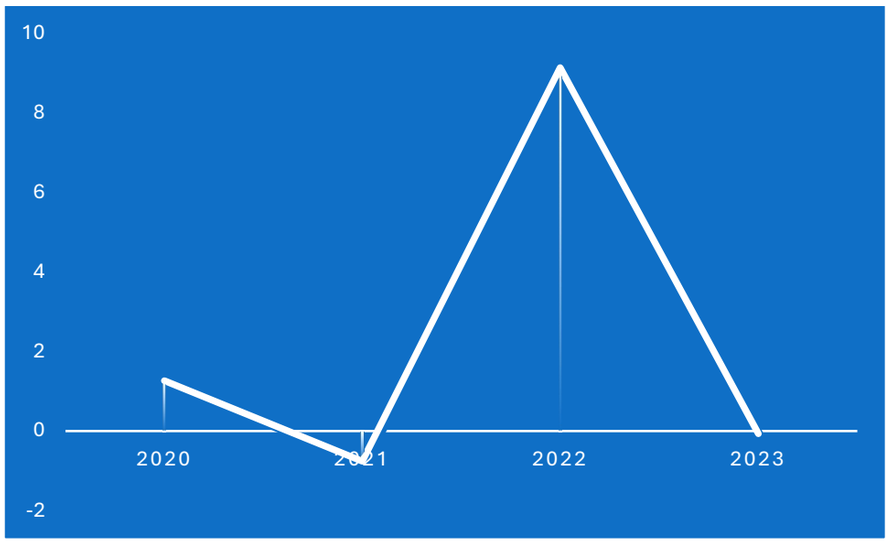
Tabel II.42
Rasio Pajak terhadap PDRB Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah (Juta Rp)	3.440,10	3.767,58	4.351,34	9.532,11	7.778,41
PDRB adh Berlaku (Miliar Rp)	5.873,23	6.734,16	8.625,73	9.021,14	9.297,34
Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	0,06	0,06	0,05	0,11	0,08

Sumber: *Bappedalitbang Kabupaten Tana Tidung, 2025*

Selama periode 2020 hingga 2024, penerimaan pajak daerah Kabupaten Tana Tidung mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan, dari Rp3,44 miliar pada 2020 menjadi puncaknya Rp9,53 miliar pada 2023, sebelum turun menjadi Rp7,78 miliar di tahun 2024. Secara umum, kenaikan tersebut berdampak pada rasio pajak terhadap PDRB yang meningkat dari 0,06 persen pada tahun 2020 menjadi 0,08 persen pada tahun 2024, meskipun sempat mencapai titik tertinggi di tahun 2023 sebesar 0,11 persen. Meskipun meningkat, namun capaian ini masih relatif rendah dan fluktuatif, dimana rasio pajak terhadap PDRB berada pada kisaran 0,05 persen hingga 0,11 persen, yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap total aktivitas ekonomi masih terbatas dan berpotensi untuk dioptimalkan.

Gambar II.21
Indikator Presentasi Peningkatan Invest di Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024



Sumber : Data realisasi investasi bidang Penanaman Modal DPMPTSP

Indikator persentase peningkatan investasi di Kabupaten Tana Tidung selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, investasi tumbuh positif sebesar 1,26 persen, namun kemudian menurun cukup tajam menjadi -0,76 persen di 2021. Kondisi membaik pada 2022 dengan lonjakan signifikan hingga 9,14 persen, mencerminkan adanya daya tarik investasi yang meningkat pada tahun tersebut. Meski demikian, tren positif tersebut tidak berlanjut karena pada 2023 kembali mengalami kontraksi tipis sebesar -0,07 persen, dan berlanjut turun lagi ke -0,35 persen pada 2024. Perkembangan ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Tana Tidung masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi pertumbuhan, sehingga diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk menciptakan stabilitas dan daya saing investasi jangka panjang.

2.1.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum, mencakup segala jenis layanan, baik berupa barang publik maupun jasa publik, yang merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

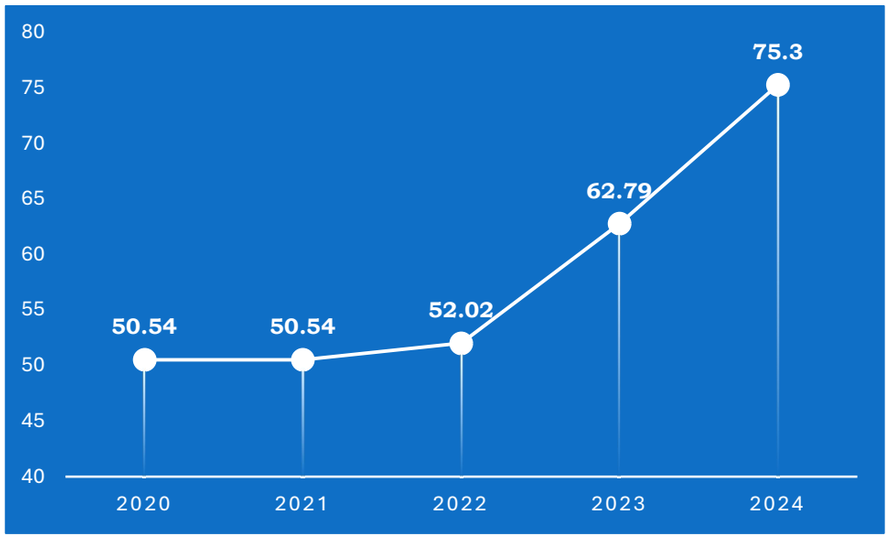
Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum yang berlaku.

A. Reformasi Birokrasi

Implementasi reformasi birokrasi merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Beberapa yang perlu dilaksanakan dalam

mewujudkan reformasi birokrasi yakni Penyederhanaan prosedur administrasi, pengurangan birokrasi yang tidak perlu, dan penyusunan peraturan yang lebih sederhana dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat pelayanan publik. Selain itu, perlu adanya keterbukaan akses informasi publik, termasuk data tentang anggaran, kebijakan, dan kinerja pemerintah, adalah langkah penting dalam memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Poin penting lainnya seperti manajemen ASN, budaya organisasi hingga pengendalian korupsi juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Kabupaten Tana Tidung sudah berupaya mewujudkan reformasi birokrasi secara optimal. Adapun pencapaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Tana Tidung mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai angka 75,30 pada tahun 2024, setelah sebelumnya memiliki capaian 62,79 pada tahun 2023 dengan kategori B dan tahun 2022 sebesar 52,02 dengan kategori CC. Peningkatan ini cukup signifikan yang mengindikasikan berjalannya pelaksanaan pemerintahan yang baik dan budaya kerja positif dalam pelayanan publik, termasuk didalamnya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan kenaikan nilai SAKIP menjadi 71,10 pada tahun 2024.

Gambar II.22
Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024



Sumber: *Bappedalitbang Kabupaten Tana Tidung, 2025*

B. Pelayanan Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Tana Tidung, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tana Tidung memperoleh hasil dari penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia dengan nilai 89,64 dengan kategori A. Selain itu, terdapat pula nilai Indeks Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB dimana skor Kabupaten Tana Tidung mencapai 3,81 yang meningkat dari tahun sebelumnya (tahun 2023 sebesar 2,84).

Tabel II.43
Uraian Indikator Pelayanan Publik
di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

Uraian Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE daerah	1,15	1,15	1,8	2,34	2,84
Persentase layanan publik yang terdigitalisasi	-	-	-	86.67%	51.85%
Tingkat literasi digital Masyarakat-ASN	-	-	-	11,72	49,45
Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	81.58	83.77	81.7	85.91	85.3

Sumber : Diskominfo

Dari sisi peningkatan digitalisasi layanan pemerintah maupun untuk kinerja internal, dapat terlihat dari capaian Indeks SPBE (Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). SPBE merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun capaian Indeks SPBE Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2023 mencapai 2,34 dan meningkat menjadi 2,84 pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan terus berkembangnya digitalisasi dalam pengelolaan pembangunan, khususnya pada pelayanan publik berbasis IT kepada masyarakat Tana Tidung.

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Tana Tidung periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif baik dengan kecenderungan meningkat meskipun sempat berfluktuasi. Pada tahun 2020, nilai indeks tercatat sebesar 81,58, kemudian naik menjadi 83,77 pada 2021. Namun, di tahun 2022 sedikit menurun ke angka 81,70, sebelum kembali melonjak signifikan menjadi 85,91 pada 2023. Pada 2024, nilainya sedikit terkoreksi menjadi 85,30, namun masih berada di atas capaian awal periode. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang mampu menjaga tingkat kepuasan masyarakat di level yang cukup tinggi.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Angka kriminalitas, Indikator angka kriminalitas yang tertangani digunakan sebagai langkah mengidentifikasikan permasalahan kesenjangan kesejahteraan yang dilihat dari angka kriminal. Di bawah ini disajikan jumlah kejahatan yang dilaporka pada Kepolisian Resort *Departmental* di Kalimantan Utara.

Tabel II.44
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan/*Crime Total*
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2024

Kepolisian Resort *Departmental*	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan		
	2022	2023	2024
Kabupaten Malinau	86	80	157

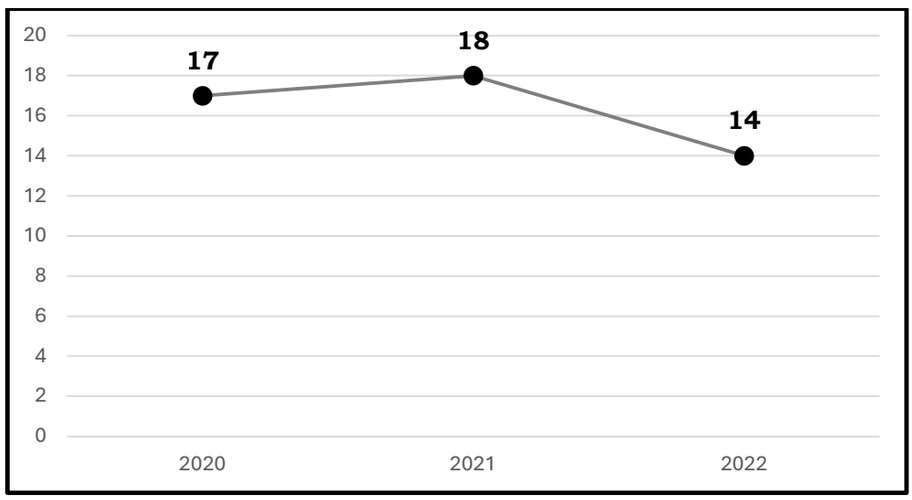
Kabupaten Bulungan	193	248	313
Kabupaten Tana Tidung	-	25	39
Kabupaten Nunukan	358	445	486
Kota Tarakan	400	521	596
Kalimantan Utara	**1.138**	**1.403**	**1.591**

Sumber : Kalimantan Utara Dalam Angka, 2025

Jumlah kejahatan yang dilaporkan di Provinsi Kalimantan Utara periode 2022–2024 menunjukkan tren peningkatan di hampir seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Tana Tidung. Meski pada 2022 belum terdapat data yang tercatat, pada 2023 jumlah kejahatan yang dilaporkan di Tana Tidung mencapai 39 kasus pada 2024. Meskipun demikian, pelaporan kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Tana Tidung relatif kecil jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini mengindikasikan keamanan di Kabupaten Tana Tidung sudah cukup baik. Namun, tetap butuh perhatian lebih dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan data di bawah, dalam beberapa tahun terakhir angka penanganan tindak kriminal di Kabupaten Tana Tidung cenderung menurun. Berdasarkan data Polsek Sesayap yang telah dipublikasikan BPS dalam Kabupaten Tana Tidung Dalam Angka, angka kriminalitas di Kabupaten Tana Tidung cenderung menurun dimana pada tahun 2020 sebanyak 17 menjadi 14 pada tahun 2022.

Gambar II.23
Jumlah Kriminalitas Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2022

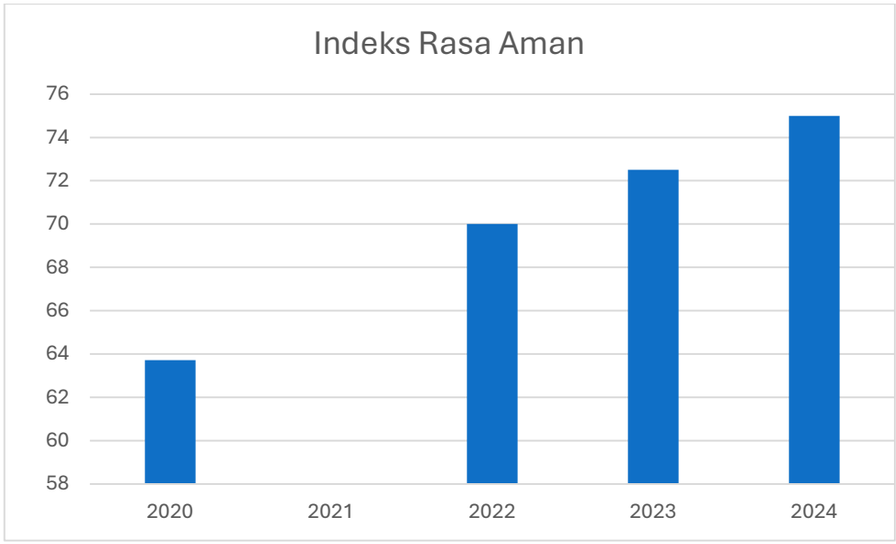


Sumber: *RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025*

Salah satu indikator dalam melihat keamanan adalah Indeks Rasa Aman. Indeks Rasa Aman merupakan indikator yang mengukur tingkat persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap kondisi keamanan di lingkungan tempat

tinggalnya, baik dari ancaman kejahatan, gangguan ketertiban umum, maupun risiko bencana dan konflik sosial. Indeks Rasa Aman di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020 nilainya tercatat 63,72, meskipun pada 2021 tidak terdapat angka yang tercatat. Namun setelah itu mengalami perbaikan dengan capaian 70 pada 2022, meningkat lagi menjadi 72,5 pada 2023, dan mencapai angka tertinggi 75 pada 2024. Perkembangan ini menggambarkan adanya perbaikan kondisi maupun persepsi masyarakat terhadap keamanan, yang seiring waktu semakin membaik dan menguatkan rasa aman di wilayah Kabupaten Tana Tidung.

Gambar II.24
Indeks Rasa Aman Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024



Sumber: *Bappeda Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025*

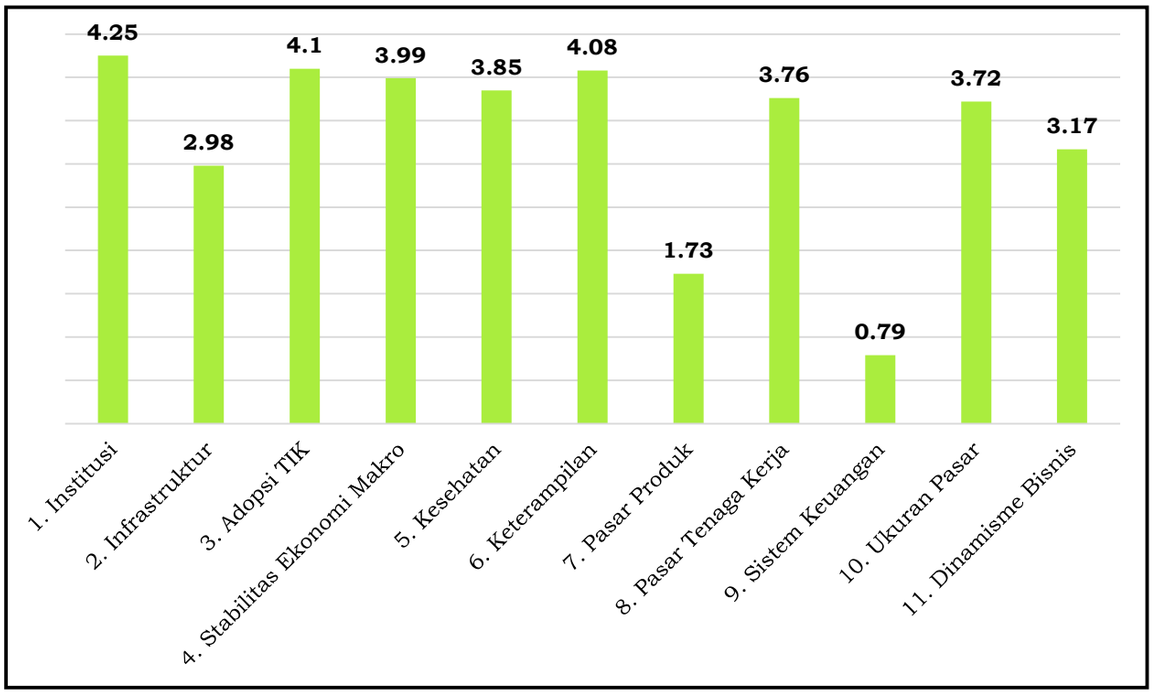
2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Tana Tidung tahun 2024 mencatat skor rata-rata 3,15, mencerminkan daya saing yang masih memerlukan penguatan di beberapa aspek. Pilar dengan skor tertinggi adalah Institusi (4,25), diikuti oleh Adopsi TIK (4,10) dan Keterampilan (4,08), yang menunjukkan kinerja positif di bidang kelembagaan, teknologi informasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, tantangan besar terlihat pada pilar Sistem Keuangan (0,79), Kapabilitas Inovasi (1,31), dan Pasar Produk (1,73), yang memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan daya saing. Upaya strategis yang berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat pilar-pilar dengan skor rendah, sambil mempertahankan keunggulan pada pilar dengan performa tinggi, guna

mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih kompetitif.

Gambar II.30
Pilar Penyusun Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024



Sumber: *Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025*

2.1.4.4 Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.

Dalam implementasi pelayanan umum kepada masyarakat, terdapat berbagai urusan pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Urusan pemerintahan memiliki indikator kinerja pembangunan daerah yang merupakan rekapitulasi dari seluruh capaian pembangunan bidang urusan pembangunan untuk menjadi tolak ukur secara rinci setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berikut indikator kinerja daerah yang merupakan gambaran pembangunan Kabupaten Tana Tidung berdasarkan hasil capaian kinerja pembangunan dalam lima tahun terakhir.

Tabel II.45
Indikator Kinerja Kunci Menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar							
a) Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	60,11	53,78	86,12	87,47	80,85
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	%	87,20	84,88	91,57	87,49	91,60

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	dasar						
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	67,52	67,05	81,44	79,66	80,02
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	0,29	86,67	7,16	7,15	24,7
b) Kesehatan							
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	0,20	0,21	0,24	1,98	2,1
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	0	0	100	100,00	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	92,13	89,42	93,24	90,00	53,43
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	84,98	85,85	88,68	85,00	67,81
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	91,15	85,94	94,35	88,00	65,47
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	38,06	50,20	87,01	100,00	86,2
7	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	52,89	97,77	100,00	94,68
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	6,79	15,41	54,41	74,00	63,53
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	39,72	46,33	99,92	100,00	92,25
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	5,32	10,39	32,62	63,00	73,63
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	20,78	100	86,69	100,00	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	17,30	32,73	52,08	100,00	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	21,57	100	29,04	81,00	100
I4	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	21,91	21,91	100	89,00	100
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	58,57	21,91	44,63	21,91	44,63
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	100	100	100	100,00	100

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	9,67	9,67	9,67	8,2200	8,22
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	48,69	21,3	71,85	69,2800	45,38
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	58,28	59,93	64,38	74,41	69,41
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	90,78	92,9	93,48	93,65	91,37
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	55,3	55,31	61,77	55,15	55,15
8	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	21,77	21,78	28,01	32,50	38,87
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100,00	100
d) Perumahan Rakyat							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	0	0	0	0,00	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	0	0	0	0,00	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	71,93	35,15	25,94	2,00	6,37
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	9,51	11,5	15,20	39,40	41,85
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	63,04	63,1	100	100,00	59,1
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	91	100	100	100,00	100
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100,00	42,86
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	25.352	243	243	782	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	120	243	243	782	5,38
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	28	0	0	0,00	0
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	85,71	83,33	83,33	0,00	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit		13,5	13,66	13,66	12,86
f) Sosial							
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang	%		100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)						
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	120	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar							
a) Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0	0	26,67	25,00	50
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0	0,77	1,42	2,95	5,21
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	0	27,15	23,97	28,53	88.778.594.771,242
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	0	73,08	100	100,00	100
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	72,16	100	86,03	63,77	48,88
g) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,03	14,03	17,21	15,91	12,29
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	35,75	50,42	100	100,00	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	4	19,55	15,26	22,02	70,06
h) Pangan							
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	37,08	11,8	0	0	143,05
i) Pertanahan							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0	100	100	100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	85	100	100	100	98,65
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	0	100	100	100	100
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	0	0	0	0
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0	0	0	100	0
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	77	100	100	100	100
j) Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan	-	72,97	70,38	71,8	76,16	71,55

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Hidup (IKLH) Kab/Kota						
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	80,56	73,28	67,89	87,78	67,08
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	60,46	31,7	21,95		0
k) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	perekaman KTP elektronik	%	99,46	100	98,37	97,51	96,9
2	persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	70,48	79,39	76,94	83,51	95
3	kepemilikan akta kelahiran	%	64,48	94,92	90,20	85,21	99,72
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	%	9	24,4	17,24	17,24	35,71
l) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	0	100	0	0	0
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0	5,88	28,57	38,89	0
m) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana							
1	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,2	2	1,9	2,00	1,7
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	61,43	62,89	11,14	70,67	69,16
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	18,56	17,6	19,10	10,39	6,29
n) Perhubungan							
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	-	26,64	26,64	0,26	0,26	0,27
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	-	33	0	0,12	0,12	0,12
o) Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	25,71	52,94	52,94	62,06	64,7
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	86,6	86,67	86,67	45,16
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	69,7	69,56	54,39	66,81	64,40
p) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	6,97	9,61	18,52	16,00	35,29
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%		28,36	29,94	8,30	18,47
q) Penanaman Modal							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	93,83	76,18	90,07	78,00	11,17
r) Kepemudaan dan Olahraga							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%		4,28	5,98	2,80	1,82
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan	%	49,27	1,73	4,20	12,65	6,11

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	organisasi sosial kemasyarakatan						
3	Peningkatan prestasi olahraga	medali	5	0	160	15,00	0
s) Statistik							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	91,17	93,10	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	91,17	93,10	100
t) Persandian							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	0	67,5		90,00	54,73
u) Kebudayaan							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	11,76	13,14	55		39,28
v) Perpustakaan							
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	-	68	0	56,75	80,75	80,54
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	68	0,13	11,45	72,89	49,447
w) Kearsipan							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-	70,89	0	50	70,00	76,47
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	88,98	0	0	60,00	0
Urusan Pilihan							
a) Kelautan dan Perikanan							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	8.497,694	8.864,21	8.186,795	8.847,98	8.918,792
b) Pariwisata							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	12	0	100	-0,20	-50
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	-46,52	-1,76	11,68	421,98	-16,5
3	Tingkat hunian akomodasi	%	2,62	56,75	0,6	3,95	42,16
4	Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku	%	6,34	0,002	0,173	0,174	0,194
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	10,89	0,08	10,29	8,70	10,45
c) Pertanian							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	3	260,04	253,31	3,40	263,84
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	0	0	20,27	14,00	17,04
d) Kehutanan							
e) Energi dan Sumber Daya Mineral							
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang	%		0			0

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	memiliki izin di kab/kota						
f) Perdagangan							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	3,74	3,73	0	0,00	0
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%		65,58	96	26,07	11,81
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	27	29	61,5	28,06	63,92
g) Perindustrian							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	15,16	20,64	4,72	5,92	5,32
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%		0	25	100,00	181,06
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%		0	0	0,00	0
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%		0	0	0,00	0
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	%		0	0	0,00	0
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	100	65	90	90,00	25
h) Transmigrasi							
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	%	0	0			
2	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	%	0	0			
3	Jumlah satuan permukiman yang dibina	%	4	4			
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
a) Perencanaan dan Keuangan							
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	31,83	21,93	23,09	13,44	12,1
2	Rasio PAD	%		0,52	2,47	2,58	3,34
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	2,953	2,9	3,23	3,2	3,343
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	level 2 plus	level 2 plus	level 3	3,00	3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	74,16	68,65	65,91	57,68	57,1
6	Opini Laporan Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP	6 WTP (2018-

No	IKK Outcome	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
							2023)
b) Pengadaan							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	3,77	2,38	1,83
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	3,1	31,17	47,09	55,21	30,70
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	87,33	29,40	60,83	44,38	59,46
c) Kepegawaian							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	52,57	80	80,20	81,63	11,68
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	ASN	2,89	5,42	15,19	16,63	83,25
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	2,89	5,75	27,88	23,70	17,21
d) Manajemen Keuangan							
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani APBD	%	90,94	10	5,28	99,2	2,39
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	46,07	62,30	7,59	64,94	2,58
3	Manajemen Aset	-	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana		ya
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	5,01	4,85	12,16	21,62	22,82
e) Transparansi dan Partisipasi Publik							
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%		90,69	94,98	95,80	84,36
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%		58,33	66,67	66,67	100

Sumber : RKPD Kabupaten Tana Tidung, 2025

2.1.4.5 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan menjadi hak setiap warga negara untuk diperoleh secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian, tetapi mengutamakan pendekatan yang berfokus pada: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif pada standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bantaeng disajikan pada tabel berikut ini.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 secara resmi mencabut Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 dan menetapkan pedoman teknis baru terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan yang wajib diterapkan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai bagian dari layanan kesehatan dasar yang harus diperoleh setiap warga negara secara minimal. Aturan ini mencakup definisi SPM Kesehatan meliputi jenis dan mutu pelayanan dasar serta secara tegas mengatur bahwa pemerintah daerah wajib memenuhi mutu pelayanan dasar tersebut melalui standar teknis berupa: (1) jumlah dan kualitas barang/jasa, (2) jumlah dan kualitas sumber daya manusia, serta (3) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar, dan diarahkan untuk mencapai pemenuhan 100 % mutu layanan setiap tahunnya. Dengan diberlakukannya peraturan ini, pemerintah daerah diberi waktu maksimal tiga bulan sejak diundangkan untuk menyesuaikan pemenuhan mutu SPM Kesehatan, dan selanjutnya pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi dilakukan secara berjenjang dan sistemik melalui sistem informasi nasional yang terintegrasi, guna memastikan ketersediaan layanan kesehatan dasar secara menyeluruh dan berkualitas.

Tabel II.46

Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

No	Mutu Layanan SPM	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pendidikan							
1	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	88,44	53,78	86,12	100	89,4
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar jenjang SD/MI	%	87,02	79,61	98,18	100	99,86
3	Precentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar jenjang SMP/MTs	%	93,88	79,61	98,18	100	99,16
4	Precentase Pendidikan Kesetaraan (Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)	%	0,25	86,67	86,67	100	30,77
Kesehatan							
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	92	89,42	93,24	72,38	62,2
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	84,90	85,03	88,68	68,32	74,25
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	91,20	85,94	94,35	70,21	72,37
4	Pelayanan Kesehatan Balita	%	38,10	50,2	84,01	80	88,96
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	52,89	97,77	80	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	39,70	91,04	99,92	80	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	6,80	15,41	54,41	59,02	64,54
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	5,30	10,39	32,62	50,68	64,76
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	20,8	98,5	86,69	80	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	17,3	32,73	52,08	80	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	21,6	62,3	29,04	64,7	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV	%	22,0	96,8	100	70,94	100
Sosial							
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah WN	0	100	100	110	127
2	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0	100	100	80	100
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah WN	0	100	100	38	1
4	Persentase (%) annak terlantar yang terpenuhi	%	0	100	100	80	100

No	Mutu Layanan SPM	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	kebutuhan dasarnya di luar panti						
5	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah WN	0	100	100	581	1202
6	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0	100	100	80	100
7	Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandang pengemisterlantar di luar panti	Jumlah WN	0	100	100	5	1
8	Persentase (%) gelandang pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0	100	100	80	100
9	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten	Jumlah WN	3	100	100	169	50
10	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelahtanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	60	100	100	80	91,67
Bidang Pekerjaan Umum							
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum (SPAM) Sehari-hari	%	100	34,4	57,97	100	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	%	0	95,7	98,41	100	100
Bidang Perumahan Rakyat							
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	%	0	0	0	100	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	%	90	0	0	100	100
TRANTIBUMLINMAS							
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	%	0	91,60	96,05	100	87,78
2	Pelayanan informasi rawan bencana	%	0	79,38	64,79	90	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0	100	79,72	100	95
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	0	100	-	20	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	0	82,30	84,41	74,47	97,08

Sumber : Bappedalitbang KTT

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang memainkan peran penting dalam menyediakan layanan dasar kepada penduduknya dan mendorong pembangunan ekonomi di tingkat lokal. Pemerintah daerah membuat rencana keuangan jangka menengah dan anggaran tahunan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran. Proses perencanaan dan anggaran ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dimanfaatkan dengan efisien dan efektif. Untuk itu prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk memberikan laporan keuangan yang jelas dan terbuka kepada publik, serta memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dengan kata lain keuangan daerah tidak hanya merupakan aspek administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mereka dengan hati-hati dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan. Dalam mengelola keuangan daerah kita perlu memperhatikan berbagai kondisi yang mampu mempengaruhi keuangan daerah khususnya perkembangan kondisi ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan daerah. Gejolak global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat di hampir semua negara. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menciptakan krisis multidimensi dan menyebabkan kontraksi ekonomi global sebesar 2,8 persen di 2020 yang merupakan resesi terburuk sejak the Great Depression 1930-an.

Memasuki tahun 2021, ekonomi global mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akibat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi yang direspons dengan kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Konflik antara Rusia dan Ukraina di awal tahun 2022 semakin memperparah disrupsi sisi suplai, terutama pangan dan energi. Harga-harga komoditas global melonjak tajam sehingga menyebabkan semakin tingginya inflasi di banyak negara hingga mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Risiko kerawanan pangan dan energi juga meningkat di banyak negara khususnya negara berpendapatan rendah.

Pengetatan kebijakan moneter menjadi semakin agresif, khususnya di Amerika Serikat (AS), yang menyebabkan semakin ketatnya likuiditas global, meningkatnya biaya utang serta gejolak pasar keuangan di banyak negara berkembang. Sebagai akibatnya, pemulihan ekonomi global mengalami perlambatan di tahun 2022 yang diperkirakan hanya tumbuh 3,4 persen, jauh dari perkiraan awal (Januari 2022) yang sebesar 4,4 persen. Lebih parah lagi dalam laporan WEO edisi Januari 2024, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya sebesar 3,1 persen pada 2023 dan 2024. Sedangkan World Bank memprediksi perekonomian global tahun 2024 hanya tumbuh 2,4 persen di mana meskipun inflasi mengalami moderasi atau penurunan, namun

belum serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir. Dari sisi domestik, inflasi yang diperkirakan relatif stabil, dampak dari penyelenggaraan Pemilu 2024 terhadap konsumsi masyarakat maupun konsumsi Pemerintah, serta kebijakan sektor perumahan yang sudah digulirkan Pemerintah pada triwulan IV-2023 akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan 2024. Perekonomian domestik diperkirakan masih tumbuh kuat pada 2024 sebesar 5,2%.

Dalam skala lokal Kabupaten Tana Tidung perekonomian cukup didominasi oleh sektor Perkebunan dan Pertambangan. Di sektor Perkebunan, kelapa sawit menjadi pendorong terbesar sektor tersebut, sementara pertambangan didorong oleh ekstraksi batu bara. Ketergantungan pada sektor perkebunan dan pertambangan dapat memicu kerentanan atas fluktuasi harga komoditas global. Untuk menjaga keberlanjutan ekonomi Kabupaten Tana Tidung (KTT) diperlukan diversifikasi ekonomi dan pengembangan infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk itu arah kebijakan Belanja perlu ditekankan pada dua hal tersebut.

2.2.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan performa keuangan Daerah selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisisnya mencakup berbagai aspek dari laporan keuangan Daerah yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan finansial dan kinerja entitas keuangan Daerah tersebut selama periode waktu 5 (lima) tahun. Kinerja keuangan masa lalu dievaluasi dengan menganalisis data-data historis seperti laporan realisasi keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dari data tersebut, berbagai metrik keuangan dapat dihitung dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang kinerja finansial entitas selama periode waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan kemandirian pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat kemandirian fiskal mengacu pada tingkat kemandirian atau independensi pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan dan anggarannya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar khususnya provinsi dan nasional.

Dalam konteks pemerintahan daerah, ini sering kali mengacu pada kemampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber dalam Daerah seperti pajak, cukai, dan sumber-sumber lainnya, sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber pendapatan luar lainnya. Semakin tinggi derajat kemandirian fiskal maka semakin mandiri atau independen keuangan mereka. Hal ini dianggap penting karena tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dapat memberikan stabilitas dan keberlanjutan finansial bagi Pemerintahan Daerah, mengurangi risiko ketergantungan pada pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang berbeda. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.40
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tana Tidung berdasarkan DOFD terjadi penurunan dari 2,81% (2019) menjadi 1,64% (2020), hal ini terjadi karena adanya pademi covid-19. Kemudian dalam 4 (empat) tahun terakhir (2020-2024) relatif mengalami tren positif yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah semakin baik namun tidak signifikan. Di tahun 2020 DOFD Kabupaten Tana Tidung mencapai 1,64% dan terus meningkat hingga mencapai 3,15% di tahun 2024. Dinamika fluktuasi peningkatan DOFD tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 2020-2024 yang kurang signifikan. Walaupun dapat dikatakan bahwa kemandirian fiskal Daerah Kab. Tana Tidung terus bergerak positif tetapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) masih berada di kategori 'sangat kurang'. Agar tingkat kemandirian fiskal kedepan bisa terus meningkat maka Pemerintah Kabupaten Tana Tidung perlu menjaga konsistensi tumbuhnya PAD dengan terus menggali sumber-sumber potensi keuangan daerahnya dan menekankan kebijakan belanja yang berorientasi peningkatan PAD. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Tana Tidung periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel II.41
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Tana Tidung, Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
1	2020	11.941.721.403	730.359.538.938	1,64
2	2021	19.857.987.031	772.036.806.642	2,57
3	2022	20.063.962.145	811.815.437.246	2,47
4	2023	33.956.641.613	1.315.713.014.762	2,58
5	2024	42.168.541.355	1.337.636.280.433	3,15
	Rata-Rata	25.597.770.710	993.512.215.604	2,58

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjalankan anggaran yang telah disetujui dalam APBD. Kinerja ini dapat dinilai dari beberapa aspek, termasuk efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan dana

publik. Kinerja pelaksanaan APBD yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola keuangan publik, serta mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk itu kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tana Tidung akan dilihat dari kinerja Pendapatan Daerah, kinerja Belanja Daerah, dan kinerja Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Pendapatan Daerah

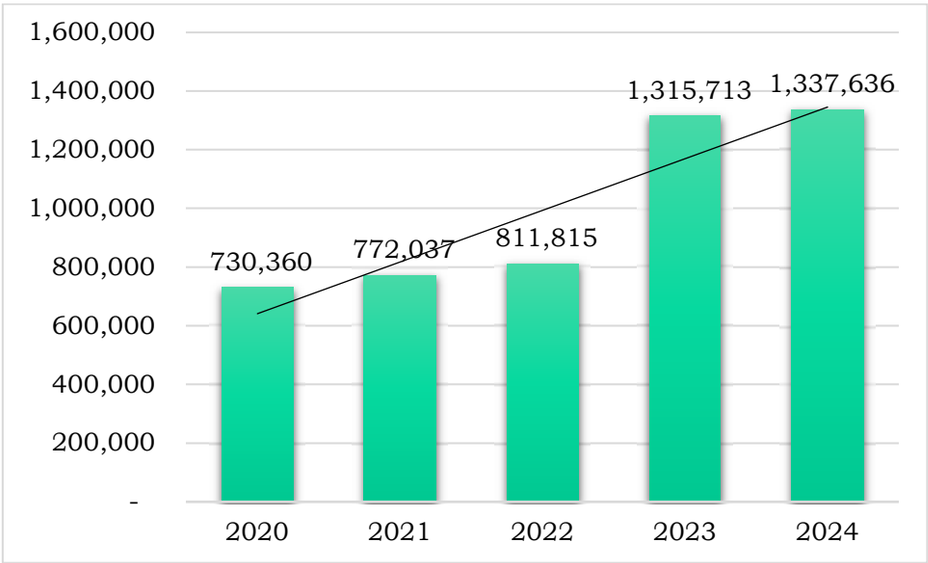
Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kebijakan pendapatan daerah perlu diterjemahkan melalui serangkaian langkah atau strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan yang diperolehnya dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dana perimbangan dari pemerintah pusat, hasil investasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
(2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir perkembangan Pendapatan Kabupaten Tana Tidung terus mengalami peningkatan cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 16,16% per tahun di mana Pendapatan tahun 2020 mencapai Rp. 730,36 miliar menjadi Rp. 1,33 triliun di tahun 2024 yang terutama didorong oleh meningkatnya Pendapatan Transfer yang cukup signifikan.

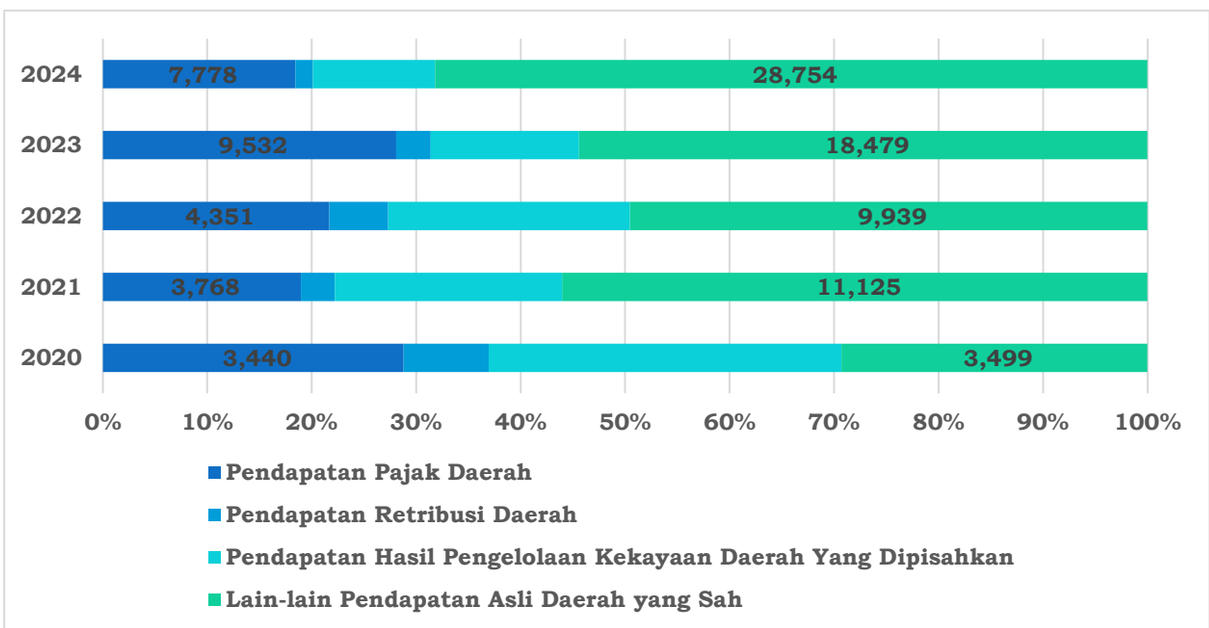
Gambar II.31
Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)



Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

Jika dilihat lebih dalam pada komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), terlihat bahwa baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer mengalami rata-rata pertumbuhan positif dimana pertumbuhannya secara berurutan sebesar 37,08% per tahun dan 15,73% per tahun. Sementara Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami peningkatan juga sampai 30,39% per tahun dari Rp. 5,99 miliar (2020) menjadi Rp. 17,31 miliar (2024).

Gambar II.32
Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Lain-lain PAD yang Sah.

1) Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Perkembangan pajak Daerah mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,63% per tahun dari Rp. 3,44 miliar (2020) menjadi Rp. 7,78 miliar (2024). Peningkatan paling signifikan terjadi di tahun 2023 khususnya dari pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini juga menunjukkan adanya akselerasi penggalian pungutan pajak daerah yang berkualitas. Meskipun begitu dengan melihat nilainya yang relatif masih kecil, untuk lebih mengoptimalkan PAD dari Pajak Daerah ke depan perlu dilakukan optimalisasi pemungutan pajak lainnya seperti pajak properti, pajak penjualan, pajak restoran, dan sebagainya.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi daerah yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (MTA).

Pendapatan retribusi di Kabupaten Tana Tidung mengalami kontraksi dengan rata-rata penurunan sebesar 7,69% per tahun dari Rp. 972 juta (2020) menjadi Rp 706 juta (2024). Nilai retribusi ini terbilang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan biaya operasional pemungutan retribusi yang ada. Untuk

lebih mengoptimalkan PAD retribusi ke depan, selain melalui penegakan perda pajak dan retribusi juga masih perlu dilakukan optimalisasi sumber retribusi bisa berupa biaya layanan seperti parkir, izin usaha, atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah.

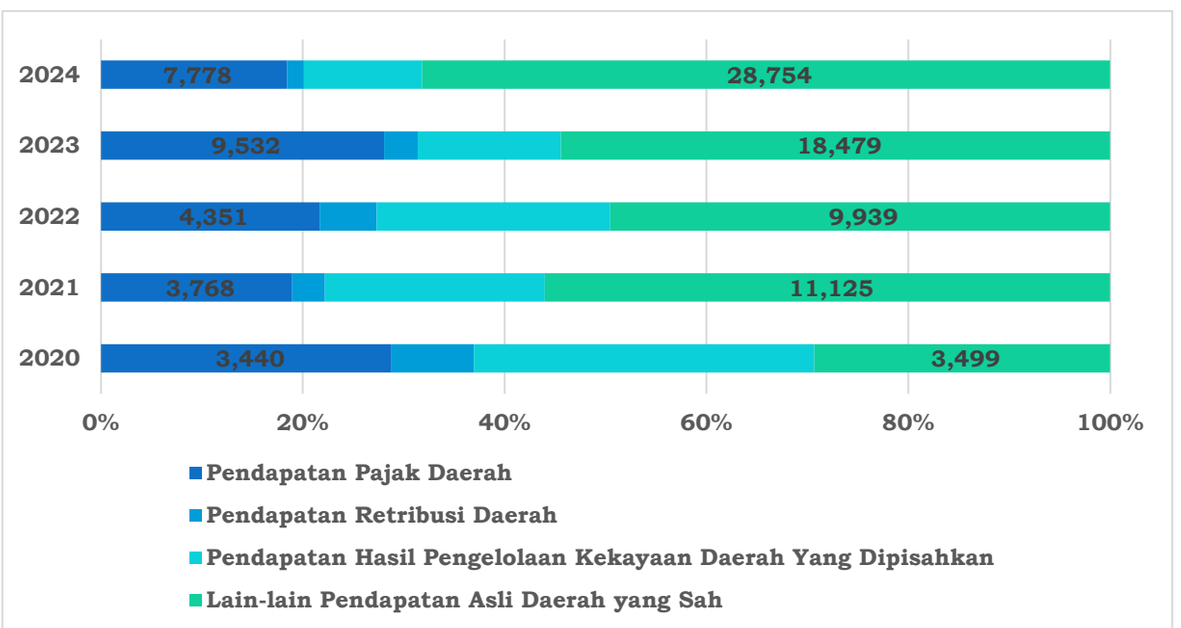
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perkembangan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami tren menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -5,17% dari Rp. 4,03 miliar (2020) menjadi Rp. 4,93 miliar (2024). Pertumbuhan ini berasal dari dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tana Tidung pada lembaga keuangan, aneka usaha dan bidang air minum. BUMD yang memberikan deviden. Untuk meningkatkannya maka kinerja BUMD perlu dikuatkan agar mampu menghasilkan laba yang meningkat secara signifikan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 69,31% dari Rp. 3,50 miliar (2020) menjadi Rp. 28,75 miliar (2024). Tumbuhnya Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya didorong oleh Jasa Giro, Pendapatan Bunga, dan Pendapatan BLUD. Secara nominal, keseluruhan komposisi struktur PAD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.33
Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, seperti kita ketahui bahwa Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD Kabupaten Tana Tidung. Secara rata-rata kontribusi Lain-lain PAD yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 56% per tahun

terutama dari BLUD, kemudian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berkontribusi rata-rata 18% per tahun, berikutnya Pendapatan Pajak Daerah berkontribusi rata-rata 22% per tahun dan terakhir Retribusi Daerah kontribusinya sebesar 4% per tahun. Berdasarkan hal tersebut, untuk menguatkan kemandirian daerah maka penerimaan Lain-lain PAD yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Pajak Daerah perlu lebih dikuatkan dengan dibarengi penggalian sumber-sumber potensial untuk mengakselerasi penerimaan dari Hasil Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Gambar II.34
Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (%)

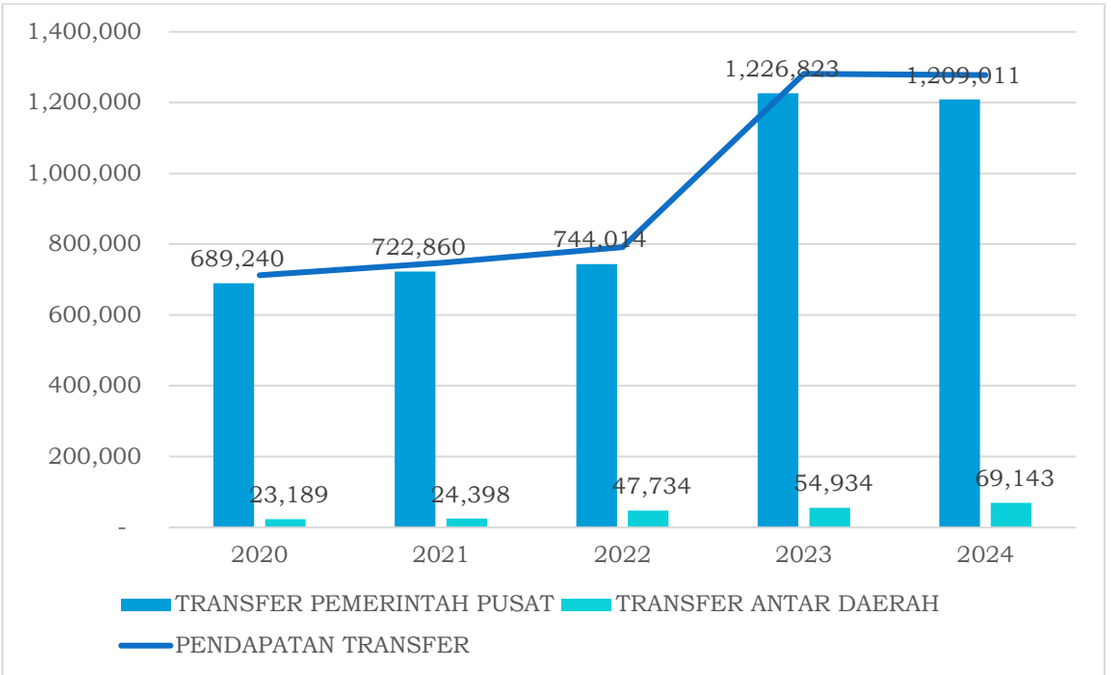


Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: Dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Sementara transfer antar-daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

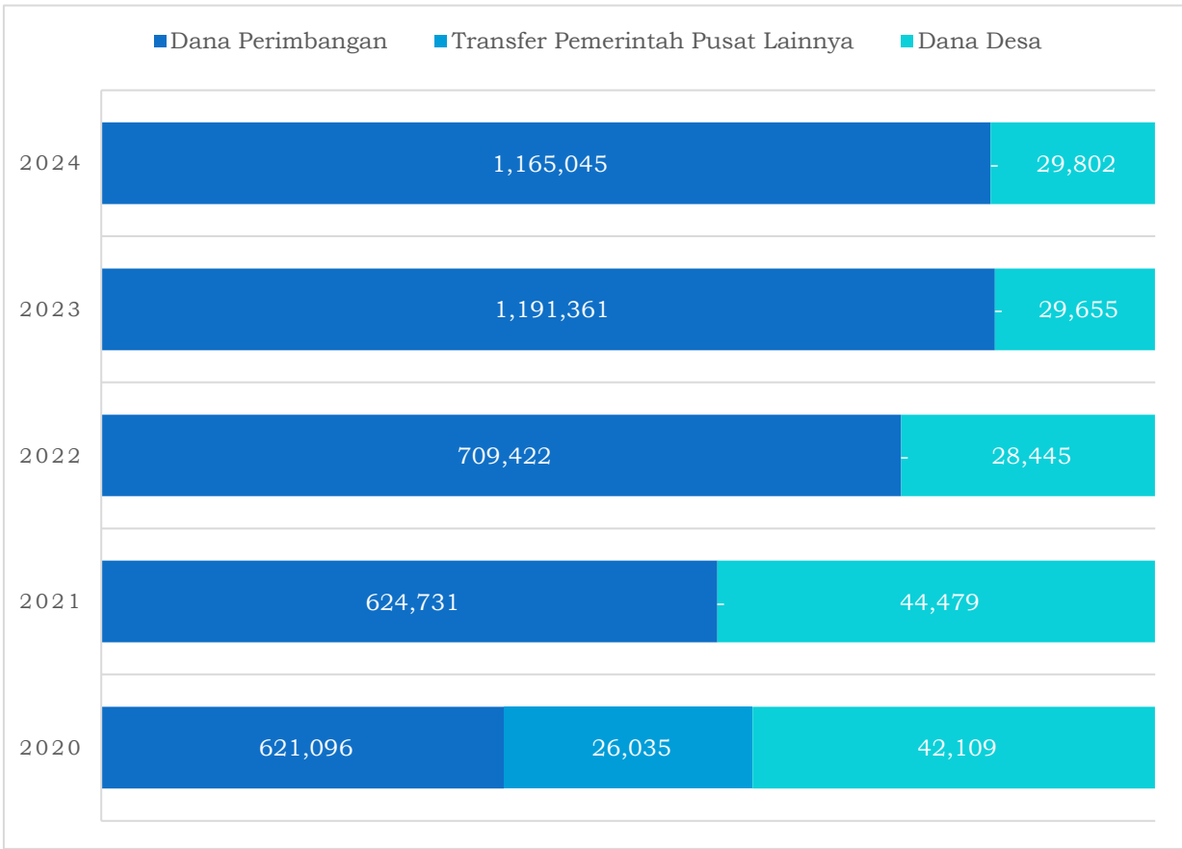
Gambar II.35
Komponen Komponen Pendapatan Transfer
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

Dalam 5 (lima) tahun terakhir pendapatan transfer Kabupaten Tana Tidung mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,73% per tahun dari Rp. 712,43 miliar (2020) menjadi Rp. 1,278 triliun (2024). Pendapatan transfer tertinggi diterima pada tahun 2023 sebesar Rp. 1,281 triliun karena relatif tingginya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari sumber Dana Perimbangan pada tahun tersebut dibandingkan tahun lainnya. Jika dilihat rata-rata kontribusinya maka rata-rata 96% Pendapatan Transfer disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat. Jika melihat komponen utama pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam 5 (lima) tahun terakhir maka rata-rata 92,5% adalah disumbang oleh Dana Perimbangan sisanya dari transfer pemerintah pusat lainnya dari pos Dana Penyesuaian dan Dana Desa.

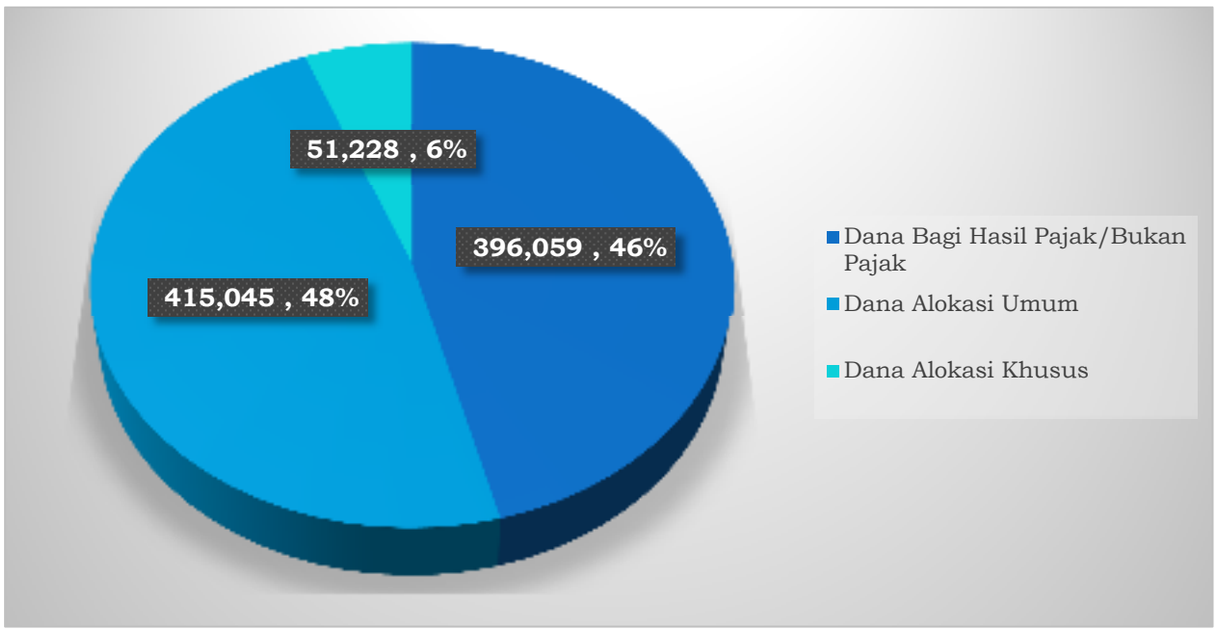
Gambar II.36
Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

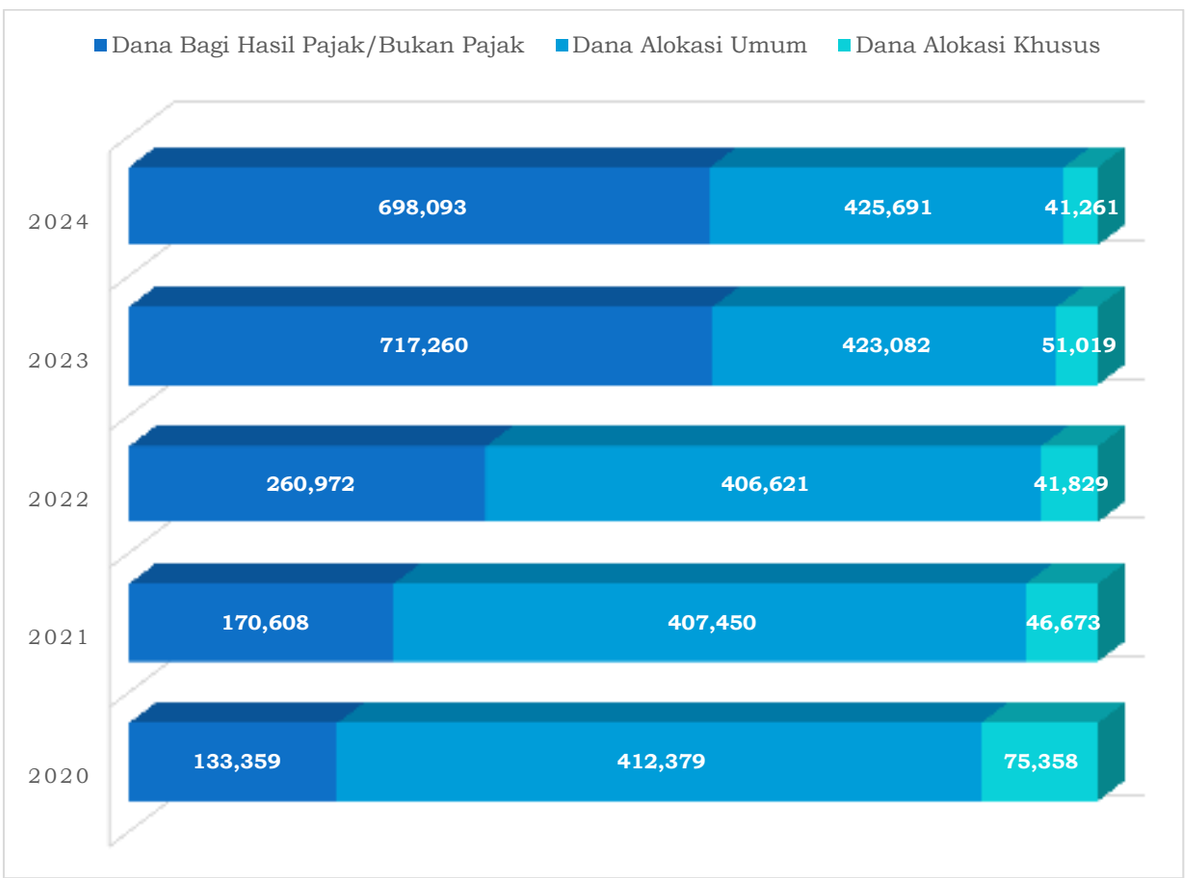
Perkembangan Dana Perimbangan sendiri dalam 5 (lima) tahun terakhir telah tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,03% dari Rp. 621,10 miliar di tahun 2020 menjadi Rp. 1,16 triliun di tahun 2024. Dari komponen pembentuk Dana Perimbangan itu sendiri tren Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) semua mengalami tren naik dimana secara berturut-turut tren kenaikannya sebesar 51,26% per tahun dari Rp. 133,36 miliar (2020) menjadi Rp. 698,10 miliar (2024), 0,80% per tahun dari Rp. 412,38 miliar (2020) menjadi Rp. 425,69 miliar (2024) dan -13,98% per tahun dari Rp. 75,36 miliar (2020) menjadi Rp. 41,26 miliar (2024). DAU masih menjadi kontributor terbesar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan rata-rata kontribusi sebesar 60% kemudian DBH Pajak/Bukan Pajak sebesar 34% dan sisanya DAK Sebesar 6%.

Gambar II.37
Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

Gambar II.38
Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024



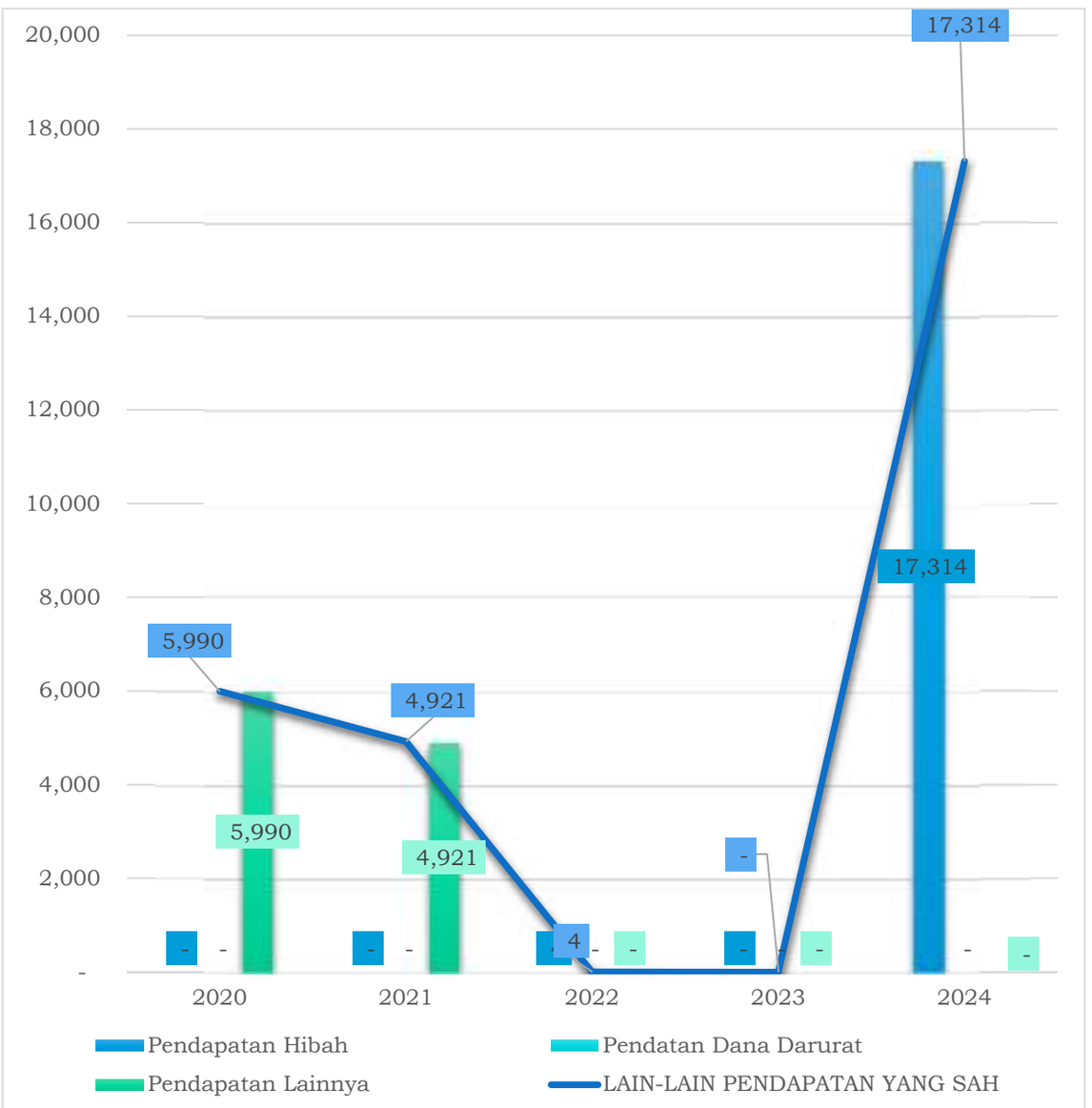
Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatatkan nilai yang fluktuatif namun dengan tren positif, dari Rp. 5,99 miliar (2020) menjadi Rp. 17,31 miliar (2024) atau rata-rata meningkat 30,39%.

Gambar II.39
Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari perkembangan Pendapat Daerah dalam lima tahun terakhir maka beberapa kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam mengelola pendapatan daerah:

a. Peningkatan Efisiensi: Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah.
b. Diversifikasi Pendapatan: Upaya untuk mencari sumber pendapatan tambahan diluar pajak dan retribusi, seperti pengembangan aset daerah, kerja sama dengan sektor swasta, atau pendapatan dari investasi.
c. Pembangunan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai properti.
d. Pengelolaan Utang: Manajemen utang yang baik dapat membantu pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui pinjaman yang diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.
e. Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK): Memastikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
f. Pengembangan Sektor Ekonomi: Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang potensial di daerah, seperti pariwisata, pertanian, atau industri lokal, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan penerimaan lainnya.
g. Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar masyarakat dapat memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan tersebut secara efektif.
h. Kebijakan pendapatan daerah haruslah seimbang antara memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan memperhatikan keadilan serta kepentingan masyarakat dalam penggunaan dan penyaluran pendapatan tersebut.

Secara keseluruhan perkembangan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.42

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**	**730.360**	**772.037**	**811.815**	**1.315.713**	**1.337.636**	**16,33**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**11.942**	**19.858**	**20.064**	**33.957**	**42.169**	**37,08**
1.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	**3.440**	**3.768**	**4.351**	**9.532**	**7.778**	**22,63**
1.1.2	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**972**	**642**	**1.130**	**1.129**	**706**	**-7,69**
1.1.3	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**	**4.030**	**4.323**	**4.643**	**4.817**	**4.930**	**5,17**
1.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	**3.499**	**11.125**	**9.939**	**18.479**	**28.754**	**69,31**
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**712.428**	**747.258**	**791.747**	**1.281.756**	**1.278.154**	**15,73**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**689.240**	**722.860**	**744.014**	**1.226.823**	**1.209.011**	**15,08**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**621.096**	**624.731**	**709.422**	**1.191.361**	**1.165.045**	**17,03**
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	133.359	170.608	260.972	717.260	698.093	51,26
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	412.379	407.450	406.621	423.082	425.691	0,80
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	75.358	46.673	41.829	51.019	41.261	-13,98
1.2.1.2	**Dana Insentif Daerah**	**-**	**53.650**	**6.147**	**5.806**	**14.164**	**51,80**
1.2.1.3	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**26.035**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-100,00**

.

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	26.035	-	-	-	-	-100,00
1.2.1.3	**Dana Desa**	**42.109**	**44.479**	**28.445**	**29.655**	**29.802**	**-8,28**
1.2.2	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	**23.189**	**24.398**	**47.734**	**54.934**	**69.143**	**31,41**
1.2.2.1	**Pendapatan Bagi Hasil**	15.751	19.577	31.006	44.957	31.239	18,67
1.2.2.2	**Bantuan Keuangan**	**4.304**	**4.820**	**16.728**	**9.977**	**37.904**	**72,27**
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	4.304	4.820	10.700	9.977	29.750	62,15
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	6.028	-	8.154	35,27
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**5.990**	**4.921**	**4**	**-**	**17.314**	**30,39**
1.3.1	**Pendapatan Hibah**	**-**	**-**	**4**	**-**	**17.314**	**709,51**
1.3.2	**Pendatan Dana Darurat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
1.3.3	**Pendapatan Lainnya**	**5.990**	**4.921**	**-**	**-**	**-**	**-100,00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

.

2. Belanja Daerah

Belanja secara umum adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:

1) Belanja operasi
   Merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

2) Belanja modal
   Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

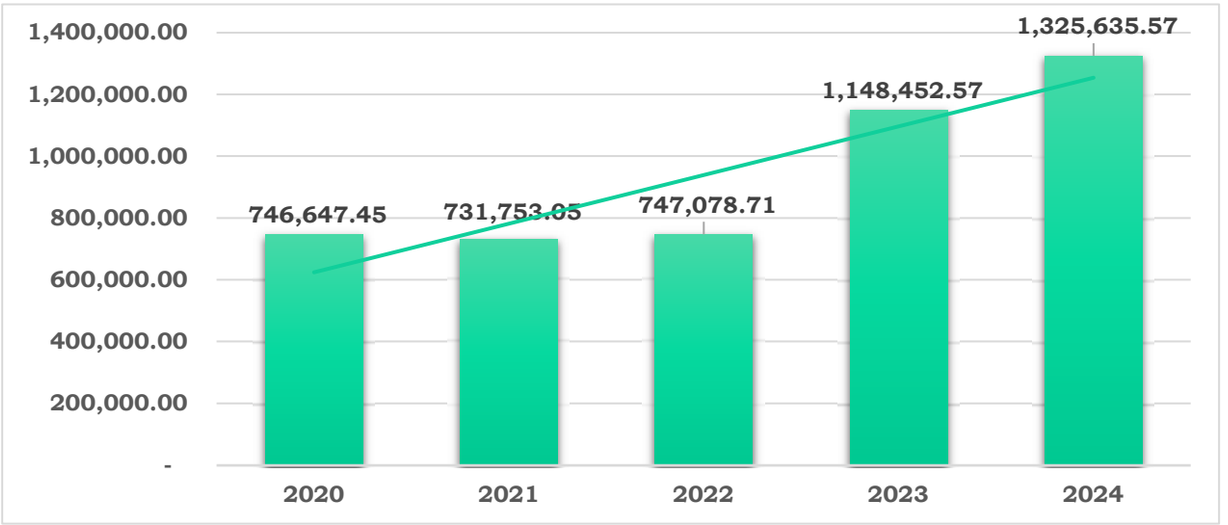
3) Belanja tidak terduga
   Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4) Belanja transfer
   Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi namun trennya meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,43% per tahun. Fluktuasi Belanja Daerah terjadi dimana realisasi Belanja Daerah di tahun 2020 sebesar 746,65 miliar mengalami penurunan menjadi Rp. 731,75 miliar

pada tahun 2021 lalu terus meningkat hingga di tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 1,32 triliun. Adapun peningkatan secara signifikan akibat peningkatan pendapatan daerah yang juga signifikan sehingga kemampuan belanjanya juga meningkat.

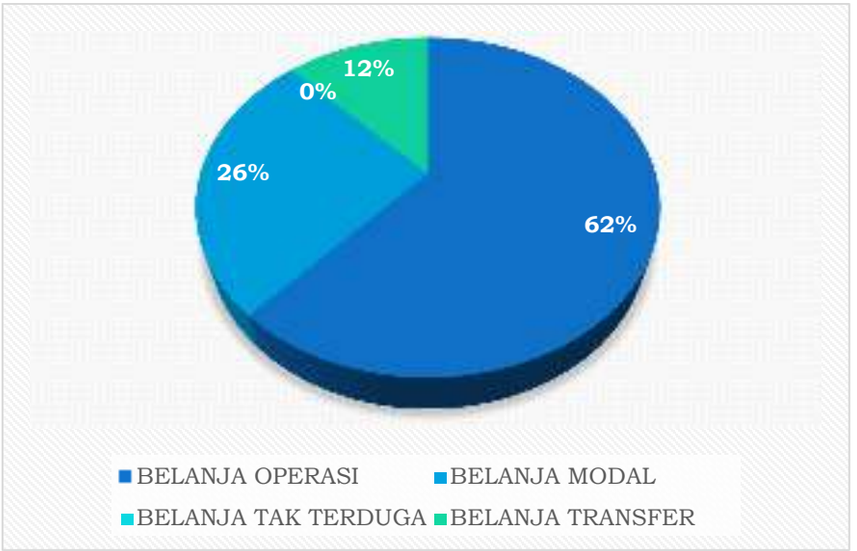
Gambar II.40
Perkembangan Belanja Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

Jika dilihat lebih rinci, semua jenis belanja daerah mengalami tren naik dengan pertumbuhan rata-rata 12,36% per tahun (Belanja Operasi), 24,91% per tahun (Belanja Modal), dan 8,86% per tahun (Belanja Transfer). Jika dilihat dari komposisinya dalam 5 (lima) tahun terakhir maka terlihat bahwa rata-rata 62% Belanja Daerah digunakan untuk belanja operasi, kemudian 26% digunakan untuk belanja modal, dan 12% digunakan untuk belanja transfer. Melihat komposisi tersebut dengan tingginya ketergantungan fiskal daerah, maka kebijakan belanja Daerahnya perlu bergeser ke arah yang mampu meningkatkan PAD. Belanja modal infrastruktur perlu ditingkatkan untuk menarik investasi dan memutar roda perekonomian dengan lebih cepat.

Gambar II.41
Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2020-2024

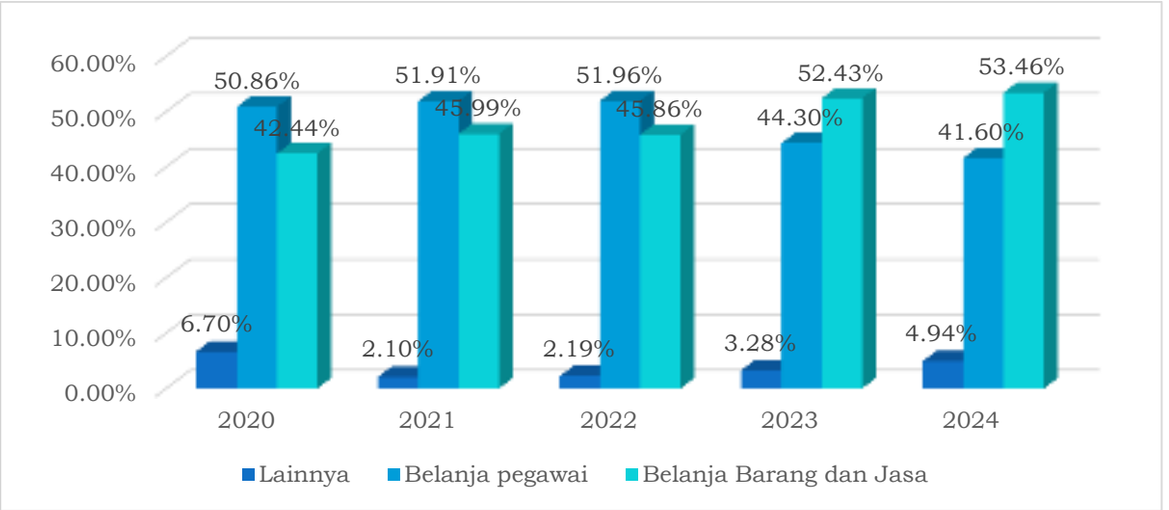


Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

a. Belanja Operasi

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja operasi Kabupaten Tana Tidung telah tumbuh 12,36% per tahun dari Rp. 467,31 miliar (2020) menjadi Rp. 744,91 miliar (2024). Sebagian besar atau hampir separuh belanja operasi yang ada digunakan untuk belanja pegawai kemudian digunakan untuk belanja barang dan jasa. Jika dilihat perkembangannya, proporsi belanja pegawai terbesar terjadi di tahun 2022 yaitu sebesar 51,96% dari total belanja operasi yang ada, dan kemudian terus ditekan hingga mencapai 44,30% di tahun 2023. Sebaliknya proporsi belanja barang dan jasa proporsinya secara rata-rata meningkat setiap tahun dari 50,05% (2019) menjadi 52,43% (2023). Sementara belanja operasi lainnya (belanja hibah dan bantuan sosial) proporsinya tidak pernah lebih dari 7% dan tertinggi terjadi di tahun 2020 yang mencapai 6,70%.

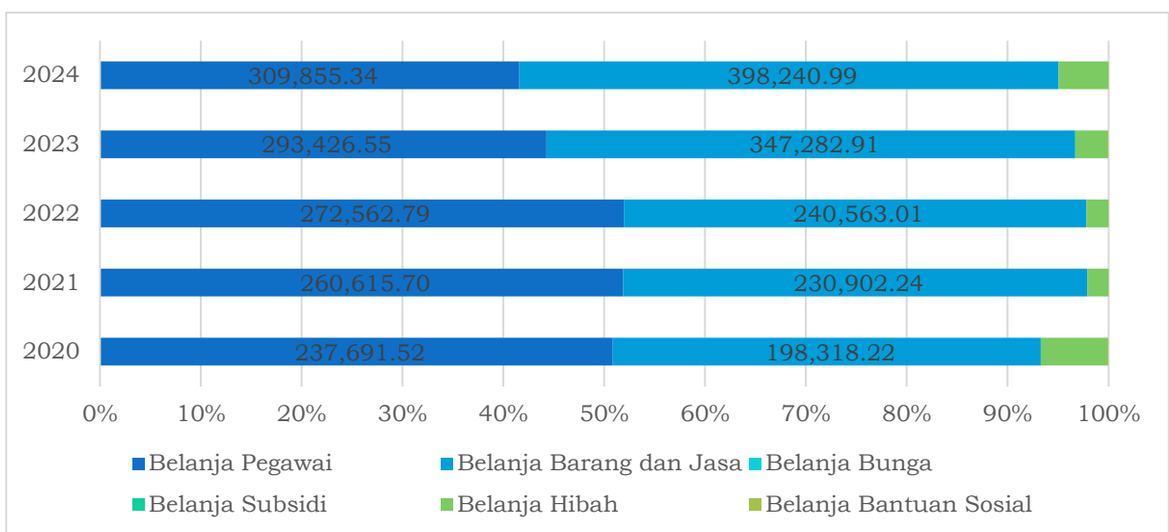
Gambar II.42
Rata-rata Struktur Belanja Operasi Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

Secara proporsi belanja pegawai mengalami tren meningkat dari Rp. 237,69 miliar (2020) menjadi Rp. 309,86 miliar (2024). Peningkatan nominal belanja pegawai ini perlu menjadi perhatian agar kedepan tidak mengganggu alokasi proporsi dan kualitas belanja publik khususnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Gambar II.43
Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kab Tana Tidung
Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

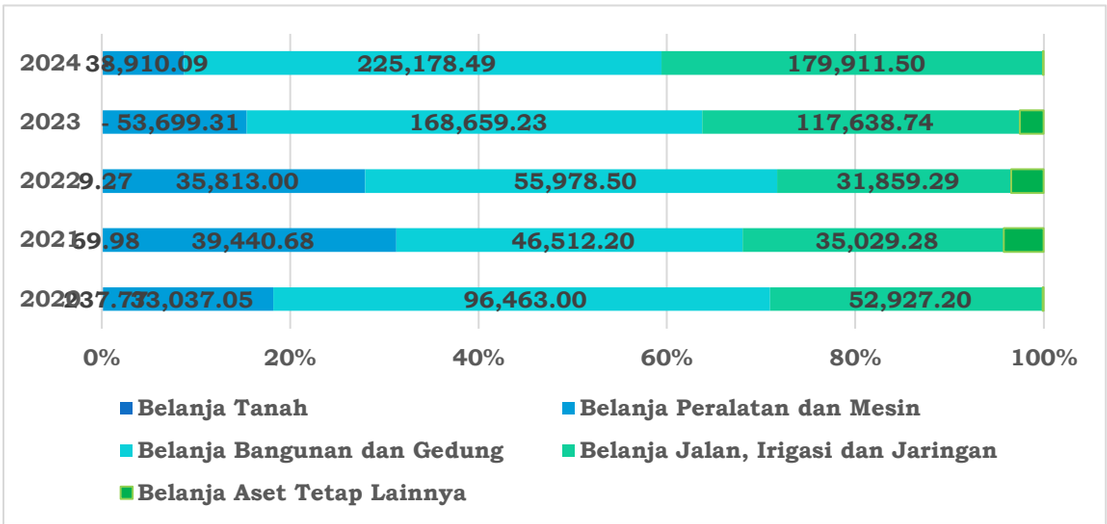
b. Belanja Modal

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja modal Kabupaten Tana Tidung mengalami tren naik cukup signifikan 24,91% per tahun dari Rp. 182,88 miliar (2020) menjadi Rp. 445,23 miliar (2024). Naiknya belanja modal tersebut disebabkan oleh naiknya hampir semua komponen belanja modal yaitu seperti Belanja Peralatan dan Mesin (4,18% per tahun), Belanja Bangunan dan Gedung (23,61% per tahun), Belanja Jalan, Irigasi

dan Jaringan (35,78%), Belanja Aset Tetap Lainnya (9,86% per tahun) dan Aset lainnya mulai dialokasikan pada tahun 2023 yaitu sebesar 1,167 miliar dan menurun menjadi Rp 925 juta pada tahun 2024, sementara Belanja Tanah dimana pada tahun 2023 sudah tidak dialokasikan kembali.

Dalam rangka mendorong perekonomian daerah maka struktur alokasi belanja modal masih perlu mendapatkan penguatan dari sisi besaran anggaran khususnya belanja modal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air minum, dan sistem transportasi umum yang dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, serta membuka peluang investasi dan perdagangan. Begitu juga dengan belanja peralatan dan mesin dalam rangka peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, memungkinkan untuk lebih efisien dan bersaing di pasar global. Selain itu Belanja modal dapat diarahkan ke daerah tertentu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang.

Gambar II.44
Perkembangan Struktur Belanja Modal Kab Tana Tidung
Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

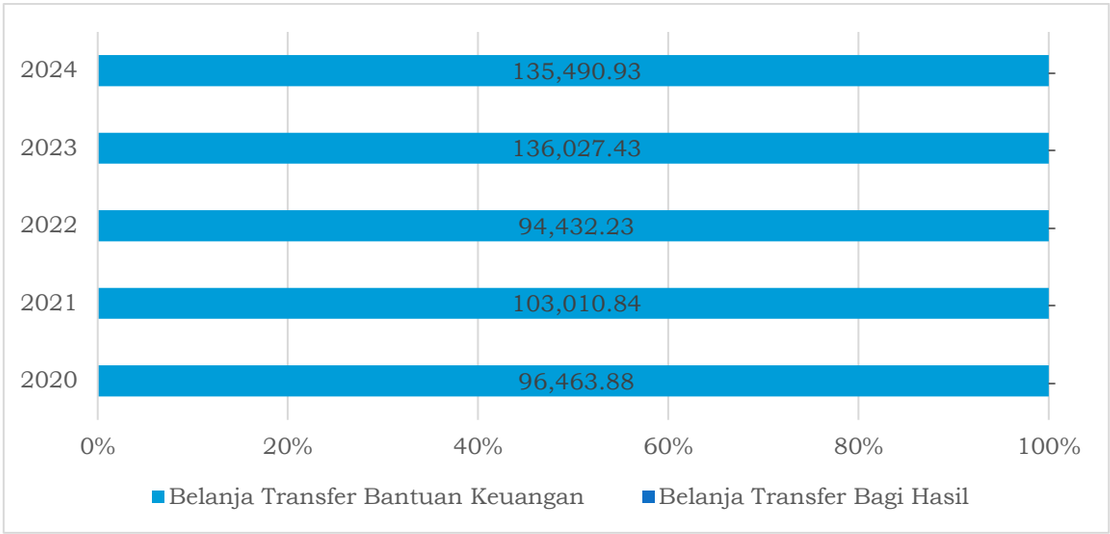
c. Belanja Tak Terduga

Dalam 5 (lima) tahun terakhir realisasi belanja tak terduga Kabupaten Tana Tidung hanya terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 272,12 miliar. Belanja tak terduga ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya darurat sesuai peraturan perundang-undangan seperti bencana dan sejenisnya. Oleh karena itu belanja tak terduga tahun 2021 tersebut dialokasikan untuk penanganan dan recovery Covid-19.

d. Belanja Transfer

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja transfer Kabupaten Tana Tidung relative naik sekitar 8,86% per tahun dari Rp. 96,46 miliar (2020) menjadi Rp. 135,49 miliar (2024). Kenaikan tersebut didorong oleh relative meningkatnya belanja transfer bantuan keuangan dari Rp. 102,606 miliar (2020) menjadi Rp. 136,027 miliar. Adapun belanja transfer bantuan keuangan terbesar dengan angka yang sama.

Gambar II.45
Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari aspek surplus/defisit belanja, maka dalam 5 tahun terakhir defisit belanja hanya terjadi di tahun 2020 yang nilai defisitnya secara sebesar Rp. 16,287 miliar. Meskipun terjadi defisit belanja namun besaran defisit tersebut masih dapat ditutup SiLPA yang dapat digunakan di tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 53,974 miliar. Adapun selain tahun 2020 terjadi surplus anggaran belanja.

Dengan melihat kinerja belanja daerah 5 (lima) tahun terakhir maka masih diperlukan strategi untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan efektif, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari anggaran belanja yang tersedia. beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk tujuan tersebut:

1) Perencanaan Anggaran yang Cermat: Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta menyusun anggaran dengan cermat berdasarkan hal tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi area-area penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya.
2) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi praktik akuntabilitas yang kuat. Ini mencakup publikasi anggaran secara terbuka, pelaporan keuangan yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.
3) Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, kompetitif, dan efisien. Ini dapat mencakup penggunaan sistem lelang terbuka, kerja sama dengan pihak swasta, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan.
4) Pengelolaan Utang yang Bijaksana: Mengelola utang daerah dengan bijaksana, termasuk pemantauan tingkat bunga dan jangka waktu, serta

memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

5) Pengembangan Pendapatan Alternatif: Mencari sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sumber-sumber konvensional seperti pajak dan dana pemerintah pusat. Ini bisa meliputi pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri, atau kemitraan dengan sektor swasta untuk proyek-proyek investasi.
6) Peningkatan Efisiensi Operasional: Mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, termasuk pengurangan biaya administratif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan produktivitas pegawai.
7) Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek yang didanai oleh belanja daerah. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

Secara keseluruhan Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.43
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2020-2024 (dalam juta)

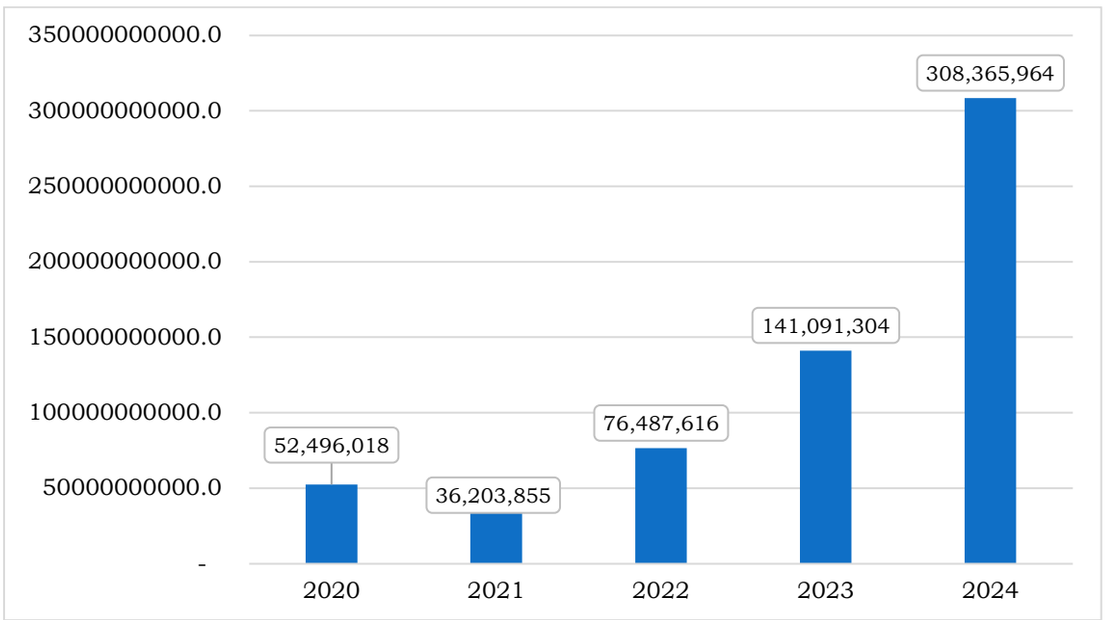
No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	**BELANJA**	**746.647,45**	**731.753,05**	**747.078,71**	**1.148.452,57**	**1.325.635,57**	**15,43**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**467.307,26**	**502.061,28**	**524.597,38**	**662.418,35**	**744.912,89**	**12,36**
2.1.1	Belanja Pegawai	237.691,52	260.615,70	272.562,79	293.426,55	309.855,34	6,85
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	198.318,22	230.902,24	240.563,01	347.282,91	398.240,99	19,04
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	30.841,40	10.471,54	11.443,06	21.037,04	36.798,94	4,51
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	456,12	71,80	28,52	671,86	17,62	-55,67
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	0,00
2.2	**BELANJA MODAL**	**182.876,31**	**126.408,80**	**128.049,09**	**350.006,79**	**445.231.75**	**24,91**
2.2.1	Belanja Tanah	237,77	69,98	9,27	-	-	-100.00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	33.037,05	39.440,68	35.813,00	53.699,31	38.910,09	4,18
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	96.463,00	46.512,20	55.978,50	168.659,23	225.178,49	23,61
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.927,20	35.029,28	31.859,29	117.638,74	179.911,50	35,78
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	211,29	5.356,67	4.389,03	8.841,63	305,80	9,68
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	1.167,89	925,87	-20,72
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**-**	**272,12**	**-**	**-**	**-**	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	**-**	**272,12**	**-**	**-**	**-**	
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**96.463,88**	**103.010,84**	**94.432,23**	**136.027,43**	**135.490,93**	**8,86**
2.4.1	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	0,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	0,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**96.463,88**	**103.010,84**	**94.432,23**	**136.027,43**	**135.490,93**	**8,86**
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	**-**	**3.629,55**	**4.934,70**	**990,60**	**-**	**(102,00)**
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	55,20	357,00	546,74
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	95.622,34	99.381,29	89.497,53	134.981,63	135.133,93	9,03
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	841,54	-	-	-	-	-100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.287,91)	40.283,76	64.736,73	167.260,45	12.000,71	

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

3. Pembiayaan

Perkembangan pembiayaan netto dalam 5 tahun terakhir relative mengalami pertumbuhan rata-rata yang cukup signifikan yaitu 55,68% per tahun dari Rp. 52,49 miliar (2020) menjadi Rp. 308,36 miliar (2024). Naiknya pembiayaan tersebut dipengaruhi oleh naiknya penerimaan pembiayaan dari sumber SiLPA dari khususnya dari tahun 2022 ke tahun 2023. Sebenarnya jika dilihat lebih mendalam terlihat bahwa SiLPA dari tahun 2020-2024 relatif mengalami peningkatan. Hal itu menunjukkan adanya penurunan efektivitas penyerapan anggaran kegiatan. Sementara dari pos pengeluaran pembiayaan selama 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) tidak terdapat alokasi pengeluaran pembiayaan apapun.

Gambar II.46
Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

Secara keseluruhan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Tana Tidung tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.44
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (Dalam Jutaan)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**	**730.359,54**	**772.036,81**	**811.815,44**	**1.315.713,01**	**1.337.636,28**	**16,33**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**11.941,72**	**19.857,99**	**20.063,96**	**33.956,64**	**42.168,54**	**37,08**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.440,10	3.767,58	4.351,34	9.532,11	7.778,41	22,63
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	972,30	642,05	1.130,48	1.129,13	705,97	-7,69
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.029,89	4.323,11	4.643,24	4.816,82	4.930,22	5,17
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.499,43	11.125,25	9.938,90	18.478,59	28.753,93	69,31
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**712.428,26**	**747.257,99**	**791.747,44**	**1.281.756,37**	**1.278.153,59**	**15,73**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**689.239,63**	**722.860,35**	**744.013,69**	**1.226.822,79**	**1.209.010,60**	**15,08**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**621.095,93**	**624.730,82**	**709.421,81**	**1.191.361,09**	**1.165.044,77**	**17,03**
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	133.358,63	170.608,22	260.972,43	717.260,47	698.092,97	51,26
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	412.379,21	407.450,06	406.620,87	423.082,01	425.690,87	0,80
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	75.358,09	46.672,53	41.828,50	51.018,61	41.260,93	-13,98
1.2.1.2	**Dana Insentif Daerah**	**-**	**53.650,23**	**6.146,98**	**5.806,33**	**14.164,04**	**51,80**
1.2.1.3	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**26.034,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-100,00**
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	**-**	**-**	-	-	**-**	**0,00**
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	26.034,69	-	-	-	-	-100,00

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.3	**Dana Desa**	**42.109,01**	**44.479,31**	**28.444,90**	**29.655,37**	**29.801,78**	**-8,28**
1.2.2	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	**23.188,63**	**24.397,64**	**47.733,76**	**54.933,58**	**69.142,99**	**31,41**
1.2.2.1	**Pendapatan Bagi Hasil**	15.751,50	19.577,41	31.005,84	44.956,79	31.239,11	18,67
1.2.2.2	**Bantuan Keuangan**	**4.303,66**	**4.820,22**	**16.727,92**	**9.976,79**	**37.903,89**	**72,27**
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	4.303,66	4.820,22	10.700,00	9.976,79	29.750,00	62,15
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	6.027,92	-	8.153,89	35,27
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**5.989,56**	**4.920,83**	**4,03**	**-**	**17.314,15**	**30,39**
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	4,03	-	17.314,15	709,51
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5.989,56	4.920,83	-	-	-	-100,00
2	**BELANJA**	**746.647,45**	**731.753,05**	**747.078,71**	**1.148.452,57**	**1.325.635,57**	**15,43**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**467.307,26**	**502.061,28**	**524.597,38**	**662.418,35**	**744.912,89**	**12,36**
2.1.1	Belanja Pegawai	237.691,52	260.615,70	272.562,79	293.426,55	309.855,34	6,85
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	198.318,22	230.902,24	240.563,01	347.282,91	398.240,99	19,04
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	30.841,40	10.471,54	11.443,06	21.037,04	36.798,94	4,51
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	456,12	71,80	28,52	671,86	17,62	-55,67

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	0,00
2.2	**BELANJA MODAL**	**182.876,31**	**126.408,80**	**128.049,09**	**350.006,79**	**445.231,75**	**24,91**
2.2.1	Belanja Tanah	237,77	69,98	9,27	-	-	-100,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	33.037,05	39.440,68	35.813,00	53.699,31	38.910,09	4,18
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	96.463,00	46.512,20	55.978,50	168.659,23	225.178,49	23,61
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.927,20	35.029,28	31.859,29	117.638,74	179.911,50	35,78
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	211,29	5.356,67	4.389,03	8.841,63	305,80	9,68
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	1,167,89	925,87	-20,72
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**-**	**272,12**	**-**	**-**	**-**	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	-	272,12	-	-	-	
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**96.463,88**	**103.010,84**	**94.432,23**	**136.027,43**	**135.490,93**	**8,86**
2.4.1	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	0,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	0,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**96.463,88**	**103.010,84**	**94.432,23**	**136.027,43**	**135.490,93**	**8,86**
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	**-**	**3.629,55**	**4.934,70**	**990,60**	**-**	**(102,00)**
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	55,20	357,00	546,74

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	95.622,34	99.381,29	89.497,53	134.981,63	135.133,93	9,03
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	841,54	-	-	-	-	-100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.287,91)	40.283,76	64.736,73	167.260,45	12.000,71	
3	**PEMBIAYAAN**	**52.496,02**	**36.203,86**	**76.487,62**	**141.091,30**	**308.365,96**	**55,68**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**52.496,02**	**36.203,86**	**76.487,62**	**141.091,30**	**308.365,96**	**55,68**
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	53.974,37	36.203,86	76.487,62	141.090,88	308.365,96	54,60
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	0,00
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	0,43	-	-100,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.	(1.478,35)	-	-	-	-	-100,00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
3.2.1	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	0,00
3.2.2	penyertaan modal daerah;	-	-	-	-	-	0,00
3.2.3	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	0,00
3.2.5	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	-	-	-	-	-	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**52.496,02**	**36.203,86**	**76.487,62**	**141.091,30**	**308.365,96**	**55,68**

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada waktu tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kabupaten Tana Tidung dari tahun 2020-2024 relatif mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 8,75% per tahun dari Rp. 3,05 triliun (2020) menjadi Rp. 4,26 triliun (2024). Adapun jenis aset yang rata-rata pertumbuhannya positif dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah Aset Lancar (46,55% per tahun), investasi jangka panjang (0,32% per tahun) dan Aset Lainnya (47,80% per tahun), serta jenis Aset Tetap (3,67% per tahun). Jika dilihat proporsinya maka rata-rata lebih dari 84% nilai total aset yang ada berasal dari jenis aset tetap khususnya berupa Gedung dan Bangunan dan Jalan. Irigasi. dan Jaringan

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu tahun 2020-2024 berupa kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek tersebut cukup berfluktutatif namun relatif mengalami tren meningkat cukup signifikan sebesar 4,86% per tahun dari Rp. 52,76 miliar (2020) menjadi Rp. 63,78 miliar (2024). Jika dilihat lebih dalam maka nilai kewajiban jangka pendek terbesar disumbangkan oleh Utang Jangka Pendek Lainnya yang trennya juga relatif meningkat cukup signifikan sebesar 97,92%.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Tana Tidung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 8,82% per tahun dimana pada tahun 2020 sebesar Rp. 2,99 triliun menjadi Rp. 4,19 Triliun di tahun 2024. Fluktuasi nilai ekuitas dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan keuangan suatu entitas, mengurangi kemampuannya untuk memperoleh pembiayaan tambahan, berinvestasi dalam proyek-proyek baru, atau bahkan mempertahankan keseimbangan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, manajemen risiko dan pengelolaan keuangan yang hati-hati penting untuk memitigasi risiko penurunan nilai ekuitas. Ada beberapa strategi untuk menekan penurunan nilai ekuitas antara lain: mencegah dan menekan kerugian invetasi, mencejah dan menekan penurunan nilai aset, mencegah dan menekan kerugian operasional dimana pendapatan menurun atau biaya meningkat, serta membatasi pinjaman baru atau peningkatan utang lainnya.

Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Tana Tidung disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel II.45
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	35.646.362.602	76.123.144.241	140.999.040.791		302.779.696.675	70,72
Kas di Bendahara Penerimaan		15.000	1.352.521		474.489.871	3,062,61
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.562.500	4.285.436	-		1.076.059.183	412,28
Kas di BLUD					3.055.287.795	
Kas di Bendahara FKTP					119.001.416	
Kas di Bendahara BOS					7.938.538.454	
Kas dana BOK Puskesmas					4.919.096.923	
Kas Lainnya	570.380.777	419.440.547	224.473.765		31.717	(91,36)
Setara Kas				308.496.959.335		(100,00)
Investasi Jangka Pendek						
Piutang Pendapatan						
Piutang Pajak	2.181.750.353	2.516.898.033	2.059.791.193	3.100.445.109	3.100.445.109	9,18
Penyisihan Piutang Pajak						
Piutang Retribusi	659.000			33.697.944	33.697.944	167,41
Penyisihan Piutang Retribusi						
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan						
Piutang Lain-lain PAD yang Sah				493.054.465	493.054.465	0,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah						
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	12.828.424.530	2.357.851.706	28.517.770.088	5.505	5.505	(97,44)
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat						
Piutang Transfer Antar Daerah				19.308.478.465	19.308.478.465	0,00
Piutang Lainnya			35.332.291.459	11.107.228.293	11.107.228.293	(43,93)
Penyisihan Piutang	(704.264.949)	(1.125.738.439)	(618.212.970)	(995.810.925)	(995.810.925)	9,05
Beban Dibayar Dimuka	115.083.333	194.000.000	2.694.571.667	1.713.581.667	1.435.290.000	87,92
Persediaan	60.548.813.651	75.128.937.768	100.353.767.439	157.953.759.740	157.953.759.740	27,09
Jumlah Aset Lancar	**111.188.771.798**	**155.618.834.292**	**309.564.845.952**	**501.211.399.598**	**512.798.350.630**	**46,55**
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
Dana Bergulir						
Penyisihan Investasi Jangka Panjang						
Jumlah Investasi Non Permanen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Investasi Permanen						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	100.100.000.000	100.100.000.000	100.100.000.000	101.369.459.294	101.369.459.294	0,32
Jumlah Investasi Permanen	**100.100.000.000**	**100.100.000.000**	**100.100.000.000**	**101.369.459.294**	**101.369.459.294**	**0,32**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**100.100.000.000**	**100.100.000.000**	**100.100.000.000**	**101.369.459.294**	**101.369.459.294**	**0,32**
ASET TETAP						
Tanah	279.471.429.483	279.949.152.013	336.973.152.913	329.446.225.416	329.446.225.416	4,20
Peralatan dan Mesin	230.076.149.823	267.585.925.198	293.745.509.057	330.494.041.798	369.404.135.181	12,57
Gedung dan Bangunan	1.269.892.323.803	1.334.393.223.199	1.363.977.890.027	1.387.463.422.490	1.612.641.915.604	6,16
Jalan. Irigasi. dan Jaringan	2.023.010.110.005	2.112.121.677.089	2.137.161.739.085	2.191.596.879.052	2.371.508.374.433	4,05
Aset Tetap Lainnya	9.861.042.354	10.785.770.574	10.538.999.493	18.240.998.193	18.546.794.893	17,11
Konstruksi dalam Pengerjaan	123.749.012.606	110.474.180.130	116.955.372.412	375.537.312.922	375.537.312.922	31,99
Akumulassi Penyusutan	(1.203.025.168.058)	(1.428.963.084.361)	(1.704.023.856.122)	(1.920.170.124.114)	(1.920.170.124.114)	12,40
Jumlah Aset Tetap	**2.733.034.900.016**	**2.686.346.843.842**	**2.555.328.806.864**	**2.712.608.755.756**	**3.156.914.634.335**	**3,67**
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
Jumlah Dana Cadangan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
ASET LAINNYA						
Tagihan Penjualan Angsuran				18.304.951.440		(100,00)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	22.406.695.269	21.662.631.943	18.862.419.444		18.304.951.440	(4,93)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	30.222.581.684				49.305.137.655	13,02

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Aset Tak Berwujud		35.015.499.683,00	39.269.961.233	48.379.267.155		(100,00)
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(21.715.867.526)	(24.862.053.631)	(27.957.494.708)	(31.796.506.176)	(31.796.506.176)	10,00
Aset Lain-Lain	123.751.266.733	117.363.829.366	294.524.435.597	106.269.021.848	106.269.021.848	(3,74)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(51.700.680.585)	(64.808.382.525)	(70.587.598.784)	(65.466.426.041)	(65.466.426.041)	6,08
Dana Transfer Treasury Deposit Facility				414.721.110.000	414.721.110.000	0,00
Jumlah Aset Lainnya	**102.963.995.575**	**84.371.524.835**	**254.111.722.781**	**490.411.418.225**	**491.337.288.725**	**47,80**
JUMLAH ASET	**3.047.287.667.389**	**3.026.437.202.969**	**3.219.105.375.597**	**3.805.601.032.873**	**4.262.419.732.984**	**8,75**
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	10.195.018	59.269.161	525.190	101.797.587		(100,00)
Pendapatan Diterima Dimuka			5.120.332	12.514.432		(100,00)
Utang Beban	9.009.647.151	1.115.489.999	1.378.803.511	8.252.522.397		(100,00)
Utang belanja					9.439.985.271	
Utang Bunga					54.338.595.838	
Utang Jangka Pendek Lainnya	43.740.575.900	25.161.092.265	37.596.721.660	54.338.604.056	8.218	(97,92)
Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka						
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**52.760.418.068**	**26.335.851.424**	**38.981.170.694**	**62.705.438.472**	**63.778.589.327**	**4,86**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank						
Utang Dalam Negeri - Obligasi						
Utang Jangka Panjang Lainnya						
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
JUMLAH KEWAJIBAN	**52.760.418.068**	**26.335.851.424**	**38.981.170.694**	**62.705.438.472**	**63.778.589.327**	**4,86**
EKUITAS						
EKUITAS						
Equitas	2.994.527.249.321	3.000.101.351.544	3.180.124.204.903	3.742.895.594.401	4.198.641.068.581	8,82
Sisa Kas BLUD						
Sisa Kas JKN						
JUMLAH EKUITAS	**2.994.527.249.321**	**3.000.101.351.544**	**3.180.124.204.903**	**3.742.895.594.401**	**4.198.641.068.581**	**8,82**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3.047.287.667.389**	**3.026.437.202.969**	**3.219.105.375.597**	**3.805.601.032.873**	**4.262.419.657.908**	**8,75**

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung. 2025 (diolah)

4) Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Tana Tidung periode tahun 2020-2024 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid. Ada beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk menganalisis namun disini pendekatan yang dipakai adalah rasio lancar (*current ratio*). Rasio ini juga dikenal sebagai rasio aset cepat atau rasio acid-test. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Pada umumnya, rasio lancar di atas 2 telah dianggap baik.

Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tahun 2020-2024 sedikit berfluktuatif namun trennya semakin meningkat dari nilai 2,11 (2020) menjadi 8,04 (2024). Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar di tahun 2020 nilainya 2 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang dibebankan. Sementara di tahun 2024 nilai aset lancarnya 7-8 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang ada di tahun 2024. Dari nilai rasio lancar 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung memiliki tingkat likuiditas yang cukup tinggi dan semakin membaik. Untuk itu yang perlu dijaga adalah membatasi jumlah kewajiban lancarnya agar tidak membesar atau bahkan tidak melebihi nilai aset lancar yang ada

Berikut ini terlihat fluktuatifnya rasio lancar Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024.

Tabel II.46
Rasio Lancar Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET LANCAR	111.188.771.798	155.618.834.292	309.564.845.952	501.211.399.598	512.798.350.630
KEWAJIBAN LANCAR	52.760.418.068	26.335.851.424	38.981.170.694	62.705.438.472	63.778.589.327
RASIO LANCAR	2,11	5,91	7,94	7,99	8,04

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan

pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang memengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

a) *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Kesehatan pengelolaan keuangan pemda bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt to Equity Ratio* (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit ketergantungan perusahaan pada utang dan semakin stabil keuangannya.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Tana Tidung dari tahun 2020-2024 berfluktuatif tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi ditahun 2021 yaitu sebesar 0,009 dan yang tertinggi terjadi ditahun 2020 sebesar 0,018. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasio terbaik (terendah) terjadi di tahun 2021 dimana nilai kewajiban yang ada jumlahnya hanya sekitar 0,88% dari total ekuitas yang ada. Sementara nilai rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2020 dimana jumlah total kewajiban yang ada jumlahnya hanya sekitar 1,76% dari total ekuitas yang ada. Adapun capaian rasio terakhir tahun 2024 senilai 0,015 atau nilai kewajiban yang ada sebesar 1,52% dari total ekuitas yang ada.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu 2020-2024 nilainya jauh lebih kecil dibandingkan ekuitas yang dimiliki sehingga dapat dikatakan kemampuan Kabupaten Tana Tidung cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada masih sangat baik.

Tabel II.47.
Rasio Hutang Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	52.760.418.068	26.335.851.424	38.981.170.694	62.705.438.472	63.778.589.327
EKUITAS	2.994.527.249.321	3.000.101.351.544	3.180.124.204.903	3.742.895.594.401	4.198.641.068.581
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	0,018	0,009	0,012	0,017	0,015

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

b) *Total Debt to Total Asset Ratio* (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Atau menunjukkan proporsi total aset yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit risiko perusahaan terhadap perubahan suku bunga dan pembayaran bunga.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Tana Tidung dari tahun 2020-2024 sedikit mengalami fluktuasi dimana angka rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2020 dengan nilai rasio 0,0173 dan yang terendah (terbaik) terjadi di tahun 2021 dengan nilai rasio 0,0087. Oleh karena itu secara keseluruhan Kabupaten Tana Tidung tidak memiliki risiko gagal bayar kewajiban yang ada. Artinya secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar daripada jumlah hutang yang ada di Kabupaten Tana Tidung.

Tabel II.48
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	52.760.418.068	26.335.851.424	38.981.170.694	62.705.438.472	63.778.589.327
AKTIVA	3.047.287.667.389	3.026.437.202.969	3.219.105.375.597	3.805.601.032.873	4.262.419.732.984
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	0,0173	0,0087	0,0121	0,0165	0,0150

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

3. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran aktiva tetap *(fixed assets turn over)*

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan/ penerimaan daerah.

Perkembangan rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu 2020-2024 memiliki tren sedikit berfluktuasi namun terus meningkat. Rasio tahun 2020 mencapai 0,004 dan meningkat hingga 0,013 di tahun 2024. Itu artinya kinerja Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam memanfaatkan aset tetapnya semakin membaik dimana pada tahun 2020 dari Rp. 2,73 triliun nilai aset yang ada mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp. 11,94miliar atau 0,44% dari nilai aset tetap dan pada tahun 2024 berkinerja lebih baik lagi dimana dengan memanfaatkan aset senilai Rp. 3,16 triliun mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD)

sebesar Rp. 42,17 miliar atau 1,34% dari nilai aset. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset tetap terhadap perolehan PAD masih sangat kecil bahkan cenderung menurun. Oleh karena itu efektifitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

Tabel II.49
Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	11.941.721.403	19.857.987.031	20.063.962.145	33.956.641.613	42.168.541.355
AKTIVA TETAP (Aset Tetap)	2.733.034.900.016	2.686.346.843.842	2.555.328.806.864	2.712.608.755.756	3.156.914.634.335
TRASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	0,004	0,007	0,008	0,013	0,013

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami perkembangan positif dimana rasio dari nilai rasio 0,004 di tahun 2020 menjadi 0,010 di tahun 2024. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan total aset di tahun 2020 mampu memberikan keuntungan PAD sebesar 0,39% nilai nilai total aset itu sendiri. Kinerja pemanfaatan total aset di tahun 2024 semakin membaik hingga mampu menghasilkan 0,99% keuntungan dari nilai total aset yang ada.

Secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 rata-rata nilai total aset daerah terbilang memiliki kinerja semakin membaik namun ke depan masih perlu ditingkatkan melalui beberapa strategi antara lain:

a) Pengembangan Aset Komersial: Menggunakan aset tetap seperti tanah kosong, bangunan tidak terpakai, atau properti komersial untuk dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan, pusat hiburan, atau kompleks perkantoran yang bisa disewakan kepada pihak swasta. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan sewa yang signifikan.
b) Penyediaan Infrastruktur: Membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, tol, atau pusat logistik yang dapat menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat memberikan izin operasi atau kontrak kepada pihak swasta yang akan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah sebagai imbalan.

c) Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Jika daerah memiliki sumber daya alam seperti hutan, tambang, atau lahan pertanian yang luas, pemerintah daerah dapat menjual hak pengelolaannya kepada pihak swasta dengan cara lelang atau kontrak konsesi. Pendapatan dari penjualan hak pengelolaan ini dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.

d) Pembangunan Properti Publik: Membangun properti publik seperti gedung perkantoran, pusat pemerintahan, atau fasilitas publik lainnya yang dapat disewakan kepada pihak swasta atau digunakan untuk kegiatan komersial. Pendapatan sewa dari properti ini dapat menjadi sumber pendapatan tetap bagi pemerintah daerah.

e) Kemitraan Publik-Privat (KPP): Melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk mengembangkan atau mengelola aset tetap. Dalam kemitraan ini, pemerintah daerah dapat memberikan izin pengelolaan atau kontrak kepada pihak swasta dengan imbalan bagi hasil atau pembayaran sewa.

f) Peningkatan Efisiensi Operasional: Memastikan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikelola dengan efisien dan optimal. Hal ini mencakup pemeliharaan rutin, penggunaan energi yang efisien, dan manajemen biaya operasional secara keseluruhan.

g) Pengembangan Wisata: Pemerintah daerah dapat mengembangkan aset tetap seperti pantai, bukit/gunung, benda sejarah dan lainnya menjadi destinasi wisata yang menarik. Pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.

h) Pengelolaan Aset Digital: Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tetap, termasuk pemantauan dan pemeliharaan, serta menghasilkan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Tabel II.50
Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	11.941.721.403	19.857.987.031	20.063.962.145	33.956.641.613	42.168.541.355
TOTAL AKTIVA (Jumlah Aset)	3.047.287.667.389	3.026.437.202.969	3.219.105.375.597	3.805.601.032.873	4.262.419.732.984
RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA	0,004	0,007	0,006	0,009	0,010

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

2.2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah**.**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tana Tidung 2020-2024 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi

belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan. Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata persentasenya sebesar 27,31%. Proporsi belanja aparatur terbesar terjadi di tahun 2021 yang mencapai 36,48% sedangkan capaian terakhir tahun 2024 sebesar 23,12%.

Jika dilihat dari keseluruhan perkembangan proporsinya yang tidak pernah lebih dari 37% bisa dikatakan proporsi belanjanya masih cukup sehat. Meskipun begitu Pemerintah Daerah tetap harus memperhatikan proporsi belanja aparatur agar tidak melebihi batas yang dapat memengaruhi keseimbangan anggaran dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, peningkatan belanja pegawai yang signifikan tanpa pertumbuhan yang sesuai dalam pendapatan bisa menjadi beban fiskal yang besar bagi pemerintah, sehingga memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang cermat agar belanja publiknya bisa dijaga kualitas maupun kuantitasnya.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.51
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2020	260.615,70	731.753,05	35,62%
2	2021	272.562,79	747.078,71	36,48%
3	2022	293.426,55	1.148.452,57	25,55%
4	2023	309.855,34	1.325.635,57	23,37%
5	2024	313.541,04	1.356.243,52	23,12%
Rata-Rata		**290.000,28**	**1.061.832,68**	**27,31%**

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2020-2024 meningkat signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,17% per tahun dari Rp. 365,45 miliar (2020) menjadi Rp. 482,16 miliar (2024). Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya belanja pegawai dari Rp. 237,69 miliar (2020) menjadi Rp. 309,85 miliar (2024) dan belanja hibah dari Rp. 30,84 miliar (2020) menjadi Rp. 36,79 miliar (2024). Jika dikaitkan dengan rata-rata belanja daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang sebesar Rp. 819,230 miliar maka rata-rata proporsi Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas mencapai 45,93%. Hal ini masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah Daerah agar ruang fiskal untuk belanja publik ke depan bisa ditingkatkan kembali. Oleh karena itu diperlukan strategi khususnya untuk menekan biaya aparatur antara lain:

1) Evaluasi Kebutuhan Pegawai: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pegawai di setiap unit organisasi Ini termasuk peninjauan terhadap struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta kinerja pegawai yang sudah ada. Dengan memahami kebutuhan yang sebenarnya, pemerintah dapat menghindari pengadaan pegawai yang tidak perlu.
2) Optimalisasi Produktivitas: Mendorong produktivitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang efisien, serta menerapkan praktik kerja yang efektif. Dengan meningkatkan produktivitas, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit.
3) Pengendalian Pengadaan Pegawai Baru: Mengendalikan pengadaan pegawai baru dengan membatasi jumlah penerimaan pegawai baru atau memperlambat proses rekrutmen. Pemerintah dapat memprioritaskan pengisian posisi yang kritis atau strategis, sambil mempertimbangkan opsi untuk menutup atau menggabungkan posisi yang tidak terlalu penting.
4) Peningkatan Efisiensi Administrasi: Mengurangi birokrasi dan proses administrasi yang berlebihan yang dapat menghambat efisiensi pelayanan

publik. Memperkenalkan inovasi dalam sistem administrasi seperti penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin atau integrasi layanan online dapat membantu mengurangi belanja pegawai.

5) Pengendalian Tunjangan dan Insentif: Mengkaji ulang dan menyesuaikan tunjangan dan insentif yang diberikan kepada pegawai, seperti tunjangan kinerja atau bonus. Memastikan bahwa insentif tersebut sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang sebenarnya, serta terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.

Penghapusan atau Penyederhanaan Jabatan: Melakukan peninjauan terhadap struktur jabatan dan mempertimbangkan untuk menghapus atau menyederhanakan jabatan yang tidak lagi relevan atau diperlukan. Ini dapat membantu mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan. Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.52

Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Belanja Operasi Wajib dan Mengikat**	**268.989,04**	**271.159,04**	**284.034,37**	**315.135,45**	**346.671,90**	**6,55**
1.1	Belanja Pegawai	237.691,52	260.615,70	272.562,79	293.426,55	309.855,34	6,85
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	30.841,40	10.471,54	11.443,06	21.037,04	36.798,94	4,51
1.5	Belanja Bantuan Sosial	456,12	71,80	28,52	671,86	17,62	(55,67)
1.6	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	
2	**Belanja Transfer**	**96.463,88**	**103.010,84**	**94.432,23**	**136.027,43**	**135.490,93**	**9,57**
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	96.463,88	103.010,84	94.432,23	136.027,43	135.490,93	9,57
3	**Belanja Tak Terduga**	**-**	**272,12**	**-**	**-**	**-**	
4	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	
4.2	penyertaan modal daerah;	-	-	-	-	-	
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	-	-	-	-	-	
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	**365.452,92**	**374.442,00**	**378.466,61**	**451.162,88**	**482.162,83**	**7,17**

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2024 (diolah)

.

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaraan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2020-2024) defisit riil anggaran hanya terjadi pada tahun 2020 dimana defisit riil pada tahun tersebut sebesar Rp -16,287 miliar. Sementara pada tahun 2021-2023 terjadi surplus anggaran.

Tabel II.53
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	730.359,54	772.036,81	811.815,44	1.315.713,01	1.337.636,28
	dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	746.647,45	731.753,05	747.078,71	1.148.452,57	1.325.635,57
3	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	(Defisit Riil)	-16.287,91	40.283,76	64.736,73	167.260,45	12.000,71

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

Jika dibandingkan antara defisit riil angggaran daerah dan komponen penutupnya diketahui bahwa defisit riil anggaran yang terjadi di tahun 2020 dapat ditutup oleh SiLPA pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 53,974 miliar. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa target defisit riil yang ditetapkan masih sangat aman bahkah masih bisa dimaksimalkan selama tidak melebihi target SiLPA atau komponen penutup lainnya yang ditetapkan

Tabel II.54
Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	53.974,37	36.203,86	76.487,62	141.090,88	308.365,96
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan	-	-	-	-	-
Total Komposisi Penutup Defisit	**53.974,37**	**36.203,86**	**76.487,62**	**141.090,88**	**308.365,96**

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2024 (diolah)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Tana Tidung dari tahun 2020-2024 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit riil anggaran yang ada di Kabupaten Tana Tidung.

2.2.3 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPJMD hingga tahun 2030. Dalam konteks kemandirian fiskal, kemungkinan besar penerimaan dana transfer akan semakin berkurang. Oleh karena itu penggunaan ruang fiskal daerah kedepan harus lebih mengedepankan asas efektifitas dan efisiensi.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2026 hingga 2030.

2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan daerah adalah perkiraan atau estimasi pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam periode tahun 2025-2029. Proyeksi ini penting untuk perencanaan keuangan serta untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Ada beberapa acuan yang dipakai dalam rangka memproyeksikan pendapatan daerah antara lain:

1) Analisis Historis: Melakukan analisis terhadap data historis pendapatan daerah untuk menentukan tren dan pola pengeluaran. Ini dapat melibatkan peninjauan data pendapatan tahun sebelumnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan dari waktu ke waktu.
2) Analisis Ekonomi: Mengkaji kondisi ekonomi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal dapat berpengaruh pada pendapatan daerah.
3) Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan: Berdasarkan data historis dan analisis ekonomi, membuat proyeksi tentang pertumbuhan pendapatan masa depan khususnya mencakup pendapatan pajak,, pendapatan dari investasi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.
4) Analisis Demografi: Memahami demografi penduduk daerah dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi permintaan layanan publik dan ketersediaan sumber daya. Misalnya, pertumbuhan populasi dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dari pajak properti dan pajak penjualan.
5) Perencanaan Sensitivitas: Mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan mengembangkan skenario alternatif berdasarkan variabel-variabel yang mungkin berubah, seperti perubahan kebijakan pajak atau fluktuasi ekonomi dan apakah proyeksi tersebut realistis dan konservatif.
6) Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi berkala terhadap proyeksi pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya untuk mengetahui keberhasilan proyeksi dan mengidentifikasi area-area di mana penyesuaian mungkin diperlukan.
7) Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik, seperti pengendalian biaya dan diversifikasi sumber pendapatan, untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.
8) Tahun dasar proyeksi yang digunakan adalah angka realisasi APBD tahun 2023 dan/atau target APBD tahun 2024, serta data APBD Tahun 2025 yang telah dilakukan efisiensi menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Tana Tidung masih bertumpu pada dana transfer pemerintah pusat khususnya dari sumber dana perimbangan. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Tana Tidung masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya. Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD) dengan melihat berbagai variabel yang berkaitan dengannya.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah kabupaten Tana Tidung tahun 2026-2030 diproyeksikan hanya tumbuh ± 3,00% per tahun dari Rp. 1,06 triliun (2026) menjadi Rp.1,19 triliun (2030). Nilai proyeksinya relatif sangat kecil mengingat ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer khususnya dana Perimbangan masih sangat tinggi. Sehingga proyeksi Pendapatannya di targetkan agak rendah yang fokusnya di PAD. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas perencanaan anggaran yang lebih realistis maka fokus pertumbuhan Pendapatan Daerah ini akan didongkrak oleh target tumbuhnya PAD. Sementara untuk sumber pendapatan seperti pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah akan diproyeksikan dengan tingkat pertumbuhan 0% atau flat sama nilai dengan angka realisasi tahun terakhir yaitu realisasi tahun 2023 ataupun target tahun 2024.

Untuk PAD sendiri dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhan rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir yang sebesar 37,08% per tahun, dengan berbagai pertimbangan ke depan maka proyeksi PAD tahun 2026-2030 diproyeksikan tumbuh ± 2,39 % per tahun dari Rp. 32,87 miliar (2026) menjadi Rp. 36,99 miliar (2030, dengan seluruh komponan PAD yang diproyeksikan tumbuh sebesar 3% per tahun.

Proyeksi pertumbuhan Pajak Daerah yang sebesar ± 3% per tahun dari Rp. 9,13 miliar (2026) menjadi Rp. 10,27 miliar (2030) juga mempertimbangkan pada rata-rata realisasi pertumbuhan pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang juga tumbuh ± 22,63% per tahun. Adapun target minimal proyeksi pertumbuhan pajak daerah tersebut dilakukan melalui serangkaian kebijakan utama yaitu:

1) Penilaian Properti yang Akurat: Memastikan penilaian properti yang akurat dapat membantu pemerintah daerah mengenakan pajak properti khususnya

NJOP yang sesuai dengan nilai aktualnya. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan teratur terhadap data properti dan menggunakan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk membantu dalam proses penilaian.

2) Peningkatan Kepatuhan: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka dapat menjadi langkah penting. Pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang kewajiban pajak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan.
3) Diversifikasi Sumber Pajak: Selain pajak properti, pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pajak penjualan, pajak hotel, atau bahkan pajak atas industri tertentu yang signifikan di Kabupaten Tana Tidung. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pajak saja.
4) Inisiatif Peningkatan Layanan: Meningkatkan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi dapat membuat masyarakat lebih rela membayar pajak jika mereka melihat manfaat yang diterima dari pajak yang mereka bayar.
5) Kemitraan Publik-Swasta: Bermitra dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan properti yang dapat meningkatkan nilai properti dan pendapatan pajak daerah.
6) Peninjauan Kembali Insentif Pajak: Meninjau kembali insentif pajak kepada industri atau pemilik properti tertentu untuk mendorong investasi atau pengembangan. Namun, jika insentif ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, maka perlu dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah daerah sebanding dengan manfaat yang diberikan.
7) Evaluasi Kebijakan Pajak: Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang ada secara berkala untuk memastikan kebijakan pajak masih relevan dan efektif dalam menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan.
8) Peningkatan Pengawasan dan Transparansi: Membangun sistem pengawasan yang kuat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah yang dapat membantu mencegah kebocoran dan penyalahgunaan potensi pajak daerah, sehingga memastikan bahwa semua potensi pendapatan pajak yang ada dapat dipungut dengan efisien dan efektif.

Proyeksi pertumbuhan Retribusi Daerah tahun 2026-2030 ditargetkan tumbuh ± 3% per tahun dari Rp. 642,68 juta (2026) menjadi 723,35 juta (2030) sementara realisasi rata-rata pertumbuhan retribusi daerah 5 (lima) tahun terakhir sebesar -7,69% per tahun. Terdapat penurunan realisasi retribusi pada tahun 2022 ke 2023 yang merupakan imbas dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dimana terdapat sejumlah objek retribusi yang

sudah tidak boleh dilakukan pemungutan. Untuk itu diperlukan strategi untuk memaksimalkan kembali pendapatan retribusi daerah agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan melalui:

1) Analisis Potensi Sektor dan Layanan: Identifikasi sektor dan layanan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan retribusi. Ini bisa termasuk sektor pariwisata, terminal, perizinan usaha, parkir, pasar, pelayanan persampahan dan sebagainya.
2) Perbaikan Sistem Pungutan Retribusi: Memastikan bahwa sistem pungutan berjalan efisien dan transparan. Meminimalkan birokrasi, mempercepat proses, dan memperbarui peraturan serta tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
3) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran retribusi. Ini mencakup pemeriksaan secara rutin, sanksi yang tegas terhadap pelanggar, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi kecurangan.
4) Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengumpulan retribusi, seperti sistem pembayaran online, terminal parkir yang canggih, atau perangkat lunak manajemen pajak yang efisien.
5) Promosi dan Pemasaran: Melakukan promosi aktif terhadap layanan dan fasilitas yang dikenakan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik lebih banyak pengguna atau pelanggan.
6) Kemitraan Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola beberapa layanan atau fasilitas, dengan mempertimbangkan kontrak yang menguntungkan pihak daerah dalam hal pendapatan retribusi.
7) Diversifikasi Pendapatan: Tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, tapi mencari cara untuk mendiversifikasi pendapatan daerah, termasuk eksplorasi potensi baru dan inovasi dalam pengumpulan retribusi.
8) Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengumpulan retribusi, mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
9) Peningkatan Kualitas Layanan: Menawarkan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, sehingga mereka merasa nilai yang mereka bayarkan sebanding dengan layanan yang mereka terima.
10) Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan dampak positifnya bagi pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2026-2030 diproyeksikan tumbuh ± 3% per tahun dari Rp. 6,28 miliar (2026) menjadi Rp. 7,07 miliar (2030). Untuk mencapai target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan maka perlu didorong BUMD

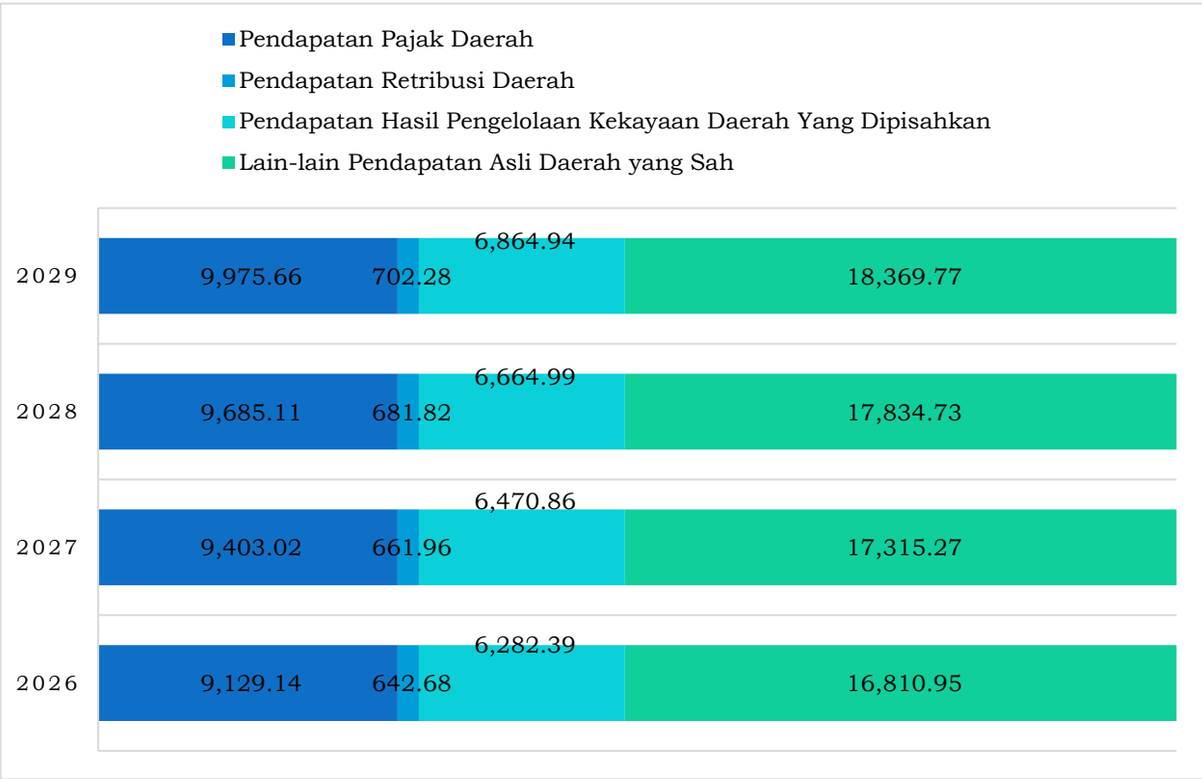
dan Swasta yang terdapat penyertaan modal di dalamnya agar dapat lebih produktif melalui:

1) Mendorong Penyusunan Rencana Bisnis yang Komprehensif: BUMD dan swasta yang terkait harus menyusun rencana bisnis yang jelas dan komprehensif yang mencakup target keuangan jangka pendek dan jangka panjang, strategi pemasaran, pengelolaan risiko, dan lain-lain.
2) Mendorong Pengelolaan Efisiensi Operasional: Memastikan operasional khususnya BUMD berjalan dengan efisien, termasuk pengelolaan biaya yang efektif, optimalisasi proses produksi, dan manajemen rantai pasok yang baik.
3) Mendorong Inovasi Produk dan Layanan: Mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Inovasi dapat mencakup peningkatan kualitas, fitur baru, atau pendekatan yang berbeda dalam pemasaran.
4) Mendorong Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan khususnya oleh BUMD untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru.
5) Mendorong Ekspansi Pasar: Mencari peluang untuk memperluas pasar khususnya BUMD, baik secara regional maupun nasional. Ini bisa melalui ekspansi geografis, diversifikasi produk, atau penetrasi pasar yang lebih dalam.
6) Mendorong Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan swasta atau entitas lain yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan BUMD, seperti dalam hal teknologi, distribusi, atau pemasaran.
7) Mendorong Manajemen Risiko yang Efektif: Mengelola risiko dengan baik untuk menghindari kerugian yang tidak perlu dan memastikan keberlanjutan operasional. Ini termasuk manajemen risiko finansial, operasional, dan reputasi.
8) Mendorong Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan investasi dalam pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan BUMD.
9) Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMD, serta melakukan penyesuaian strategis jika diperlukan.
10) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMD, serta memastikan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah kurun waktu 2026-

2030 ditargetkan naik ± 3% per tahun dari Rp. 16,81 miliar (2026) menjadi Rp. 18,92 miliar (2030). Strategi umum untuk mencapai target pertumbuhan ini adalah dengan memaksimalkan dan mengefektifkan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang dapat meningkatkan penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga.

Gambar II.47
Target Komposisi PAD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030



Sumber: Bappeda Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung masih didominasi oleh sumber Pendapatan Transfer yang besar kecilnya terutama sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara. Untuk menjaga kualitas perencanaan keuangan daerah agar tidak terlalu dinamis sebagai dasar menyusun penganggaran pembangunan, maka pendekatan proyeksi Pendapatan Transfer khususnya transfer pemerintah pusat menggunakan pendekatan konstan sesuai pendapatan transfer yang diperoleh (realisasi) pada tahun 2024. Dengan kata lain pertumbuhan transfer pemerintah pusat pertumbuhannya 0%. Komponen pendapatan transfer yang ditargetkan sedikit mengalami pertumbuhan adalah dari pendapatan transfer antar daerah dengan target pertumbuhan sebesar ± 15,73% per tahun yang berasal dari sumber Bagi Hasil Pajak. Berdasarkan beberapa asumsi tersebut maka secara keseluruhan Pendapatan Transfer ditargetkan hanya tumbuh sangat kecil yaitu sebesar ± 3% per tahun dari Rp. 1,02 triliun (2026) menjadi Rp. 1,15 triliun (2030).

Untuk sumber transfer pemerintah pusat ditargetkan sebesar 3,00% per tahun dari Rp. 1,01 triliun pada tahun 2026 hingga Rp 1,14 triliun pada tahun 2030. Dengan kata lain Dana Perimbangan ditargetkan dari tahun 2026-2030 meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,00% per tahun yaitu sebesar Rp. 976,36 miliar pada tahun 2026 diproyeksikan meningkat hingga Rp 1,09 triliun pada tahun 2030.

Gambar II.48
Target Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2026-2030



Sumber: Bappeda Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sumber Pendapatan Transfer yang ditargetkan naik adalah dari Transfer Antar Daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar ± 3% per tahun dari Rp. 11,38 miliar (2026) menjadi Rp. 12,80 miliar (2030). Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Tana Tidung tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.55

Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030 (dalam jutaan)

No	Uraian	Baseline	Proyeksi				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**	**1.337.636,28**	**1.056.253,89**	**1.087.941,51**	**1.120.579,75**	**1.154.197,14**	**1.188.823,06**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**42.168,54**	**32.865,16**	**33.851,11**	**34.866,65**	**35.912,65**	**36.990,03**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.778,41	9.129,14	9.403,02	9.685,11	9.975,66	10.274,93
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	705,97	642,68	661,96	681,82	702,28	723,35
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.930,22	6.282,39	6.470,86	6.664,99	6.864,94	7.070,88
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.753,93	16.810,95	17.315,27	17.834,73	18.369,77	18.920,87
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.278.153,59**	**1.023.165,33**	**1.053.860,29**	**1.085.476,10**	**1.118.040,39**	**1.151.581,60**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**1.209.010,60**	**1.011.789,74**	**1.042.143,43**	**1.073.407,74**	**1.105.609,97**	**1.138.778,27**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**1.165.044,77**	**976.364,70**	**1.005.655,65**	**1.035.825,32**	**1.066.900,07**	**1.098.907,08**
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak/SDA	698.092,97	518.527,01	534.082,82	550.105,31	566.608,47	583.606,72
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	425.690,87	414.741,45	427.183,70	439.999,21	453.199,18	466.795,16
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	41.260,93	43.096,24	44.389,13	45.720,80	47.092,42	48.505,20
1.2.1.2	**Dana Insentif Daerah**	14.164,04	7.217,57	7.434,10	7.657,12	7.886,83	8.123,44
1.2.1.3	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Baseline	Proyeksi				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.1.4	**Dana Desa**	**29.801,78**	**28.207,47**	**29.053,69**	**29.925,30**	**30.823,06**	**31.747,75**
1.2.2	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	**69.142,99**	**11.375,59**	**11.716,86**	**12.068,37**	**12.430,42**	**12.803,33**
1.2.2.1	**Pendapatan Bagi Hasil**	31.239,11	11.375,59	11.716,86	12.068,37	12.430,42	12.803,33
1.2.2.2	**Bantuan Keuangan**	**37.903,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	29.750,00	-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	8.153,89	-	-	-	-	-
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**17.314,15**	**223,39**	**230,10**	**237,00**	**244,11**	**251,43**
1.3.1	Pendapatan Hibah	17.314,15	-	-	-	-	-
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	223,39	230,10	237,00	244,11	251,43

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

b. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah mengacu pada pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki rencana anggaran yang matang yang mencakup identifikasi kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah yang pertama adalah menetapkan pada belanja yang wajib diluar Pagu OPD antara lain belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia (penerimaan) dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun kebijakan perencanaan pagu indikatif OPD diarahkan pada:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu :
    a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
    b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
5. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Tana Tidung, termasuk

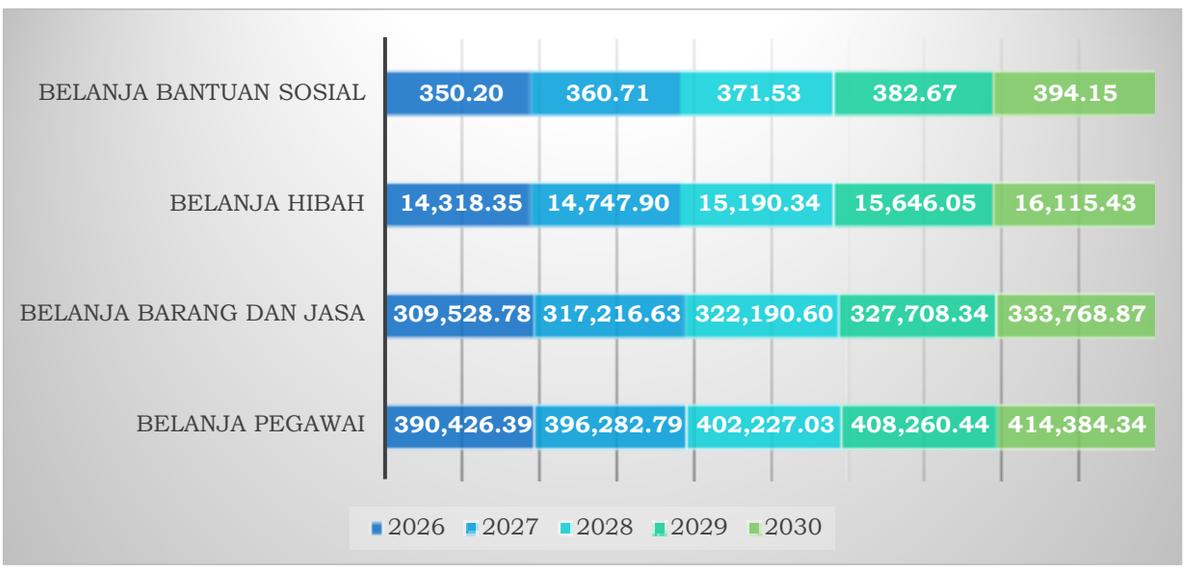
investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam 5 (lima) tahun ke depan diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan ± 1,98% per tahun dari Rp. 1,28 triliun (2026) menjadi Rp. 1,37 triliun (2030). Target pertumbuhan Belanja Daerah ini relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata realisasi Belanja Daerah dalam 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu 2020-2024 yang hanya tumbuh ± 15,43% per tahun.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya dari sisi PAD, maka proporsi belanja modal khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan investasi akan ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jenis belanja lainnya terus ditekan atau diminimalkan.

Untuk Belanja Operasi secara agregat juga dinaikkan dibandingkan target APBD tahun 2024 dan dari realisasi tahun 2023. Adapun belanja operasi akan ditargetkan sedikit meningkat 1,72% per tahun dari Rp. 714,62 miliar (2026) menjadi Rp. 764,66 (2030). Dalam komposisi Belanja Operasi, jenis belanja Hibah akan ditingkatkan dengan proyeksi pertumbuhan 3% per tahun dari Rp. 14,32 miliar (2026) menjadi Rp16,12 miliar (2030) kemudian Belanja Bantuan Sosial juga ditingkatkan dengan proyeksi pertumbuhan 3% per tahun dari 350,20 juta (2026) menjadi 394,15 juta (2030).

Gambar II.49
Target Belanja Operasi Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030
(dalam juta)



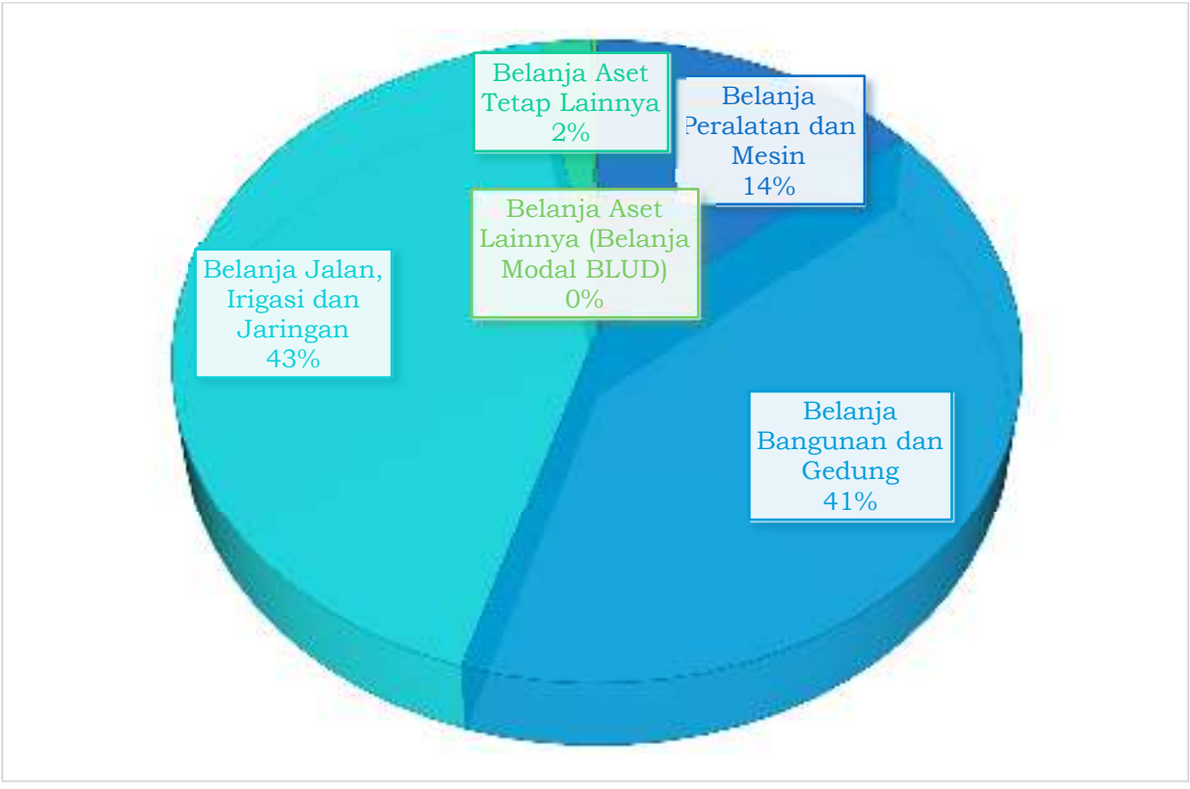
Sumber: Bappeda Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

Dalam meningkatkan layanan infrastruktur publik serta menarik investasi daerah, porsi belanja modal akan ditingkatkan cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan ± 2,17 % per tahun dari Rp 434,73 miliar (2026) dan Rp. 460,92 miliar (2030). Porsi Belanja Modal terbesar diarahkan untuk

meningkatkan kulitas layanan jalanan, irigasi dan jaringan (43%), kemudian belanja bangunan dan Gedung (41%), kemudian belanja peralatan dan mesin (14%), dan sisanya belanja aset tetap lainnya (2%). Arah pembangunan jalan, irigasi dan jaringan difokuskan / diprioritaskan pada wilayah yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi wilayah. Untuk itu sasaran pembangunan juga harus jelas dan spesifik. Sedangkan belanja peralatan dan mesin diarahkan untuk mendorong inovasi yang dapat mempercepat/mengakselerasi proses produksi yang ada di masyarakat. harapannya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan produktivitas wilayah secara bersamaan. Untuk belanja bangunan dan Gedung diarahkan pada bangunan dan Gedung pelayanan publik seperti perkantoran, fasilitas umum, dan sejenisnya.

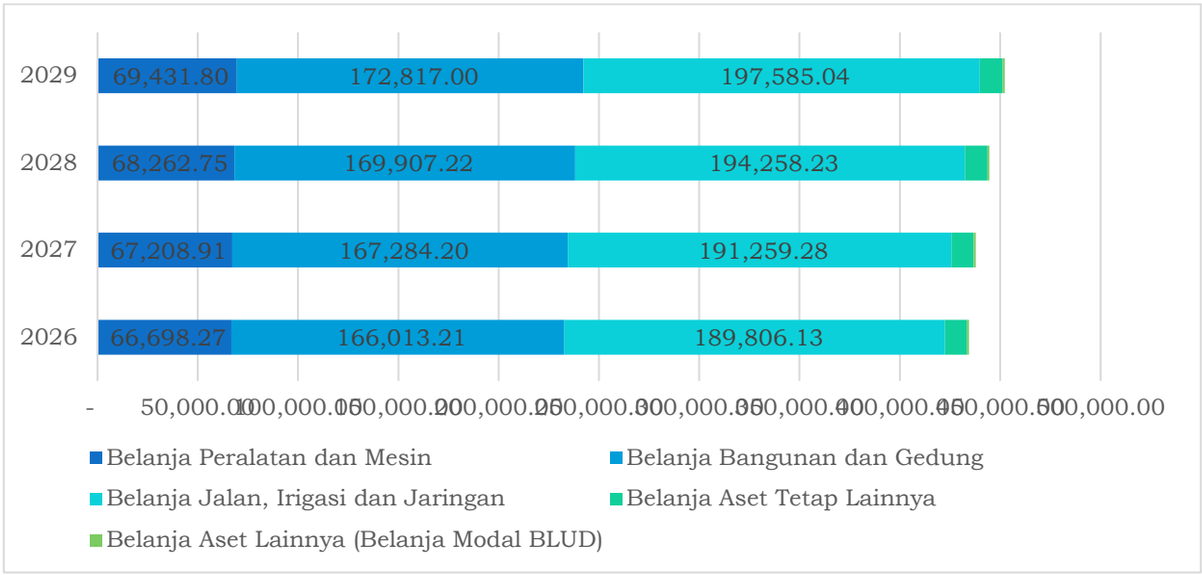
Secara rinci target tahunan komponen belanja Modal dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar II.50
Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2026-2030



Sumber: Bappeda Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

Gambar II.51
Target Alokasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030 (dalam juta)



Sumber: Bappeda Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

Untuk Belanja Tak Terduga tahun 2026-2030 ditargetkan konstan yaitu sebesar Rp. 8,16 miliar per tahun. Penggunaan Belanja Tak Terduga ini dialokasikan untuk kejadian mendesak dan darurat seperti penanganan bencana banjir yang butuh waktu respon cepat dan sejenisnya.

Untuk Belanja Transfer ditargetkan dengan pertumbuhan yang relatif konstan hanya ± 3% per tahun dari Rp 122,48 miliar (2026) sampai Rp 137,32 miliar (2030). Proyeksi peningkatan belanja transfer disebabkan oleh meningkatnya belanja transfer bantuan keuangan yang diproyeksikan naik dari Rp. 122 miliar (2026) menjadi Rp. 136,79 miliar (2030) yang didasarkan pada formula minimal dana transfer ke desa dengan mempertimbangkan target pendapatan transfer yang juga konstan yaitu DAU, DBH Pajak dan Non Pajak/SDA, serta Pendapatan Dana Desa.

Dengan melihat semakin tertekannya ruang fiskal daerah maka kualitas belanja daerah perlu menjadi prinsip utama. Untuk itu diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui:

1) Pengelolaan Anggaran yang Teliti: Pemerintah daerah harus membuat anggaran yang realistis dan teliti, dengan memprioritaskan pengeluaran yang penting dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Hal ini melibatkan peninjauan secara menyeluruh terhadap setiap pos anggaran, mengidentifikasi area-area di mana penghematan dapat dicapai, dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
2) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pengeluaran. Pemerintah daerah harus memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat serta

memperkuat sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab.

3) Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Proses pengadaan barang dan jasa merupakan area penting untuk mencapai efisiensi belanja daerah. Pemerintah daerah harus menggunakan mekanisme pengadaan yang transparan dan kompetitif, serta melakukan negosiasi harga yang baik dengan pemasok untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien.
4) Penggunaan Teknologi Informasi: Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Sistem informasi keuangan yang canggih dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
5) Kebijakan Penghematan Biaya: Pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan penghematan biaya, seperti pengurangan pengeluaran yang tidak penting, efisiensi dalam penggunaan energi dan sumber daya lainnya, serta restrukturisasi program-program yang kurang efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat.
6) Kolaborasi dan Konsolidasi: Kolaborasi antar pemerintah daerah atau konsolidasi layanan publik dapat membantu mengurangi biaya administratif dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan. Misalnya, berbagi sumber daya dengan pemerintah daerah lain atau menggabungkan layanan yang serupa untuk mencapai skala ekonomis.
7) Pengembangan Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pengembangan SDM yang berkualitas dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan pengembangan pegawai pemerintah yang kompeten dalam manajemen keuangan dan pengadaan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana publik.
8) Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan: Pemerintah daerah harus secara teratur mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pengeluaran dan kinerja keuangan daerah untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan.

Secara keseluruhan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.56
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030 (dalam juta)

No	Uraian	Baseline	Proyeksi				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
2	**BELANJA**	**1.325.635,57**	**1.280.000,00**	**1.300.500,31**	**1.322.510,62**	**1.346.031,47**	**1.371.065,66**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**744.912,89**	**714.623,73**	**728.608,02**	**739.979,50**	**751.997,50**	**764.662,79**
2.1.1	Belanja Pegawai	309.855,34	390.426,39	396.282,79	402.227,03	408.260,44	414.384,34
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	398.240,99	309.528,78	317.216,63	322.190,60	327.708,34	333.768,87
2.1.5	Belanja Hibah	36.798,94	14.318,35	14.747,90	15.190,34	15.646,05	16.115,43
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	17,62	350,20	360,71	371,53	382,67	394,15
2.2	**BELANJA MODAL**	**445.231,75**	**434.732,76**	**438.061,06**	**444.929,88**	**452.549,61**	**460.918,91**
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	-	217,37	219,03	222,46	226,27	230,46
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	38.910,09	66.698,27	67.208,91	68.262,75	69.431,80	70.715,85
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	225.178,49	166.013,21	167.284,20	169.907,22	172.817,00	176.013,02
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	179.911,50	189.806,13	191.259,28	194.258,23	197.585,04	201.239,11
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	305,80	10.981,92	11.066,00	11.239,52	11.432,00	11.643,42
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	925,87	1.015,86	1.023,64	1.039,69	1.057,50	1.077,05
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**-**	**8.164,23**	**8.164,23**	**8.164,23**	**8.164,23**	**8.164,23**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	-	8,164,23	8,164,23	8,164,23	8,164,23	8,164,23

No	Uraian	Baseline	Proyeksi				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**135.490,93**	**122.479,28**	**125.667,00**	**129.437,01**	**133.320,12**	**137.319,72**
2.4.1	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	**-**	**472,48**	**486,66**	**501,26**	**516,29**	**531,78**
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	472,48	486,66	501,26	516,29	531,78
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	-
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.4.2	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**135.490,93**	**122.006,80**	**125.180,34**	**128.935,75**	**132.803,83**	**136.787,94**
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	357,00	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	135.133,93	122.006,80	125.180,34	128.935,75	132.803,83	136.787,94
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	12.000,71	(223.746,11)	(212.558,81)	(201.930,87)	(191.834,32)	(182.242,61)

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

2.2.3.2 Proyeksi Pembiayaan

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Tana Tidung tahun 2026-2030 adalah dengan menekan dan menurunkan SiLPA sebagai sumber penerimaan Daerah sekaligus menekan seluruh bentuk pengeluaran pembiayaan. Hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana menciptakan pembiayaan netto bernilai positif agar dapat menutup defisit anggaran yang ada.

Secara keseluruhan terdapat beberapa arah kebijakan pembiayaan terkait kondisi surplus atau desifit anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito
2. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

Adapun proyeksi pembiayaan dan keseluruhan APBD Kabupaten Tana Tidung tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.57

Proyeksi APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030 (dalam juta)

No	Uraian	Baseline	Proyeksi				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**	**1.337.636,28**	**1.056.253,89**	**1.087.941,51**	**1.120.579,75**	**1.154.197,14**	**1.188.823,06**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**42.168,54**	**32.865,16**	**33.851,11**	**34.866,65**	**35.912,65**	**36.990,03**
1.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	7.778,41	9.129,14	9.403,02	9.685,11	9.975,66	10.274,93
1.1.2	**Pendapatan Retribusi Daerah**	705,97	642,68	661,96	681,82	702,28	723,35
1.1.3	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**	4.930,22	6.282,39	6.470,86	6.664,99	6.864,94	7.070,88
1.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	28.753,93	16.810,95	17.315,27	17.834,73	18.369,77	18.920,87
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.278.153,59**	**1.023.165,33**	**1.053.860,29**	**1.085.476,10**	**1.118.040,39**	**1.151.581,60**
1.2.1	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**1.209.010,60**	**1.011.789,74**	**1.042.143,43**	**1.073.407,74**	**1.105.609,97**	**1.138.778,27**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**1.165.044,77**	**976.364,70**	**1.005.655,65**	**1.035.825,32**	**1.066.900,07**	**1.098.907,08**
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak/SDA	698.092,97	518.527,01	534.082,82	550.105,31	566.608,47	583.606,72
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	425.690,87	414.741,45	427.183,70	439.999,21	453.199,18	466.795,16
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	41.260,93	43.096,24	44.389,13	45.720,80	47.092,42	48.505,20
1.2.1.2	**Dana Insentif Daerah**	14.164,04	7.217,57	7.434,10	7.657,12	7.886,83	8.123,44
1.2.1.3	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	**Dana Desa**	**29.801,78**	**28.207,47**	**29.053,69**	**29.925,30**	**30.823,06**	**31.747,75**
1.2.2	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	**69.142,99**	**11.375,59**	**11.716,86**	**12.068,37**	**12.430,42**	**12.803,33**
1.2.2.1	**Pendapatan Bagi Hasil**	31.239,11	11.375,59	11.716,86	12.068,37	12.430,42	12.803,33
1.2.2.2	**Bantuan Keuangan**	**37.903,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	29.750,00	-	-	-	-	-

No	Uraian	Baseline	Proyeksi				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	8.153,89	-	-	-	-	-
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**17.314,15**	**223,39**	**230,10**	**237,00**	**244,11**	**251,43**
1.3.1	**Pendapatan Hibah**	17.314,15	-	-	-	-	-
1.3.2	**Pendatan Dana Darurat**	-	-	-	-	-	-
1.3.3	**Pendapatan Lainnya**	-	223,39	230,10	237,00	244,11	251,43
2	**BELANJA**	**1.325.635,57**	**1.280.000,00**	**1.300.500,31**	**1.322.510,62**	**1.346.031,47**	**1.371.065,66**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**744.912,89**	**714.623,73**	**728.608,02**	**739.979,50**	**751.997,50**	**764.662,79**
2.1.1	**Belanja Pegawai**	309.855,34	390.426,39	396.282,79	402.227,03	408.260,44	414.384,34
2.1.2	**Belanja Barang dan Jasa**	398.240,99	309.528,78	317.216,63	322.190,60	327.708,34	333.768,87
2.1.5	**Belanja Hibah**	36.798,94	14.318,35	14.747,90	15.190,34	15.646,05	16.115,43
2.1.6	**Belanja Bantuan Sosial**	17,62	350,20	360,71	371,53	382,67	394,15
2.2	**BELANJA MODAL**	**445.231,75**	**434.732,76**	**438.061,06**	**444.929,88**	**452.549,61**	**460.918,91**
2.2.1	**Belanja Modal (Tanah)**	-	217,37	219,03	222,46	226,27	230,46
2.2.2	**Belanja Peralatan dan Mesin**	38.910,09	66.698,27	67.208,91	68.262,75	69.431,80	70.715,85
2.2.3	**Belanja Bangunan dan Gedung**	225.178,49	166.013,21	167.284,20	169.907,22	172.817,00	176.013,02
2.2.4	**Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**	179.911,50	189.806,13	191.259,28	194.258,23	197.585,04	201.239,11
2.2.5	**Belanja Aset Tetap Lainnya**	305,80	10.981,92	11.066,00	11.239,52	11.432,00	11.643,42
2.2.6	**Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)**	925,87	1.015,86	1.023,64	1.039,69	1.057,50	1.077,05
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**-**	**8.164,23**	**8.164,23**	**8.164,23**	**8.164,23**	**8.164,23**
2.3.1	**Belanja Tak Terduga**	-	8.164,23	8.164,23	8.164,23	8.164,23	8.164,23
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**135.490,93**	**122.479,28**	**125.667,00**	**129.437,01**	**133.320,12**	**137.319,72**
2.4.1	**Belanja Transfer Bagi Hasil**	**-**	**472,48**	**486,66**	**501,26**	**516,29**	**531,78**
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	472,48	486,66	501,26	516,29	531,78
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	-
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.4.2	**Belanja Transfer Bantuan Keuangan**	**135.490,93**	**122.006.80**	**125.180,34**	**128.935,75**	**132.803,83**	**136.787,94**

.

No	Uraian	Baseline	Proyeksi				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	357,00	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	135.133,93	122.006,80	125.180,34	128.935,75	132.803,83	136.787,94
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	12.000,71	(223.746,11)	(212.558,81)	(201.930,87)	(191.834,32)	(182.242,61)
3	**PEMBIAYAAN**	**308.365,96**	**223.746,11**	**212.558,81**	**201.930,87**	**191.834,32**	**182.242,61**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**308.365,96**	**223.746,11**	**212.558,81**	**201.930,87**	**191.834,32**	**182.242,61**
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	308.365,96	223.746,11	212.558,81	201.930,87	191.834,32	182.242,61
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.	-	-	-	-	-	-
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**308.365,96**	**223.746,11**	**212.558,81**	**201.930,87**	**191.834,32**	**182.242,61**

.

No	Uraian	Baseline	Proyeksi				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	320.366,68	-	-	-	-	-

Sumber: Bappeda Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

.

2.2.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas. Untuk itu, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas.

Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung di awal ialah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Sebagaimana hasil analisis masing-masing pos Belanja Daerah dan Pembiayaan yang telah dijelaskan sebelumnya maka diproyeksikan Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas tahun 2026-2030 akan mengalami rata-rata pertumbuhan dari Rp. 535,74 miliar (2026) menjadi Rp. 576,38 miliar (2030).

Adapun rincian proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Tana Tidung tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.58
Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)

No	Uraian		Proyeksi				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Belanja Operasi**	**346.671,90**	**405.094,94**	**411.391,40**	**417.788,90**	**424.289,16**	**430.893,93**
1.1	Belanja Pegawai	309.855,34	390.426,39	396.282,79	402.227,03	408.260,44	414.384,34
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	36.798,94	14.318,35	14.747,90	15.190,34	15.646,05	16.115,43
1.5	Belanja Bantuan Sosial	17,62	350,20	360,71	371,53	382,67	394,15
2	**Belanja Transfer**	**135.490,93**	**122.479,28**	**125.667,00**	**129.437,01**	**133.320,12**	**137.319,72**
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	472,48	486,66	501,26	516,29	531,78
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	135.490,93	122.006,80	125.180,34	128.935,75	132.803,83	136.787,94
3	**Belanja Tak Terduga**	**-**	**8.164,23**	**8.164,23**	**8.164,23**	**8.164,23**	**8.164,23**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	-	8.164,23	8.164,23	8.164,23	8.164,23	8.164,23
4	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	-

No	Uraian		Proyeksi				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
4.2	penyertaan modal daerah;	-	-	-	-	-	-
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	-	-	-	-	-	-
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	**482.162,83**	**535.738,45**	**545.222,63**	**555.390,14**	**565.773,51**	**576.377,88**

Sumber: Bappeda Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

.

Analisis Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung. Namun perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 900.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 900.15.5-3406 tahun 2024, sebagian besar belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/sub kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan dengan dua metode berbeda Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil keuangan daerah dan kapasitas riil pagu belanja program/kegiatan/subkegiatan OPD.

Dari proyeksi kapasitas riil pagu OPD tersebut kemudian perlu didistribusikan berdasarkan prioritas pemanfaatannya antara lain:

a. Prioritas I. digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
b. Prioritas II. digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
c. Prioritas III. digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Pembagian pendanaan untuk program prioritas diatas secara lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.59
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	1.056.253,89	1.087.941,51	1.120.579,75	1.154.197,14	1.188.823,06
2.	Penerimaan Pembiayaan	223.746,11	212.558,81	201.930,87	191.834,32	182.242,61
	TOTAL PENERIMAAN					
	(***Dikurangi***):					
3.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	535.738,45	545.222,63	555.390,14	565.773,51	576.377,88
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	744.261,55	755.277,68	767.120,48	780.257,96	794.687,78

Sumber: Bappeda Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

Tabel II.60
Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	1.056.253,89	1.087.941,51	1.120.579,75	1.154.197,14	1.188.823,06
2.	Penerimaan Pembiayaan	223.746,11	212.558,81	201.930,87	191.834,32	182.242,61
	TOTAL PENERIMAAN	1.280.000,00	1.300.500,31	1.322.510,62	1.346.031,47	1.371.065,66
	(***Dikurangi***):					
3	Belanja Transfer	122.479,28	125.667,00	129.437,01	133.320,12	137.319,72
4	Belanja Tak Terduga	8.164,23	8.164,23	8.164,23	8.164,23	8.164,23
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	Kapasitas Riil Pagu OPD	**1.149.356,49**	**1.166.669,08**	**1.184.909,37**	**1.204.547,11**	**1.225.581,71**

Sumber: Bappeda Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

Tabel II.61
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030

No	Uraian	Proyeksi Kapasitas Pagu OPD				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan OPD	1.149.356,49	1.166.669,08	1.184.909,37	1.204.547,11	1.225.581,71
2	Prioritas I	639.272,08	648.901,34	659.046,59	669.969,10	681.668,55
3	Prioritas II	344.806,95	350.000,72	355.472,81	361.364,13	367.674,51
4	Prioritas III	165.277,46	167.767,01	170.389,97	173.213,87	176.238,65
	JUMLAH	1.149.356,49	1.166.669,08	1.184.909,37	1.204.547,11	1.225.581,71

Sumber: Bappeda Kabupaten Tana Tidung, 2025 (diolah)

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Perumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah merupakan langkah krusial dalam perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Perumusan permasalahan dimulai dengan analisis mendalam terhadap kondisi eksisting daerah, termasuk aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Data statistik, hasil survei, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan menjadi dasar untuk mengidentifikasi masalah-masalah utama yang menghambat perkembangan daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa mengalami dinamika permasalahan dan isu yang menyertai. Permasalahan ini muncul ketika terdapat kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan, menandakan bahwa tujuan dari perencanaan pembangunan daerah belum tercapai sepenuhnya. Dalam merumuskan permasalahan, diperlukan identifikasi dan analisis dari pencapaian-pencapaian pembangunan sebelumnya untuk memahami akar masalahnya. Proses ini menjadi bagian penting dari perencanaan, karena dengan mengidentifikasi permasalahan yang tepat, dapat memberikan arah dalam penyusunan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Selain itu, dalam perencanaan pembangunan juga penting untuk mengantisipasi isu strategis baik dalam bentuk ancaman maupun peluang yang signifikan dalam pembangunan daerah.

Isu strategis yang diidentifikasi akan diimplementasikan dalam dokumen rencana pembangunan daerah, Isu-isu ini harus dirumuskan dengan memperhatikan tujuan jangka Panjang terutama pada jangka menengah. Selain itu, isu strategis harus responsif terhadap dinamika lokal dan global, termasuk perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan perubahan demografis. Dengan demikian, perumusan permasalahan dan isu strategis tidak hanya berfungsi sebagai *"warning action*" dalam pembangunan daerah, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan responsif, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Melalui analisis yang telah dilakukan terhadap gambaran umum kondisi daerah (Sub Bab II.1), maka dalam merumuskan permasalahan pembangunan daerah dapat diidentifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan daerah. Setelah meninjau data dan informasi yang terdapat dalam gambaran umum kondisi daerah serta mengevaluasi hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada berbagai bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka dapat ditemukan permasalahan utama dalam pembangunan di Kabupaten Tana Tidung yaitu "**Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tana Tidung yang maju dan berkeadilan**" dengan enam permasalahan pokok, yaitu :

1. Belum optimalnya daya saing SDM menuju masyarakat unggul dan berbudaya
2. Belum optimalnya pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas

3. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas berbasis potensi unggulan yang ramah lingkungan
4. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
5. Belum optimalnya peningkatan taraf hidup layak dalam pemerataan pengentasan kemiskinan
6. Tingginya potensi kerusakan lingkungan sebagai dampak aktivitas pembangunan

Keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan di Kabupaten Tana Tidung dapat dipahami melalui gambar sebagai berikut.

Gambar II.52
Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung



Berdasarkan rumusan permasalahan pokok diatas, maka dijabarkan sebagai berikut.

1. Belum optimalnya daya saing SDM menuju masyarakat unggul dan berbudaya

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci utama dalam membangun daerah yang berdaya saing. Kabupaten Tana Tidung masih menghadapi tantangan besar dalam upaya peningkatan SDM, baik dari sisi akses terhadap pendidikan, kualitas layanan, hingga keberlanjutan proses belajar. Pada tahun 2024, IPM Tana Tidung tercatat sebesar 70,95 terendah kedua di Kalimantan Utara setelah Nunukan (69,40), dan masih dibawah capaian Kabupaten Malinau (74,72). Hal ini menunjukkan bahwa akselerasi pembangunan sektor pendidikan di Tana Tidung belum sejalan dengan daerah lain di provinsi.

Indikator penyusun IPM, seperti Harapan Lama Sekolah (12,61 tahun) dan Rata-rata Lama Sekolah (9,24 tahun), masih berada di bawah rata-rata provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak anak-anak di Kabupaten Tana Tidung belum menyelesaikan pendidikan menengah, dan terbatasnya akses ke jenjang pendidikan tinggi menjadi hambatan utama. Selain itu, rendahnya tingkat literasi masyarakat tercermin dari penurunan Indeks Pembangunan

Literasi Masyarakat (IPLM) dari 72,89 menjadi 59,47 pada 2024 juga menunjukkan minimnya budaya baca dan belum berkembangnya literasi digital, ekonomi, dan lingkungan secara merata. Permasalahan pendidikan lainnya terlihat dari penurunan tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun dalam PAUD, dari 87,47% pada tahun 2023 menjadi 80,85% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan akses dan kualitas layanan pendidikan sejak usia dini, pengembangan budaya literasi berbasis komunitas, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Rendahnya kualitas SDM berdampak langsung terhadap pasar tenaga kerja. Sebagian besar penduduk usia kerja hanya berpendidikan SD atau SMA, tanpa keahlian teknis atau vokasional yang memadai. Kurangnya pelatihan kerja berbasis potensi lokal (perikanan, pertanian, dan kehutanan) menambah kesenjangan antara kebutuhan dunia kerja dan kesiapan angkatan kerja lokal. Oleh karena itu, strategi peningkatan SDM di Tana Tidung harus menekankan pada penguatan pendidikan vokasi berbasis wilayah, peningkatan kompetensi guru, dan pengembangan budaya literasi yang adaptif terhadap era digital.

2. Belum optimalnya peningkatan taraf hidup layak dalam pemerataan pengentasan kemiskinan

Permasalahan kesejahteraan di Kabupaten Tana Tidung masih menunjukkan dinamika yang perlu mendapat perhatian, meskipun angka kemiskinan relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 4,47%, namun dari sisi absolut (jumlah penduduk miskin) justru meningkat menjadi 1.500 jiwa, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk menjadi 30.036 jiwa. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan yang memadai, khususnya bagi kelompok rentan. Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung berkaitan dengan masih rendahnya pendapatan masyarakat, yang mana masih adanya ketergantungan pada sektor primer dan keterbatasan akses ekonomi. Pada saat ini struktur ekonomi Kabupaten Tana Tidung masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam, yang rentan terhadap fluktuasi harga dan iklim. Di satu sisi, potensi ekonomi belum sepenuhnya dioptimalkan melalui diversifikasi dan peningkatan nilai tambah. Sehingga masyarakat

Ketimpangan pendapatan juga menjadi tantangan utama dalam pembangunan daerah. Indeks Gini tahun 2024 berada pada angka 0,280, yang meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 (0,281), tetap berada di atas daerah tetangga seperti Kabupaten Bulungan (0,262) dan Nunukan (0,249). Ini menunjukkan distribusi pendapatan yang masih timpang, khususnya antara wilayah pedesaan dan perkotaan, serta antara masyarakat pesisir dan wilayah administratif pusat. Ketimpangan ini turut diperburuk oleh terbatasnya akses layanan dasar dan kesempatan ekonomi di wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan masih menghadapi tantangan dalam

bentuk rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta keterbatasan akses terhadap pembiayaan usaha kecil. UMKM di Kabupaten Tana Tidung masih banyak yang menghadapi kendala dalam hal permodalan, akses pasar, serta pengelolaan usaha dan literasi digital. Minimnya kelembagaan koperasi aktif dan terbatasnya kehadiran lembaga keuangan mikro yang inklusif juga menjadi hambatan dalam memperkuat ekonomi keluarga.

3. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas berbasis potensi unggulan yang ramah lingkungan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Tidung belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan dan keberlanjutan berbasis potensi unggulan daerah. Meskipun pada tahun 2024 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami rebound pertumbuhan sebesar 4,47 persen setelah kontraksi di tahun sebelumnya, tren kontribusinya terhadap PDRB justru terus menurun, dari 31,11 persen pada 2020 menjadi hanya 23,96 persen pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor yang seharusnya menjadi pilar utama ekonomi berbasis sumber daya lokal masih menghadapi kendala struktural dan belum bertransformasi menuju praktik yang efisien dan ramah lingkungan.

Fluktuasi yang tajam dalam laju pertumbuhan sektor pertanian juga mencerminkan ketidakstabilan pembangunan di sektor ini, baik akibat tekanan terhadap ekosistem, pola produksi yang belum efisien, keterbatasan dalam adopsi teknologi hijau, maupun minimnya integrasi dengan pendekatan ekonomi hijau dan biru. Dengan kata lain, potensi sumber daya alam yang dimiliki belum diolah secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas.

Dari sisi digitalisasi ekonomi sebagai pendorong efisiensi dan inovasi, sektor informasi dan komunikasi tumbuh pesat sebesar 16,96 persen pada 2024, mencerminkan adanya kemajuan dalam infrastruktur dan adopsi teknologi digital. Namun, pertumbuhan ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan pengembangan sektor-sektor produktif utama seperti pertanian, perikanan, dan UMKM, sehingga manfaatnya terhadap pemerataan ekonomi masih terbatas.

Sementara itu, kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB pada 2024 tercatat sebesar 30,22 persen, menandakan adanya investasi fisik yang cukup signifikan, meskipun laju pertumbuhannya kembali melambat menjadi 4,91 persen setelah sempat mencapai 8,36 persen pada 2023. Di sisi lain, kontribusi ekspor barang dan jasa tetap tinggi di angka 50,33 persen, namun didominasi oleh aktivitas perdagangan komoditas mentah, yang rawan terhadap fluktuasi pasar global dan belum menjamin nilai tambah lokal secara maksimal.

Selain itu, rasio pajak daerah terhadap PDRB pada 2024 hanya mencapai 0,08 persen, mengindikasikan rendahnya kapasitas fiskal daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada untuk pembiayaan pembangunan. Rendahnya rasio ini juga menunjukkan bahwa ekonomi lokal

belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam basis penerimaan daerah secara optimal.

Secara keseluruhan, data 2024 memperlihatkan bahwa Kabupaten Tana Tidung masih menghadapi tantangan besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, inklusif, dan ramah lingkungan. Kelemahan dalam pengelolaan sektor unggulan, rendahnya kapasitas fiskal, serta belum maksimalnya pemanfaatan transformasi digital dan hilirisasi komoditas menjadi faktor utama yang harus segera ditangani. Transformasi menuju ekonomi hijau dan biru yang terintegrasi lintas sektor perlu menjadi agenda prioritas dalam lima tahun ke depan guna menjamin keberlanjutan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata.

4. Belum optimalnya pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas

Permasalahan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tana Tidung masih menjadi tantangan penting dalam mendorong pertumbuhan wilayah yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa sektor, masih terdapat kesenjangan infrastruktur antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Kawasan perkotaan seperti Betayau dan Sesayap berkembang sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan ekonomi, namun kawasan perdesaan masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas, infrastruktur dasar, dan sarana prasarana penunjang. Meskipun Kabupaten Tana Tidung mencatat tren positif dalam Indeks Desa Membangun (IDM) mencapai 0,7669 pada 2024, meningkat dari 0,7429 pada 2023 kenaikan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan layanan dan fasilitas dasar antarkawasan. Banyak desa masih mengalami keterbatasan infrastruktur jalan, air bersih, sanitasi, dan internet yang berfungsi optimal.

Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, yang terakhir tercatat 41,00 pada tahun 2022, menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan infrastruktur publik secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan signifikan, baik dalam aspek fisik maupun tata kelola layanan publik, agar infrastruktur benar-benar mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara merata.

Di sektor pendidikan, meskipun terjadi peningkatan jumlah sekolah dan tenaga pendidik selama 2021–2024, ketersediaan infrastruktur masih belum merata. Beberapa wilayah terpencil masih menghadapi keterbatasan fasilitas belajar, akses transportasi, dan koneksi internet, yang menghambat pemerataan layanan pendidikan. Sebagai contoh, pada tahun 2024 terdapat 30 SD, 10 SMP, dan 6 SMA, namun tidak semua memiliki sarana dan prasarana memadai. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Sementara itu, sektor kesehatan mencatatkan perbaikan terbatas. Hingga 2024, Tana Tidung memiliki 2 rumah sakit dan 5 puskesmas untuk melayani penduduk di 5 kecamatan, namun distribusi layanan kesehatan dan tenaga medis masih belum merata, terutama di wilayah pesisir dan desa terpencil.

Akses masyarakat terhadap layanan rujukan dan spesialis juga masih terbatas karena kendala transportasi dan lokasi layanan kesehatan yang jauh.

Permasalahan infrastruktur lainnya menyangkut keterbatasan konektivitas antardesa dan antarkecamatan. Jalan penghubung antarwilayah masih banyak yang belum beraspal atau rusak, menghambat mobilitas barang dan jasa. Ini berdampak langsung terhadap efisiensi ekonomi lokal dan ketimpangan akses terhadap layanan dasar serta peluang usaha produktif.

Secara umum, meskipun ada kemajuan di sejumlah indikator, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tana Tidung masih menghadapi tantangan besar dalam hal kualitas, jangkauan, dan keterpaduan antarwilayah. Diperlukan intervensi strategis yang menyasar peningkatan infrastruktur dasar secara merata, penguatan konektivitas antarwilayah, serta integrasi kawasan perdesaan dan perkotaan melalui sistem perencanaan yang mengacu pada RTRW dan RPJMD secara sinergis.

5. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tana Tidung masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang menghambat terwujudnya birokrasi yang adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024 oleh Kementerian PAN-RB, beberapa indikator kunci menunjukkan kinerja yang belum optimal dengan penjabaran sebagai berikut.

Pertama, kualitas pelayanan publik masih menjadi tantangan utama. Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 hanya mencapai 1,52, menempatkan Tana Tidung pada kategori rendah. Hal ini mencerminkan masih jauhnya kesesuaian antara standar pelayanan formal dan realitas di lapangan. Meskipun tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman mencapai 89,64 (kategori A), ketimpangan dalam implementasi tetap terlihat jelas. ***Kedua,*** perumusan dan implementasi kebijakan publik masih lemah. Indeks Kualitas Kebijakan hanya mencapai 1,2, menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan belum didasarkan pada analisis yang kuat, minim partisipasi pemangku kepentingan, serta belum terdokumentasi secara memadai. Situasi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola kebijakan yang baik belum menjadi praktik umum di lingkungan perangkat daerah. ***Ketiga,*** sistem pengendalian internal belum berjalan efektif. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berada pada skor 2,53, yang berarti bahwa sebagian besar perangkat daerah belum menerapkan sistem kendali yang berorientasi pada mitigasi risiko secara menyeluruh. Struktur manajemen risiko masih bertumpu pada Inspektorat, dan belum dijadikan indikator kinerja di perangkat daerah. ***Keempat,*** pengelolaan pengaduan masyarakat masih belum efektif. Meskipun kanal LAPOR! telah tersedia, tingkat tindak lanjut laporan hanya memperoleh skor 1, dengan jumlah laporan yang sedikit dan waktu respon yang masih lambat. Hal ini menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas kanal aduan, sekaligus lemahnya budaya responsif dalam pelayanan publik. ***Kelima,*** digitalisasi tata kelola pemerintahan

belum optimal. Indeks SPBE tahun 2024 tercatat sebesar 2,84, yang baru mencapai predikat “cukup”. Bahkan, arsitektur SPBE belum disusun sesuai standar nasional, dan tingkat digitalisasi arsip hanya meraih skor 1,24. Minimnya integrasi data antar-OPD serta belum adanya pemanfaatan big data dalam perencanaan menjadi penghambat utama dalam menciptakan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy).

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih terbatas, terutama di wilayah pedalaman. Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan lebih banyak bersifat prosedural, tanpa disertai mekanisme umpan balik yang mendorong keterlibatan aktif warga. Permasalahan ini turut diperparah dengan rendahnya capaian Indeks Reformasi Hukum (2,19) dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengawasan. Secara keseluruhan, berbagai data tahun 2024 tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung masih berada pada fase transisi menuju tata kelola pemerintahan yang modern. Reformasi birokrasi perlu dilanjutkan dengan penekanan pada peningkatan kualitas kebijakan, penguatan sistem pengendalian internal, digitalisasi layanan, serta perluasan partisipasi masyarakat sebagai pilar utama tata kelola yang demokratis dan berkelanjutan.

6. Tingginya potensi kerusakan lingkungan sebagai dampak aktivitas pembangunan

Kabupaten Tana Tidung menghadapi tekanan lingkungan yang kian meningkat seiring dengan ekspansi pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam. Berdasarkan KLHS RPJMD, tutupan hutan di wilayah ini mengalami penurunan signifikan, dari 113.587 ha menjadi hanya 102.345 ha di tahun 2029, bahkan diproyeksikan tinggal 84.521 ha pada 2045. Penurunan ini disebabkan oleh konversi lahan untuk pertanian, perkebunan, dan permukiman, tanpa diimbangi kebijakan konservasi yang memadai. Produksi sampah juga meningkat tajam dari 4.839 ton (2008) menjadi 6.909 ton (2022), sementara sistem pengelolaan sampah masih minim baik dari sisi sarana maupun kesadaran masyarakat.

Kondisi lingkungan diperparah oleh meningkatnya risiko bencana seperti banjir dan longsor, khususnya di wilayah pesisir dan sepanjang sungai Sesayap. Data menunjukkan bahwa lebih dari 98% wilayah Tana Tidung berada dalam zona kerentanan iklim sedang. Ini berarti masyarakat setempat sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut, kekeringan, dan anomali cuaca yang dapat merusak ekosistem pertanian dan perikanan. Selain itu, pencemaran udara dari pembakaran sampah dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menambah tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup.

Jika tidak ditangani secara sistematis, kerusakan lingkungan akan berdampak langsung pada penurunan produktivitas lahan, menurunnya kualitas hidup masyarakat, dan hilangnya potensi ekonomi dari sektor berbasis alam. Oleh karena itu, strategi pembangunan Tana Tidung ke depan harus

berorientasi pada ekonomi hijau dan biru, dengan pendekatan konservasi berbasis masyarakat, penguatan pengawasan lingkungan, serta implementasi program rehabilitasi kawasan kritis. Pemerintah juga perlu mendorong investasi ramah lingkungan dan memperluas kampanye edukasi masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan.

Dengan penjabaran permasalahan atas, maka beberapa akar masalah sebagai pemicu permasalahan pokok dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

.

Tabel II.62
Permasalahan Perurusan Kabupaten Tana Tidung

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DASAR		
1	Pendidikan	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan daerah
		Belum optimalnya upaya peningkatan angka partisipasi sekolah di setiap jenjang pendidikan
		Belum optimalnya kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan yang merata
		Belum optimalnya penyediaan fasilitas layanan pendidikan yang ramah disabilitas
2	Kesehatan	Belum meratanya fasilitas dan pelayanan kesehatan pada seluruh wilayah dan lapisan masyarakat
		Belum optimalnya penanganan prevalensi Stunting
		Pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas belum optimal
		Belum optimalnya perubahan perilaku masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya penanganan masalah dampak sosial dalam pembangunan infrastruktur
		Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, akses masyarakat terhadap air minum bersih, dan pengelolaan air limbah domestik
		Belum optimalnya Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan publik
4	Perumahan dan Permukiman	Belum optimalnya penanganan pemukiman kumuh
		Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
		Belum optimalnya pemenuhan dan kelayakan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman
5	Ketertiban dan Ketentraman Umum	Belum optimalnya pencegahan pelanggaran PERDA oleh masyarakat
		Belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana
		Masih rendahnya ketahanan daerah
		Belum optimalnya pelayanan penanganan ketentraman dan ketertiban umum
		Belum optimalnya sarana prasarana dan SDM kebencanaan serta penanganan kebakaran

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
6	Sosial	Belum optimalnya pelayanan, pemberdayaan dan rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Belum optimalnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat
		Belum optimalnya pemanfaatan data dan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) dalam melaksanakan perlindungan sosial masyarakat
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON- DASAR		
7	Tenaga Kerja	Belum optimalnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dimana tenaga kerja terbanyak berpendidikan SD ke bawah (termasuk tidak pernah sekolah)
		Belum optimalnya dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya peran, partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
		Belum optimalnya antisipasi dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
9	Pangan	Masih adanya wilayah rawan pangan di beberapa wilayah
		Belum optimalnya ketahanan pangan daerah
10	Pertanahan	Belum optimalnya kualitas administrasi pertanahan
11	Lingkungan Hidup	Meningkatnya potensi kerusakan lingkungan sebagai dampak aktivitas ekonomi
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya peran perangkat daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
		Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat
		Belum optimalnya upaya kemandirian desa, khususnya dari pemenuhan dan kualitas sarana prasarana pembangunan
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya pembinaan kesejahteraan keluarga berkualitas
		Belum optimalnya pemahaman kesehatan reproduksi masyarakat
15	Perhubungan	Belum optimalnya konektivitas antar wilayah
		Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar nasional
16	Komunikasi dan Informasi	Belum optimalnya penggunaan layanan komunikasi dan informasi dalam meningkatkan pelayanan publik
		Belum optimalnya akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi
		Pelayanan pemerintah berbasis *e-government* belum optimal penggunaan dan pemanfaatannya

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
17	Koperasi dan Industri Kecil Menengah	Masih kurangnya permodalan, kapasitas usaha, hingga pemasaran produk UMKM
		Belum optimalnya peningkatan kualitas UMKM mandiri sehingga kurang kompetitif
		Belum optimalnya produktivitas koperasi dalam pengembangan ekonomi kerakyatan
18	Penanaman Modal	Belum maksimalnya promosi investasi pengembangan produk unggulan daerah
		Belum optimalnya iklim investasi yang kondusif
19	Pemuda dan Olahraga	Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi dan kegiatan kepemudaan
		Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dan keolahragaan
		Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
20	Statistik	Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia
		Belum optimalnya pemenuhan data sektoral oleh perangkat daerah yang valid dan *up to date*
21	Persandian	Belum optimalnya tingkat keamanan informasi pemerintah
22	Kebudayaan	Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang luhur
23	Perpustakaan	Masih rendahnya minat baca masyarakat
		Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan perpustakaan daerah
24	Kearsipan	Belum optimalnya layanan dan pengelolaan kearsipan di perangkat daerah
		Belum optimalnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan serta pelestarian arsip
C. URUSAN PILIHAN		
25	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan sumber daya perikanan budidaya belum optimal
		Belum optimalnya produktivitas penangkapan ikan
26	Pariwisata	Belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung pariwisata dan promosi destinasi pariwisata unggulan daerah
		Belum optimalnya pengelolaan destinasi karena keterbatasan SDM
		Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis keunggulan daerah
27	Pertanian	Belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas komoditas pertanian
		Belum optimalnya hilirisasi produk pertanian
28	Perdagangan	Belum optimalnya daya saing dan pemasaran produk unggulan daerah
		Belum optimalnya pengendalian harga kebutuhan pokok
29	Perindustrian	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi
D. URUSAN PENUNJANG		

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
30	Penelitian dan pengembangan	Belum optimalnya penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah
31	Perencanaan	Belum optimalnya integrasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan
		Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan yang komprehensif dan relevan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan
32	Keuangan	Belum optimalnya pengelolaan aset, khususnya dalam identifikasi dan pengelolaan aset-aset daerah
		Belum optimalnya kemandirian fiskal daerah dalam pelaksanaan pembangunan
		Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan penganggaran, pengelolaan anggaran hingga evaluasi secara efektif dan efisien
33	Kepegawaian	Belum optimalnya pemetaan dan pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan potensi
		Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN berbasis kinerja
		Belum optimalnya pengelolaan disiplin pegawai melalui pemberian reward dan punishment
		Belum optimalnya proses administrasi kepegawaian yang meliputi mutasi, kepangkatan, promosi ASN dan pengelolaan informasi kepegawaian
34	Pengawasan	Belum optimalnya fungsi sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan
		Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan
35	Sekretariat Dewan	Belum optimalnya tata kelola kesekretariatan DPRD dalam mengoptimalkan kinerja anggota dewan
36	Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingginya potensi penurunan kualitas pemahaman ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
		Belum optimalnya pendidikan politik kepada masyarakat

2.3.2 ISU STRATEGIS

Di tengah kompleksitas dunia saat ini, isu-isu strategis mengemuka sebagai fokus utama yang mempengaruhi arah dan kebijakan masa depan. Dari perubahan iklim hingga ketegangan geopolitik, tantangan-tantangan ini memperumit dinamika global dan menuntut perhatian dari pemimpin dunia. Salah satu isu strategis yang mendominasi perbincangan adalah perubahan iklim, yang menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Di sisi lain, ketegangan geopolitik antara kekuatan besar memunculkan risiko konflik berskala besar yang dapat mengganggu stabilitas global. Selain itu, isu-isu terkait keamanan siber, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia juga menjadi bagian dari agenda strategis yang mendesak. Dalam menghadapi

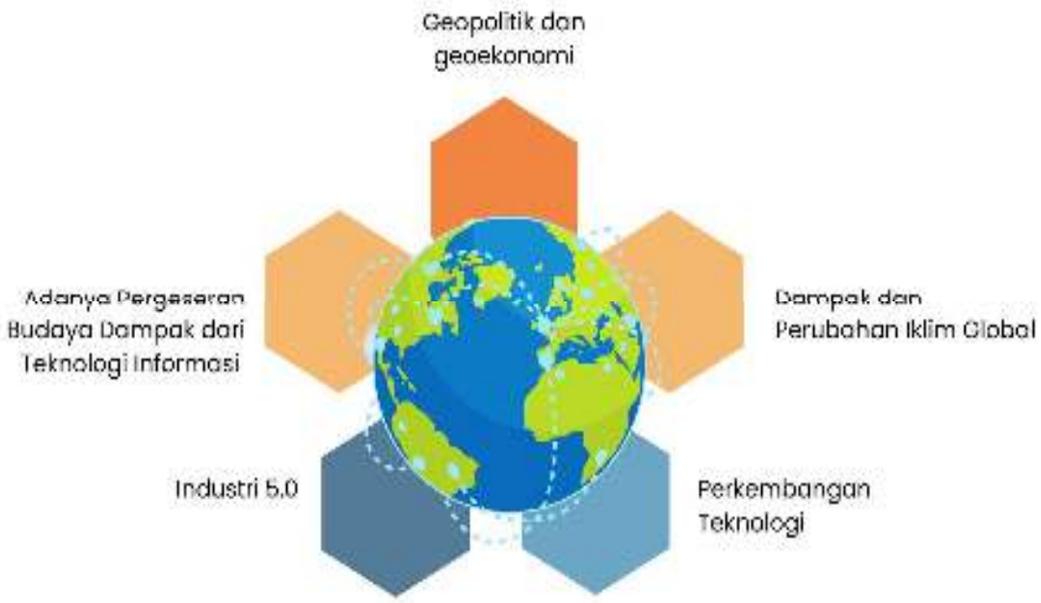
tantangan-tantangan ini, koordinasi internasional dan kepemimpinan yang kuat diperlukan untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia.

2.3.2.1 Telaah Isu Strategis Internasional

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung, telaah terhadap isu-isu internasional merupakan langkah strategis yang esensial untuk memastikan arah kebijakan pembangunan daerah tetap relevan, adaptif, dan terintegrasi dengan dinamika global yang terus bergerak cepat. Perubahan tatanan dunia dalam berbagai aspek mulai dari geopolitik, geoekonomi, perubahan iklim, teknologi digital, hingga transformasi sosial budaya membawa pengaruh yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga langsung dan nyata terhadap konteks pembangunan daerah. Kabupaten Tana Tidung yang memiliki karakteristik wilayah agraris, pesisir, serta kaya potensi sumber daya alam, membutuhkan strategi pembangunan yang responsif terhadap isu global agar mampu menghadapi tantangan eksternal sekaligus mengoptimalkan peluang yang tersedia.

Memahami isu-isu strategis global bukan semata-mata untuk mengikuti tren internasional, tetapi lebih jauh merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan daerah, meningkatkan daya saing sektor unggulan, dan mengintegrasikan pembangunan lokal dalam konteks global. Dalam RPJMN 2025–2029 telah diidentifikasi sejumlah isu global yang relevan dan perlu menjadi acuan daerah dalam menyusun agenda prioritas. Kabupaten Tana Tidung, dalam hal ini, dituntut untuk mampu memosisikan diri secara strategis melalui penguatan hilirisasi sektor agrobisnis, adopsi teknologi digital dalam pelayanan publik dan produksi, penguatan kapasitas adaptasi perubahan iklim, serta pelestarian budaya lokal di tengah arus globalisasi. Oleh karena itu, peran aktif daerah dalam menanggapi isu-isu global menjadi sangat penting dalam membangun fondasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan. Dalam RPJMN telah disebutkan beberapa isu global, berikut penjabaran isu global beserta peranan Kabupaten Tana Tidung terhadap isu tersebut:

Gambar II.53
Isu Global



Sumber: RPJMN 2025-2029

1. Geopolitik dan Geoekonomi

Konstelasi geopolitik dan geoekonomi global yang semakin dinamis telah menimbulkan ketidakpastian terhadap stabilitas pasokan pangan, energi, dan komoditas strategis. Kabupaten Tana Tidung, sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan memiliki peluang sekaligus tantangan dalam membangun ketahanan ekonomi lokal yang tangguh. Dalam konteks geoekonomi, Tana Tidung perlu mendorong hilirisasi produk pertanian dan perikanan secara intensif, mengingat sebagian besar hasil produksinya masih dijual dalam bentuk mentah. Selain itu, potensi strategis wilayah yang terletak di perlintasan Kalimantan Utara dapat dioptimalkan untuk membuka akses pasar ekspor melalui penguatan konektivitas antarwilayah dan infrastruktur logistik, termasuk pelabuhan rakyat dan jalur distribusi hasil bumi.

2. Dampak dan Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim global memberikan dampak langsung terhadap keberlanjutan sektor unggulan Kabupaten Tana Tidung. Fluktuasi iklim ekstrem, peningkatan suhu, dan kenaikan muka air laut mengancam ekosistem pesisir, kawasan pertanian lahan kering, serta perikanan tangkap yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat. Risiko banjir, kekeringan, dan kerusakan hutan akibat kebakaran juga meningkat, seiring dengan tekanan pembangunan. Oleh karena itu, adaptasi perubahan iklim menjadi kebutuhan mendesak yang harus direspon melalui pendekatan pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang berkelanjutan, konservasi daerah tangkapan air, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam budidaya pertanian dan perikanan. Upaya ini tidak hanya bertujuan menjaga produktivitas ekonomi, tetapi juga melindungi daya dukung lingkungan jangka panjang.

3. Perkembangan Teknologi

Transformasi digital dan revolusi teknologi informasi telah mengubah cara kerja di berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, dan pelayanan publik. Bagi Kabupaten Tana Tidung yang memiliki karakteristik wilayah terpencar dan aksesibilitas terbatas, teknologi menjadi solusi strategis untuk mengurangi disparitas pembangunan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mendorong sistem pertanian presisi, pemantauan stok ikan berbasis satelit, serta integrasi data antarperangkat daerah. Namun demikian, penguatan infrastruktur TIK dan literasi digital masyarakat harus menjadi prioritas, agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata. SDM lokal perlu dibekali keterampilan digital agar tidak tertinggal dari arus teknologi yang terus berkembang.

4. Industri 5.0

Masuknya era Industri 5.0 membawa peluang bagi daerah seperti Tana Tidung untuk mengembangkan sistem ekonomi yang lebih cerdas dan inklusif, dengan memadukan kecanggihan teknologi dan kearifan lokal. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dapat diarahkan pada model smart-agroindustry yang efisien dan berkelanjutan. Industri 5.0 juga membuka jalan bagi UMKM lokal untuk naik kelas melalui pemanfaatan platform digital dan otomatisasi ringan, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan memperluas jangkauan pasar. Dengan strategi yang tepat, industri berbasis komunitas dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi lokal.

5. Pergeseran Budaya Dampak dari Teknologi Informasi

Teknologi informasi tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga berpotensi menggeser nilai-nilai budaya lokal, terutama di wilayah dengan komunitas adat yang masih kuat seperti Tana Tidung. Masuknya arus informasi global tanpa filter dapat melemahkan identitas lokal, khususnya di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, pelestarian budaya lokal harus dilakukan secara adaptif dan inovatif, seperti melalui digitalisasi budaya daerah, dokumentasi warisan lokal berbasis multimedia, serta pengembangan wisata budaya yang menonjolkan nilai-nilai tradisi dan ekologi. Strategi ini tidak hanya akan menjaga jati diri masyarakat, tetapi juga mengubah warisan budaya menjadi aset ekonomi kreatif yang bernilai.

2.3.2.2 Telaah Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan tantangan yang berpotensi menghambat capaian pembangunan secara nasional jika tidak diantisipasi secara komprehensif oleh daerah. Dalam konteks Kabupaten Tana Tidung, pemahaman dan respons terhadap isu strategis nasional menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah, agar selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Sebagai kabupaten yang bertumpu pada kekayaan sumber daya alam dan berbasis kawasan pesisir serta pedalaman hutan, Tana Tidung

perlu merumuskan strategi yang adaptif terhadap dinamika nasional dan global. Isu jangka menengah Nasional yang tertuang dalam RPJMN dijabarkan sebagai berikut.

Gambar II.54
Isu Nasional



Sumber: RPJMN 2025-2029

1. Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif

Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi ekonomi yang besar dari sektor agrobisnis, perikanan, kehutanan, dan hasil hutan bukan kayu. Namun, ketergantungan terhadap komoditas mentah dan minimnya hilirisasi menjadikan struktur ekonomi daerah belum cukup tangguh terhadap guncangan eksternal. Untuk memperkuat resiliensi ekonomi, Tana Tidung perlu mendorong diversifikasi ekonomi lokal dengan memperkuat sektor pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta membuka peluang pasar melalui pengembangan konektivitas antarwilayah dan infrastruktur logistik. Upaya ini penting agar ekonomi lokal tidak hanya bertahan dalam ketidakpastian global, tetapi juga tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif.

2. Keanekaragaman Hayati dan Potensi Lingkungan

Kabupaten Tana Tidung dianugerahi kekayaan ekologis berupa kawasan hutan lindung, sungai, pesisir, dan rawa yang mendukung keanekaragaman hayati. Potensi ini menjadi kekuatan dalam mendukung sektor ekonomi berbasis alam seperti perikanan dan pertanian organik. Namun demikian, tekanan terhadap lingkungan akibat aktivitas pembangunan dan pertambangan dapat mengancam ekosistem yang ada. Untuk itu, penting bagi Kabupaten Tana Tidung untuk menerapkan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, termasuk praktik perikanan ramah lingkungan, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, serta pemulihan ekosistem pesisir. Pelestarian lingkungan yang terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan di wilayah ini.

3. Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia

Kemajuan Kabupaten Tana Tidung sangat ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah rendahnya rata-rata lama sekolah, keterbatasan akses pendidikan di wilayah terpencil, serta kurangnya

tenaga kerja terampil di sektor produktif. Peningkatan kualitas SDM perlu dilakukan melalui perluasan pendidikan vokasi yang relevan dengan potensi lokal seperti perikanan, pertanian, dan ekowisata. Selain itu, pengembangan modal manusia melalui pelatihan berbasis teknologi dan kewirausahaan akan mendorong tumbuhnya pelaku usaha lokal yang mandiri dan inovatif. SDM yang unggul dan adaptif akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berdaya saing tinggi.

4. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi berpotensi menciptakan kesenjangan sosial apabila tidak disertai kebijakan yang adil dan inklusif. Kabupaten Tana Tidung mulai mengalami dinamika perubahan kelas masyarakat, seiring dengan masuknya investasi dan pembangunan infrastruktur. Untuk mencegah kesenjangan yang semakin melebar, perlu dilakukan penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Pengembangan UMKM, koperasi desa, dan skema perlindungan sosial adaptif harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.

5. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel menjadi pilar penting dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Tana Tidung masih dihadapkan pada tantangan dalam peningkatan kapasitas birokrasi, sistem pengawasan internal, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Peningkatan nilai reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi indikator bahwa perbaikan terus dilakukan, namun belum optimal. Oleh karena itu, perlu penguatan dalam digitalisasi pelayanan, peningkatan kapasitas ASN, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi. Dengan tata kelola yang baik, pembangunan daerah akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

6. Rendahnya Produktivitas

Meskipun memiliki sumber daya alam yang besar, tingkat produktivitas sektor-sektor ungulan di Kabupaten Tana Tidung masih relatif rendah. Kegiatan pertanian dan perikanan masih menggunakan metode tradisional dengan keterbatasan akses teknologi dan permodalan. Rendahnya nilai tambah juga memperlemah kontribusi sektor-sektor ini terhadap PDRB daerah. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan inovasi dalam penerapan teknologi tepat guna, mekanisasi pertanian, dan digitalisasi rantai pasok. Selain itu, infrastruktur penunjang seperti jalan produksi, cold storage, dan sentra pengolahan hasil pertanian dan perikanan harus diperkuat agar kegiatan produksi berjalan lebih efisien dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Tana Tidung memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan strategis yang dihadapi oleh wilayah Kalimantan, khususnya terkait sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Meskipun sektor hulu ini masih sangat dominan, kabupaten ini perlu mempercepat hilirisasi industri pada sektor ekonomi hijau dan biru agar lebih mampu menambah nilai dan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam hal ini, Kabupaten Tana Tidung dapat berkontribusi dengan memfokuskan pengembangan industri pengolahan yang berbasis pada sumber daya lokal.

Visi RPJMN 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" mencerminkan komitmen nasional untuk mewujudkan kemajuan Indonesia dalam rangka mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita dituangkan dalam bentuk Prioritas Nasional yang menjadi landasan utama dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional ini berfungsi sebagai tujuan strategis dan sasaran pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, yang mencakup berbagai sektor penting seperti pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Dengan mengacu pada Prioritas Nasional tersebut, Kabupaten Tana Tidung dapat menyusun program pembangunan yang terarah, berbasis pada kebutuhan lokal namun tetap sejalan dengan tujuan besar pembangunan nasional. Dengan 8 asta cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat bergama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

- RPJMN menyebutkan terdapat 17 program prioritas sebagai berikut:
    1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
    2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
    3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
    4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
    5. Pemberantasan kemiskinan

6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesial peninkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pukuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

- Adapun terdapat 8 *quick wins* sebagai berikut:
    1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
    2. menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten
    3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
    4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
    5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
    6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh) TNI/Polri dan pejabat negara
    7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
    8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Arah pembangunan wilayah Kalimantan "Superhub Ekonomi Nusantara" menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dengan arah pembangunan wilayah Kalimantan Utara,

khususnya pada Kabupaten Tana Tidung yang disajikan pada penjabaran Tabel sebagai berikut.

Tabel II.63
***Highlight* Indikasi Intervensi Wilayah Kalimantan Utara**

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
D1,D2,D3	Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Tana Lia), Kab. Tana Tidung	Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui: 1) Pemenuhan Layanan Dasar di Kawasan Perbatasan, dengan *output* di antaranya: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 2) pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional 3) sesuai standar, dan layanan validasi dan verifikasi pupuk. 4) Penataan Ruang Dan Penanggulangan Bencana di Kawasan Perbatasan, dengan *output*: Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN, Penguatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, dan Penguatan Instrumen Peringatan Dini Bencana 5) Penguatan tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan, dengan *output*: bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara

Sumber: RPJMN 2025-2029

2.3.2.3 Telaah Isu Strategis Regional/Daerah

1. Telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029

Dalam upaya memastikan sinergi antarlevel pemerintahan, penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2025–2029 harus memperhatikan arah kebijakan dan isu strategis yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. Telaah terhadap dokumen RPJMD provinsi menjadi krusial mengingat posisi Kabupaten Tana Tidung sebagai bagian integral dari Kalimantan Utara yang memiliki karakteristik wilayah agraris-pesisir, kaya sumber daya alam. Beberapa poin penting terkait isu strategis, visi, misi dan tema serta arah pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dijabarkan sebagai berikut.

a. Isu Stratgeis Provinsi Kalimantan Utara yaitu:
   1. Produktivitas ekonomi yang inklusif, bernilai tambah, dan berkelanjutan,
   2. Transformasi ekonomi hijau, biru, dan energi terbarukan

3. Penguatan kualitas sdm dan kohesivitas sosial,
4. Konektivitas wilayah dan aksesibilitas layanan dasar yang merata dan berkeadilan
5. Tata kelola pemerintahan dan tata kelola perbatasan yang berkualitas

b. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara adalah

"Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju,Makmur dan Berkelanjutan"

Visi RPJMD tersebut selaras dengan visi pembangunan jangka panjang daerah. Visi tersebut mempertegas posisi pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029 sebagai bagian dari periode pertama pembangunan jangka panjang tahun 2025–2045 yang memasuki pentahapan pembangunan berupa memperkokoh fondasi transformasi. Visi RPJMD tidak kalah penting juga memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi RPJMN, **yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045."** Penjelasan kata kunci/kondisi di dalam visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara yaitu:

- **Fondasi Transformasi yang Kokoh:** merupakan arah kebijakan periode pertama dalam rangkaian periode pembangunan jangka panjang tahun 2025–2045. Perwujudan fondasi transformasi dicapai melalui pelayanan dasar yang merata dan berkualitas, pengembangan ekonomi yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta ditopang tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan stabilitas wilayah yang terjaga.
- **Beranda Depan NKRI:** merupakan letak geografis Provinsi Kalimantan Utara yang berada di wilayah terdepan NKRI dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia maupun kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Letak geografis ini sekaligus menjadi potensi dan tantangan geopolitik dan geoekonomi yang perlu dikelola dengan baik melalui tata kelola perbatasan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- **Maju:** kondisi pembangunan yang diharapkan tercapai yaitu kemajuan di segala bidang. Kemajuan memiliki arti bahwa kinerja pembangunan semakin baik atau progresif dari tahun ke tahun, sehingga masyarakat semakin menikmati manfaat nyata dari pembangunan. *Maju* juga diarahkan untuk tercapainya daerah yang berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil.
- **Makmur:** kondisi yang tercipta melalui kinerja pembangunan yang semakin baik sehingga mencapai kondisi masyarakat yang tercukupi

kebutuhan ekonomi dan sosial-budayanya. *Makmur* menandakan masyarakat yang semakin sejahtera atau lepas dari garis kemiskinan, serta tidak kalah penting masyarakat yang bahagia lahir dan batin. Kemakmuran merupakan hasil kolaborasi seluruh bidang pembangunan, yaitu ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat, pembangunan SDM dan sosial agar menghasilkan SDM yang unggul serta terpenuhi jaminan dan perlindungan sosialnya, serta tata kelola yang baik untuk menopang efektivitas kinerja berbagai bidang pembangunan menuju kemakmuran.

- **Berkelanjutan:** kondisi yang tercipta sebagai bentuk komitmen Provinsi Kalimantan Utara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Berkelanjutan* merupakan kondisi dari keselarasan pembangunan antara orientasi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditopang dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil pembangunan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi masa depan. Berbagai agenda pembangunan untuk mendukung pencapaian kondisi berkelanjutan antara lain melalui pengembangan ekonomi hijau.

c. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara adalah
   1) Misi 1 Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan
   2) Misi 2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan
   3) Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif
   4) Misi 4 Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI
   5) Misi 5 Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   6) Misi 6 Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
   7) Misi 7 Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan
   8) Misi 8 Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas

d. Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut



e. Arahan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara terhadap pembangunan Kabupaten Tana Tidung

Tabel II.64
Arahan Strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara terhadap Kabupaten Tana Tidung

Kabupaten/Kota	Strategi Pembangunan
Kabupaten Tana Tidung	• Akselerasi kualitas pelayanan dasar
	• Pengembangan pusat kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan tambak.
	• Pengembangan Pelabuhan logistik
	• Pelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai.
	• Pengembangan kawasan kampung nelayan.
	• Penataan permukiman yang layak huni.
	• Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan afirmasi (Kecamatan Tana Lia)
	• Pengelolaan Kawasan HGU secara berkelanjutan
	• Perlindungan ekosistem Kawasan Hidrologi Gambut

2. Telaah RPJPD Kabupaten Tana Tidung 2025-2045

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2045 untuk memastikan relevansi setiap isu yang tercantum dalam RPJMD dengan visi pembangunan jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Tana Tidung. Adapun enam isu strategis yang menjadi fokus RPJPD Kabupaten Tana Tidung 2025-2045 adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan kualitas SDM berbudaya dalam mengakselerasi pembangunan sosial dan ekonomi wilayah

Dalam pembangunan jangka menengah 2025-2029, SDM merupakan penggerak utama pembangunan daerah di Kabupaten Tana Tidung, di mana kualitas SDM menentukan keberhasilan pembangunan. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang tangguh, cerdas, sehat, dan berwawasan luas. Fokus pada pengembangan SDM yang memahami dan memelihara nilai-nilai budaya setempat penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal dan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi integrasi pendidikan lokal, pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan ekonomi lokal, serta promosi partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, SDM yang berkualitas dan berbudaya dapat mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Tana Tidung. Pendidikan dan kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan, dengan penekanan pada pentingnya karakter dan budaya dalam kehidupan sosial dan pembangunan ekonomi. Masyarakat berkualitas akan memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan daerah.

b) Akselerasi pengentasan kemiskinan kultural

Pembangunan Kabupaten Tana Tidung 2025-2029 berfokus pada pengentasan kemiskinan kultural dengan memperhatikan budaya lokal, tradisi, pola pikir masyarakat, dan ketimpangan gender. Pendekatan holistik diterapkan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, termasuk pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas, serta pemberdayaan perempuan. Memahami dan menghargai nilai-nilai lokal serta tradisi menjadi kunci dalam merancang program yang relevan dan efektif. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

c) Transformasi ekonomi berkelanjutan

Kabupaten Tana Tidung mampu memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui transformasi ekonomi berkelanjutan pada periode pembangunan 2025-2029. Ini mencakup pembangunan ekonomi rendah karbon dengan penekanan pada energi terbarukan, efisiensi energi, pemulihan dan konservasi sumber daya alam, serta inklusivitas dan keadilan sosial dalam akses ekonomi. Inovasi berkelanjutan akan mendorong teknologi dan model bisnis ramah lingkungan melalui kemitraan. Pembangunan ini akan terintegrasi dengan masyarakat dan ekologi, terutama memanfaatkan sektor pertanian dengan hilirisasi berwawasan lingkungan. Pembangunan ekonomi akan memperhatikan dampak lingkungan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang, dengan pengembangan infrastruktur ramah lingkungan dan efisien.

d) Implementasi Reformasi Birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik

Tana Tidung menuju tata kelola pemerintahan baik (*good governance)* pada periode 2025-2029 fokus pada reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Dengan indeks reformasi sebesar 52,02 (kategori cukup), upaya ini bertujuan mengatur ulang struktur birokrasi untuk menciptakan kinerja yang efektif, efisien, dan optimal. Reformasi birokrasi melibatkan pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi e-government, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola dan pelayanan publik. Evaluasi dan penataan ulang struktur organisasi pemerintah daerah, termasuk penyederhanaan struktur dan peningkatan kinerja, adalah bagian penting dari reformasi ini. Sistem manajemen aparatur pemerintah akan diperbaiki melalui penerimaan pegawai berbasis merit, peningkatan profesionalisme, dan pengembangan karir berkelanjutan. Komitmen dari pimpinan pemerintahan, koordinasi antar instansi, dan keterlibatan aktif masyarakat sangat penting untuk keberhasilan reformasi birokrasi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur akan memperbaiki layanan publik dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

e) Peningkatan suasana pembangunan yang harmonis dan terjaga

Kabupaten Tana Tidung periode 2025-2029 berfokus pada menciptakan suasana pembangunan yang harmonis dan terjaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, serta pemeliharaan budaya dan lingkungan. Upaya ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga kemasyarakatan. Peningkatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat bertujuan untuk memastikan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga. Selain itu, koordinasi antar sektor dan lembaga akan diperkuat untuk mencapai sinergi dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Pembangunan yang harmonis juga memerlukan perhatian khusus terhadap pelestarian budaya lokal dan lingkungan alam. Langkah-langkah perlindungan terhadap warisan budaya serta upaya pelestarian lingkungan akan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kelestarian alam, Kabupaten Tana Tidung berupaya membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

f) Merebaknya konten media sosial yang tidak sesuai budaya ketimuran

Kabupaten Tana Tidung menghadapi tantangan merebaknya konten media sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya ketimuran. Fenomena ini menjadi perhatian karena dapat merusak kohesi sosial, norma-norma sosial, dan identitas budaya masyarakat. Konten negatif di media sosial juga berpotensi mempengaruhi perkembangan mental dan moral generasi muda, yang merupakan aset penting untuk masa depan daerah. Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah konkret perlu diambil. Peningkatan kesadaran dan

literasi digital di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, mengenai dampak negatif dari konten media sosial yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran sangat penting. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal perlu berperan aktif dalam mengedukasi dan memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai budaya dan moral. Dengan demikian, Kabupaten Tana Tidung dapat membangun lingkungan digital yang sehat dan memperkuat nilai-nilai budaya ketimuran dalam pembangunan yang berkelanjutan.

g) Implementasi SDG's

Pada periode 2025-2029, isu implementasi SDG's (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) di Kabupaten Tana Tidung menjadi sangat penting. Kabupaten Tana Tidung akan menghadapi tantangan signifikan dalam upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Implementasi SDGs memberikan kerangka kerja yang sistematis dan komprehensif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, Kabupaten Tana Tidung dapat menyelaraskan program pembangunan lokal dengan target SDGs secara efektif. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan, alokasi sumber daya yang efisien, serta pelaksanaan program-program yang terukur. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal melalui peningkatan kapasitas pemahaman dan partisipasi dalam implementasi SDGs akan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan berdampak positif bagi masyarakat. Dengan demikian, partisipasi aktif dalam implementasi SDGs tidak hanya memperkuat komitmen Kabupaten Tana Tidung terhadap pembangunan berkelanjutan secara global tetapi juga membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal dalam jangka panjang.

Berdasarkan tujuh isu strategis di atas, relevansi isu strategis RPJMD dengan isu strategis RPJPD Kabupaten Tana Tidung terlihat pada gambar di bawah ini:

Tabel II.65
Relevansi Isu RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2025-2029 dengan Isu RPJPD Kabupaten Tana Tidung 2025-2045

Isu Strategis (RPJPD)	Isu Strategis RPJMD
Peningkatan kualitas SDM dalam mengakselerasi pembangunan sosial dan ekonomi wilayah	Pemanfaatan Bonus Demografi dalam akselerasi pembangunan
Merebaknya konten media sosial yang tidak sesuai budaya ketimuran	Merebaknya konten media sosial yang tidak sesuai budaya ketimuran
Akselerasi pengentasan kemiskinan kultural	Akselerasi pengentasan kemiskinan dengan pendekatan sosial budaya
Transformasi ekonomi berkelanjutan	Transformasi Ekonomi Berkelanjutan berbasis agribisnis
	Peningkatan pemberdayaan desa yang mandiri dan produktif

Isu Strategis (RPJPD)	Isu Strategis RPJMD
	Percepatan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas
Implementasi Reformasi Birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik	Pemerataan digitalisasi pelayanan publik
Peningkatan suasana pembangunan yang harmonis dan terjaga	Kondusivitas wilayah menuju iklim investasi yang baik
Implementasi SDG's	Peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah

Selain memperhatikan isu strategis RPJPD, RPJMD juga memperhatikan Visi dan Misi RPJPD 2025-2045. Visi Kabupaten Tana Tidung 2025-2045 yakni "**Tana Tidung MEMBANGUN (Mandiri, Ekonomi Maju, Berdaya saing dan Berkelanjutan)"** dengan didukung oleh delapan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Unggul dan Berkeadilan
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Berbasis Agribisnis
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Baik dan Bersih
4. Mewujudkan Pembangunan yang Demokratis dan Kondusif
5. Mewujudkan ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Tana Tidung yang konsisten dan terintegrasi

Pada periode pembangunan 2025-2029, Kabupaten Tana Tidung berkomitmen untuk menyelaraskan visi dan misi jangka panjangnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang sejalan dengan isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Visi Kabupaten Tana Tidung yaitu "Tana Tidung MEMBANGUN (Mandiri, Ekonomi Maju, Berdaya saing dan Berkelanjutan)" menggarisbawahi komitmen untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dengan ekonomi yang maju dan berdaya saing, serta memastikan keberlanjutan pembangunan. Delapan misi yang mendukung visi ini meliputi transformasi sosial yang unggul dan berkeadilan, pengembangan ekonomi berbasis agribisnis, tata kelola yang baik dan bersih, pembangunan demokratis, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pemerataan pembangunan kewilayahan, sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan yang konsisten dan terintegrasi. Upaya perwujudan pembangunan ini didukung **dengan Tema Pembangunan 2025-2029 "Penguatan Pondasi Transformasi Pembangunan Menuju Daya Saing SDM yang Unggul dan Berakhlak Karimah"**. Keselarasan ini memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di Kabupaten Tana Tidung selama periode 2025-2029 tidak

hanya mendukung pencapaian visi jangka panjang tetapi juga merespons kebutuhan dan tantangan lokal secara efektif dan berkelanjutan.

3. Telaah KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung periode 2025-2029 berperan penting dalam merumuskan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap isu-isu lingkungan. KLHS ini mengidentifikasi beberapa isu krusial yang perlu diatasi guna menciptakan lingkungan yang sehat dan berkualitas bagi masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Penyusunan KLHS ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD.

Integrasi KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2025-2029 dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Proses ini mencakup identifikasi pengaruh kebijakan, rencana, dan program pembangunan terhadap lingkungan hidup, serta pengintegrasian konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS juga memfasilitasi rangkaian forum dialog bersama kelompok masyarakat untuk menggali isu strategis pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Dengan hasil analisis tersebut, KLHS memberikan kontribusi penting dalam memastikan bahwa isu-isu strategis pembangunan Tana Tidung dapat terakomodir secara efektif dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2025-2029.

Isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung untuk RPJMD 2025-2029 meliputi:

1. Pengelolaan Sampah dan Limbah
2. Keberlanjutan Sumberdaya Air Bersih
3. Ketahanan Pangan
4. Kebutuhan Hunian Layak dan Terjangkau
5. Layanan Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Masyarakat

Kelima isu tersebut memiliki keterkaitan dengan isu strategis RPJMD Kabupaten Tana Tidung, yang terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.66
Relevansi Isu KLHS RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2025-2029 dengan Isu RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2025-2029

Isu Strategis KLHS Kabupaten Tana Tidung	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Tana Tidung
1. Pengelolaan Sampah dan Limbah	Percepatan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas

Isu Strategis KLHS Kabupaten Tana Tidung	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Tana Tidung
	Peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah
2. Keberlanjutan Sumberdaya Air Bersih	Percepatan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas
	Peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah
3. Ketahanan Pangan	Transformasi Ekonomi Berkelanjutan berbasis agribisnis
	Peningkatan pemberdayaan desa yang mandiri dan produktif
4. Kebutuhan Hunian Layak dan Terjangkau	Percepatan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas
	Pemerataan digitalisasi pelayanan publik
5. Layanan Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Masyarakat	Akselerasi pengentasan kemiskinan dengan pendekatan sosial budaya
	Percepatan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas
	Peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah

Keterkaitan antara isu-isu strategis KLHS Kabupaten Tana Tidung dan RPJMD Kabupaten Tana Tidung menunjukkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas harus memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan sampah dan limbah serta keberlanjutan sumber daya air bersih sangat bergantung pada percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, yang juga berperan dalam meningkatkan ketahanan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah terhadap bencana. Ketahanan pangan yang berkelanjutan dapat tercapai melalui transformasi ekonomi berbasis agribisnis, serta peningkatan pemberdayaan desa untuk menciptakan desa yang mandiri dan produktif. Kebutuhan hunian layak dan terjangkau serta layanan kesehatan yang baik memerlukan infrastruktur yang memadai dan pemerataan digitalisasi pelayanan publik. Selain itu, pengentasan kemiskinan dengan pendekatan sosial budaya turut mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan siap menghadapi tantangan lingkungan dan bencana. Secara keseluruhan, keselarasan antara kedua isu ini mengarah pada pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan tangguh dalam menghadapi perubahan dan bencana.

4. Telaah RTRW

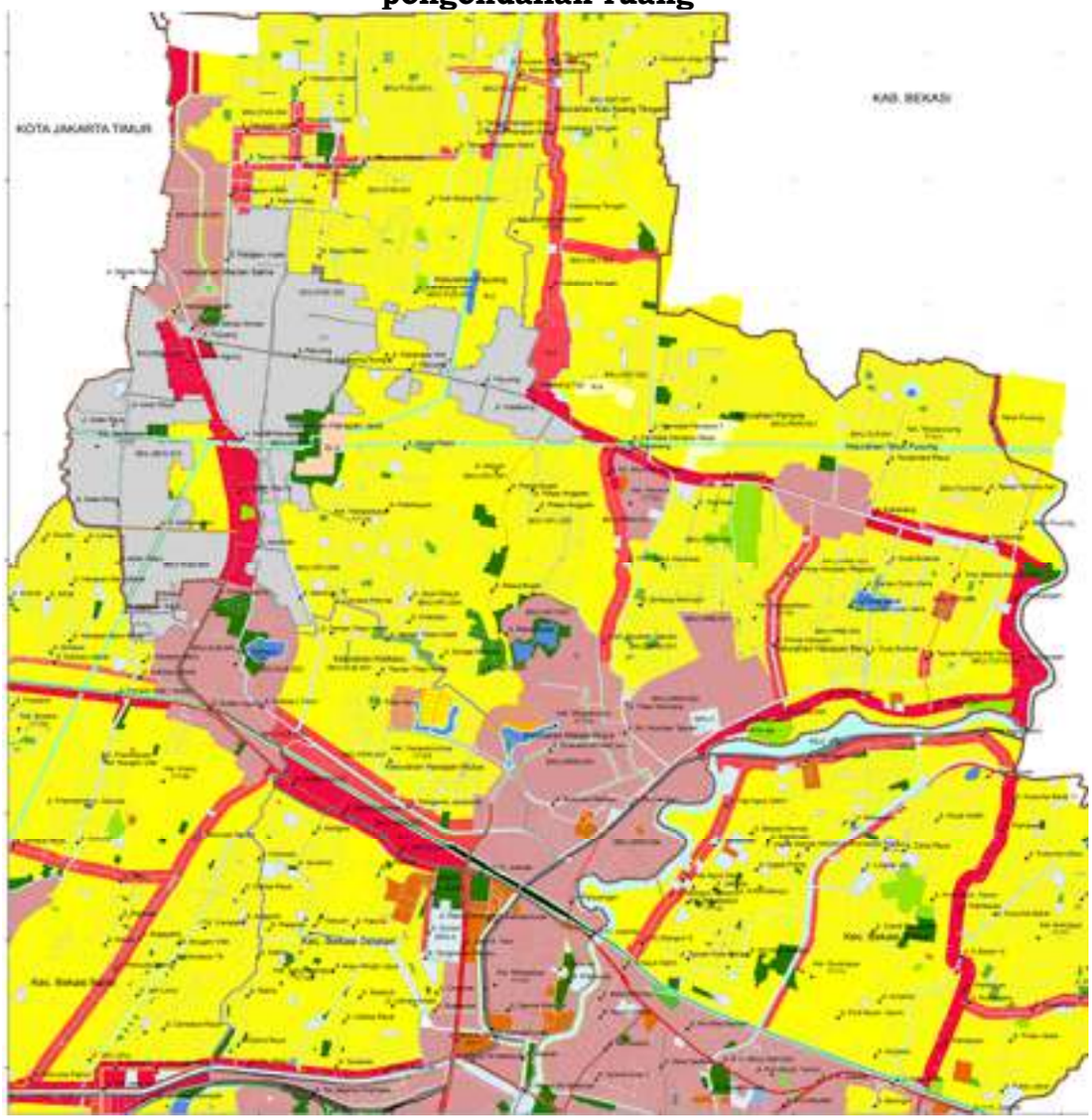
A. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tana Tidung

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan mengenai pengelolaan dan penggunaan ruang di tingkat kabupaten. RTRW ini dirancang untuk mengarahkan pembangunan wilayah secara terencana dan berkelanjutan,

serta untuk mengoptimalkan penggunaan lahan demi kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan dari perencanaan tata ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

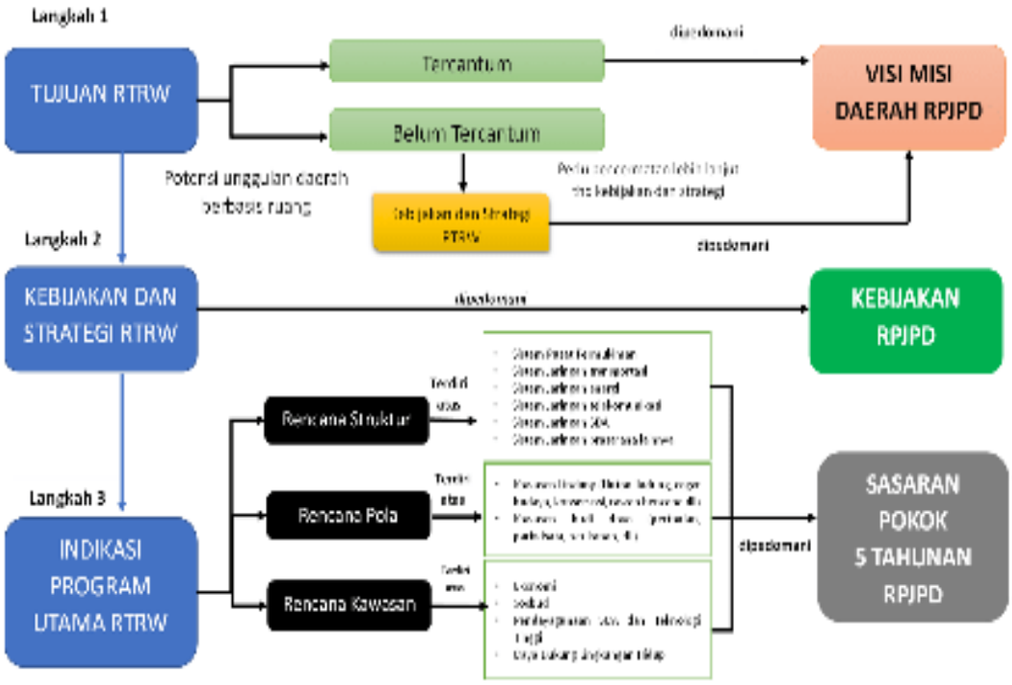
RTRW Kabupaten merupakan representasi dari tingkat detail yang digunakan dalam peta perencanaan wilayah kabupaten. Skala ini penting karena menentukan seberapa rinci informasi yang disajikan dalam RTRW dan mempengaruhi keputusan perencanaan yang dibuat berdasarkan peta tersebut. Skala RTRW Kabupaten umumnya ada pada tingkatan Skala 1:50.000 hingga 1:100.000. Ini berarti bahwa 1 unit pada peta (misalnya, 1 cm) mewakili 50.000 atau 100.000 unit yang sama di lapangan (misalnya, 50.000 cm atau 500 meter untuk skala 1:50.000 dan 1 km untuk skala 1:100.000). Di dalam RTRW sendiri terdapat arahan Zonasi textual dan zonasi peta yang sangat diperlukan untuk mengatur penggunaan lahan secara efisien dan berkelanjutan. Keduanya menyediakan panduan dan visualisasi yang jelas tentang bagaimana wilayah harus dikembangkan dan dikelola, membantu mencegah konflik penggunaan lahan, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya zonasi textual dan zonasi peta yang baik, perencanaan tata ruang dapat dilakukan secara terstruktur, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan perubahan.

Gambar II.55
Ilustrasi Zonning Map sebagai arah rencana, pemanfaatan dan pêngendalian ruang



Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka Peraturan Penataan Ruang diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalisasikan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan. Peranan penataan ruang didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terjabarkan pada rencana pembangunan sangatlah penting. Segala kegiatan yang tentu saja membutuhkan ruang sebagai wadah pendukung kegiatan pembangunan tersebut harus diatur di dalam rencana tata ruang Dimana RTRW sendiri merupakan rencana jangka Panjang yang memiliki durasi selama 20 tahun. Oleh karenanya, integrasi RTRW sebagai produk rencana spasial ke dalam rencana Pembangunan mutlak untuk dilakukan.

Gambar II.56
Alur integrasi RTRW sebagai produk rencana spasial ke dalam rencana Pembangunan



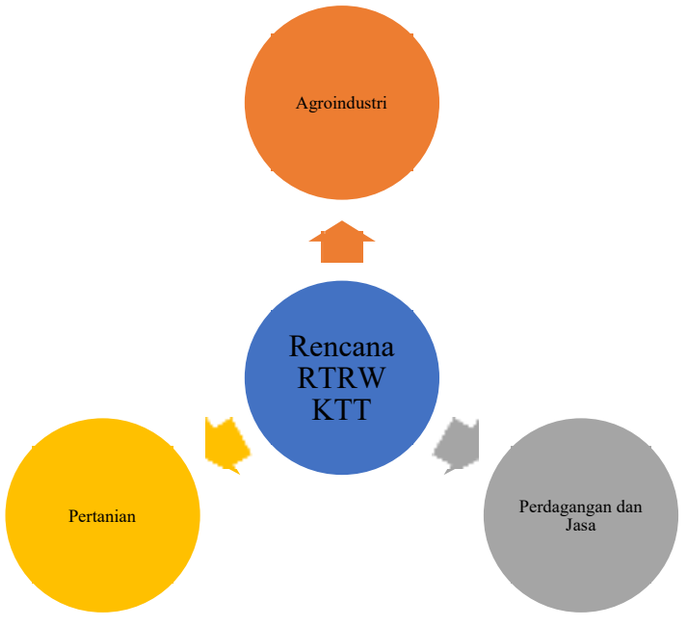
Adapun Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung berdasarkan pada dokumen Materi Teknis RTRW Kabupaten Tana Tidung 2023 - 2042 adalah sebagai berikut:

"**Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Tana Tidung sebagai sentra agroindustri, perdagangan jasa dan pertanian yang didukung oleh simpul transportasi dengan mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Alam yang sinergi dan berkelanjutan**"

Dari kerangka tujuan RTRW di atas, pada dasarnya arahan pengembangan kewilayahan Kabupaten Tana Tidung berfokus ke arah pengembangan sektor **agroindustri, perdagangan dan jasa serta pertanian** yang didukung oleh simpul transportasi. Hal ini tentunya selaras dengan arah pengembangan Kabupaten Tana Tidung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berdasarkan arahan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara No. 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037. Dimana, hal ini dibuktikan dengan arahan rencana pengembangan infrastruktur simpul transportasi Pelabuhan penyeberangan Bebatu di Kabupaten Tana Tidung yang teintegrasi dengan zona pengembangan kawasan industri.

Adapun kerangka utama pengembangan rencana RTRW Kabupaten Tana Tidung digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.57
Kerangka Tujuan RTRW Kabupaten Tana Tidung



Disamping itu, adanya tujuan penataan ruang juga diperkuat dengan kebijakan penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang ini nantinya akan dapat digunakan dalam upaya penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan tata ruang. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Tana Tidung, sebagai kerangka arah kebijakan yang diperlukan untuk dapat diimplementasikan dalam dokumen rencana pembangunan (RPJPD) Kabupaten Tana Tidung tahun 2025-2045. Adapun kebijakan yang dimaksud dapat dirinci sebagai berikut.

1. pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pengembangan pertanian, industri dan perdagangan jasa untuk pertumbuhan wilayah disertai pemerataan secara seimbang
2. penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif pertanian dan industri yang didukung oleh pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi yang terkoneksi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan
3. pemantapan fungsi kawasan lindung dengan menetapkan fungsi utamanya adalah fungsi lindung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya
4. pengembangan kawasan budidaya dalam mendorong pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang didukung oleh industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan
5. pelestarian sumberdaya zona pesisir dan laut dan mendorong perkembangan fungsi budidaya zona pesisir dan laut untuk perikanan, permukiman, pariwisata, dan prasarana perhubungan

6. peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan dengan turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Selanjutnya, perlu ditekankan pentingnya identifikasi konsistensi dalam Pola Ruang Kabupaten Tana Tidung untuk memastikan bahwa tujuan Rencana RTRW Kabupaten Tana Tidung produktif dan berdaya saing berbasis pertanian, perikanan, dan industri yang berkelanjutan, menuju masyarakat sejahtera, dapat diakomodasi secara optimal dalam struktur pola ruang Kabupaten Tana Tidung.

B. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung

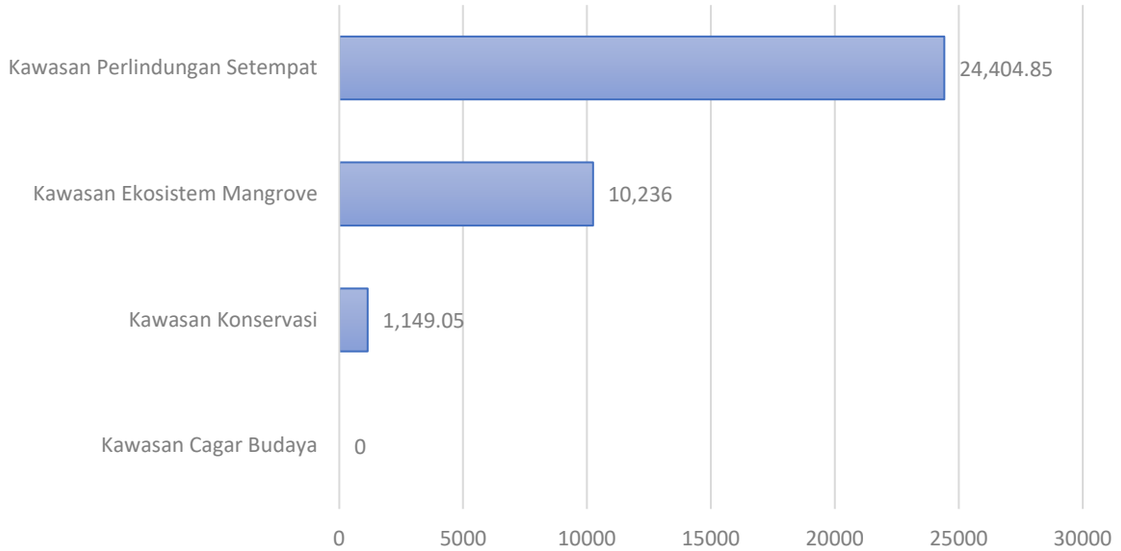
Perencanaan pola ruang di tingkat kabupaten adalah sebuah kerangka rencana yang menggambarkan cara pengorganisasian dan pemanfaatan ruang wilayah di tingkat tersebut. Perencanaan pola ruang memiliki tujuan menciptakan kebijakan terkait tata guna lahan, perkembangan sektor-sektor utama, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Berikut merupakan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tana Tidung ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Tabel II.67
Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tana Tidung

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)
1	Kawasan Perlindungan Setempat	24.404,85
2	Kawasan Konservasi	1.149,054
3	Kawasan Cagar Budaya	-
4	Kawasan Ekosistem Mangrove	10.236

Gambar II.58
Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tana Tidung



Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Tana Tidung 2022 – 2042.

Apabila ditinjau berdasarkan alokasi lahan di kawasan lindung Kabupaten Tana Tidung, kawasan yang memiliki alokasi lahan terbesar adalah pada kawasan perlindungan perlindungan setempat seluas 24.404,85 Ha. Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) adalah area dalam suatu wilayah yang ditetapkan untuk melindungi fungsi-fungsi ekologis penting dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih luas. Kawasan ini memiliki nilai strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi sumber daya alam, dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Berikutnya, kawasan lindung terbesar kedua kemudian disusul oleh Kawasan konservasi seluas 10.236 hektar. Kawasan konservasi sendiri adalah area yang ditetapkan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam yang memiliki nilai ekologis, ilmiah, pendidikan, budaya, dan rekreasi yang tinggi. Kawasan ini sering kali memiliki peraturan khusus yang membatasi aktivitas manusia untuk memastikan perlindungan jangka panjang terhadap flora, fauna, dan habitat alaminya.

Gambar II.59
Kawasan Konservasi Kabupaten Tana Tidung



Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Tana Tidung 2023 – 2042.

Selain pada kawasan lindung, telaah pola ruang Kabupaten Tana Tidung juga ditinjau pada kawasan budidaya di wilayah kabupaten Tana Tidung. Dalam konteks rencana tata ruang wilayah, Kawasan Budidaya adalah area yang dialokasikan untuk kegiatan yang menghasilkan produk pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan kegiatan lain yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Penetapan kawasan budidaya bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan, sambil mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kawasan budidaya juga mencakup permukiman, Perindustrian, pariwisata maupun perdagangan dan jasa. Berikut merupakan alokasi luasan kawasan budidaya di Kabupaten Tana Tidung berdasarkan arahan Materi Teknis RTRW Kabupaten Tana Tidung 2022 - 2042.

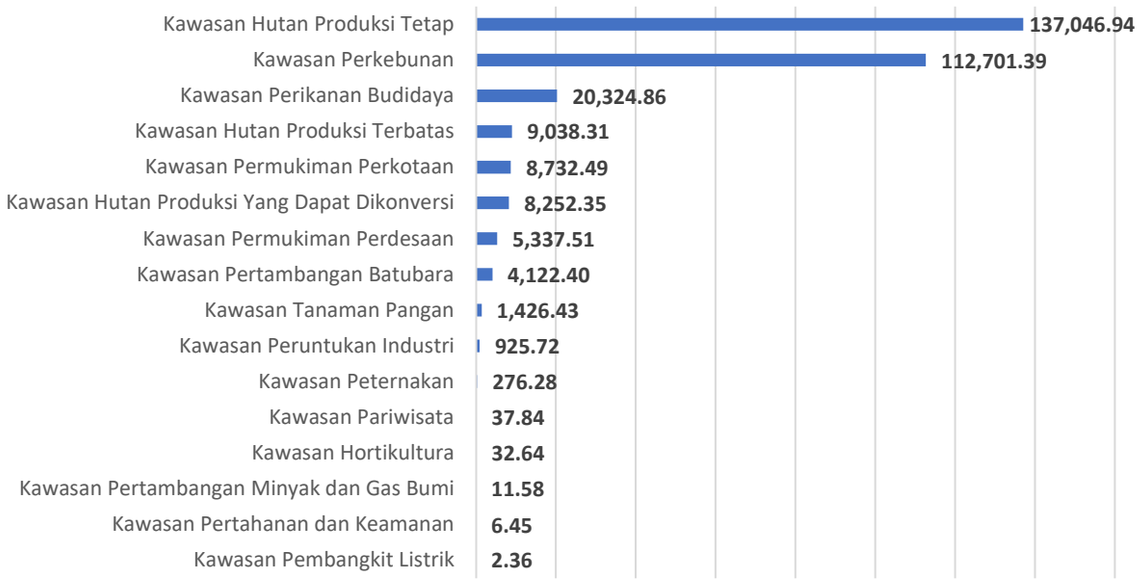
Tabel II.68
Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Tana Tidung

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1	**Kawasan Hutan Produksi**	
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	9.038,31
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	137.046,94
	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	8.252,35
2	**Kawasan Pertanian**	
	Kawasan Tanaman Pangan	1.426,43
	Kawasan Hortikultura	32,64
	Kawasan Perkebunan	112.701,39
	Kawasan Peternakan	276,28
3	**Kawasan Perikanan**	
	Kawasan Perikanan Budidaya	20.324,86
4	**Kawasan Pertambangan dan Energi**	
	Kawasan Pertambangan Batubara	4.122,40
	Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	11,58

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
	Kawasan Pembangkit Listrik	2,36
	Kawasan Peruntukan Industri	925,72
	Kawasan Pariwisata	37,84
5	**Kawasan Permukiman**	
	Kawasan Permukiman Perkotaan	8.732,49
	Kawasan Permukiman Perdesaan	5.337,51
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	6,45

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Tana Tidung 2022 – 2042

Gambar II.59
Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Tana Tidung



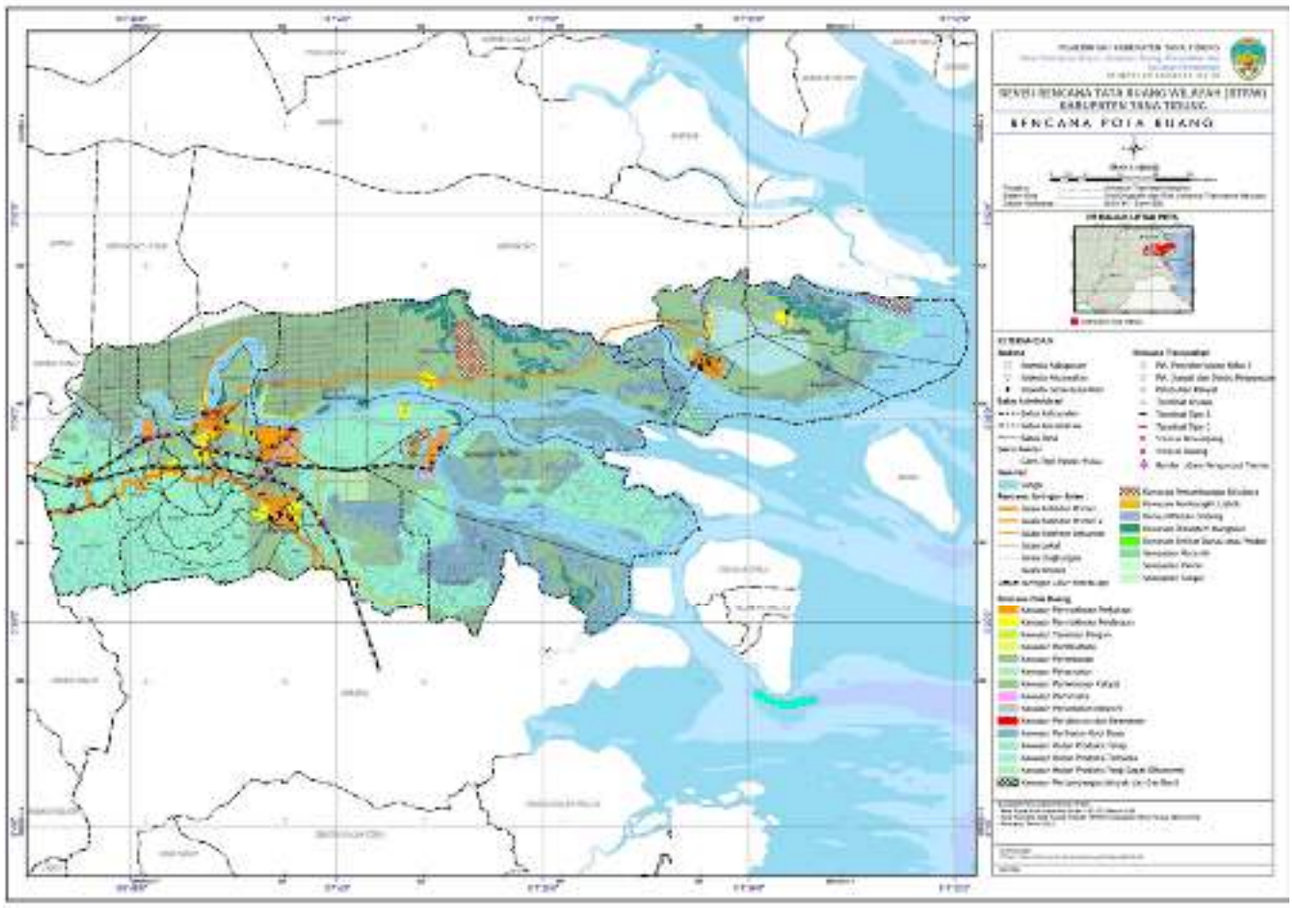
Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Tana Tidung 2022 – 2042.

Ditinjau dari alokasi pola Ruang Budidaya, pada dasarnya persentase terbesar terletak pada:

1. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan luas lahan peruntukan sebesar 137.046,94 Hektar. Berikut merupakan peta sebaran kawasan hutan di Kabupaten Tana Tidung.
2. Kawasan Perkebunan dengan luas lahan peruntukan sebesar 112.701,39 Hektar.
3. Kawasan Perikanan Budidaya dengan luas lahan peruntukan sebesar 20.324,86 Hektar.

Berikut adalah sebaran spasial Pola ruang Kabupaten Tana Tidung yang terbagi atas kawasan lindung dan budidaya.

Gambar II.60
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tana Tidung



Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Tana Tidung 2022 – 2042.

Dari analisis di atas, berdasarkan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung, yang bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Tana Tidung sebagai sentra agroindustri, perdagangan jasa dan pertanian yang didukung oleh simpul transportasi dengan mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Alam yang sinergi dan berkelanjutan, maka fokus pengembangan wilayah Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Materi Teknis RTRW Kabupaten Tana Tidung 2022 - 2042, adalah pengembangan sektor **agroindustry,** yang merupakan elaborasi lebih lanjut dengan sektor pertanian berdasarkan kondisi geografi-ekonomi Kabupaten Tana Tidung**. Agroindustry dan Pertanian** ditinjau dari adanya potensi kawasan Hutan Produksi seluas 137.046,94 Hektar dan potensi Kawasan Perkebunan dengan luas lahan peruntukan sebesar 112.701,39. Arah rencana pengembangan spasial Kabupaten Tana Tidung juga mengarah pada upaya pengembangan Kabupaten yang memiliki dinamika aktivitas **perdagangan dan jasa.** Pengembangan wilayah Kabupaten Tana Tidung juga akan diperkuat oleh adanya alokasi lahan di pada sektor perikanan. Selain itu, apabila merujuk pada telaah terhadap pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Tana Tidung, simpul-simpul bagi eksplorasi pertambangan, minyak dan gas juga memiliki kedudukan penting dalam alokasi pola ruang Kabupaten Tana Tidung.

2.3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Tana Tidung

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Tana Tidung yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Pemanfaatan Bonus Demografi dalam akselerasi pembangunan

Di Kabupaten Tana Tidung, pemanfaatan bonus demografi menjadi pusat perhatian dalam upaya mempercepat pembangunan. Dengan mayoritas penduduknya berusia muda, potensi bonus demografi dianggap sebagai kesempatan emas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemanfaatan bonus demografi juga menimbulkan tantangan dan isu strategis yang perlu diatasi.

Salah satu isu utama adalah kebutuhan akan investasi yang besar dalam bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan. Meskipun jumlah penduduk muda yang besar menawarkan tenaga kerja potensial, kurangnya kualifikasi dan keterampilan yang sesuai dapat menghambat produktivitas dan kontribusi ekonomi mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta menyelenggarakan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja local. Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai juga menjadi isu strategis dalam pemanfaatan bonus demografi. Pembangunan infrastruktur yang terkendala dapat menghambat mobilitas tenaga kerja, distribusi barang, dan akses masyarakat terhadap layanan penting seperti kesehatan dan sanitasi. Oleh karena itu, diperlukan investasi yang signifikan dalam pembangunan jaringan transportasi, jalan raya, dan utilitas publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk mendorong kewirausahaan dan pengembangan sektor ekonomi lokal. Meskipun bonus demografi menawarkan potensi pasar yang besar, kurangnya lapangan kerja formal dapat menjadi masalah . Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan program yang mendukung pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah serta memfasilitasi penciptaan lapangan kerja baru.

Kesimpulannya, pemanfaatan bonus demografi di Kabupaten Tana Tidung memerlukan perencanaan dan implementasi kebijakan yang tepat. Dengan mengatasi tantangan dalam bidang pendidikan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi, potensi bonus demografi dapat diwujudkan menjadi peluang nyata untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

b) Merebaknya konten media sosial yang tidak sesuai budaya ketimuran

Merebaknya konten media sosial yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran di Kabupaten Tana Tidung menjadi isu strategis yang menuntut perhatian . Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, konten-konten di media sosial seringkali tidak memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma budaya lokal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatifnya terhadap generasi muda dan keutuhan nilai-nilai tradisional yang telah dijunjung tinggi selama ini. Isu ini memunculkan berbagai tantangan, termasuk risiko pengaruh negatif terhadap moralitas dan perilaku sosial masyarakat, terutama generasi muda. Konten yang tidak sesuai dengan budaya lokal dapat memicu perubahan sikap dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional yang telah dijunjung tinggi selama ini. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif dan intervensi perlu diambil oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga dan memperkuat nilai-nilai budaya ketimuran perlu ditingkatkan, sementara pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap konten-konten di media sosial menjadi penting untuk mencegah pelanggaran nilai-nilai budaya lokal dan memastikan harmoni sosial di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang cepat.

c) Akselerasi pengentasan kemiskinan dengan pendekatan sosial budaya

Di Kabupaten Tana Tidung, isu strategis terkait dengan akselerasi pengentasan kemiskinan melalui pendekatan sosial budaya menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini mengakui bahwa kemiskinan seringkali bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga terkait dengan faktor-faktor sosial dan budaya yang kompleks. Salah satu isu utama adalah ketimpangan akses terhadap sumber daya dan peluang antara berbagai kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok marginal, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat, seringkali menghadapi diskriminasi dan keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung menekankan pada pembangunan inklusif yang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok masyarakat, serta mempromosikan kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, pentingnya memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengatasi kemiskinan juga menjadi isu strategis. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program-program pembangunan, diharapkan solusi-solusi yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan konteks lokal dapat dihasilkan. Pendekatan partisipatif ini mencakup pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta promosi budaya lokal sebagai sumber daya potensial untuk pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, melalui pendekatan sosial budaya yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan Kabupaten Tana Tidung dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam

upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

d) Transformasi Ekonomi Berkelanjutan berbasis agribisnis

Isu strategis terkait transformasi ekonomi berkelanjutan berbasis agribisnis menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan kehutanan, namun masih menghadapi tantangan dalam memanfaatkan secara optimal sumber daya alam dan potensi pertanian yang ada. Salah satu isu utama adalah rendahnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian lokal di pasar regional dan nasional.

Memahami hal ini, Kabupaten Tana Tidung perlu mengadopsi pendekatan transformasi ekonomi berkelanjutan yang berbasis pada pengembangan agribisnis. Dengan meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai tambah produk pertanian lokal melalui penggunaan teknologi modern, pengembangan varietas unggul, dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan. Selain itu, pentingnya memperkuat rantai pasok agribisnis lokal menjadi isu strategis lainnya. Dengan memperbaiki infrastruktur transportasi dan distribusi, memfasilitasi akses ke pasar, dan meningkatkan akses terhadap pembiayaan dan teknologi, diharapkan para pelaku usaha di sektor agribisnis dapat meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar produk mereka. Dengan demikian, melalui transformasi ekonomi berkelanjutan berbasis agribisnis, Kabupaten Tana Tidung diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

e) Peningkatan pemberdayaan desa yang mandiri dan produktif

Isu strategis terkait peningkatan pemberdayaan desa yang mandiri dan produktif di Kabupaten Tana Tidung melibatkan beberapa aspek krusial. Pertama, aksesibilitas infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan konektivitas dan akses terhadap pasar. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia, modal, dan teknologi di desa dapat menghambat kemajuan ekonomi lokal. Penting untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat desa, terutama yang berkaitan dengan pertanian modern dan teknologi informasi. Ketiga, peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi desa perlu ditingkatkan dengan memberikan dukungan khusus untuk pelatihan dan akses terhadap sumber daya. Keempat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti melalui agroforestri dan ekowisata, penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi desa sambil menjaga kelestarian lingkungan. Kelima, kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat desa akan menjadi kunci dalam mengatasi isu-isu tersebut dan menciptakan desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung.

f) Percepatan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas

Terkait percepatan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Tana Tidung memerlukan perhatian yang . Pentingnya infrastruktur dasar yang meliputi jaringan jalan yang baik, listrik yang stabil, air bersih, dan sanitasi yang memadai menjadi fokus utama, karena ketidaksempurnaan dalam hal ini dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik dan peluang ekonomi. Selain itu, pengembangan infrastruktur transportasi, termasuk pelabuhan dan bandara, menjadi penting untuk mendukung konektivitas wilayah serta pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga harus diperluas secara merata guna meningkatkan akses terhadap informasi dan kesempatan pemanfaatan teknologi. Di samping itu, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung merupakan aspek kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan pembangunan manusia. Perlunya pengelolaan infrastruktur yang berkelanjutan dan adaptif juga perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan menangani isu-isu ini secara efektif, diharapkan Kabupaten Tana Tidung dapat mencapai percepatan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas, memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan perkembangan wilayah secara keseluruhan.

g) Pemerataan digitalisasi pelayanan publik

Pemerataan digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Tana Tidung adalah sebuah tantangan penting yang membutuhkan perhatian . Dalam era dimana teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, kesenjangan digital antar wilayah dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik yang efisien dan berkualitas. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah pedesaan dan terpencil, memiliki akses yang sama terhadap layanan-layanan pemerintah yang didigitalisasi. Salah satu aspek krusial dalam pemerataan digitalisasi pelayanan publik adalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merata. Hal ini meliputi akses internet yang stabil dan terjangkau serta infrastruktur komputer dan perangkat mobile yang memadai. Selain itu, diperlukan juga upaya dalam meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan layanan-layanan yang telah didigitalisasi dengan baik. Langkah-langkah seperti pelatihan keterampilan teknologi, penyediaan pusat akses internet umum, dan kampanye edukasi tentang keamanan dan privasi data menjadi penting untuk dilakukan. Selain itu, perlu juga kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan dan mengimplementasikan solusi-solusi digital yang relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan memperhatikan isu-isu ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat,

diharapkan pemerataan digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Tana Tidung dapat terwujud, sehingga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

h) Kondusivitas wilayah menuju iklim investasi yang baik

Kondusivitas wilayah menuju iklim investasi yang baik di Kabupaten Tana Tidung adalah sebuah perihal yang sangat penting untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kondusivitas wilayah merujuk pada berbagai faktor yang memengaruhi daya tarik dan kemudahan berinvestasi di suatu daerah. Pertama-tama, stabilitas politik dan keamanan merupakan faktor utama dalam menciptakan iklim investasi yang baik. Keberlangsungan program-program pembangunan dan konsistensi dalam kebijakan pemerintah daerah menjadi kunci untuk menarik minat investor. Selain itu, transparansi dalam regulasi dan proses perizinan juga penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para investor. Infrastruktur yang memadai juga menjadi faktor penentu dalam menciptakan iklim investasi yang baik. Investasi dalam infrastruktur jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi akan meningkatkan konektivitas dan efisiensi operasional bagi para investor. Selain itu, ketersediaan lahan yang cukup untuk pengembangan proyek-proyek investasi juga perlu diperhatikan. Pemberdayaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan juga menjadi faktor penting. Tenaga kerja yang terampil dan terlatih akan meningkatkan produktivitas dan daya saing wilayah dalam menarik investasi. Selain itu, dukungan terhadap pengembangan sektor-sektor unggulan lokal yang memiliki potensi untuk menarik investasi, seperti pariwisata atau industri perikanan, juga dapat menjadi strategi yang efektif.

Kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga penting dalam menciptakan iklim investasi yang baik. Dialog yang terbuka dan berkelanjutan antara semua pihak akan memungkinkan identifikasi permasalahan dan solusi secara bersama-sama, serta memperkuat kepercayaan dan komitmen dalam memajukan investasi di Kabupaten Tana Tidung. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut dan mengambil langkah-langkah yang tepat, diharapkan Kabupaten Tana Tidung dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

i) Peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah

Peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana di Kabupaten Tana Tidung adalah hal yang memerlukan perhatian dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Kabupaten Tana Tidung memiliki kekayaan alam yang perlu dijaga, namun juga rentan terhadap berbagai ancaman bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Penting untuk menjaga kualitas lingkungan hidup agar tetap bersih dan lestari. Ini melibatkan upaya dalam pengelolaan sampah dan limbah secara efektif, pelestarian hutan

dan lahan, serta pengendalian polusi udara dan air. Melalui pendekatan konservasi yang berkelanjutan, Kabupaten Tana Tidung dapat memastikan bahwa sumber daya alamnya tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Tabel II.69
Teknik Merumuskan Isu Strategis Kabupaten Tana Tidung

POTENSI	PERMASALAHAN	KLHS	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL	ISU STRATEGIS
Jumlah penduduk terus meningkat dengan pertumbuhan 2,52% (2024), menjadi modal produktif jika ditopang peningkatan kualitas SDM. Terdapat potensi budaya lokal yang tersebar di seluruh kecamatan yang dapat diangkat melalui sektor pariwisata budaya. Permasalahan kekurangan SDM kepariwisataan menjadi peluang intervensi dalam pengembangan pelatihan dan sertifikasi berbasis budaya lokal. Meningkatnya akses air bersih dan ketahanan pangan menunjukkan perbaikan kondisi kesehatan masyarakat, walau prevalensi kurang konsumsi masih 14,96% (2024). IKP (Indeks Ketahanan Pangan) menunjukkan tren positif, meningkat ke 61,25 pada 2024, menandakan penguatan akses dan pemanfaatan pangan.	Belum optimalnya daya saing SDM menuju masyarakat unggul dan berbudaya	Layanan Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Masyarakat	Pergeseran Budaya Dampak dari Teknologi Informasi	Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia	penguatan kualitas SDM dan kohesivitas sosial	Pemanfaatan Bonus Demografi dalam akselerasi pembangunan Merebaknya konten media sosial yang tidak sesuai budaya ketimuran
Terdapat jalur strategis Trans Kalimantan, pelabuhan Tideng Pale, serta jaringan transportasi laut dan sungai yang mendukung mobilitas regional. Jaringan listrik PLN dan PLTD telah mencakup permukiman dan terus meningkat; pelanggan naik dari 6.784 (2022) ke 7.635 (2024). Akses air bersih meningkat signifikan, dari 81,23% (2020) menjadi 95,61% (2023). Potensi telekomunikasi, termasuk seluler dan kantor pos, tersedia dan mendukung aktivitas sosial ekonomi. Infrastruktur lingkungan seperti pengelolaan sampah	Belum optimalnya pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas	Kebutuhan Hunian Layak dan Terjangkau			konektivitas wilayah dan pemerataan layanan dasar	Percepatan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas

POTENSI	PERMASALAHAN	KLHS	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL	ISU STRATEGIS
terpadu dan penerapan prinsip 3R menjadi peluang dalam perbaikan kualitas hidup.						
Memiliki kekayaan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, batu bara, emas, serta hasil hutan dan perikanan budidaya yang bernilai ekonomi tinggi (termasuk udang windu dan kepiting bakau). Potensi pertanian meskipun terbatas luas lahan sawah, namun terdapat pengairan dari sungai besar seperti Sesayap. Potensi perkebunan dengan komoditas seperti kelapa, kopi, kakao, dan lada, didukung oleh kondisi geografis yang bervariasi. Tersedianya kawasan industri berbasis sumber daya lokal (industri kayu, pertanian, perikanan, pertambangan). Potensi ekonomi biru berbasis ekosistem mangrove seluas 54.000 ha untuk perdagangan karbon dan perikanan pesisir. Potensi pariwisata alam, budaya, dan pantai, dengan nilai lokal dan kearifan masyarakat.	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas berbasis potensi unggulan yang ramah lingkungan		Geopolitik dan Geoekonomi	Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif	transformasi ekonomi hijau, biru, dan energi terbarukan	Transformasi Ekonomi Berkelanjutan berbasis agribisnis
			Industri 5.0	Rendahnya Produktivitas	produktivitas ekonomi yang inklusif, bernilai tambah, dan berkelanjutan	Peningkatan pemberdayaan desa yang mandiri dan produktif
Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Sesayap, yang memiliki aksesibilitas tinggi dan jaringan jalan poros tengah Kalimantan Utara. Kabupaten ini sudah memiliki sistem wilayah pengembangan (WP) dengan pusat pertumbuhan baru untuk pemerataan pelayanan. Ketersediaan infrastruktur pemerintahan terus ditingkatkan meski masih ada keterbatasan lahan dan kantor representatif. Nilai Indeks Risiko Bencana menunjukkan tren penurunan signifikan dari 174,80 (2020) ke 146,77 (2024), mengindikasikan meningkatnya kapasitas mitigasi dan ketertiban lingkungan.	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik		Perkembangan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	tata kelola pemerintahan dan pengelolaan wilayah perbatasan yang berkualitas	Pemerataan digitalisasi pelayanan publik
						Kondusivitas wilayah menuju iklim investasi yang baik

POTENSI	PERMASALAHAN	KLHS	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL	ISU STRATEGIS
Perluasan akses air bersih dan pangan bergizi menjadi fondasi kesejahteraan dasar masyarakat. Dukungan terhadap masyarakat pesisir melalui pemanfaatan ekosistem mangrove membuka peluang pemberdayaan ekonomi lokal. Ketersediaan layanan publik dan pemerataan pembangunan wilayah pengembangan memberikan dasar penguatan inklusi sosial. Perkembangan permukiman perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi memberi peluang untuk distribusi pelayanan yang merata. Data ketahanan sosial lingkungan menunjukkan penurunan risiko bencana dan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman	Belum optimalnya peningkatan taraf hidup layak dalam pemerataan pengentasan kemiskinan	Ketahanan Pangan		Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat		Akselerasi pengentasan kemiskinan dengan pendekatan sosial budaya
Daya serap karbon tinggi dari hutan mangrove dan hutan rawa gambut, berkontribusi terhadap pembangunan rendah karbon. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat dari 72,97 (2020) menjadi 76,16 (2024), menunjukkan tren perbaikan kualitas lingkungan. Tersedia lahan berpotensi tinggi dalam penyediaan air bersih (46,21%) dan pangan (66,54%) berdasarkan jasa ekosistem. Terdapat kawasan lindung, kawasan konservasi, dan kawasan rawan bencana yang dapat dikelola untuk penguatan mitigasi iklim dan pelestarian biodiversitas.	Tingginya potensi kerusakan lingkungan sebagai dampak aktivitas pembangunan	Pengelolaan Sampah dan Limbah Keberlanjutan Sumberdaya Air Bersih	Dampak dan Perubahan Iklim Global	Keanekaragaman Hayati dan Potensi Lingkungan		Peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah

BAB 3
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



Kabupaten Tana Tidung merupakan daerah yang memiliki potensi wisata yang cukup besar karena kekayaan alam, tradisi seni dan budaya serta sejarah. Beberapa potensi pariwisata yang telah dikembangkan namun masih banyak yang belum tergarap secara serius. Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah hutan dengan persentase sebesar 47,63% (persen) yang terdiri atas hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, dan hutan tanaman. Di samping peruntunkan tersebut, peruntukan lahan digunakan sebagai pemukiman, perkebunan, tambak, tambang, ladang, sawah, kawasan lindung, dan lain-lain. Selain digunakan kawasan pertanian dan perkebunan, lahan di Kabupaten Tana Tidung juga digunakan sebagai pembangunan infrastruktur dan pemukiman warga. Dengan potensi sumber daya yang melimpah, hal ini menjadi landasan kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan konteks ini, visi dan misi RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kabupaten Tana Tidung dalam menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya dalam mengupayakan pencapaian visi dan misi maka dirumuskan Tujuan dan sasaran untuk memperkuat dan mempertajam dalam rangka membangun Tana Tidung yang ke arah yang lebih baik dan mewujudkan Tana Tidung menjadi Kabupaten berdaya saing dalam waktu jangka menengah. Visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya yang melimpah yang dimiliki. Visi dan misi dalam konteks ini merupakan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yaitu Bp. Ibrahim Ali dan Bp. Sabri. Tujuan merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD dan RPJMN. Sasaran merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapaianya tujuan RPJMD.

5.1. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada akhir periode perencanaan sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi jangka menengah menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang

yang ada di Kabupaten Tana Tidung, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

"TANA TIDUNG BERDAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA"

Dalam rumusan visi ini terkandung tiga rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung di tahun 2029. Ketiga rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun rumusan pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Pokok Visi	Uraian
Berdaya Saing	Daya saing adalah keunggulan kompetitif yang dipersiapkan secara sistematis, melibatkan setiap bidang dan partisipasi masyarakat secara kolaboratif. Perhatian terhadap dunia pendidikan, kesehatan, termasuk sosial-ekonomi hingga infrastruktur diperkuat melalui berbagai program yang sinergis dengan pemangku kepentingan terkait dan berkelanjutan, guna mendukung posisi Kabupaten Tana Tidung dalam persaingan regional maupun nasional.
Adil	Keadilan merupakan salah satu nilai dasar yang selaras dengan Pancasila sebagai dasar negara. Adil dimaknai sebagai tindakan yang proporsional atau sesuai dengan hak yang dimiliki berdasarkan prestasi dan kemampuan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip-prinsip keadilan diterapkan secara tepat dalam berbagai bidang, termasuk pemberdayaan masyarakat, manajemen birokrasi, pengelolaan anggaran, dan kebijakan pemerintah berdasarkan skala prioritas. Penerapan prinsip ini menjadi dasar terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, sehingga cita-cita pembangunan Kabupaten Tana Tidung dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Sejahtera	Sejahtera berkenaan dengan tata kehidupan yang bersifat material dan spiritual. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dipandang secara luas, tidak hanya pada urusan pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi, tetapi juga mencakup aspek spiritual (keagamaan), seni

Pokok Visi	Uraian
	budaya, rasa aman, dan kenyamanan hidup bermasyarakat termasuk iklim investasi yang kondusif. Sejahtera juga mencakup perhatian terhadap potensi bencana dengan langkah preventif (pencegahan), responsif (cepat tanggap), dan rehabilitatif (pasca-bencana), sehingga keberlangsungan kehidupan masyarakat dapat terjamin.

Visi Kabupaten Tana Tidung periode 2025-2029 menitikberatkan pada perwujudan kehidupan yang berdaya saing, adil dan sejahtera dapat dicapai dengan memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan regeneratif serta mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan menciptakan pembangunan manusia yang unggul. Karena dengan hal ini maka masyarakat akan mampu melewati permasalahan ekonomi dan serta terhindar dari ketertinggalan. Arah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Tidung yaitu dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan konsep pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menuju kesejahteraan sehingga kelestarian lingkungan yang dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya.

5.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi pembangunan Kabupaten Tana Tidung tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam mendukung implementasi Asta Cita sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Asta Cita, yang terdiri dari delapan misi prioritas, merupakan kebijakan yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana Kabupaten Tana Tidung harus mengintegrasikan misi pembangunan lima tahunan dengan hal tersebut. Mengingat Kabupaten Tana Tidung merupakan daerah penghasil komoditas unggulan yang potensial, maka pemerintah Kabupaten Tana Tidung harus menggali potensi tersebut agar

tujuan Tana Tidung berdaya saing, adil dan sejahtera. Berikut ini adalah keterkaitan antara Misi pembangunan Kabupaten Tana Tidung tahun 2025-2029 dengan Asta Cita.

Gambar III.1
Keterkaitan 8 Misi Asta Cita RPJMN 2025-2029 dengan Misi Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029



Dengan memerhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

MISI 1 : **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Tana Tidung. Pembangunan sumber daya manusia merupakan sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu meningkatkan daya saing, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak yang dapat diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, misi ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan agar

semua masyarakat di Kabupaten Tana Tidung dapat merasakan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang adil dan sesuai standar.

MISI 2 : **Meningkatkan pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, antara lain kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, serta dari segi sosial dan budaya mampu mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-budaya masyarakat. Langkah pertama untuk mewujudkan kesejahteraan diwujudkan dengan meningkatkan produktivitas masyarakat berbasis sektor unggulan daerah dan penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Selain itu, pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri berbasis pertanian, perikanan, industri dan pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut diharapkan Kabupaten Tana Tidung dapat mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang inklusif dan regeneratif sebagai upaya perwujudan Kabupaten Tana Tidung yang berdaya saing.

MISI 3 : **Membangun infrastruktur dan mendorong kemandirian desa**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kabupaten Tana Tidung dengan infrastruktur dasar mulai dari infrastruktur yang merata di perdesaan. Sarana dan prasarana publik atau infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana serta transportasi dapat meningkatkan mobilitas yang dapat berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Keberadaaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi. Selain infrastruktur yang handal dan merata, konektivitas seperti jaringan digital juga menjadi sesuatu yang harus dibangun untuk mendorong terwujudnya kemandirian desa dan hal ini tentu menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi Kabupaten Tana Tidung dalam mendorong pemerataan serta daya saing daerah.

MISI 4 : **Menjaga keamanan dan ketertiban wilayah serta kelestarian lingkungan**

Sebagai upaya mendukung konsep pembangunan berkelanjutan dalam rencana jangka panjang daerah, Kabupaten Tana Tidung berupaya mewujudkan Kabupaten yang aman dan tertib dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup.

Hal tersebut diwujudkan melalui pembangunan Kabupaten dengan pengelolaan limbah terpadu, karbon rendah, serta ketersediaan ruang hijau publik, mengurangi efek gas rumah kaca, menurunkan suhu dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehingga tahan terhadap krisis iklim dan bencana. Upaya-upaya tersebut dapat diimplementasikan mulai dari rukun tetangga dan pemberdayaan di tingkat desa berbasis gotong royong dan toleransi antar sesama.

MISI 5 : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional dalam pelayanan publik**

Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Kabupaten Tana Tidung. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat. Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa harus ditaati.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhaan. Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah

kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD).

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria *SMART-C*. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut:

Tabel III.1
Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Kab. Tana Tidung
Tahun 2025-2029

VISI **TANA TIDUNG BERDAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA**				
Pokok Visi	**Pilar**	**Misi**	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**
BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA	SDM	MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia
				Tingkat Kemiskinan
				Tingkat Pengangguran Terbuka
	EKONOMI	MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang	PDRB per Kapita
				Laju Pertumbuhan Ekonomi
				Indeks Gini

VISI TANA TIDUNG BERDAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA				
Pokok Visi	**Pilar**	**Misi**	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**
		MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DAN MENDORONG KEMANDIRIAN DESA	Tumbuh dan Inklusif	Indeks Desa
		MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN WILAYAH SERTA KELESTARIAN LINGKUNGAN		
ADIL	TATA KELOLA	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PROFESIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi
				Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Tana Tidung dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. **T1. Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia**

   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:
   - ✓ Meningkatnya kualitas dan mutu Pendidikan
   - ✓ Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Olahraga
   - ✓ Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
   - ✓ Meningkatnya kualitas keluarga sesuai yang sejahtera dan sesuai norma kehidupan Masyarakat
   - ✓ Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan
   - ✓ Meningkatnya daya beli masyarakat
   - ✓ Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (Infrastruktur Dasar) berkualitas

2. **T2. Mewujudkan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif**

   Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:
   - ✓ Menguatnya Produktivitas Sektor Pertanian dalam Arti Luas
   - ✓ Meningkatnya Hilirisasi Ekonomi Potensi Sumber daya Strategis Daerah
   - ✓ Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah
   - ✓ Meningkatnya Realisasi Investasi
   - ✓ Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- ✓ Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah
- ✓ Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah
- ✓ Meningkatnya Desa yang Mengalami Kenaikan Status
- ✓ Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Antar Wilayah

3. T3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Melayani

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- ✓ Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.2

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026-2030

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
VISI: **"TANA TIDUNG BERDAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA"** MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MISI 2 : MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MISI 3 MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DAN	**Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia**		**Indeks Pembangunan Manusia**	**71,04**	**71,13**	**71,55**	**71,96**	**72,38**	**72,78**
			Tingkat Kemiskinan	**4,20**	**4,00**	**3,79**	**3,58**	**3,37**	**3,16**
			Tingkat Pengangguran Terbuka	**3,19**	**3,16**	**3,13**	**3,10**	**3,07**	**3,04**
		Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	Indeks Pendidikan	65,97	66,11	66,64	67,18	67,71	68,25
		Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Rasio Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional Terhadap Ajang Yang Diikuti	10,00	10,00	11,00	11,00	12,50	12,50
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	73,57	73,61	73,66	73,70	73,75	73,79
		Meningkatnya kualitas keluarga sesuai yang sejahtera dan sesuai	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	71,56	71,80	72,05	72,30	72,56	72,81

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
MENDORONG KEMANDIRIAN DESA MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN WILAYAH SERTA KELESTARIAN LINGKUNGAN MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PROFESIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK		norma kehidupan Masyarakat							
		Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender	0,439	0,431	0,422	0,414	0,405	0,396
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita	9.041	9.377	9.713	10.050	10.386	10.722
		Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (Infrastruktur Dasar) berkualitas	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	88,02	88,46	88,90	89,34	89,79	90,24
	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Tumbuh dan Inklusif		**PDRB per Kapita**	**334,38**	**338,60**	**342,81**	**347,03**	**351,25**	**355,46**
			Laju Pertumbuhan Ekonomi	**4,39**	**4,43**	**4,47**	**4,52**	**4,56**	**4,61**
			Rasio Gini	**0,277**	**0,275**	**0,273**	**0,271**	**0,269**	**0,267**
			Indeks Desa	**77,46**	**78,23**	**79,01**	**79,80**	**80,60**	**81,41**

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Menguatnya Produktivitas Sektor Pertanian dalam Arti Luas	LPE Kategori Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	5,49	5,55	5,60	5,66	5,72	5,77
		Meningkatnya Hilirisasi Ekonomi Potensi Sumber daya Strategis Daerah	LPE Kategori Industri Pengolahan	6,16	6,22	6,28	6,34	6,41	6,47
		Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	LPE Sektor Pariwisata	7,73	8,18	8,64	9,09	9,55	10,00
		Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Tana Tidung	81,43	83,14	84,86	86,57	88,29	90,00
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,83	73,17	73,52	73,86	74,20	74,55
			Penurunan Intensitas Emisi GRK	45,93	48,63	51,34	54,04	56,74	59,45
		Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Resiko Bencana	146,22	145,67	145,11	144,56	144,01	143,46
		Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Laju Penurunan Pelanggaran Perda	5,00	5,00	7,50	7,50	10,00	10,00

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatnya Desa yang Mengalami Kenaikan Status	Persentase Nilai Kinerja Pemerintahan Desa	80	82	84	86	88	90
			Indeks Ketahanan Ekonomi	75	75	77	78	79	80
		Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Antar Wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	50,00	52,50	55,00	57,50	60,00	62,50
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Melayani		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**76,05**	**76,81**	**77,58**	**78,36**	**79,14**	**80,00**
			Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	**86,08**	**86,87**	**87,65**	**88,43**	**89,22**	**90,00**
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,89	3,97	4,05	4,13	4,21	4,29
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	71,75	72,40	73,05	73,70	74,35	75,00
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Tim Penyusun, 2025 sesuai dengan penyajian yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Memahami bahwa Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki indikator tujuan dan sasaran jangka menengah yang harus didukung oleh pencapaian kinerja perangkat daerah. Maka hal ini menjadi elemen krusial dalam mencapai target pembangunan yang terintegrasi dan efektif. RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi pedoman utama bagi seluruh sektor pembangunan di tingkat daerah. Indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD diturunkan secara spesifik ke dalam rencana pembangunan perangkat daerah agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini menciptakan kesinambungan antara kebijakan strategis daerah dan implementasinya di tingkat teknis melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sasaran perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator RPJMD agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berjalan terarah dan terukur.

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun ke depan. RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan bersifat terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang disusun secara matang memungkinkan adanya fokus kewilayahan dan penetapan program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi unggulan daerah.

Perencanaan strategis RPJMD bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja pembangunan lima tahunan. Visi pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029 adalah " TANA TIDUNG BERDAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA" Untuk mewujudkan visi tersebut, misi kepala daerah dirumuskan secara sistematis dan dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan. Strategi pembangunan dalam RPJMD 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penetapan tahapan, fokus dan lokus pembangunan, serta perumusan program prioritas dalam merespons dinamika lingkungan yang terus berubah.

Arah kebijakan RPJMD 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran dari misi pembangunan dan diselaraskan dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain sebagai panduan normatif dan operasional, strategi dan arah kebijakan juga menjadi instrumen dalam mendorong transformasi, reformasi birokrasi, serta perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, program prioritas disusun melalui proses cascading kinerja, dimulai dari visi hingga capaian outcome, serta dilengkapi dengan indikator kinerja sesuai dengan jenjang perencanaannya.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

a. Strategi

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirumuskan secara jelas dan terukur mampu mengarahkan pembangunan agar lebih fokus, adaptif terhadap perubahan, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan strategi dalam RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang bersumber dari identifikasi masalah, dinamika lingkungan, dan potensi kewilayahan. Strategi tersebut merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, penetapan lokus, serta pemilihan program prioritas. Dengan pendekatan ini, setiap langkah pembangunan dirancang agar berjalan secara terarah, sinergis, dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

Dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Tana Tidung, terdapat tema per tahun yang menjadi fokus dalam pembangunan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penguatan landasan transofrmasi serta mewujudkan visi pembangunan jangka menengah. Tema pembangunan per tahun pada Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut.

Gambar III.2

Tema Pembangunan Per Tahun Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2025-2029



Dalam melaksanakan kinerja pembangunan tahunan, maka perlu disusun penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Adapun penahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.3

Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029

Tema RPJPD Tahap I **"Penguatan Pondasi Transformasi Pembangunan Menuju Daya Saing SDM yang Unggul dan Berakhlakul Karimah"**				
Tema I (2026)	**Tema II (2027)**	**Tema III (2028)**	**Tema IV (2029)**	**Tema V (2030)**
Akselerasi Pembangunan Infrastruktur guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar	**Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah**	**Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau**	**Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan**	**Perwujudan Tana Tidung Berdaya Saing, Adil dan Sejahtera**
Arah Kebijakan: 1. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dalam meningkatkan kondisi sosial masyarakat, ketenagakerjaan berkualitas dan kesejahteraan keluarga 2. Penyediaan sarana prasarana permukiman dan prasarana sarana utilitas umum yang merata dan berkualitas	Arah Kebijakan: 1. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan menuju masyarakat berkehidupan layak 2. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dalam meningkatkan kondisi sosial masyarakat, ketenagakerjaan berkualitas dan kesejahteraan keluarga	Arah Kebijakan: 1. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan menuju masyarakat berkehidupan layak 2. Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan berbasis ekonomi kerakyatan 3. Optimalisasi pelestarian dan pengembangan warisan budaya	Arah Kebijakan: 1. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan menuju masyarakat berkehidupan layak 2. Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan berbasis ekonomi kerakyatan 3. Peningkatan daya tarik investasi dan penguatan kepariwisataan daerah	Arah Kebijakan: 1. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan menuju masyarakat berkehidupan layak 2. Penyediaan sarana prasarana permukiman dan prasarana sarana utilitas umum yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga

Tema RPJPD Tahap I "Penguatan Pondasi Transformasi Pembangunan Menuju Daya Saing SDM yang Unggul dan Berakhlakul Karimah"				
Tema I (2026)	**Tema II (2027)**	**Tema III (2028)**	**Tema IV (2029)**	**Tema V (2030)**
Akselerasi Pembangunan Infrastruktur guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar	**Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah**	**Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau**	**Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan**	**Perwujudan Tana Tidung Berdaya Saing, Adil dan Sejahtera**
3. Optimalisasi pelestarian dan pengembangan warisan budaya 4. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas kewilayahan dan kawasan strategis 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, murah dan terjangkau 6. Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel, profesional, dan inovatif	3. Penyediaan sarana prasarana permukiman dan prasarana sarana utilitas umum yang merata dan berkualitas 4. Optimalisasi pelestarian dan pengembangan warisan budaya 5. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas kewilayahan dan kawasan strategis 6. Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel, profesional, dan inovatif	4. Peningkatan daya tarik investasi dan penguatan kepariwisataan daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga pemasyarakatan yang unggul dan berdaya saing 6. Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan 7. Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga pemasyarakatan yang unggul dan berdaya saing 5. Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan 6. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	pemasyarakatan yang unggul dan berdaya saing 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, murah dan terjangkau 5. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 6. Penguatan kondusivitas keamanan dan ketertiban wilayah

Tema RPJPD Tahap I "Penguatan Pondasi Transformasi Pembangunan Menuju Daya Saing SDM yang Unggul dan Berakhlakul Karimah"				
Tema I (2026)	**Tema II (2027)**	**Tema III (2028)**	**Tema IV (2029)**	**Tema V (2030)**
Akselerasi Pembangunan Infrastruktur guna Meningkatkan Pemerataan dan Akses Layanan Dasar	**Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah**	**Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Terjangkau**	**Perluasan Cakupan Perekonomian Daerah berbasis Hilirisasi SDA dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan**	**Perwujudan Tana Tidung Berdaya Saing, Adil dan Sejahtera**
		akuntabel, profesional, dan inovatif		

b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja terencana yang menjadi penjabaran dari misi pembangunan daerah dan disusun secara selaras dengan strategi. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029, arah kebijakan ditetapkan sebagai turunan langsung dari misi pembangunan daerah. Kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tana Tidung. Fokus utama arah kebijakan tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi sektor unggulan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kelestarian lingkungan. Adapun rincian arah kebijakan dimaksud disajikan sebagai berikut.

Tabel III.4

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029

Misi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan kualitas pendidikan, kepemudaan dan olahraga
	Peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merata
	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak
	Penguatan kualitas keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat
	Penguatan perlindungan sosial adaptif dan integratif
	Peningkatan ketahanan pangan daerah di seluruh wilayah
	Meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat
	Penyediaan perumahan yang memastikan seluruh penduduk mendapatkan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan prasarana dan sarana utilitas memadai
MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DAN MENDORONG KEMANDIRIAN DESA	Peningkatan kualitas dan kehandalan infrastruktur jalan dan perhubungan
	Integrasi pembangunan daerah dengan program kemandirian desa
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN	Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kompetensi kewirausahaan

Misi RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD
EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Menerapkan pertanian terpadu dengan konsep teknologi tepat guna dan kolaboratif
	Optimalisasi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	Hilirisasi komoditas unggulan yang kreatif dan inovatif
	Penyediaan sarana dan prasarana distribusi berkualitas
	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan berbasis perikanan tangkap dan budidaya
	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal
	Penguatan infrastruktur budaya daerah
	Integrasi pendidikan kebudayaan pada peserta didik berbasis pengembangan kurikulum muatan lokal
	Peningkatan kualitas destinasi wisata dan infrastruktur pendukungnya
	Peningkatan peran PMA/PMDN terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi baru
	Peningkatan produktivitas ekonomi berbasis penguatan ekonomi syariah dan tata kelola dana sosial syariah
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PROFESIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
	Akselerasi pembangunan pusat pemerintahan dan perwujudan pelayanan publik yang terintegrasi berbasis digital
	Meningkatkan manajemen birokrasi, pengelolaan anggaran dan kebijakan pemerintah yang tepat fungsi
MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN WILAYAH SERTA KELESTARIAN LINGKUNGAN	Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dalam mendukung pelestarian lingkungan
	Penguatan antisipasi dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap lingkungan dan ketahanan bencana
	Meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendukung keamanan wilayah dan iklim investasi daerah

c. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tana Tidung 2025-2029

Pencapaian misi pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan focus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap misi pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung dijabarkan sebagai berikut

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial untuk masyarakat yang unggul, religius, berbudaya dan berkualitas, sebagai berikut:

a) Meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan menuju masyarakat berkehidupan layak

Meningkatkan kualitas layanan dasar di Kabupaten Tana Tidung dapat dilakukan melalui penguatan sektor kesehatan dan pendidikan guna menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, serta berdaya saing. Pemenuhan akses pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang merata menjadi langkah utama dalam membangun masyarakat berkehidupan layak. Dengan memanfaatkan bonus demografi, investasi pada pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan akan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mendorong inovasi di berbagai sektor. Upaya ini tidak hanya memperkuat daya saing individu, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menjadikan Kabupaten Tana Tidung sebagai daerah yang maju dengan sumber daya manusia unggul. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan, kepemudaan dan olahraga

   Arah kebijakan peningkatan kualitas pendidikan, kepemudaan, dan olahraga diarahkan pada upaya memperluas akses serta meningkatkan mutu layanan pendidikan, memperkuat peran dan kapasitas pemuda sebagai agen perubahan yang kreatif dan berdaya saing, serta mengembangkan olahraga baik sebagai sarana pembinaan prestasi

maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui sinergi ketiga bidang tersebut, diharapkan tercipta masyarakat yang berpengetahuan, sehat, produktif, dan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk hidup layak serta berkontribusi dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merata

   Arah kebijakan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merata difokuskan pada upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, memperkuat sarana dan prasarana kesehatan, meningkatkan ketersediaan serta kompetensi tenaga medis, dan memastikan layanan kesehatan dasar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Melalui langkah ini, diharapkan terwujud masyarakat yang sehat, produktif, dan berkehidupan layak, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

3. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak

   Arah kebijakan meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak diarahkan pada pemberdayaan perempuan agar lebih berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun politik, serta memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui layanan yang komprehensif dan berkeadilan. Dengan kebijakan ini, diharapkan terwujud masyarakat yang inklusif, berkehidupan layak, serta mampu menjamin tumbuh kembang generasi penerus secara optimal dalam lingkungan yang aman, sehat, dan sejahtera.

4. Penguatan kualitas keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat

   Arah kebijakan penguatan kualitas keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat difokuskan pada peningkatan ketahanan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga melalui penguatan nilai-nilai pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya dalam lingkup rumah tangga. Dengan memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama pembentukan karakter, moral, dan kesejahteraan anggota di dalamnya, diharapkan tercipta masyarakat yang berdaya, mandiri, serta berkehidupan layak sebagai dasar terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

b) Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dalam meningkatkan kondisi sosial masyarakat, ketenagakerjaan berkualitas dan kesejahteraan keluarga

Strategi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS dan P3KE) di Kabupaten Tana Tidung difokuskan pada peningkatan akurasi perencanaan dan penargetan program sosial secara tepat sasaran, guna mendorong kondisi sosial masyarakat yang lebih baik, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Pemerintah daerah berkomitmen memanfaatkan data tersebut untuk menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), mempercepat integrasi program perlindungan sosial, pelatihan keterampilan kerja, serta intervensi stunting dan kemiskinan ekstrem. Dengan data yang valid dan terintegrasi lintas sektor, intervensi akan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat rentan, memperkuat ketahanan keluarga, serta menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif terhadap kebutuhan industri dan potensi lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Tana Tidung. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan perlindungan sosial adaptif dan integratif

   Arah kebijakan penguatan perlindungan sosial adaptif dan integratif diarahkan pada upaya memperluas jangkauan serta meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan, sekaligus terintegrasi dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Melalui kebijakan ini, masyarakat rentan diharapkan memperoleh perlindungan yang memadai, pekerja mendapatkan jaminan atas hak-haknya, serta keluarga mampu meningkatkan ketahanan dan kualitas hidupnya, sehingga tercipta kondisi sosial yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
2. Peningkatan ketahanan pangan daerah di seluruh wilayah

   Arah kebijakan peningkatan ketahanan pangan daerah di seluruh wilayah difokuskan pada penguatan produksi, distribusi, dan aksesibilitas pangan yang berkualitas dan berkelanjutan, sekaligus mendorong keterlibatan petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Kebijakan ini tidak hanya menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
3. Meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat

Arah kebijakan meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat diarahkan pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta pemberdayaan berbasis potensi lokal agar masyarakat memiliki daya saing tinggi di pasar kerja. Dengan peningkatan keterampilan ini, diharapkan masyarakat mampu memperoleh peluang kerja yang lebih luas, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperbaiki kondisi sosial dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

c) Penyediaan sarana prasarana permukiman dan prasarana sarana utilitas umum yang merata dan berkualitas

Penyediaan sarana prasarana permukiman dan utilitas umum di Kabupaten Tana Tidung difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata ruang wilayah, peningkatan kualitas perumahan dan akses air bersih, serta penguatan koordinasi kelembagaan. Pembangunan kawasan pusat pemerintahan, peningkatan jaringan jalan, dan akses sanitasi menjadi prioritas utama, didukung pelatihan bagi masyarakat agar mampu mengelola lingkungan permukiman secara mandiri dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga menekankan akuntabilitas melalui pengawasan ketat terhadap proyek-proyek pembangunan. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan berjalan merata, berkualitas, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan hidup masyarakat Tana Tidung. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan “Penyediaan perumahan yang memastikan seluruh penduduk mendapatkan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan prasarana dan sarana utilitas memadai”

Arah kebijakan penyediaan perumahan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk dengan dukungan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan nyaman, sekaligus memastikan pemerataan akses terhadap sarana dan prasarana dasar yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Misi 2. Membangun Infrastruktur dan Mendorong Kemandirian Desa

a) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas kewilayahan dan kawasan strategis

Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan sarana prasarana di Kabupaten Tana Tidung menjadi kunci dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, seperti jalan, jembatan, serta fasilitas pelayanan publik, akan memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan berinvestasi pada sektor transportasi, energi, dan teknologi informasi, akses masyarakat terhadap layanan dasar dapat ditingkatkan secara efisien, sehingga mobilitas dan produktivitas masyarakat semakin optimal. Infrastruktur yang memadai juga mendukung sektor perekonomian dan pelayanan publik, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan wilayah serta pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Tana Tidung. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan "Peningkatan kualitas dan kehandalan infrastruktur jalan dan perhubungan"

Arah kebijakan peningkatan kualitas dan keandalan infrastruktur jalan dan perhubungan diarahkan pada pembangunan, pemeliharaan, dan modernisasi jaringan transportasi yang terintegrasi guna meningkatkan aksesibilitas serta konektivitas antarwilayah dan kawasan strategis. Melalui kebijakan ini, diharapkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang maupun jasa dapat berlangsung lebih lancar, efisien, dan merata, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat daya saing wilayah.

b) Peningkatan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga pemasyarakatan yang unggul dan berdaya saing

Strategi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Unggul dan Berdaya Saing di Kabupaten Tana Tidung diarahkan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelayanan publik di tingkat desa. Upaya ini dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa, sehingga proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan menjadi lebih partisipatif dan tepat sasaran. Di sisi lain, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan difokuskan pada peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, termasuk pengelolaan potensi lokal untuk mendukung kemandirian desa. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, sarana air bersih, dan fasilitas pelayanan publik menjadi bagian penting

untuk mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi desa. Dengan tata kelola yang baik dan infrastruktur yang memadai, desa-desa di Tana Tidung diharapkan mampu mandiri, berdaya saing, dan menjadi penggerak utama pembangunan daerah. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan "Integrasi pembangunan daerah dengan program kemandirian desa."

Arah kebijakan integrasi pembangunan daerah dengan program kemandirian desa difokuskan pada upaya menyinergikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah daerah dan desa, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, partisipatif, dan transparan. Melalui integrasi ini, desa didorong menjadi pusat kemandirian dan inovasi, dengan memperkuat kapasitas lembaga kemasyarakatan agar lebih unggul dan berdaya saing, sekaligus mampu berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Misi 3. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

a) Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan berbasis ekonomi kerakyatan

Strategi peningkatan hilirisasi potensi sumber daya alam (SDA) unggulan di Kabupaten Tana Tidung diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Hilirisasi dilakukan melalui pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan budidaya tambak yang melibatkan pelaku usaha lokal, koperasi, dan kelompok tani/nelayan sebagai pelaku utama. Pendekatan ini bertujuan untuk memperpendek rantai distribusi, meningkatkan nilai tambah produk di tingkat lokal, serta membuka akses yang lebih luas terhadap pasar. Dengan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses produksi dan pengolahan, diharapkan tercipta struktur ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi lahan budidaya yang luas dan dapat dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, maupun perikanan budidaya. Pemanfaatan lahan-lahan tersebut, khususnya di kawasan pesisir dan lahan rawa yang cocok untuk pengembangan tambak udang, bandeng, serta komoditas perikanan lainnya, menjadi peluang strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor unggulan. Untuk mendukung hal tersebut, penerapan teknologi tepat guna, pelatihan kewirausahaan, serta kemitraan dengan pelaku industri dan lembaga keuangan menjadi bagian penting dalam strategi ini. Penguatan kelembagaan lokal, akses permodalan, serta pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan produksi dan sentra

logistik juga akan mempercepat proses hilirisasi. Melalui upaya ini, pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan merata, meningkatkan daya saing daerah, serta menjaga kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kompetensi kewirausahaan

   Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kompetensi kewirausahaan difokuskan pada penguatan kapasitas dan keterampilan masyarakat untuk mengelola serta mengembangkan hilirisasi potensi sumber daya alam unggulan seperti perikanan, pertanian, perkebunan, dan budidaya hutan produksi. Melalui kebijakan ini, masyarakat didorong untuk mampu menghasilkan produk bernilai tambah, meningkatkan efisiensi usaha, memperluas akses pasar, serta menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, pengelolaan potensi lokal tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah agar lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2. Menerapkan pertanian terpadu dengan konsep teknologi tepat guna dan kolaboratif

   Arah kebijakan menerapkan pertanian terpadu dengan konsep teknologi tepat guna dan kolaboratif diarahkan pada pengelolaan sektor pertanian yang lebih efisien, produktif, dan ramah lingkungan melalui pemanfaatan inovasi teknologi serta sinergi antar-pelaku pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya mendorong optimalisasi produksi dan diversifikasi usaha tani, tetapi juga memperkuat hilirisasi potensi unggulan ekonomi kerakyatan dengan menghasilkan produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasar. Dengan demikian, pertanian terpadu berperan sebagai motor penggerak peningkatan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, serta kemandirian ekonomi daerah secara berkelanjutan.

3. Optimalisasi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

   Arah kebijakan optimalisasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) difokuskan pada penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, perluasan akses permodalan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan akses pasar bagi pelaku usaha. Kebijakan ini juga menekankan perlindungan UMKM dari berbagai risiko usaha

sekaligus mendorong pengembangan produk bernilai tambah sehingga mampu memperkuat hilirisasi potensi unggulan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, UMKM dapat tumbuh lebih berdaya saing, berkelanjutan, serta berkontribusi signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

4. Hilirisasi komoditas unggulan yang kreatif dan inovatif

   Arah kebijakan hilirisasi komoditas unggulan yang kreatif dan inovatif diarahkan pada pengembangan produk turunan bernilai tambah tinggi melalui penerapan inovasi teknologi, kreativitas, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal. Kebijakan ini bertujuan memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah agar tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi mampu dipasarkan sebagai produk olahan yang memiliki kualitas, nilai ekonomi, dan daya tarik lebih besar. Dengan demikian, hilirisasi komoditas unggulan menjadi motor penggerak peningkatan ekonomi kerakyatan, memperluas lapangan kerja, serta mendorong kemandirian dan keberlanjutan pembangunan daerah.

5. Penyediaan sarana dan prasarana distribusi berkualitas

   Arah kebijakan penyediaan sarana dan prasarana distribusi berkualitas difokuskan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung yang mampu menjamin kelancaran arus barang dan jasa, mulai dari akses jalan produksi, fasilitas penyimpanan, hingga jaringan transportasi yang terintegrasi. Dengan ketersediaan sarpras distribusi yang andal, proses hilirisasi potensi unggulan ekonomi kerakyatan dapat berjalan lebih efisien, produk lokal memiliki daya saing yang lebih tinggi, serta akses pasar semakin terbuka luas. Hal ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal.

6. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan berbasis perikanan tangkap dan budidaya

   Arah kebijakan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan berbasis perikanan tangkap dan budidaya difokuskan pada penguatan infrastruktur pengolahan hasil perikanan, baik budidaya air tawar, air payau, budidaya laut, maupun perikanan tangkap, agar mampu menghasilkan produk olahan bernilai tambah tinggi. Kebijakan ini menjadi sangat strategis bagi Kabupaten Tana Tidung yang memiliki keunggulan geografis dengan sungai berlebar permukaan terpanjang di Kalimantan mencapai 2,5 km, sehingga memberikan potensi besar dalam pengembangan sektor perikanan. Dengan tersedianya sarana pengolahan

yang memadai, diharapkan hilirisasi potensi unggulan ekonomi kerakyatan di bidang perikanan semakin optimal, membuka peluang pasar yang lebih luas, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan.

7. Peningkatan produktivitas ekonomi berbasis penguatan ekonomi syariah dan tata kelola dana sosial syariah

   Arah kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi berbasis penguatan ekonomi syariah dan tata kelola dana sosial syariah diarahkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang inklusif, berkeadilan, serta berlandaskan prinsip syariah. Melalui optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, sedekah, wakaf, serta dorongan sertifikasi halal bagi produk lokal dan UMKM, kebijakan ini diharapkan mampu memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, sekaligus memberikan jaminan mutu bagi konsumen. Dengan tata kelola dana sosial syariah yang profesional dan transparan, potensi ekonomi umat dapat didorong secara lebih produktif, mendukung pemberdayaan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

b) Optimalisasi Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya

Strategi Optimalisasi Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya di Kabupaten Tana Tidung diarahkan untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya lokal sekaligus mengembangkannya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Upaya ini mencakup pendokumentasian, perlindungan, dan revitalisasi warisan budaya, baik yang bersifat berwujud seperti situs bersejarah, bangunan tradisional, dan kerajinan daerah, maupun yang tak berwujud seperti bahasa daerah, seni pertunjukan, adat istiadat, dan kearifan lokal. Salah satu langkah penting yang ditempuh adalah pengembangan kurikulum muatan lokal di sekolah, sehingga generasi muda mengenal, memahami, dan mencintai budaya daerahnya sejak dini. Kegiatan pelestarian ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas adat, pelaku seni, lembaga pendidikan, dan sektor swasta, sehingga warisan budaya dapat terus hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Pengembangan warisan budaya juga dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga selain terjaga, budaya lokal dapat memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas pelaku budaya, penyelenggaraan festival budaya secara rutin, dan promosi budaya melalui media digital menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan dan

daya tarik budaya Tana Tidung, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan pendekatan ini, pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pelindungan sejarah, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan berbasis identitas daerah. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal

   Arah kebijakan penguatan nilai luhur kebudayaan lokal diarahkan untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya yang menjadi identitas serta jati diri masyarakat. Upaya ini ditempuh melalui penggalian, revitalisasi, dan pemanfaatan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat agar tetap relevan dengan dinamika zaman sekaligus memperkuat karakter generasi muda. Optimalisasi pelestarian dan pengembangan warisan budaya diharapkan mampu menumbuhkan kebanggaan kolektif, memperkuat kohesi sosial, serta membuka peluang pemanfaatan budaya sebagai basis ekonomi kreatif dan pariwisata yang berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah pengembangan warisan budaya Suku Tidung, di mana bahasa, adat istiadat, dan sistem kekerabatan yang kuat menjadi pilar penting dalam menjaga kehidupan sosial yang harmonis, penuh dengan semangat gotong royong, serta menjadi kekayaan budaya yang harus terus dilestarikan dan dikembangkan.

2. Penguatan infrastruktur budaya daerah

   Arah kebijakan penguatan infrastruktur budaya daerah diarahkan untuk mendukung optimalisasi pelestarian dan pengembangan warisan budaya melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, terintegrasi, dan berkelanjutan. Infrastruktur budaya seperti pusat kegiatan seni, rumah adat, museum, serta ruang ekspresi kreatif difungsikan sebagai wadah pelestarian nilai-nilai kearifan lokal sekaligus ruang pengembangan inovasi budaya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat identitas dan jati diri masyarakat, menumbuhkan apresiasi generasi muda terhadap budaya daerah, serta membuka peluang pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya yang inklusif dan berdaya saing.

3. Integrasi pendidikan kebudayaan pada peserta didik berbasis pengembangan kurikulum muatan lokal

   Arah kebijakan integrasi pendidikan kebudayaan pada peserta didik berbasis pengembangan kurikulum muatan lokal diarahkan untuk menanamkan pemahaman, apresiasi, dan kecintaan terhadap warisan budaya sejak usia dini. Melalui penyusunan kurikulum yang adaptif,

kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik daerah, nilai-nilai budaya lokal dapat diajarkan secara sistematis baik dalam bentuk materi ajar maupun kegiatan ekstrakurikuler. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat jati diri dan karakter generasi muda, menjaga keberlanjutan tradisi dan kearifan lokal, sekaligus menjadikan pendidikan sebagai sarana strategis dalam optimalisasi pelestarian serta pengembangan warisan budaya yang berdaya guna dan relevan dengan dinamika zaman.

c) Peningkatan daya tarik investasi dan penguatan kepariwisataan daerah

Strategi peningkatan daya tarik investasi dan penguatan kepariwisataan di Kabupaten Tana Tidung diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, penyediaan infrastruktur penunjang kawasan ekonomi, serta promosi potensi unggulan daerah secara aktif dan terintegrasi. Pemerintah daerah mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, BUMDes, dan UMKM lokal untuk mendukung ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal, termasuk sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata alam. Dalam penguatan pariwisata, fokus diarahkan pada pengembangan destinasi unggulan seperti wisata bahari, hutan mangrove, dan situs budaya di Kabupaten Tana Tidung, disertai peningkatan kapasitas SDM pariwisata serta promosi digital yang menjangkau pasar nasional dan internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk menjadikan Tana Tidung sebagai daerah tujuan investasi dan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis potensi lokal. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas destinasi wisata dan infrastruktur pendukungnya

   Arah kebijakan peningkatan kualitas destinasi wisata dan infrastruktur pendukungnya diarahkan untuk memperkuat daya tarik investasi sekaligus mendorong pengembangan sektor pariwisata daerah yang berkelanjutan. Salah satu destinasi wisata unggulan terdapat di Kecamatan Tana Lia yang menawarkan wisata pantai, serta wisata alam di kawasan Gunung Rian yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Upaya peningkatan aksesibilitas, penyediaan fasilitas umum, serta pengelolaan infrastruktur pendukung yang ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal akan menjadi prioritas, sehingga mampu menarik minat wisatawan maupun investor. Dengan demikian, penguatan destinasi wisata ini diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing pariwisata daerah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

2. Peningkatan peran PMA/PMDN terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi baru

Arah kebijakan peningkatan peran Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) difokuskan pada upaya mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi baru yang mampu memperkuat daya tarik investasi sekaligus mendukung pengembangan kepariwisataan daerah. Melalui fasilitasi kemudahan berusaha, penyediaan infrastruktur investasi yang memadai, serta pemberian insentif bagi sektor-sektor potensial termasuk pariwisata, diharapkan mampu menarik lebih banyak investor untuk berkontribusi pada pembangunan daerah. Kehadiran PMA dan PMDN tidak hanya menjadi motor penggerak terciptanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga mempercepat transformasi ekonomi lokal menuju sektor yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Misi 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional Dalam Pelayanan Publik

a) Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan

Strategi peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan di Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan melalui penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), serta penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung saat ini sedang mengupayakan proses pembangunan pusat pemerintahan yang dilaksanakan dengan sistem tahun jamak, dalam mengintegrasikan pelayanan dan menjalankan fungsi pemerintahan agar semakin maksimal. Untuk pelaksanaannya nanti akan diatur melalui peraturan daerah terkait dengan pembangunan tahun jamak.

Pemerintah daerah mendorong integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan informasi publik, dan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengawasan internal melalui Inspektorat diperkuat guna memastikan setiap program dan anggaran berjalan sesuai aturan dan berdampak langsung pada masyarakat. Partisipasi publik juga difasilitasi melalui forum konsultasi dan pelaporan kinerja secara daring, sehingga tercipta budaya birokrasi yang melayani, terbuka, dan bertanggung jawab. Pendekatan ini bertujuan membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan profesional di

Tana Tidung. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan "Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah"

Arah kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip good governance. Upaya ini dilakukan melalui perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif, penguatan sistem pengendalian intern, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan. Dengan pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat kinerja pembangunan, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih berkualitas dan berkeadilan.

b) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, murah dan terjangkau

Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, murah, dan terjangkau di Kabupaten Tana Tidung diarahkan pada penguatan sistem layanan yang berbasis digital, percepatan reformasi birokrasi, serta peningkatan kompetensi dan etika pelayanan aparatur. Pemerintah daerah berupaya menggunakan aplikasi daring untuk pengurusan administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat. Selain itu, standar pelayanan publik disusun secara transparan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan keterjangkauan biaya dan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan menciptakan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan warga, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan "Akselerasi pembangunan pusat pemerintahan dan perwujudan pelayanan publik yang terintegrasi berbasis digital"

Arah kebijakan akselerasi pembangunan pusat pemerintahan dan perwujudan pelayanan publik yang terintegrasi berbasis digital difokuskan pada penguatan infrastruktur kelembagaan dan sistem pelayanan yang modern, efisien, serta transparan. Melalui pembangunan pusat pemerintahan yang representatif dan terintegrasi dengan layanan digital, pemerintah daerah dapat menciptakan tata kelola yang lebih efektif, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Digitalisasi pelayanan ini sekaligus menjadi instrumen penting dalam mendorong akuntabilitas, mengurangi potensi penyimpangan,

dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

c) Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel, profesional, dan inovatif

Strategi peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel, profesional, dan inovatif di Kabupaten Tana Tidung dilakukan melalui penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja, peningkatan kapasitas dan integritas ASN, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung efisiensi birokrasi. Pemerintah daerah mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat layanan, memperkuat transparansi, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang berbasis data. Di sisi lain, pelatihan dan pembinaan ASN secara berkelanjutan digencarkan untuk mendorong budaya kerja yang adaptif, responsif, dan inovatif. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik serta kolaborasi lintas sektor dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan pendekatan ini, Tana Tidung diarahkan menjadi pemerintahan yang modern, bersih, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara kreatif dan bertanggung jawab. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan "Meningkatkan manajemen birokrasi, pengelolaan anggaran dan kebijakan pemerintah yang tepat fungsi"

Arah kebijakan peningkatan manajemen birokrasi, pengelolaan anggaran, dan kebijakan pemerintah yang tepat fungsi diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Langkah ini dilakukan melalui penataan sistem birokrasi yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik, penguatan disiplin pengelolaan anggaran sesuai prinsip efisiensi dan manfaat, serta perumusan kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, kinerja pemerintah daerah dapat semakin optimal, transparansi keuangan daerah terjamin, dan kualitas pelayanan publik mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi 5. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Wilayah Serta Kelestarian Lingkungan

a) Optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan di Kabupaten Tana Tidung dapat dioptimalkan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, konservasi ekosistem, serta rehabilitasi lahan yang terdegradasi. Langkah-

langkah ini tidak hanya menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga mengurangi emisi gas rumah kaca serta meningkatkan kualitas udara, air, dan tanah. Selain itu, penguatan infrastruktur tanggap bencana dan penerapan sistem peringatan dini yang efektif akan meningkatkan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana akibat perubahan iklim. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dalam mendukung pelestarian lingkungan

   Arah kebijakan penguatan aksi pembangunan rendah karbon dalam mendukung pelestarian lingkungan diarahkan pada upaya menekan emisi gas rumah kaca melalui penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan dengan mendorong penggunaan energi terbarukan, efisiensi sumber daya alam, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta pengendalian alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Dengan mengintegrasikan konsep rendah karbon dalam setiap program pembangunan, pemerintah daerah tidak hanya menjaga kualitas lingkungan hidup tetapi juga menciptakan ruang tumbuh bagi ekonomi hijau yang berdaya saing dan berkelanjutan.

2. Penguatan antisipasi dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap lingkungan dan ketahanan bencana

   Arah kebijakan penguatan antisipasi dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap lingkungan dan ketahanan bencana difokuskan pada upaya pencegahan dan mitigasi risiko lingkungan yang timbul dari aktivitas pembangunan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Langkah ini mencakup pengendalian pencemaran, pemantauan kualitas lingkungan, penerapan tata kelola ruang yang berkelanjutan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Dengan mengintegrasikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap sejalan dengan pelestarian lingkungan hidup, sekaligus meningkatkan ketahanan daerah terhadap ancaman bencana.

b) Penguatan kondusivitas keamanan dan ketertiban wilayah

Penguatan kondusivitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tana Tidung menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang stabil dan demokratis. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran lembaga keamanan, penegak hukum, serta institusi demokrasi guna memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan koordinasi yang baik antara

pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, ketahanan wilayah dapat terjaga, serta potensi konflik dapat diminimalisir. Stabilitas yang tercipta tidak hanya mendukung kehidupan sosial yang harmonis, tetapi juga memberikan kepastian bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan "Meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendukung keamanan wilayah dan iklim investasi daerah"

Arah kebijakan meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendukung keamanan wilayah dan iklim investasi daerah diarahkan pada terciptanya stabilitas sosial, politik, dan keamanan yang mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan investor. Upaya ini meliputi penguatan koordinasi antar-aparat keamanan, peningkatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, serta pengendalian potensi konflik sosial yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Dengan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif, diharapkan iklim investasi daerah semakin menarik dan pembangunan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.

3.2.2 Program-program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung dirancang sebagai upaya akseleratif dalam mencapai target pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pendekatan yang berbasis pada potensi daerah serta kebutuhan Masyarakat.Selama masa kampanye, Kepala Daerah terpilih mengusung serangkaian program kerja yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan ekonomi lokal, hingga program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Implementasi janji Kepala Daerah terpilih memiliki urgensi krusial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena representasi mandat rakyat yang harus diterjemahkan secara akuntabel ke dalam kebijakan pembangunan. Keterkaitan erat antara janji kampanye dan program prioritas yang selaras dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya responsif terhadap aspirasi pemilih, tetapi juga terstruktur, terukur, dan sinkron dengan prioritas nasional serta klasifikasi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang efektif

serta tepat sasaran. Berikut disajikan Proyek Strategis KDH yang dikaitkan dengan program prioritas sesuai dengan numenklatur.

Tabel III.5

Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
Visi "Tana Tidung Berdaya Saing, Adil dan Sejahtera" **Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia** **Misi 2. Membangun Infrastruktur dan Mendorong Kemandirian Desa** **Misi 3. Meningkatkan Pemberdayaan**	**Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia**			**Indeks Pembangunan Manusia**	
				Tingkat Kemiskinan	
				Tingkat Pengangguran Terbuka	
		Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan		**Indeks Pendidikan**	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan
				Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
Ekonomi, Sosial dan Budaya **Misi 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Profesional Dalam Pelayanan Publik** **Misi 5. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Wilayah Serta Kelestarian Lingkungan**			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional	Pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
		Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Olahraga		**Rasio Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional Terhadap Ajang Yang Diikuti**	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Level Nasional dan Internasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		**Usia Harapan Hidup**	
			Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Angka Morbiditas	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
					Program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		Meningkatnya kualitas keluarga sesuai yang sejahtera dan sesuai norma kehidupan Masyarakat		**Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)**	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam pembangunan	Persentase keluarga sejahtera	Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
					Program Pembinaan Keluarga Berencana
			Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	Program Pengendalian Penduduk
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat rentan	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Meningkatnya rehabilitasi sosial masyarakat yang membutuhkan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial
					Program Pemberdayaan Sosial

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan		**Indeks Ketimpangan Gender**	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase anggaran responsif gender (ARG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
					Program Perlindungan Perempuan
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan pada anak	Persentase penanganan kekerasan terhadap anak	Program Pemenuhan Hak Anak
		Meningkatnya daya beli masyarakat		**Pengeluaran per kapita**	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (Infrastruktur Dasar) berkualitas		**Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan**	
			Meningkatnya kapasitas dan ketahanan air	Kapasitas air baku	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Program Kawasan Permukiman
			Meningkatnya kualitas perumahan rakyat	Penurunan rumah tidak layak huni	Program Pengembangan Perumahan
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menepati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Program Penataan Bangunan Gedung dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Tumbuh dan Inklusif			**PDRB Perkapita**	
				Laju Pertumbuhan Ekonomi	
				Indeks Gini	
				Indeks Desa	
		Menguatnya Produktivitas Sektor Pertanian dalam Arti Luas		**LPE Kategori Pertanian, Perkebunan dan Perikanan**	
				Pertumbuhan Produksi Perkebunan	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Meningkatnya Hilirisasi Ekonomi Potensi Sumber daya Strategis Daerah		**LPE Kategori Industri Pengolahan**	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan pengusaha UMKM yang naik kelas	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
					Program Pengembangan UMKM

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien,merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah		**LPE Sektor Pariwisata**	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
					Program Pemasaran Pariwisata
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pengusaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yong Ditetapkan	
		Meningkatnya Realisasi Investasi		**Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Tana Tidung**	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase koperasi yang sehat	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Pertumbuhan jumlah proyek penanaman modal daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah investor yang berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal
			terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
					Program Pelayanan Penanaman Modal
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Modal
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	
				Penurunan Intensitas Emisi GRK	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pertumbuhan Indeks Kualitas Air	Program: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terhadap Media Air
				Pertumbuhan Indeks Kualitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanganan jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan ijin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan
			Meningkatnya kualiats pengelolaan keanekaragaman hayati	persentase RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah		**Indeks Resiko Bencana**	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi edukasi rawan kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
			Meningkatnya pelayanan penyelematan dan evakuasi	Cakupan layanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	persentase penanganan tanggap darurat bencana	Program Penanggulangan Bencana
		Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah		**Laju Penurunan Pelanggaran Perda**	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
			Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Meningkatnya Desa yang Mengalami Kenaikan Status		**Persentase Nilai Kinerja Pemerintahan Desa**	
				Indeks Ketahanan Ekonomi	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase fasilitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Program Pemberdayaan Lembaga, Kemasyarakatan, Lembaga Adat & Masyarakat Hukum Adat
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasa transmigrasi	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
		Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Antar Wilayah		**Indeks Konektivitas Wilayah**	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio konektivitas darat	Program Penyelenggaraan Lalu

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Meningkatnya kualitas transportasi air	Pertumbuhan penumpang moda transportasi air	Program Pengelolaan Pelayaran
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	Program:Pengelolaan Sumber Daya Air
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Rasio kepatuhan IMB	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
					Program Penataan Bangunan Gedung
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Melayani			**Indeks Reformasi Birokrasi**	
				Indeks Kepuasan Masyrakat Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Indeks Pelayanan Publik**	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah		**Nilai SAKIP**	
				Opini BPK	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase penurunan temuan BPK	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya tata kelola aset deerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program Pengelolaan Aset Daerah
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
					Program Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Program Pendaftaran Penduduk
				Persentase kepemilikan kartu identitas anak	Program: Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Program Pencatatan Sipil
				persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
					Program: Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Pertumbuhan masyarakat yang terlayani	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentese ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Program Kepegawaian Daerah
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya pemanfataan inovasi	Persentase produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			daerah dalam pembangunan		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Indikator Renstra PD yang selaras dengan Indikator RPJMD	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sumber : Tim Penyusun, 2025 sesuai dengan penyajian yang tertuang dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

3.2.3 Program-program Unggulan Kepala Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tana Tidung 2025-2029

Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung dirancang sebagai upaya akseleratif dalam mencapai target pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pendekatan yang berbasis pada potensi daerah serta kebutuhan Masyarakat.Selama masa kampanye, Kepala Daerah terpilih mengusung serangkaian program kerja yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan ekonomi lokal, hingga program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Implementasi janji Kepala Daerah terpilih memiliki urgensi krusial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena representasi mandat rakyat yang harus diterjemahkan secara akuntabel ke dalam kebijakan pembangunan. Keterkaitan erat antara janji kampanye dan program prioritas yang selaras dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya responsif terhadap aspirasi pemilih, tetapi juga terstruktur, terukur, dan sinkron dengan prioritas nasional serta klasifikasi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang efektif serta tepat sasaran. Berikut disajikan program kepala daerah yang dikaitkan dengan program prioritas sesuai dengan numenklatur.

Gambar III.3
Program Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029



Selain itu, program prioritas pembangunan jangka menengah Kabupaten Tana Tidung dijabarkan sebagai berikut.

Tabel III.6

Keselarasan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2025-2029 dengan Program Nomenklatur

Misi RPJMD	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	Program Prioritas Kepala Daerah	OPD Penanggung Jawab
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Tana Tidung Unggul	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tana Tidung Unggul	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Tana Tidung Unggul	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tana Tidung Unggul	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Tana Tidung Unggul	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tana Tidung Unggul	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Tana Tidung Unggul	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	Tana Tidung Unggul	Dinas Kesehatan
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tana Tidung Peduli	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Perlindungan Perempuan	Tana Tidung Peduli	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Misi RPJMD	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	Program Prioritas Kepala Daerah	OPD Penanggung Jawab
	Program Pemenuhan Hak Anak	Tana Tidung Peduli	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Tana Tidung Peduli	Dinas Kesehatan
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Tana Tidung Peduli	Dinas Kesehatan
	Program Pengendalian Penduduk	Tana Tidung Peduli	Dinas Kesehatan
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tana Tidung Peduli	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Rehabilitasi Sosial	Tana Tidung Peduli	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Pemberdayaan Sosial	Tana Tidung Peduli	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tana Tidung Peduli	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tana Tidung Peduli	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum	Tana Tidung Unggul	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Program Kawasan Permukiman	Tana Tidung Unggul	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Program Pengembangan Perumahan	Tana Tidung Unggul	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Tana Tidung Unggul	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

Misi RPJMD	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	Program Prioritas Kepala Daerah	OPD Penanggung Jawab
	Program Penataan Bangunan Gedung dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tana Tidung Unggul	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
Membangun Infrastruktur Dan Mendorong Kemandirian Desa	Program Penyelenggaraan Jalan	Tana Tidung Unggul	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tana Tidung Unggul	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Pelayaran	Tana Tidung Unggul	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Tana Tidung Unggul	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tana Tidung Unggul	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Program Penataan Bangunan Gedung	Tana Tidung Unggul	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Desa Cermat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Program Pemberdayaan Lembaga, Kemasyarakatan, Lembaga Adat & Masyarakat Hukum Adat	Desa Cermat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tana Tidung Peduli	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tana Tidung Peduli	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Tana Tidung Peduli	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan

Misi RPJMD	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	Program Prioritas Kepala Daerah	OPD Penanggung Jawab
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Tana Tidung Peduli	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm
	Program Pengembangan UMKM	Tana Tidung Peduli	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tana Tidung Peduli	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Tana Tidung Peduli	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Tana Tidung Melaju	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
	Program Pemasaran Pariwisata	Tana Tidung Melaju	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tana Tidung Melaju	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tana Tidung Melaju	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Tana Tidung Peduli	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tana Tidung Melaju	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal	Tana Tidung Melaju	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tana Tidung Melaju	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Misi RPJMD	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	Program Prioritas Kepala Daerah	OPD Penanggung Jawab
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Tana Tidung Melaju	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tana Tidung Melaju	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Profesional Dalam Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tana Tidung Melayani	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tana Tidung Melaju Tana Tidung Melayani	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Aset Daerah	Tana Tidung Melayani	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tana Tidung Melayani	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Program Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	Tana Tidung Melayani	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tana Tidung Melayani	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Program Pendaftaran Penduduk	Tana Tidung Melayani	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tana Tidung Melayani	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Tana Tidung Melayani	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tana Tidung Melayani	Sekretariat Dprd

Misi RPJMD	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	Program Prioritas Kepala Daerah	OPD Penanggung Jawab
	Program Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Tana Tidung Melayani	Sekretariat Dprd
	Program Pengelolaan Arsip	Tana Tidung Melayani	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tana Tidung Melayani	Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tana Tidung Melayani	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tana Tidung Melayani	Inspektorat
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tana Tidung Melayani	Sekretariat Daerah
	Program Kepegawaian Daerah	Tana Tidung Melayani	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tana Tidung Melayani	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Riset dan Inovasi Daerah	Tana Tidung Melayani	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Tana Tidung Melayani	Sekretariat Daerah
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tana Tidung Melayani	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tana Tidung Melayani	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan

Misi RPJMD	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	Program Prioritas Kepala Daerah	OPD Penanggung Jawab
Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Wilayah Serta Kelestarian Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terhadap Media Air	Tana Tidung Peduli	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tana Tidung Peduli	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan ijin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tana Tidung Peduli	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	Tana Tidung Peduli	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Tana Tidung Peduli	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Tana Tidung Melayani	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	Program Penanggulangan Bencana	Tana Tidung Melayani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tana Tidung Peduli	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan	Tana Tidung Peduli	Satuan Polisi Pamong Praja

Misi RPJMD	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	Program Prioritas Kepala Daerah	OPD Penanggung Jawab
	Pengembangan Etika serta Budaya Politik		
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tana Tidung Peduli	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tana Tidung Peduli	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

3.2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

A. Pengembangan wilayah berdasarkan RTRW Kabupaten Tana Tidung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023-2043 maka kebijakan penataan ruang wilayah meliputi

1) Pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pengembangan pertanian, industri dan perdagangan jasa untuk pertumbuhan wilayah disertai pemerataan secara seimbang. Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah tersebut maka ditetapkan strategi penataan ruang wilayah daerah sebagai berikut:
   a) mendorong pertumbuhan wilayah perdesaan yang lebih mandiri;
   b) meningkatkan aksesibilitas antar perdesaan dan perkotaan;
   c) meningkatkan peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah sesuai hierarki masing-masing;
   d) mengintegrasikan pusat pengembangan baru dan lama sebagai satu sistem perkotaan dan pelayanan masyarakat;
   e) mengembangkan sentra agroindustri dan pendapatan petani melalui revitalisasi sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa dan pariwisata.
2) Penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif pertanian dan industri yang didukung oleh pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi yang terkoneksi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan. Adapun strategi penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif pertanian dan industri yang didukung oleh pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi yang terkoneksi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan ialah sebagai berikut:
   a) mengembangkan sistem jaringan transportasi untuk mendorong pembangunan wilayah melalui pengembangan jaringan jalan, dan pengembangan sistem transportasi laut;
   b) mengembangkan sistem penyediaan sumber daya energi dan gas untuk mendukung pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang didukung oleh industri untuk pertumbuhan wilayah dan peningkatan investasi di wilayah Daerah;
   c) mengembangkan sumber daya air dengan mengoptimalisasi fungsi dan pelayanan prasarana pengairan secara terkontrol sesuai dengan kapasitas sumber air sebagai pengairan untuk lahan pertanian dan sumber air minum;
   d) mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri di Daerah yang

dapat menjangkau ke seluruh pelosok wilayah secara proporsional dan terkendali; dan

e) mengembangkan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri melalui pengembangan sistem persampahan dan sistem persampahan dan jaringan air bersih untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

3) Pemantapan fungsi kawasan lindung dengan menetapkan fungsi utamanya adalah fungsi lindung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya. Adapun strateginya sebagai berikut:
   a) pengendalian alih fungsi pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung;
   b) menjaga dan melindungi kelestarian kawasan hutan yang memiliki fungsi sebagai kawasan resapan air;
   c) memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta pemantapan pengelolaan kawasan secara partisipatif; dan
   d) menyediakan dan mempertahankan pemenuhan kebutuhan rth pada kawasan perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, yang meliputi 20% (dua puluh persen) rth publik dan 10% (sepuluh eprsen) rth privat.

4) Pengembangan kawasan budidaya dalam mendorong pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang didukung oleh industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan. Adapun strateginya ialah sebagai meliputi:
   a) mengembangkan kawasan hutan produksi dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan sebagai hutan produksi;
   b) menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung suplai pangan nasional dan mengembangkan komoditas-komoditas unggulan hortikultura di setiap wilayah;
   c) mengembangkan kawasan perkebunan dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan dengan teknologi tepat guna serta peningkatan partisipasi masyarakat;
   d) mengembangkan kawasan perikanan dengan mengoptimalisasikan kawasan perikanan tangkap dan budidaya;
   e) mengembangkan kawasan pertambangan yang berbasis pada teknologi yang ramah lingkungan;

f) mengembangkan kawasan peruntukan industri dan memberdayakan industri kecil untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan serta pengembangan industri kecil untuk pariwisata;
g) meningkatkan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya leluhur dan melibatkan peran serta masyarakat;
h) meningkatkan kawasan permukiman perkotaan secara sinergis dengan permukiman perdesaan; dan
i) mengembangkan kawasan peternakan dengan mengembangkan dan mengelola produk hasil peternakan melalui pengembangan cluster sentra produksi peternakan.

5) Pelestarian sumberdaya zona pesisir dan laut dan mendorong perkembangan fungsi budidaya zona pesisir dan laut untuk perikanan, permukiman, pariwisata, dan prasarana perhubungan. Adapun strateginya ialah sebagai berikut:
a) melestarikan pada kawasan penunjang ekosistem pesisir baik sebagai kawasan hutan mangrove, terumbu karang, sea grass, dan estuaria sebagai satu kesatuan ekosistem yang terpadu di bagian darat maupun laut;
b) memantapkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengembangkan dan memelihara ekosistem pesisir;
c) meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung melalui pemanfaatan bakau dan terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan dengan cara penangkapan yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan; dan
d) mengembangkan kegiatan pariwisata, penelitian dan perikanan dengan tidak mengganggu fungsi lindung.

6) Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara. Adapun strateginya ialah sebagai berikut:
a) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukkannya;
b) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan budidaya terbangun;
c) turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/tni;
d) membatasi pengembangan kegiatan budidaya lainnya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
e) menentukan jarak bebas aman kawasan pertahanan dan keamanan dengan guna lahan lainnya;

f) mensinergikan pemanfaatan ruang kawasan transportasi dengan mempertimbangkan faktor keamanan terhadap kegiatan pertahanan dan keamanan;

g) mengendalikan pemanfaatan ruang yang merubah rona wilayah darat dan laut melalui instrumen pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan;

h) memaduserasikan penetapan kawasan lindung dan budidaya dengan mempertimbangkan mitigasi dan mengurangi dampak bencana; dan

i) mendukung pemanfaatan ruang yang mendukung penetapan ksn dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.

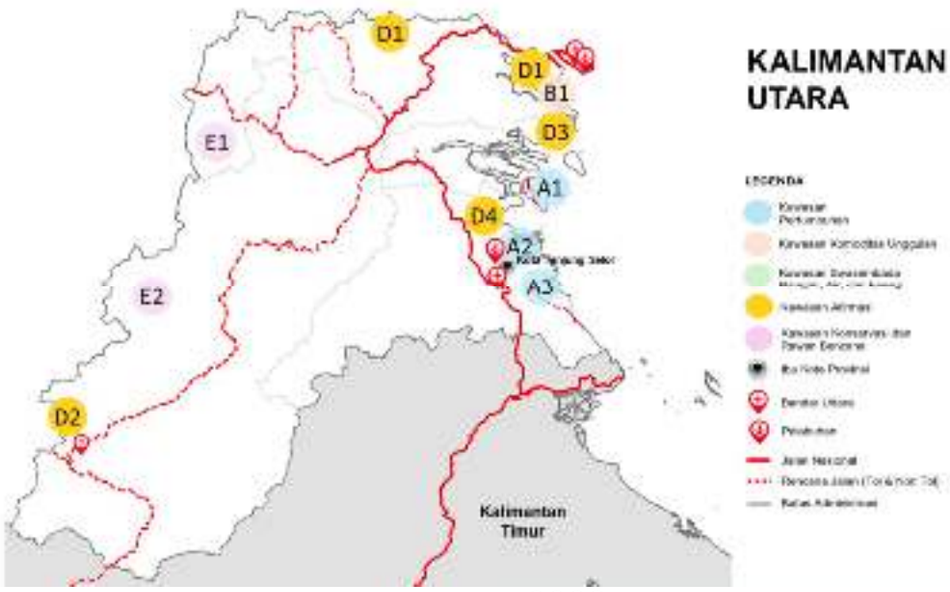
B. Pengembangan Wilayah berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029

Pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 Lampiran IV terdapat Arah Pembangunan Kewilayahan yang berada di Kabupaten Tana Tidung, yakni sebagai Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas

- **D1:** PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Krayan Selatan, Kec. Krayan, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sei Menggaris, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, dan Kec. Krayan Barat), Kabupaten Nunukan
- **D2:** PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Kayan Hilir dan Kec. Bahau Hulu), Kabupaten Malinau
- **D3:** Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Tana Lia), Kab. **Tana Tidung**

Gambar III.11

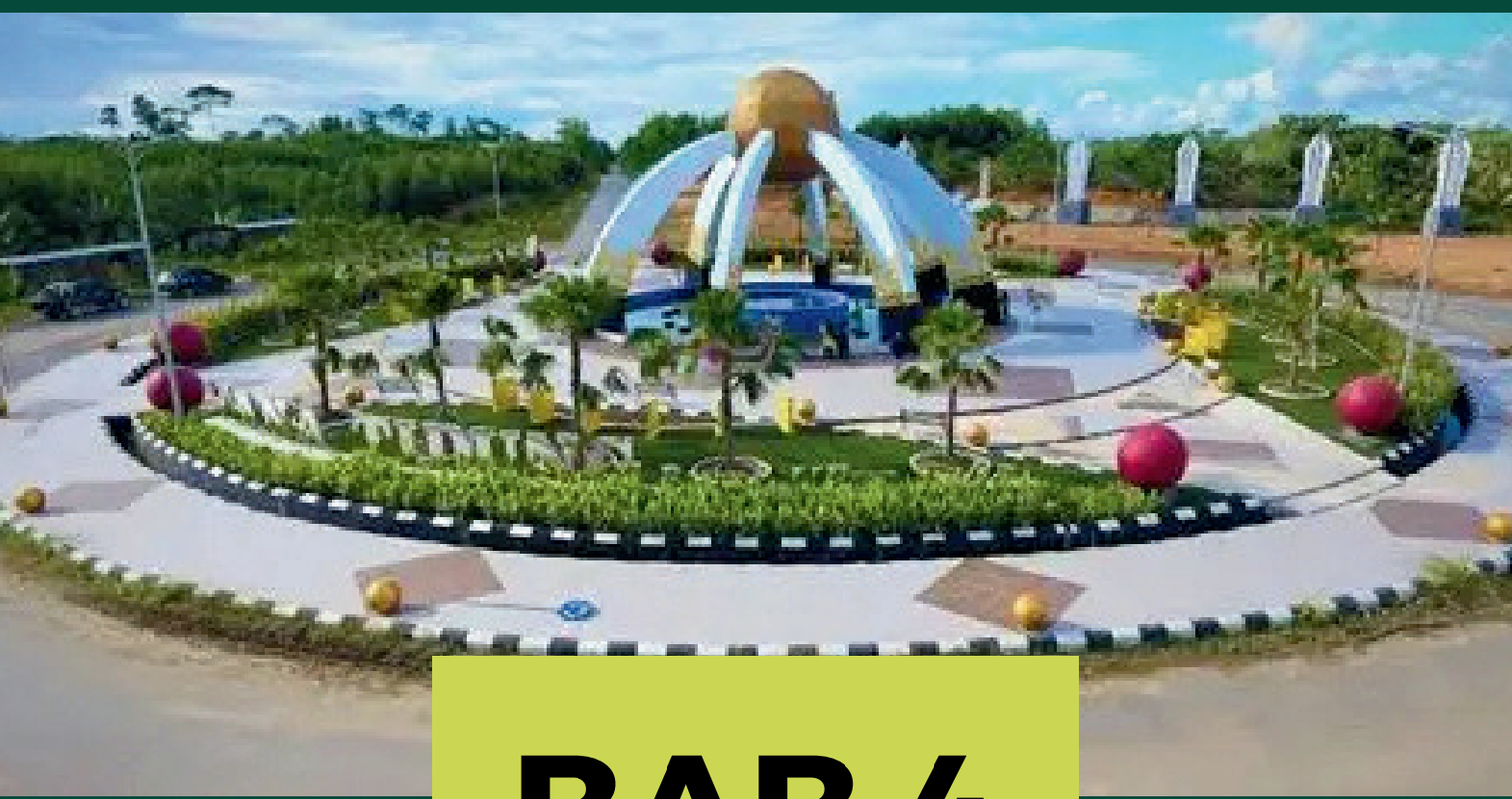
Pengembangan Kewilayahan di Kalimantan Utara Pada RPJMN 2025-2029



Sumber: RPJMN 2025-2029 (Lampiran IV), BAPPENAS, 2025

Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas**,** melalui**:**

- **Pemenuhan layanan dasar** di Kawasan Perbatasan, dengan *output*: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, pengawasan pelaksanaan BBM 1 Harga, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- **Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi** di kawasan perbatasan, dengan *output*: pembangunan jalan perbatasan dan akses kawasan PLBN, penataan bangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembangunan PLBN Long Midang beserta sarana dan prasarana pendukungnya, pembangunan jalan daerah tertinggal dan perbatasan, pembangunan jalan koridor logistik (*backbone*), pengembangan bandar udara Long Apung tahap III, Kab. Malinau, pengembangan bandar udara Seluwing, Kab. Malinau, pengembangan bandar udara Yuvai Semaring, Kab. Nunukan, pengembangan bandar udara Nunukan, Kab. Nunukan, pengembangan fasilitas pelabuhan Sungai Nyamuk, Kab. Nunukan, pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar, dan layanan validasi dan verifikasi pupuk
- **Penataan ruang dan penanggulangan bencana** di Kawasan Perbatasan, dengan *output*: dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN), penguatan desa/kelurahan tangguh bencana, dan penguatan instrumen peringatan dini bencana
- **Penguatan tata kelola pemerintahan** di Kawasan Perbatasan, dengan *output*: bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara



BAB 4

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini membahas perencanaan pendanaan pembangunan serta program kerja perangkat daerah di Kabupaten Tana Tidung dalam rangka merealisasikan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2030. Kerangka pendanaan mencerminkan kemampuan keuangan daerah yang tersedia dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Sementara itu, anggaran belanja daerah dialokasikan untuk mendukung berbagai program strategis yang telah disusun. Program-program ini berfokus pada sektor prioritas, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan peningkatan layanan publik. Selain itu, pagu indikatif digunakan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan besaran dana yang dapat digunakan untuk merancang serta melaksanakan program tahunan mereka.

Dalam menetapkan target kinerja berbagai sektor pemerintahan, aspek utama yang dipertimbangkan mencakup kapasitas keuangan daerah serta pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Tana Tidung, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan perencanaan yang sistematis dan berbasis data, pelaksanaan program pembangunan diharapkan dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, pembangunan harus selaras dengan strategi peningkatan daya saing daerah, mengingat Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, dan industri. Oleh sebab itu, keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan ketersediaan anggaran menjadi faktor utama untuk memastikan setiap program dapat direalisasikan secara optimal.

Sistem pendanaan yang tertata dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memperkuat kapasitas fiskal serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan. Dengan pendekatan yang menyelaraskan kebijakan pendanaan, strategi pembangunan, serta pelaksanaannya, Kabupaten Tana Tidung diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel IV.1
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026 – 2030

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**749,284,656,000**		**761,285,096,500**		**774,169,460,300**		**787,938,065,500**		**802,592,546,900**	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**237,259,940,800**		**241,059,863,600**		**245,139,680,200**		**249,499,488,900**		**254,139,809,500**	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				**237,259,940,800**		**241,059,863,600**		**245,139,680,200**		**249,499,488,900**		**254,139,809,500**	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				170,942,171,300		173,679,958,200		176,619,403,300		179,760,579,200		183,103,859,900	Dinas dan Pendidikan Kebudayaan
	Meningkatnya akurasi dan akuntabilitas perencanaan serta evaluasi kinerja melalui penyusunan dokumen yang memenuhi aspek kualitas sesuai standar	Predikat Lakip OPD (Dengan Satuan:Persen)	BB	BB		A		A		AA		AA		Dinas dan Pendidikan Kebudayaan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada OPD yang tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan OPD (Dengan Satuan:Persen)	82	83		84		85		86		87		Dinas dan Pendidikan Kebudayaan
	Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan dan evaluasi kinerja melalui penyusunan dokumen yang memenuhi standar aspek kualitas	Persentase Terpenuhinya Aspek Kualitas Dalam Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja (Dengan Satuan:Persen)	80	81		82		83		84		85		Dinas dan Pendidikan Kebudayaan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				63,824,677,800		64,846,884,800		65,944,386,000		67,117,207,000		68,365,487,000	Dinas dan Pendidikan Kebudayaan
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah usia 7-18 tahun	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Dengan Satuan:%)	20	21		22		23		24		25		Dinas dan Pendidikan Kebudayaan
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah usia 13-15 tahun	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas dan Pendidikan Kebudayaan
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah usia 7-12 tahun	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas dan Pendidikan Kebudayaan
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah usia 5-6 tahun	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas dan Pendidikan Kebudayaan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				444,500,400		451,619,400		459,263,000		467,430,700		476,124,400	Dinas dan Pendidikan Kebudayaan
	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas dan Pendidikan Kebudayaan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN				109,258,200		111,008,000		112,886,800		114,894,500		117,031,300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendiidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				1,638,873,100		1,665,121,100		1,693,302,400		1,723,417,800		1,755,470,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				300,460,000		305,272,100		310,438,700		315,959,700		321,836,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Terlestarinya bahasa dan sastra daerah	Persentase pengembangan bahasa dan sastra (Dengan Satuan:%)	40	41		42		43		44		45		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**132,295,592,500**		**134,414,421,100**		**136,689,316,300**		**139,120,336,700**		**141,707,769,200**	
	DINAS KESEHATAN				**132,295,592,500**		**134,414,421,100**		**136,689,316,300**		**139,120,336,700**		**141,707,769,200**	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				86,227,610,400		87,608,619,800		89,091,351,400		90,675,841,000		92,362,277,700	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan urusan kesehatan melalui tersedianya dukungan administrasi dan manajemen yang optimal	Persentase pemenuhan dukungan administrasi dan manajemen dalam pelaksanaan urusan kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				45,338,513,100		46,064,649,100		46,844,269,100		47,677,395,300		48,564,124,100	Dinas Kesehatan
	Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	Persentase Penanganan Kejadian penyakit Tidak Menular (Dengan Satuan:%)	60	61		62		63		64		65		Dinas Kesehatan
	Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	Persentase Penanganan Kejadian penyakit Tidak Menular (Dengan Satuan:%)	80	81		82		83		84		85		Dinas Kesehatan
	Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	Persentase Penanganan Kejadian penyakit Tidak Menular (Dengan Satuan:%)	80	81		82		83		84		85		Dinas Kesehatan
	Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (Dengan Satuan:%)	80	81		82		83		84		85		Dinas Kesehatan
	Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	Persentase Penanganan Kejadian penyakit Tidak Menular (Dengan Satuan:%)	80	81		82		83		84		85		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	90	91		92		93		94		95		Dinas Kesehatan
	Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular (Dengan Satuan:%)	90	91		92		93		94		95		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	2.prevalensi stunting (pendek dan sanagan pendek) pada balita (Dengan Satuan:%)	80	81		82		83		84		85		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1.angka kematian ibu (AKI) (Dengan Satuan:per 100.000 kelahiran)	5	4		3		2		1		0		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelaksanaan intervensi spesifik penurunan stunting	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Menurunnya Kejadian Penyakit Tidak Menular	Persentase Penanganan Kejadian penyakit Tidak Menular (Dengan Satuan:%)	60	61		62		63		64		65		Dinas Kesehatan
	Menurunnya Kejadian Penyakit Menular	Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular (Dengan Satuan:%)	80	81		82		83		84		85		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				229,371,000		233,044,600		236,988,700		241,203,600		245,689,600	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kapasitas dan pemenuhan SDM kesehatan yang kompeten dan sesuai standar pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya (Dengan Satuan:%)	70	71		72		73		74		75		Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				91,484,400		92,949,700		94,522,800		96,203,900		97,993,100	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya perlindungan masyarakat melalui pengawasan mutu, keamanan, dan manfaat sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman yang beredar di masyarakat	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar teknis dan legalitas berdasarkan hasil pengawasan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				408,613,600		415,157,900		422,184,300		429,692,900		437,684,700	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	Presentase Rumah Tangga ber-PHBS (Dengan Satuan:%)	81.96	82.06		82.16		82.26		82.36		82.46		Dinas Kesehatan
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**335,602,607,700**		**340,977,574,200**		**346,748,445,800**		**352,915,367,800**		**359,479,071,400**	
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN				**335,602,607,700**		**340,977,574,200**		**346,748,445,800**		**352,915,367,800**		**359,479,071,400**	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16,262,431,900		16,522,888,900		16,802,530,500		17,101,363,700		17,419,423,400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Terlaksananya kegiatan rutin kesekretariatan dan Kinerja dinas	Persentase urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				15,792,195,200		16,045,120,800		16,316,676,300		16,606,868,400		16,915,731,400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Meningkatnya Pengelolaan SDA	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:Persen)	50	51		52		53		54		55		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				7,101,352,200		7,215,086,500		7,337,198,100		7,467,690,200		7,606,578,200	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya penduduk yang berakses air bersih	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih (Dengan Satuan:Persen)	46	47		48		49		50		51		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				186,101,600		189,082,100		192,282,200		195,702,000		199,341,800	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sampah	Persentase Pengembangan Pengelolaan Sampah (Dengan Satuan:Persen)	50	51		52		53		54		55		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				2,073,558,100		2,106,767,900		2,142,424,000		2,180,527,000		2,221,081,500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Meningkatnya Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Persentase Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai (Dengan Satuan:Persen)	70	71		72		73		74		75		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				130,413,493,100		132,502,178,400		134,744,709,900		137,141,144,700		139,691,767,600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang ber IMB (Dengan Satuan:Persen)	90	91		92		93		94		95		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				8,338,978,800		8,472,534,800		8,615,928,100		8,769,162,400		8,932,255,800	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Meningkatnya Penataan Bangunan Dan Lingkungan Yang Sesuai Rtrw	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang sesuai RTRW (Dengan Satuan:Persen)	90	91		92		93		94		95		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				11,561,689,000		11,746,859,500		11,945,669,100		12,158,122,800		12,384,245,900	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Meningkatnya Jalan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dalam kondisi mantap (Dengan Satuan:Persen)	56	57		58		59		60		61		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				140,043,996,900		142,286,922,900		144,695,056,300		147,268,458,100		150,007,433,900	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Persentase pengembangan jasa kontruksi di Kabupaten Tana tidung (Dengan Satuan:Persen)	90	91		92		93		94		95		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				3,828,810,900		3,890,132,400		3,955,971,300		4,026,328,500		4,101,211,900	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang	Persentase keseuaian pemanfaatan tata ruang (Dengan Satuan:Persen)	80	81		82		83		84		85		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**18,888,100,900**		**19,190,609,600**		**19,515,401,200**		**19,862,482,600**		**20,231,895,300**	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				101,694,800		103,323,500		105,072,200		106,941,000		108,929,900	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persentase rumah layak huni (Dengan Satuan:Persen)	65	66		67		68		69		70		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				3,762,709,800		3,822,972,800		3,887,674,700		3,956,817,100		4,030,408,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Berkurangnya daerah kumuh	Persentase kawasan permukiman yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	60	61		62		63		64		65		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				2,389,829,200		2,428,104,400		2,469,198,900		2,513,113,600		2,559,853,800	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	meningkatnya pencegahan kawasan permukiman kumuh	Persentase pencegahan kawasan permukiman kumuh (Dengan Satuan:Persen)	90	91		92		93		94		95		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				5,084,743,100		5,166,179,700		5,253,614,700		5,347,050,200		5,446,497,400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Meningkatnya PSU Terbangun dalam kondisi baik	Persentase PSU Terbangun Dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:Persen)	80	81		82		83		84		85		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				**7,549,124,000**		**7,670,029,200**		**7,799,840,700**		**7,938,560,700**		**8,086,206,200**	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,549,124,000		7,670,029,200		7,799,840,700		7,938,560,700		8,086,206,200	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan	80	81		82		83		84		85		Dinas Pemadam

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)												Kebakaran dan Penyelamatan
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**16,265,876,000**		**16,526,386,800**		**16,806,088,300**		**17,104,984,300**		**17,423,111,800**	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				370,876,000		376,815,800		383,193,300		390,008,300		397,261,800	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Dengan Satuan:Persen)	85	86		87		88		89		90		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Persentase Dokumen Layanan Pencegahan Kebakaran (Dengan Satuan:Persen)	55	56		57		58		59		60		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**6,269,000,000**		**6,369,403,000**		**6,477,202,000**		**6,592,399,000**		**6,715,008,000**	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,539,638,700		5,628,360,400		5,723,617,900		5,825,412,200		5,933,756,400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang tercermin dari capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Dengan Satuan:Angka)	85	86		87		88		89		90		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				729,361,300		741,042,600		753,584,100		766,986,800		781,251,600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya efektivitas tata kelola dan kelembagaan penanggulangan bencana	Persentase elemen sistem kelembagaan dan tata kelola PB yang tersedia dan berjalan secara fungsional (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar pascabencana	Persentase masyarakat terdampak yang telah mendapatkan kembali fungsi layanan dasar pascabencana dalam waktu < 6 bulan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana di wilayah rawan	Persentase wilayah terdampak pulih dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah bencana (Dengan Satuan:Persen)	80	81		82		83		84		85		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana di wilayah rawan	Persentase Penurunan Jumlah Korban Jiwa akibat Bencana (Dengan Satuan:Persen)	20	21		22		23		24		25		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana di wilayah rawan	Persentase masyarakat di wilayah rawan yang memahami risiko bencana (Dengan Satuan:%)	0.6	0.7		0.8		0.9		1		1.1		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				**9,626,000,000**		**9,780,168,000**		**9,945,693,000**		**10,122,577,000**		**10,310,842,000**	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9,276,316,800		9,424,885,100		9,584,396,500		9,754,855,100		9,936,280,700	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				349,683,200		355,282,900		361,296,500		367,721,900		374,561,300	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**8,972,538,100**		**9,116,241,200**		**9,270,528,500**		**9,435,405,200**		**9,610,889,700**	
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**8,972,538,100**		**9,116,241,200**		**9,270,528,500**		**9,435,405,200**		**9,610,889,700**	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,804,204,900		7,929,196,100		8,063,393,300		8,206,801,100		8,359,435,400	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran yang tercermin dari tingkat kepuasan pengguna layanan	Persentase Tingkat Kepuasan administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				364,349,300		370,184,700		376,449,800		383,145,000		390,270,900	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya Kualitas Layanan Bidang Sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat (Dengan Satuan:Nilai)	99	99.25		99.5		99.75		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				172,355,600		175,116,000		178,079,800		181,246,900		184,617,800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya Layanan bidang Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				379,884,700		385,968,900		392,501,200		399,481,800		406,911,600	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran	Persentase Bantuan Sosial yang sampai Kepada KPM menerima (Dengan Satuan:Persen)	90	91		92		93		94		95		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				251,743,600		255,775,500		260,104,400		264,730,400		269,654,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**91,963,679,400**		**93,436,554,000**		**95,017,920,800**		**96,707,813,200**		**98,506,439,200**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**5,959,643,600**		**6,055,092,300**		**6,157,572,400**		**6,267,084,300**		**6,383,643,000**	
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				**5,959,643,600**		**6,055,092,300**		**6,157,572,400**		**6,267,084,300**		**6,383,643,000**	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,411,335,700		5,498,002,500		5,591,053,900		5,690,490,300		5,796,325,400	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja				5,354,500		5,440,300		5,532,400		5,630,800		5,735,500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya keselarasan kebijakan ketenagakerjaan lokal dengan dinamika usaha dan dunia industri	Persentase kegiatan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				234,530,400		238,286,600		242,319,500		246,629,200		251,216,100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja (Dengan Satuan:Persen)	40	41		42		43		44		45		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				40,694,500		41,346,400		42,046,200		42,794,000		43,589,900	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Peserta Wirausaha Baru yang Kompeten (Dengan Satuan:Persen)	40	41		42		43		44		45		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				267,728,500		272,016,500		276,620,400		281,540,000		286,776,100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya hubungan industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**408,883,400**		**415,432,700**		**422,463,700**		**429,976,800**		**437,974,300**	
	DINAS KESEHATAN				**17,220,000**		**17,495,800**		**17,791,900**		**18,108,300**		**18,445,100**	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				17,220,000		17,495,800		17,791,900		18,108,300		18,445,100	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender,pemenuhan hak,serta perlindungan perempuan dan anak	pembelajaran keluarga (puspaga) yang berperspektif gende dan hak anak sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**391,663,400**		**397,936,900**		**404,671,800**		**411,868,500**		**419,529,200**	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				41,783,000		42,452,300		43,170,700		43,938,500		44,755,800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya kualitas dan evektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				147,964,100		150,334,100		152,878,500		155,597,200		158,491,200	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensi (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				15,668,600		15,919,600		16,189,000		16,476,900		16,783,400	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	PERSENTASE LEMBAGA YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN HAK ANAK (Dengan Satuan:Persen)	69	70		71		72		73		74		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				186,247,700		189,230,900		192,433,600		195,855,900		199,498,800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan,eksploitasi,penelantaran,perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	PERSENTASE ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**567,083,300**		**576,165,500**		**585,917,000**		**596,337,600**		**607,428,500**	
	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN				**567,083,300**		**576,165,500**		**585,917,000**		**596,337,600**		**607,428,500**	
2.09.02	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan				253,162,300		257,216,900		261,570,200		266,222,200		271,173,500	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase jumlah cadangan pangan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				232,909,100		236,639,300		240,644,400		244,924,300		249,479,500	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama (Dengan Satuan:Persentase)	85	86		87		88		89		90		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				35,442,700		36,010,300		36,619,800		37,271,100		37,964,300	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				45,569,200		46,299,000		47,082,600		47,920,000		48,811,200	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**1,683,052,600**		**1,710,008,400**		**1,738,948,700**		**1,769,875,300**		**1,802,793,500**	
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN				**1,683,052,600**		**1,710,008,400**		**1,738,948,700**		**1,769,875,300**		**1,802,793,500**	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				259,321,800		263,475,100		267,934,300		272,699,500		277,771,300	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Terselenggaranya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN (Dengan Satuan:Persen)	70	71		72		73		74		75		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				172,881,200		175,650,100		178,622,900		181,799,700		185,180,900	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Terselenggaranya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	PERSENTASEPENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN (Dengan Satuan:Persen)	85	85.5		86		86.5		87		87.5		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				233,898,100		237,644,000		241,666,100		245,964,300		250,538,600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Terlaksananya Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	PERSENTASE PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE (Dengan Satuan:Persen)	70	71		72		73		74		75		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				1,016,951,500		1,033,239,200		1,050,725,400		1,069,411,800		1,089,302,700	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
	Terlaksananya Program Penatagunaan Tanah	PERSENTASE PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH (Dengan Satuan:Persen)	70	71		72		73		74		75		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**11,965,000,000**		**12,156,629,000**		**12,362,374,000**		**12,582,239,000**		**12,816,250,000**	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				**11,965,000,000**		**12,156,629,000**		**12,362,374,000**		**12,582,239,000**		**12,816,250,000**	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9,084,217,100		9,229,708,100		9,385,916,500		9,552,845,000		9,730,514,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta fungsi perangkat daerah	Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan internal OPD (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				518,629,400		526,935,600		535,853,800		545,383,900		555,527,300	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				421,463,000		428,213,100		435,460,400		443,205,000		451,448,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Status Mutu Udara (Dengan Satuan:Point)	72.84	72.94		73.04		73.14		73.24		73.34		Dinas Lingkungan Hidup
	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Status Mutu Air (Dengan Satuan:Point)	52.26	52.36		52.46		52.56		52.66		52.76		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				214,716,900		218,155,700		221,847,900		225,793,500		229,992,900	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				359,923,200		365,687,600		371,876,700		378,490,600		385,529,900	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Ketaatan penanganan jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan ,izin PPLH dan PUU LH (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				66,234,600		67,295,400		68,434,300		69,651,400		70,946,800	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatknya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persen)	65	66		67		68		69		70		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				13,961,200		14,184,800		14,424,900		14,681,400		14,954,500	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Dengan Satuan:Persen)	83.33	83.43		83.53		83.63		83.73		83.83		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				360,665,200		366,441,500		372,643,400		379,270,900		386,324,700	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				925,189,400		940,007,200		955,916,100		972,917,300		991,011,900	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Volume Sampah yang tertangani (Dengan Satuan:Persen)	66.4	66.6		66.8		67		67.2		67.4		Dinas Lingkungan Hidup
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**7,062,000,000**		**7,175,104,000**		**7,296,539,000**		**7,426,307,000**		**7,564,426,000**	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**7,062,000,000**		**7,175,104,000**		**7,296,539,000**		**7,426,307,000**		**7,564,426,000**	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,113,472,600		6,211,385,200		6,316,509,600		6,428,848,100		6,548,415,700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				696,165,100		707,314,800		719,285,900		732,078,200		745,693,900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Kepemilikan KIA (Dengan Satuan:%) (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				154,268,800		156,739,500		159,392,100		162,227,000		165,244,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (Dengan Satuan:Persentase)	65	66		67		68		69		70		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan (Dengan Satuan:Persentase)	82	83		84		85		86		87		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan (Dengan Satuan:Persentase)	82	83		84		85		86		87		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (Dengan Satuan:Persentase)	97	97.5		98		98.5		99		99.5		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				98,093,500		99,664,500		101,351,400		103,153,700		105,072,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan (Dengan Satuan:Persentase)	3	4		5		6		7		8		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**2,308,798,500**		**2,345,774,900**		**2,385,475,700**		**2,427,902,300**		**2,473,057,100**	
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**2,308,798,500**		**2,345,774,900**		**2,385,475,700**		**2,427,902,300**		**2,473,057,100**	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA				104,445,400		106,118,200		107,914,200		109,833,400		111,876,200	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				828,470,900		841,739,700		855,985,500		871,209,400		887,412,600	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa	Presentase Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1,375,882,200		1,397,917,000		1,421,576,000		1,446,859,500		1,473,768,300	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	persentase (%) fasiitasi pemdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	persentase (%) fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**204,187,500**		**207,457,100**		**210,968,800**		**214,720,000**		**218,713,700**	
	DINAS KESEHATAN				**204,187,500**		**207,457,100**		**210,968,800**		**214,720,000**		**218,713,700**	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				16,973,300		17,245,200		17,537,100		17,848,900		18,180,900	Dinas Kesehatan
	Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) (Dengan Satuan:Rata-rata anak per wanita usia 15–49 tahun)												Dinas Kesehatan
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				139,801,400		142,040,500		144,444,600		147,013,400		149,747,700	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP) (Dengan Satuan:Persen (%))	60	61		62		63		64		65		Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertiity Rate (ASFR) 15-19 tahun (Dengan Satuan:Per 1.000 perempuan usia 15–19)	1.2	1.3		1.4		1.5		1.6		1.7		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (proportion of demand safisfied by modern meyhods) (Dengan Satuan:Persen (%))	80	81		82		83		84		85		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) (Dengan Satuan:Persen (%))	80	81		82		83		84		85		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR) (Dengan Satuan:Persen (%))	65	66		67		68		69		70		Dinas Kesehatan
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				47,412,800		48,171,400		48,987,100		49,857,700		50,785,100	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahahan Keluarga (Dengan Satuan:Persen (%))	70.42	70.45		70.48		70.51		70.54		70.57		Dinas Kesehatan
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**18,553,000,000**		**18,850,142,000**		**19,169,171,000**		**19,510,095,000**		**19,872,954,000**	
	DINAS PERHUBUNGAN				**18,553,000,000**		**18,850,142,000**		**19,169,171,000**		**19,510,095,000**		**19,872,954,000**	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10,287,524,700		10,452,287,800		10,629,187,500		10,818,227,900		11,019,431,200	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Admiinistrasi Perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	95	96		97		98		99		100		Dinas Perhubungan
	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase Kepuasan ASN terhadap ketersediaan sarana prasarana aparatur (Dengan Satuan:Persen)	90	91		92		93		94		95		Dinas Perhubungan
	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Point)	77	78		79		80		81		82		Dinas Perhubungan
	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi (Dengan Satuan:Persen)	65	66		67		68		69		70		Dinas Perhubungan
	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				1,996,108,200		2,028,077,500		2,062,401,600		2,099,081,600		2,138,121,400	Dinas Perhubungan
	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase rambu - rambu yang berfungsi baik (Dengan Satuan:Persen)	94	95		96		97		98		99		Dinas Perhubungan
	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase layanan angkutan darat (Dengan Satuan:Persen)	90	91		92		93		94		95		Dinas Perhubungan
	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah angka pelanggaran (Dengan Satuan:Pelanggaran)	8	9		10		11		12		13		Dinas Perhubungan
	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang terlayani transportasi umum (Dengan Satuan:Kecamatan)	5	6		7		8		9		10		Dinas Perhubungan
	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Dengan Satuan:Orang)	4900	5000		5100		5200		5300		5400		Dinas Perhubungan
	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan yang lulus uji KIR (Dengan Satuan:Unit)	190	200		210		220		230		240		Dinas Perhubungan
	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah penumpang yang datang dan berangkat (Dengan Satuan:Persen)	12	13		14		15		16		17		Dinas Perhubungan
	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah angka kecelakaan (Dengan Satuan:Kejadian)	10	11		12		13		14		15		Dinas Perhubungan
	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja lalu lintas kabupaten/kota (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perhubungan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				6,269,367,100		6,369,776,700		6,477,581,900		6,592,785,500		6,715,401,400	Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas perhubungan yang berfungsi baik (Dengan Satuan:Persen)	95	96		97		98		99		100		Dinas Perhubungan
	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase layanan angkutan laut/sungai (Dengan Satuan:Persen)	72	73		74		75		76		77		Dinas Perhubungan
	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun (Dengan Satuan:Orang)	4900	5000		5100		5200		5300		5400		Dinas Perhubungan
	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal (Dengan Satuan:Unit)	13	14		15		16		17		18		Dinas Perhubungan
	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase dermaga sungai yang aktif digunakan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perhubungan
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**9,034,921,100**		**9,179,622,100**		**9,334,982,700**		**9,501,006,000**		**9,677,710,800**	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**9,034,921,100**		**9,179,622,100**		**9,334,982,700**		**9,501,006,000**		**9,677,710,800**	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,391,156,500		6,493,515,700		6,603,415,400		6,720,857,500		6,845,855,700	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	12	13		14		15		16		17		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1,609,429,600		1,635,205,900		1,662,880,800		1,692,455,400		1,723,932,600	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PPID	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PPID (Dengan Satuan:Indeks)	80	81		82		83		84		85		Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi Publik	Persentase Pengunjung Viewer Website dan Media Sosial milik Pemerintah (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95		Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi Publik	Persentase Informasi Publik Terverifkasi yang Tersampaikan kepada Masyarakat Sesuai Standar (Dengan Satuan:Persentase)	15000	1600		1700		1800		1900		2000		Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya jangkauan dan kuaitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1,034,335,000		1,050,900,500		1,068,686,500		1,087,693,100		1,107,922,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Pemenuhan Indikator Domain Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Pemenuhan Indikator Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (Dengan Satuan:Persentase)	95	96		97		98		99		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**697,903,100**		**709,080,600**		**721,081,400**		**733,906,000**		**747,555,600**	
	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM				**697,903,100**		**709,080,600**		**721,081,400**		**733,906,000**		**747,555,600**	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				80,366,500		81,653,600		83,035,600		84,512,400		86,084,200	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT (Dengan Satuan:Persentase)	52.94	52.96		52.98		53		53.02		53.04		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				77,681,300		78,925,500		80,261,200		81,688,700		83,208,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase SDM Koprasi yang Berdertifikat (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				184,808,800		187,768,600		190,946,600		194,342,600		197,957,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi (Dengan Satuan:Persentase)	85.29	85.3		85.31		85.32		85.33		85.34		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (Dengan Satuan:Persentase)												Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				232,801,900		236,530,500		240,533,500		244,811,500		249,364,700	Dinas Perindustrian

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														Perdagangan Koperasi dan UKM
	Meningkatnya Pertumbuhan ,Perkembangan dan kapasitas UMK	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha Baru/Pemula dan Peningkatan Kopetensi UMK dalam Menjalankan Usahanya (Dengan Satuan:Persentase)	1.09	1.1		1.11		1.12		1.13		1.14		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Meningkatnya Pertumbuhan ,Perkembangan dan kapasitas UMK	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Pengembangan Usahanya (Dengan Satuan:Persentase)	2	3		4		5		6		7		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Meningkatnya Pertumbuhan ,Perkembangan dan kapasitas UMK	Persentase Usaha Mikro yang bertraspormasi dari usaha Informal ke Usaha Formal (Dengan Satuan:Persentase)	4.08	4.1		4.12		4.14		4.16		4.18		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				122,244,600		124,202,400		126,304,500		128,550,800		130,941,700	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	meningkatnya daya saing UMKM	Persentase Pelaku UMKM yang di Fasilitasi Pemasaran/ di Promosikan Produknya baik di dalam maupun di Luar Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	0.88	0.9		0.92		0.94		0.96		0.98		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**6,600,000,000**		**6,705,704,000**		**6,819,195,000**		**6,940,474,000**		**7,069,557,000**	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				**6,600,000,000**		**6,705,704,000**		**6,819,195,000**		**6,940,474,000**		**7,069,557,000**	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,882,896,300		5,977,115,200		6,078,275,300		6,186,377,000		6,301,435,200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tercermin dari peningkatan nilai AKIP	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dengan Satuan:Nilai)	84.86	84.87		84.88		84.89		84.9		84.91		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				124,713,500		126,710,900		128,855,400		131,147,100		133,586,200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya iklim berinvestasi daerah	Persentase Pembuatan Dokumen Kebijakan Penanaman Modal (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				145,499,000		147,829,300		150,331,200		153,004,900		155,850,600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatkan Investor yang berinvestasi	Jumlah Investor yang akan berinvestasi (Dengan Satuan:Investor)	2	3		4		5		6		7		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				218,248,500		221,744,000		225,496,800		229,507,300		233,775,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya Kegiatan usaha yang memenuhi aspek legal	Persentase Kegiatan Usaha yang memenuhi Aspek Legal (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				124,713,400		126,710,800		128,855,300		131,147,000		133,586,100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				103,929,300		105,593,800		107,381,000		109,290,700		111,323,100	Dinas Penanaman Modal

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Hasil Survei kepuasan masyarakat yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pengaduan yang terselesaikan/tertangani sesuai SOP (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**804,705,400**		**817,594,100**		**831,431,300**		**846,218,800**		**861,957,000**	
	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA				**804,705,400**		**817,594,100**		**831,431,300**		**846,218,800**		**861,957,000**	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				225,924,100		229,542,500		233,427,400		237,579,100		241,997,600	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Muda (Dengan Satuan:Orang)	1	2		3		4		5		6		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				513,464,000		521,688,200		530,517,300		539,952,800		549,995,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Level Nasional dan Internasional (Dengan Satuan:%)	10	11		12		13		14		15		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				65,317,300		66,363,400		67,486,600		68,686,900		69,964,400	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan (Dengan Satuan:%)	1	2		3		4		5		6		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**437,414,000**		**444,419,300**		**451,940,900**		**459,978,800**		**468,533,700**	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**437,414,000**		**444,419,300**		**451,940,900**		**459,978,800**		**468,533,700**	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				437,414,000		444,419,300		451,940,900		459,978,800		468,533,700	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Statistik	Persentase perangkat daerah yang menggunanakan data statistik dalam pembangunan daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**446,027,700**		**453,171,600**		**460,841,400**		**469,037,200**		**477,760,500**	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				446,027,700		453,171,600		460,841,400		469,037,200		477,760,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah (Dengan Satuan:Persen)	90	91		92		93		94		95		Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Kualitas keamanan Informasi Perangkat Daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Dengan Satuan:Angka)	536	538		540		542		544		546		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**18,740,059,200**		**19,040,198,400**		**19,362,442,800**		**19,706,804,100**		**20,073,322,500**	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				**18,740,059,200**		**19,040,198,400**		**19,362,442,800**		**19,706,804,100**		**20,073,322,500**	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				13,003,999,300		13,212,269,600		13,435,880,600		13,674,837,700		13,929,169,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Dengan Satuan:%)	80	81		82		83		84		85		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				1,748,131,200		1,776,129,000		1,806,189,200		1,838,312,300		1,872,502,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Dengan Satuan:%)	80	81		82		83		84		85		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				2,349,051,400		2,386,673,500		2,427,066,800		2,470,232,100		2,516,174,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Dengan Satuan:%)	60	61		62		63		64		65		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				546,291,000		555,040,300		564,434,000		574,472,400		585,156,700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak	60	61		62		63		64		65		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Benda yang Ditetapkan (Dengan Satuan:%)												
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Dengan Satuan:%)	70	71		72		73		74		75		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				1,092,586,300		1,110,086,000		1,128,872,200		1,148,949,600		1,170,319,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan Permuseuman	Persentase Permuseuman yang Dikembangkan dan dikelola dengan baik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**6,151,228,900**		**6,249,745,500**		**6,355,520,000**		**6,468,552,300**		**6,588,858,300**	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				**6,151,228,900**		**6,249,745,500**		**6,355,520,000**		**6,468,552,300**		**6,588,858,300**	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,326,075,100		5,411,376,100		5,502,961,300		5,600,831,200		5,704,998,700	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	10	11		12		13		14		15		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				782,008,600		794,533,200		807,980,500		822,350,100		837,644,800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya pembinaan perpustakaan daerah	Perpustakaan Kabupaten Yang Memenuhi SNP (Dengan Satuan:Persentase)	80	81		82		83		84		85		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya pembinaan perpustakaan daerah	Persentase Tingkat Kegemaran Membaca (Dengan Satuan:Persentase)	65	66		67		68		69		70		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya pembinaan perpustakaan daerah	JUMLAH PERPUSTAKAAN MENDAPAT PEMBINAAN (Dengan Satuan:Unit)	5	6		7		8		9		10		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya pembinaan perpustakaan daerah	Persentase perpustakaan daerah yang ber SNP (Dengan Satuan:Persentase)	5	6		7		8		9		10		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				43,145,200		43,836,200		44,578,200		45,371,000		46,214,800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya upaya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno sebagai memori kolektif daerah	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**339,771,100**		**345,212,500**		**351,055,000**		**357,298,700**		**363,943,700**	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				285,837,700		290,415,600		295,330,700		300,583,200		306,173,500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	Tingkat ketersediaan arsip (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				53,933,400		54,796,900		55,724,300		56,715,500		57,770,200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya perizinan arsip pada tata kelola pemerintahan	Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**34,265,308,200**		**34,814,095,800**		**35,403,305,300**		**36,032,952,600**		**36,703,112,900**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**1,012,649,200**		**1,028,867,500**		**1,046,280,700**		**1,064,888,700**		**1,084,694,100**	
	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN				**1,012,649,200**		**1,028,867,500**		**1,046,280,700**		**1,064,888,700**		**1,084,694,100**	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				151,897,400		154,330,100		156,942,100		159,733,300		162,704,100	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (Dengan Satuan:Persentase)	920	925		930		935		940		945		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				556,957,100		565,877,200		575,454,400		585,688,800		596,581,800	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (Dengan Satuan:Persentase)	7660	7670		7680		7690		7700		7710		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				126,581,100		128,608,400		130,785,100		133,111,100		135,586,700	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	Meningkatnya kelestarian laut dan kennekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi (Dengan Satuan:Hektare (Ha))	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.25.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				177,213,600		180,051,800		183,099,100		186,355,500		189,821,500	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Dengan Satuan:Kg/Kapita/Tahun)	64	65		66		67		68		69		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**7,775,294,600**		**7,899,821,900**		**8,033,521,700**		**8,176,398,200**		**8,328,467,000**	
	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA				**7,775,294,600**		**7,899,821,900**		**8,033,521,700**		**8,176,398,200**		**8,328,467,000**	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,871,594,600		6,981,648,800		7,099,809,100		7,226,080,000		7,360,474,100	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur Terhadap Pelayanan Kantor (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				379,963,600		386,049,300		392,582,700		399,565,100		406,996,200	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara/Mancanegara (Dengan Satuan:Persentase)	10	11		12		13		14		15		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				143,769,900		146,072,600		148,544,700		151,186,700		153,998,500	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Dengan Satuan:Persentase)	10	11		12		13		14		15		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				148,903,600		151,288,600		153,849,000		156,585,200		159,497,500	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pengusaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi (Dengan Satuan:Persentase)	2	3		4		5		6		7		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				231,062,900		234,762,600		238,736,200		242,981,200		247,500,700	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**14,431,267,500**		**14,662,397,000**		**14,910,550,300**		**15,175,733,700**		**15,457,980,400**	
	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN				**14,431,267,500**		**14,662,397,000**		**14,910,550,300**		**15,175,733,700**		**15,457,980,400**	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12,456,599,700		12,656,102,800		12,870,301,300		13,099,199,200		13,342,824,900	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				860,751,800		874,537,400		889,338,500		905,155,600		921,990,000	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Dengan Satuan:Persentase)	1000	1010		1020		1030		1040		1050		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				506,324,700		514,433,900		523,140,400		532,444,500		542,347,100	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				151,897,300		154,330,100		156,942,000		159,733,300		162,704,100	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	Meningkatnya kualitas kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	Penurunan jumlah bencana penyakit hewan/ternak (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				50,632,400		51,443,300		52,314,000		53,244,400		54,234,700	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				60,758,900		61,732,000		62,776,800		63,893,300		65,081,600	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				344,302,700		349,817,500		355,737,300		362,063,400		368,798,000	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**1,798,873,100**		**1,827,683,700**		**1,858,616,000**		**1,891,671,600**		**1,926,854,000**	
	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM				**1,798,873,100**		**1,827,683,700**		**1,858,616,000**		**1,891,671,600**		**1,926,854,000**	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				56,657,900		57,565,300		58,539,500		59,580,700		60,688,800	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Meningkatnya kepatuhan / ketaatan pelaku usaha industri terhadap peraturan perizinan berusaha	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Memiliki Dokumen Perizinan Berusaha (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Meningkatnya kepatuhan / ketaatan pelaku usaha industri terhadap peraturan perizinan berusaha	Persentase Pelaku Usaha yang masuk dalam kategori layak ekspor (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Meningkatnya kepatuhan / ketaatan pelaku usaha industri terhadap peraturan perizinan berusaha	Persentase Produk Pangan Bebas Bahan Bebahaya (B2) (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				400,523,600		406,938,300		413,825,500		421,185,400		429,018,900	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Meningkatnya sarana, prasarana dan fasilitas perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Dengan Satuan:Persentase)	50	51		52		53		54		55		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				882,296,700		896,427,400		911,598,800		927,811,700		945,067,700	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Terjamin dan terkendalinya Harga Bapokting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu perkomoditas (Dengan Satuan:Persentase)	2	3		4		5		6		7		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Terjamin dan terkendalinya Harga Bapokting	Persentase Realisasi Pupuk Bersubsidi (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				34,093,800		34,639,900		35,226,100		35,852,600		36,519,400	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Meningkatnya kerjasama pemasaran Produk UMKM	Persentase Keikutsertaan dalam Promosi Dagang (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				389,391,300		395,627,800		402,323,600		409,478,900		417,094,600	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Alat UTTP yang beroperasi sesuai Standar (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Pelaku Usaha yang memahami aturan	80	81		82		83		84		85		Dinas Perindustrian

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Terkait Perlindungan Konsumen (Dengan Satuan:Persentase)												Perdagangan Koperasi dan UKM
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				35,909,800		36,485,000		37,102,500		37,762,300		38,464,600	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**9,247,223,800**		**9,395,325,700**		**9,554,336,600**		**9,724,260,400**		**9,905,117,400**	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,833,273,800		7,958,730,200		8,093,427,400		8,237,369,100		8,390,572,200	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	80	81		82		83		84		85		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				1,157,432,500		1,175,969,700		1,195,872,400		1,217,141,000		1,239,778,000	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap Usaha Industri	Persentase Potensi Industri yang Berkembang (Dengan Satuan:Persentase)	50	51		52		53		54		55		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap Usaha Industri	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Sektor Usaha Industri/ Persentase Peningkatan Kopetensi IKM dalam Menjalankan Usahanya (Dengan Satuan:Persentase)	80	81		82		83		84		85		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap Usaha Industri	Persentase Pelaku Usaha Industri yang Berkembang Usahanya (Meningkat Aset dan Omzetnya (Dengan Satuan:Persentase)	80	81		82		83		84		85		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				145,158,800		147,483,700		149,979,800		152,647,100		155,486,100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Meningkatnya kualitas sarana distribusi perdagangan dan informasi perizinan berusahan	Persentase IKM yang memiliki izin sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persentase)	12.63	12.65		12.67		12.69		12.71		12.73		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				111,358,700		113,142,100		115,057,000		117,103,200		119,281,100	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Dengan Satuan:Persentase)	18.94	18.95		18.96		18.97		18.98		18.99		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**93,637,000,000**		**95,136,676,000**		**96,746,816,000**		**98,467,458,000**		**100,298,808,000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**61,119,000,000**		**62,097,873,000**		**63,148,848,000**		**64,271,950,000**		**65,467,314,000**	
	SEKRETARIAT DAERAH				**61,119,000,000**		**62,097,873,000**		**63,148,848,000**		**64,271,950,000**		**65,467,314,000**	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				46,263,204,500		47,004,149,300		47,799,671,100		48,649,787,500		49,554,602,300	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya cakupan layanan dan dukungan fungsi penunjang dalam mendukung efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase meningkatnya cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya cakupan layanan dan dukungan fungsi penunjang dalam mendukung efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase meningkatnya cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program penunjang dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program penunjang dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program penunjang dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya dukungan sarana, prasarana, dan sumber daya dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan	Persentase terpenuhinya kebutuhan dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya dukungan sarana, prasarana, dan sumber daya dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan	Persentase terpenuhinya kebutuhan dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				12,237,818,500		12,433,817,700		12,644,253,800		12,869,131,600		13,108,478,800	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas kerja sama daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	80	81		82		83		84		85		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat (Dengan Satuan:Persen)	3.29	3.3		3.31		3.32		3.33		3.34		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase produk hukum yang dihasilkan (Dengan Satuan:Persen)	3.29	3.3		3.31		3.32		3.33		3.34		Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				2,617,977,000		2,659,906,000		2,704,923,100		2,753,030,900		2,804,232,900	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan (Dengan Satuan:%)	91	91.25		91.5		91.75		92		92.25		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan (Dengan Satuan:Persentase)	91	91.25		91.5		91.75		92		92.25		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat kematangan UKPBJ (Dengan Satuan:Level)	2.5	2.6		2.7		2.8		2.9		3		Sekretariat Daerah
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**32,518,000,000**		**33,038,803,000**		**33,597,968,000**		**34,195,508,000**		**34,831,494,000**	
	SEKRETARIAT DPRD				**32,518,000,000**		**33,038,803,000**		**33,597,968,000**		**34,195,508,000**		**34,831,494,000**	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17,877,220,000		18,163,537,900		18,470,946,700		18,799,452,600		19,149,094,700	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya sinergi dan keterpaduan antara program DPRD dengan dokumen perencanaan daerah	Persentase terintegrasinya program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)	95	96		97		98		99		100		Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				14,640,780,000		14,875,265,100		15,127,021,300		15,396,055,400		15,682,399,300	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Dengan Satuan:Persentase)	80	81		82		83		84		85		Sekretariat DPRD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**259,617,356,400**		**263,775,367,785**		**268,239,630,549**		**273,010,269,882**		**278,087,856,354**	
5.01	**PERENCANAAN**				**18,227,612,800**		**18,519,558,600**		**18,832,990,700**		**19,167,935,100**		**19,524,429,200**	
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				**5,356,400**		**5,441,700**		**5,533,600**		**5,631,700**		**5,737,000**	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				5,356,400		5,441,700		5,533,600		5,631,700		5,737,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya keselarasan pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan kebutuhan tenaga kerja guna mendukung efektivitas program pembangunan ketenagakerjaan.	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN				**18,222,256,400**		**18,514,116,900**		**18,827,457,100**		**19,162,303,400**		**19,518,692,200**	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12,811,533,600		13,016,732,100		13,237,032,700		13,472,452,700		13,723,019,100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya sinergi antara fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD dengan perencanaan pembangunan daerah melalui integrasi program ke dalam dokumen perencanaan	Persentase terintegrasinya program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)	95	96		97		98		99		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Bappeda dan Litbang yang tercermin dari capaian nilai AKIP	Nilai Akip Bappeda dan Litbang (Dengan Satuan:Poin)	80	81		82		83		84		85		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Bappeda dan Litbang melalui pemenuhan komponen SPIP secara optimal	Persentase Komponen SPIP pada Bappeda dan Litbang yang terpenuhi (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				3,698,894,200		3,758,138,600		3,821,742,700		3,889,712,200		3,962,054,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasaran RKPD Terhadap RPJMD (Dengan Satuan:Persentase)	70	71		72		73		74		75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
		Persentase Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat, mutakhir dan terintegrasi (Dengan Satuan:Persentase)	80	81		82		83		84		85		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
		Persentase Capaian RKPD (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1,711,828,600		1,739,246,200		1,768,681,700		1,800,138,500		1,833,618,300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	1 Persentase Indikator Renstra PD yang selaras dengan Indikator RPJMD (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	2. Persentase Indikator Renja PD yang selaras dengan Indikator RKPD (Dengan Satuan:Persentase)	70	71		72		73		74		75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	1 Persentase Perencanaan Pembangunan PD Yang terintegrasi dengan Tata Ruang Wilayah (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	2. Persentase Perencanaan Pembangunan PD Yang Terintegrasi dengan Kajian Lingkungan (Dengan Satuan:Persentase)	80	81		82		83		84		85		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	1.Persentase Capaian Indikator kinerja Utama Perangkat Daerah kategori sangat baik. (Dengan Satuan:Persentase)	70	71		72		73		74		75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	1 Persentase Indikator Renstra PD yang selaras dengan Indikator RPJMD (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	2. Persentase Indikator Renja PD yang selaras dengan	80	81		82		83		84		85		Badan Perencanaan Pembangunan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Indikator RKPD (Dengan Satuan:Persentase)												Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	1 Persentase Perencanaan Pembangunan PD Yang terintegrasi dengan Tata Ruang Wilayah (Dengan Satuan:Persentase)	70	71		72		73		74		75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	2. Persentase Perencanaan Pembangunan PD Yang Terintegrasi dengan Kajian Lingkungan (Dengan Satuan:Persentase)	80	81		82		83		84		85		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	1.Persentase Capaian Indikator kinerja Utama Perangkat Daerah kategori sangat baik. (Dengan Satuan:Persentase)	70	71		72		73		74		75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	1 Persentase Indikator Renstra PD yang selaras dengan Indikator RPJMD (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	2. Persentase Indikator Renja PD yang selaras dengan Indikator RKPD (Dengan Satuan:Persentase)	70	71		72		73		74		75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	1 Persentase Perencanaan Pembangunan PD Yang terintegrasi dengan Tata Ruang Wilayah (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	2. Persentase Perencanaan Pembangunan PD Yang Terintegrasi dengan Kajian Lingkungan (Dengan Satuan:Persentase)	70	71		72		73		74		75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	1.Persentase Capaian Indikator kinerja Utama Perangkat Daerah kategori sangat baik. (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
5.02	**KEUANGAN**				**231,764,000,000**		**235,475,901,000**		**239,461,211,000**		**243,720,028,000**		**248,252,861,000**	
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				**231,764,000,000**		**235,475,901,000**		**239,461,211,000**		**243,720,028,000**		**248,252,861,000**	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				80,581,895,891		81,872,483,400		83,258,134,100		84,738,879,500		86,314,897,800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Memastikan Pelaporan Kinerja Berkualitas	Skor Pelaporan Kinerja (Dengan Satuan:Nilai)	10.54	10.55		10.56		10.57		10.58		10.59		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Memastikan Terlaksananya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Skor Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Dengan Satuan:Nilai)	17.54	17.55		17.56		17.57		17.58		17.59		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Memastikan Pengukuran Kinerja Tersedia	Skor Pengukuran Kinerja (Dengan Satuan:Nilai)	18.94	18.96		18.98		19		19.02		19.04		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Memastikan Perencanaan Kinerja Berkualitas	Skor Perencanaan Kinerja (Dengan Satuan:Nilai)	23.14	23.16		23.18		23.2		23.22		23.24		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				147,546,293,674		149,909,374,400		152,446,514,500		155,157,775,400		158,043,481,100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya ketepatan Kapasitas Real Kemampuan Keuangan/Proyeksi Penerimaan Tahun Rencana	Tingkat Ketepatan Kapasistas Rill Keuangan Daerah Yang Dianalisis (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tertibnya pelaporan keuangan daerah KTT	Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Tersedianya dana kas daerah sesuai kebutuhan	Persentase Dana Di Kas Daerah Yang Tersedia Sesuai Kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)	30.5	31		31.5		32		32.5		33		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1,834,331,967		1,863,709,800		1,895,252,200		1,928,959,200		1,964,834,900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD	Persentase OPD yang Asetnya yang diinformasikan dalam neraca laporan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD	Nilai MCP KPK terkait BMD (Dengan Satuan:Persentase)	88	89		90		91		92		93		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD	Persentase Tindak Lanjut temuan BPK terkait BMD (Dengan Satuan:Persentase)	91	92		93		94		95		96		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1,801,478,468		1,830,333,400		1,861,310,200		1,894,413,900		1,929,647,200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Laju Pertumbuhan pajak daerah (Dengan Satuan:Persentase)	1.81	1.82		1.83		1.84		1.85		1.86		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase Pencapaian target pajak daerah (Dengan Satuan:Persentase)	2	3		4		5		6		7		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Jumlah Pajak daerah (Dengan Satuan:Rp)	4602300550	4603300550		4.60E+09		4.60E+09		4.60E+09		4.60E+09		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya pendapatan daerah asal retribusi daerah	Persentase Pencapaian target retribusi daerah (Dengan Satuan:Persentase)	2.8	3		3.2		3.4		3.6		3.8		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya pendapatan daerah asal retribusi daerah	Laju Pertumbuhan retribusi daerah (Dengan Satuan:Persentase)	2.81	2.82		2.83		2.84		2.85		2.86		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya pendapatan daerah asal retribusi daerah	Jumlah retribusi daerah (Dengan Satuan:Rp)	750900000	751000000		7.50E+08		7.50E+08		7.50E+08		7.50E+08		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.03	**KEPEGAWAIAN**				**7,878,242,700**		**8,004,418,800**		**8,139,890,400**		**8,284,657,600**		**8,438,740,200**	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**7,878,242,700**		**8,004,418,800**		**8,139,890,400**		**8,284,657,600**		**8,438,740,200**	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,002,202,400		6,098,332,300		6,201,544,000		6,311,838,100		6,429,228,900	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya kelancaran operasional dan pelayanan instansi melalui pemenuhan sarana penunjang administrasi perkantoran secara optimal	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi kantor (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1,876,040,300		1,906,086,500		1,938,346,400		1,972,819,500		2,009,511,300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentese ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**1,109,757,300**		**1,127,531,200**		**1,146,613,600**		**1,167,006,400**		**1,188,710,800**	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1,109,757,300		1,127,531,200		1,146,613,600		1,167,006,400		1,188,710,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas ASN yang profesional dan berAkhlak	Indeks Berakhlak (Dengan Satuan:Poin)	100	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN yang memiliki kompetensi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**637,743,600**		**647,958,185**		**658,924,849**		**670,642,782**		**683,115,154**	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN				**637,743,600**		**647,958,185**		**658,924,849**		**670,642,782**		**683,115,154**	
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				637,743,600		647,958,185		658,924,849		670,642,782		683,115,154	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	1. Jumlah Inovasi yang diciptakan/dikembangkan/dan ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Jumlah)	80	81		82		83		84		85		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	2.Persentase Inovasi Yang didesiminasi (Dengan Satuan:Persentase)	70	71		72		73		74		75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	3. Persentase Inovasi yang terfasilitasi HAKI (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	1.Persentase Kajian Kelitbangan Yang diintegrasikan ke dalam Renstra PD (Dengan Satuan:Persentase)	70	71		72		73		74		75		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	2.Persentase Kajian Kelitbangan Yang diintegrasikan ke dalam Renja PD (Dengan Satuan:Persentase)	80	81		82		83		84		85		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**16,267,000,000**		**16,527,530,000**		**16,807,250,000**		**17,106,167,000**		**17,424,316,000**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**16,267,000,000**		**16,527,530,000**		**16,807,250,000**		**17,106,167,000**		**17,424,316,000**	
	INSPEKTORAT KABUPATEN				**16,267,000,000**		**16,527,530,000**		**16,807,250,000**		**17,106,167,000**		**17,424,316,000**	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8,772,343,000		8,912,838,300		9,063,683,800		9,224,881,400		9,396,450,500	Inspektorat Kabupaten
	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	90	91		92		93		94		95		Inspektorat Kabupaten
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				3,481,260,000		3,537,015,000		3,596,877,200		3,660,847,700		3,728,933,900	Inspektorat Kabupaten
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran atsupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95		Inspektorat Kabupaten
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				4,013,397,000		4,077,676,700		4,146,689,000		4,220,437,900		4,298,931,600	Inspektorat Kabupaten
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Meturitas Penyelenggaraen Sistem Pengendalian Intern Pernerintah (SPIP) (Dengan Satuan:Level)	3	4		5		6		7		8		Inspektorat Kabupaten
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Petnerintah (APIP) (Dengan Satuan:Persentase)	90	91		92		93		94		95		Inspektorat Kabupaten
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**25,187,000,000**		**25,590,388,000**		**26,023,492,000**		**26,486,321,000**		**26,978,928,000**	
7.01	**KECAMATAN**				**25,187,000,000**		**25,590,388,000**		**26,023,492,000**		**26,486,321,000**		**26,978,928,000**	
	KECAMATAN SESAYAP				**5,418,000,000**		**5,504,773,000**		**5,597,939,000**		**5,697,498,000**		**5,803,463,000**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,756,666,300		4,832,937,200		4,914,732,400		5,002,140,900		5,095,173,200	Kecamatan Sesayap
	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sesayap

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)												
	Meningkatnya kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Sesayap sebagai cerminan kualitas layanan internal yang efektif dan responsif	Persentase Aparatur yang Puas Terhadap Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan Sesayap (Dengan Satuan:Persen)	86	87		88		89		90		91		Kecamatan Sesayap
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				446,050,100		453,202,400		460,872,600		469,069,200		477,793,200	Kecamatan Sesayap
	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sesayap
	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	75	76		77		78		79		80		Kecamatan Sesayap
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				41,807,000		42,477,300		43,196,200		43,964,500		44,782,100	Kecamatan Sesayap
	Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	75	76		77		78		79		80		Kecamatan Sesayap
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				11,604,800		11,688,900		11,886,800		12,098,200		12,323,200	Kecamatan Sesayap
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum yang tertib	Persentase masyarakat yang mengikuti pembinaan dalam penyelenggaran pemerintahan umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sesayap
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				161,871,800		164,467,200		167,251,000		170,225,200		173,391,300	Kecamatan Sesayap
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel	Persentase desa yang menyusun laporan administrasi pemerintah desa tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	60	61		62		63		64		65		Kecamatan Sesayap
	KECAMATAN SESAYAP HILIR				**5,165,000,000**		**5,247,721,000**		**5,336,536,000**		**5,431,447,000**		**5,532,464,000**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,040,646,600		5,121,376,000		5,208,052,800		5,300,678,600		5,399,263,600	Kecamatan Sesayap Hilir
	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sesayap Hilir
	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sesayap Hilir
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5,794,800		5,887,600		5,987,200		6,093,700		6,207,000	Kecamatan Sesayap Hilir
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel di tingkat kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kecamatan yang terselesaikan dengan tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sesayap Hilir
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sesayap Hilir yang tercermin dari hasil survei kepuasan masyarakat	Nilai Survei Kepuasan masyarakat Kecamatan Sesayap Hilir (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sesayap Hilir
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				65,744,900		66,797,800		67,928,300		69,136,500		70,422,300	Kecamatan Sesayap Hilir
	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sesayap Hilir
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				9,271,700		9,420,100		9,579,600		9,750,000		9,931,300	Kecamatan Sesayap Hilir
	Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sesayap Hilir
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				13,407,800		13,622,500		13,853,100		14,099,400		14,361,700	Kecamatan Sesayap Hilir

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum yang tertib	Persentase masyarakat yang mengikuti pembinaan dalam penyelenggaran pemerintahan umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sesayap Hilir
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				30,134,200		30,617,000		31,135,000		31,688,800		32,278,100	Kecamatan Sesayap Hilir
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel	Persentase desa yang menyusun laporan administrasi pemerintah desa tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sesayap Hilir
	KECAMATAN TANA LIA				**5,273,000,000**		**5,357,451,000**		**5,448,123,000**		**5,545,018,000**		**5,648,147,000**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,786,735,100		4,863,398,100		4,945,708,500		5,033,668,200		5,127,286,800	Kecamatan Tana Lia
	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tana Lia
	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah melalui tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai standar.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tana Lia
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				11,910,600		12,101,400		12,306,200		12,525,100		12,758,000	Kecamatan Tana Lia
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel di tingkat kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kecamatan yang terselesaikan dengan tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tana Lia
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				353,290,800		358,949,000		365,024,100		371,516,000		378,425,700	Kecamatan Tana Lia
	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tana Lia
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				55,935,300		56,831,200		57,793,000		58,820,900		59,914,800	Kecamatan Tana Lia
	Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tana Lia
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				11,466,100		11,649,800		11,846,900		12,057,600		12,281,900	Kecamatan Tana Lia
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum yang tertib	Persentase masyarakat yang mengikuti pembinaan dalam penyelenggaran pemerintahan umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tana Lia
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				53,662,100		54,521,500		55,444,300		56,430,200		57,479,800	Kecamatan Tana Lia
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel	Persentase desa yang tepat waktu dalam menyerahkan laporan administrasi pemerintah desa (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tana Lia
	KECAMATAN BETAYAU				**4,677,000,000**		**4,751,906,000**		**4,832,329,000**		**4,918,272,000**		**5,009,745,000**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,399,088,100		4,469,646,700		4,545,292,100		4,626,130,500		4,712,170,200	Kecamatan Betayau
	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	90	91		92		93		94		95		Kecamatan Betayau
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				43,420,400		44,116,800		44,863,400		45,661,400		46,510,600	Kecamatan Betayau
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel di tingkat kecamatan	Persentase pelayanan publik yang terselesaikan dengan tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	88	89		90		91		92		93		Kecamatan Betayau
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				162,826,600		165,438,300		168,238,200		171,230,300		174,415,000	Kecamatan Betayau
	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dan kelurahan (Dengan Satuan:Persen)	57	58		59		60		61		62		Kecamatan Betayau
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				37,395,700		37,995,500		38,638,500		39,325,700		40,057,100	Kecamatan Betayau
	Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi ketentraman dan ketertiban	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Betayau

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		umum yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)												
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				12,558,000		12,649,100		12,863,200		13,092,000		13,335,500	Kecamatan Betayau
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum yang tertib	Persentase masyarakat yang mengikuti pembinaan dalam penyelenggaran pemerintahan umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Betayau
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				21,711,200		22,059,600		22,433,600		22,832,100		23,256,600	Kecamatan Betayau
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel	Persentase pelayanan publik di tingkat desa (Dengan Satuan:Persen)	75	76		77		78		79		80		Kecamatan Betayau
	KECAMATAN MURUK RIAN				**4,654,000,000**		**4,728,537,000**		**4,808,565,000**		**4,894,086,000**		**4,985,109,000**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,259,941,700		4,328,264,700		4,401,518,400		4,479,799,800		4,563,118,000	Kecamatan Muruk Rian
	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	86	87		88		89		90		91		Kecamatan Muruk Rian
	Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Rata-rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muruk Rian
	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Muruk Rian melalui pemenuhan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah secara optimal	Terpenuhinya Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Muruk Rian (Dengan Satuan:Persen)	86	87		88		89		90		91		Kecamatan Muruk Rian
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				62,323,300		63,322,900		64,394,600		65,539,800		66,758,800	Kecamatan Muruk Rian
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel di tingkat kecamatan	Persentase pemberdayaan masyarakat dan kelurahan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muruk Rian
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel di tingkat kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kecamatan yang terselesaikan dengan tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muruk Rian
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				213,643,800		217,070,400		220,744,000		224,670,100		228,848,700	Kecamatan Muruk Rian
	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dan kelurahan (Dengan Satuan:Persen)	80	81		82		83		84		85		Kecamatan Muruk Rian
	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muruk Rian
		Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Persen)	80	81		82		83		84		85		Kecamatan Muruk Rian
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				39,395,000		40,026,800		40,704,200		41,428,200		42,198,600	Kecamatan Muruk Rian
	Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Kegiatan)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muruk Rian
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				12,056,900		12,144,400		12,349,900		12,569,600		12,803,400	Kecamatan Muruk Rian
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum yang tertib	Persentase masyarakat yang mengikuti pembinaan dalam penyelenggaran pemerintahan umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muruk Rian
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				66,639,300		67,707,800		68,853,900		70,078,500		71,381,500	Kecamatan Muruk Rian
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel	Persentase desa yang menyusun laporan administrasi pemerintah desa tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muruk Rian
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**9,778,000,000**		**9,934,603,000**		**10,102,741,000**		**10,282,418,000**		**10,473,656,000**	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**9,778,000,000**		**9,934,603,000**		**10,102,741,000**		**10,282,418,000**		**10,473,656,000**	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**9,778,000,000**		**9,934,603,000**		**10,102,741,000**		**10,282,418,000**		**10,473,656,000**	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,732,876,200		5,824,693,200		5,923,273,200		6,028,618,400		6,140,742,100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				452,828,300		460,080,800		467,867,300		476,188,300		485,044,800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				2,064,840,800		2,097,911,000		2,133,417,000		2,171,359,800		2,211,743,900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				581,334,600		590,645,200		600,641,500		611,323,900		622,693,700	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Aktif (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				227,067,000		230,703,600		234,608,200		238,780,600		243,221,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang di Laksanakan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				719,053,100		730,569,200		742,933,800		756,147,000		770,209,900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			TOTAL:	**1,280,000,000,000**		**1,300,500,311,085**		**1,322,510,615,949**		**1,346,031,465,182**		**1,371,065,663,354**		

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung dibagi menjadi beberapa indikator kinerja yakni Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama, Indikator Utama Pembangunan, dan Indikator Kinerja Daerah yang didalamnya terdapat Indikator Kinerja Kunci. Rincian indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam pembangunan jangka menengah periode 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut.

4.2.1 Indikator Kinerja Makro

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara makro/umum. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama periode pembangunan. Adapun target indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.2
Penetapan Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,95	71,04	71,13	71,55	71,96	72,38	72,78
2	Indeks Gini	Poin	0,280	0,277	0,275	0,273	0,271	0,269	0,267
3	Tingkat Kemiskinan	%	4,47	4,20	4,00	3,79	3,58	3,37	3,16
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,67	3,19	3,16	3,13	3,1	3,07	3,04
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,57	4,39	4,43	4,47	4,52	4,56	4,61
6	PDRB per Kapita	Juta Rp.	330,16	334,38	338,60	342,81	347,03	351,25	355,46
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72,55	72,83	73,17	73,52	73,86	74,20	74,55
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	NA	45,93	48,63	51,34	54,04	56,74	59,45
9	Kontribusi PDRB KTT terhadap Kaltara	%	6,33	6,37	6,45	6,53	6,62	6,70	6,78

4.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kabupaten Tana Tidung tahun 2025-2029.

Tabel IV.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,95	71,04	71,13	71,55	71,96	72,38	72,78
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,47	4,20	4,00	3,79	3,58	3,37	3,16
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,67	3,19	3,16	3,13	3,1	3,07	3,04
4	PDRB per Kapita	Juta Rp.	330,16	334,38	338,60	342,81	347,03	351,25	355,46
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,57	4,39	4,43	4,47	4,52	4,56	4,61
6	Indeks Gini	Poin	0,280	0,277	0,275	0,273	0,271	0,269	0,267
7	Indeks Desa	Poin	NA	77,46	78,23	79,01	79,80	80,60	81,41
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	75,85	76,05	76,81	77,58	78,36	79,14	80,00
9	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	Poin	85,30	86,08	86,87	87,65	88,43	89,22	90,00
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72,55	72,83	73,17	73,52	73,86	74,20	74,55

4.2.3 Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) merupakan indikator makro yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Indikator ini menyelaraskan dengan indikator utama pembangunan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah. Umumnya, indikator utama tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Adapun dalam turunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dilakukan penetapan target pembangunan pada indikator utama pembangunan Kabupaten Tana Tidung tahun 2025-2030 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.4
Penetapan Indikator Utama Pembangunan
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2030

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,95	71,04	71,13	71,55	71,96	72,38	72,78
2	Indeks Pendidikan	Poin	65,83	65,97	66,11	66,64	67,18	67,71	68,25
3	Hasil Pembelajaran:								
4	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:								
	a) Literasi Membaca	%	NA	20	23	26	29	32	35
	b) Numerasi	%	NA	10	12,5	15	17,5	20	22,5
5	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:								
	a) Literasi Membaca*	%	NA	40,56	42,12	43,68	45,24	46,8	48,36
	b) Numerasi*	%	NA	26,86	28,57	30,28	31,99	33,7	35,41
6	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	9,24	9,35	9,49	9,63	9,77	9,91	10,05
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,61	12,39	12,41	12,44	12,46	12,49	12,51
8	Indeks Kesehatan	Poin	82,26	82,41	82,48	82,55	82,62	82,68	82,75
9	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	73,51	73,57	73,61	73,66	73,7	73,75	73,79
10	Kesehatan ibu dan anak:								
	a) Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	NA	195	185	175	165	155	145
	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	7,4	7,3	7,2	7,1	7,0	6,9	6,8
11	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):								
	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	NA	100	100	100	100	100	100
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	40,43	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	92,79	93,29	93,79	94,29	94,79	95,29	95,79
13	Tingkat Kemiskinan	%	4,47	4,2	4	3,79	3,58	3,37	3,16
14	Indeks Gini	Poin	0,280	0,277	0,275	0,273	0,271	0,269	0,267
15	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	%	NA	44,16	46,72	49,28	51,83	54,39	56,95
16	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	NA	40	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00
17	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,57	4,39	4,43	4,47	4,52	4,56	4,61
18	PDRB per Kapita	Juta Rp.	330,16	334,38	338,6	342,81	347,03	351,25	355,46
19	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	1,79	2,02	2,26	2,49	2,73	2,96	3,2
20	Pengembangan Pariwisata:								
	a)Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	0,19	0,28	0,34	0,4	0,45	0,51	0,57
	b)Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	NA	25	30	35	40	45	50
21	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	%	2,93**	3	3,04	3,08	3,12	3,16	3,2
22	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN								
	a)Rasio kewirausahaan Kabupaten (%)	%	NA	3,79	4	4,21	4,42	4,63	4,84
	b)Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	%	NA	0,41	0,5	0,59	0,67	0,76	0,85
	c)Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	NA	0,9	1,11	1,33	1,54	1,75	1,96
23	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,67	3,19	3,16	3,13	3,1	3,07	3,04
24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	NA	61,7	62,01	62,33	62,64	62,95	63,26
25	Tingkat Penguasaan IPTEK								
	a) Indeks Inovasi Daerah	Poin	NA	48,64	49,96	51,28	52,59	53,91	55,23
26	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau								
	-Kontribusi Kategori Pertanian	%	NA	23,8	24,17	24,53	24,9	25,26	25,63
27	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	NA	1,19	1,29	1,39	1,49	1,59	1,69
28	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	%	NA	2±1	2±1	2±1	2±1	2±1	2±1
29	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	30,22	30,34	30,47	30,59	30,72	30,84	30,96
30	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	NA	55,62	55,9	56,18	56,46	56,74	57,02

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
31	Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan								
	a) Kontribusi PDRB KTT Terhadap Kalimantan Utara (%)	%	6,33	6,37	6,45	6,53	6,62	6,7	6,78
	b) Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	%	87,58	88,02	88,46	88,90	89,34	89,79	90,24
	c) Persentase Desa Mandiri (%)	%	18,75	21,88	25,00	28,13	28,13	28,13	31,26
32	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	75,85	76,05	76,81	77,58	78,36	79,14	80,00
33	Indeks Reformasi Hukum	Poin	NA	68,71	69,94	71,17	72,39	73,62	74,85
34	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	NA	2,58	2,7	2,83	2,95	3,07	3,19
35	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,81	3,89	3,97	4,05	4,13	4,21	4,29
36	Indeks Integritas Nasional	Poin	NA	75,22	75,99	76,76	77,53	78,3	79,07
37	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	NA	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
38	Angka Konflik	Poin	NA	0,507	0,52	0,534	0,547	0,56	0,573
39	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	%	NA	63,72	64,59	65,46	66,33	67,2	68,07
40	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	NA	3,08	3,43	3,78	4,12	4,47	4,82
41	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	%	NA	0,7	0,72	0,73	0,75	0,76	0,78
42	Tingkat Inflasi (%)	%	NA	2±1	2±1	2±1	2±1	2±1	2±1
43	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan								
	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	%	NA	21,24	23,85	26,47	29,08	31,69	34,3
	b) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	%	NA	3449809	4523059	5596308	6669558	7742807	8816056
	c) Total Kredit/PDRB (%)	%	NA	12	14,86	17,72	20,58	23,44	26,3
44	Inklusi Keuangan (%)	%	NA	97,3	97,39	97,49	97,58	97,67	97,76
45	Indeks Ketahanan Daerah*	Poin	NA	0,47	0,49	0,52	0,55	0,57	0,6
46	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	NA	57,92	58,39	58,86	59,33	59,8	60,27
47	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Poin	NA	81,98	82,37	82,77	83,16	83,56	83,96
48	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	56,07**	71,56	71,8	72,05	72,3	72,56	72,81
49	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,448	0,439	0,431	0,422	0,414	0,405	0,396
50	Kualitas Lingkungan Hidup								
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72,55	72,83	73,17	73,52	73,86	74,2	74,55
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	NA	75,91	76,68	77,45	78,22	78,99	79,76
	c) Pengelolaan Sampah								

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
51	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	NA	29,6	32,62	35,64	38,66	41,68	44,7
52	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	%	NA	86	86,85	87,7	88,54	89,39	90,24
53	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan								
	a. Ketahanan Energi								
	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	kWh/ kapita	NA	1670	1889	2108	2326	2545	2764
	b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	%	16,78*	15,39	14,69	14	13,3	12,6	11,9
	c) Ketahanan Air								
	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	NA	0,4	0,43	0,46	0,49	0,52	0,55
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	%	NA	65,74	67,45	69,17	70,88	72,59	74,3
54	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	146,77	146,22	145,67	145,11	144,56	144,01	143,46
55	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)								
	a. Kumulatif	%	NA	34,65	36,40	38,14	39,89	41,63	43,38
	b. Tahunan	%	NA	45,93	48,63	51,34	54,04	56,74	59,45

4.2.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel IV.5
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**Aspek Geografi Dan Demografi**								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	61,25	62,71	64,17	65,63	67,08	68,54	70,00
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	14,96	14,45	13,94	13,43	12,92	12,41	11,90
3	Konsumsi listrik perkapita	kWh/ kapita	NA	1.670	1.889	2.108	2.326	2.545	2.764
4	Kapasitas Air Baku	m3/detik	NA	0,40	0,43	0,46	0,49	0,52	0,55
5	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	NA	65,74	67,45	69,17	70,88	72,59	74,30
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	72,55	72,83	73,17	73,52	73,86	74,20	74,55
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	NA	75,91	76,68	77,45	78,22	78,99	79,76
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	NA	29,60	32,62	35,64	38,66	41,68	44,70
9	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	%	NA	86,00	86,85	87,70	88,54	89,39	90,24
10	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	NA	45,93	48,63	51,34	54,04	56,74	59,45
11	Indeks Risiko Bencana	Poin	146,77	146,22	145,67	145,11	144,56	144,01	143,46
12	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	NA	0,47	0,49	0,52	0,55	0,57	0,60
13	Jumlah Penduduk	Jiwa	28,16	28,83	29,48	30,15	30,81	31,46	32,09
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,51	2,38	2,25	2,27	2,19	2,11	2,00
15	Rasio Penduduk	Poin	112,37	111,99	111,48	110,99	110,59	110,15	109,74
16	Kepadatan Penduduk	Jiwa/km2	7,30	7,47	7,64	7,81	7,99	8,15	8,32
II	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,57	4,39	4,43	4,47	4,52	4,56	4,61
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,47	4,20	4,00	3,79	3,58	3,37	3,16
3	PDRB Per Kapita	Juta Rp.	330,16	334,38	338,60	342,81	347,03	351,25	355,46
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,67	3,19	3,16	3,13	3,1	3,07	3,04

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Indeks Gini	Poin	0,280*	0,277	0,275	0,273	0,271	0,269	0,267
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,95	71,04	71,13	71,55	71,96	72,38	72,78
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,51	73,57	73,61	73,66	73,70	73,75	73,79
8	Prevalensi Stunting	%	7,4	7,3	7,2	7,1	7,0	6,9	6,8
9	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	NA	195	185	175	165	155	145
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	NA	100	100	100	100	100	100
11	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	%	40,43	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
12	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasiona	%	92,79	93,29	93,79	94,29	94,79	95,29	95,79
13	Indeks Pendidikan	Poin	65,83	65,97	66,11	66,64	67,18	67,71	68,25
14	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,24	9,35	9,49	9,63	9,77	9,91	10,05
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,61	12,39	12,41	12,44	12,46	12,49	12,51
16	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk								
	- Literasi Membaca	%	NA	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00
	- Numerasi	%	NA	10,00	12,50	15,00	17,50	20,00	22,50
17	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk								
	- Literasi Membaca	%	NA	40,56	42,12	43,68	45,24	46,80	48,36
	- Numerasi	%	NA	26,86	28,57	30,28	31,99	33,70	35,41
18	Rasio Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional Terhadap Ajang Yang Diikuti	%	NA	10,00	10,00	11,00	11,00	12,50	12,50
19	Tingkat kedalaman kemiskinan (P1)	Poin	0,48	0,45	0,43	0,41	0,38	0,36	0,34
20	Tingkat keparahan kemiskinan (P2)	Poin	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	NA	44,16	46,72	49,28	51,83	54,39	56,95

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
22	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	NA	40	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00
23	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	NA	81,98	82,37	82,77	83,16	83,56	83,96
24	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	NA	57,92	58,39	58,86	59,33	59,80	60,27
25	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	56,07**	71,56	71,80	72,05	72,30	72,56	72,81
26	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,448	0,439	0,431	0,422	0,414	0,405	0,396
27	Pengeluaran per Kapita (PPP)	Ribu Rp/Kapita	8.707	9.041	9.377	9.713	10.050	10.386	10.722
28	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	51,45	51,45	56	60,60	65,20	70,00	74,54
III	**Aspek Daya Saing Daerah**								
1	Angka Ketergantungan	Poin	46,31	46,64	46,99	47,34	47,68	47,89	48,27
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	1,79	2,02	2,26	2,49	2,73	2,96	3,20
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,19	0,28	0,34	0,40	0,45	0,51	0,57
4	LPE Sektor Pariwisata (PAMM)	%	7,27	7,73	8,18	8,64	9,09	9,55	10,00
5	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	NA	25	30	35	40	45	50
6	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	2,93**	3,00	3,04	3,08	3,12	3,16	3,20
7	Rasio Kewirausahaan Kabupaten	%	NA	3,79	4,00	4,21	4,42	4,63	4,84
8	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	NA	0,41	0,50	0,59	0,67	0,76	0,85
9	Return on Aset (ROA) BUMD	%	NA	0,90	1,11	1,33	1,54	1,75	1,96
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	73,23	73,53	73,82	74,12	74,41	74,71	75,00
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	NA	61,70	62,01	62,33	62,64	62,95	63,26
12	Indeks Inovasi Daerah	Poin	NA	48,64	49,96	51,28	52,59	53,91	55,23
13	Kontribusi Kategori Pertanian	%	NA	23,80	24,17	24,53	24,90	25,26	25,63
14	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	NA	1,19	1,29	1,39	1,49	1,59	1,69
15	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	%	NA	2±1	2±1	2±1	2±1	2±1	2±1
16	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun Rp.	NA	1,9	2,0	2,1	2,2	2,35	2,5

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Tana Tidung	%	78,00*	81,43	83,14	84,86	86,57	88,29	90,00
18	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	30,22	30,34	30,47	30,59	30,72	30,84	30,96
19	Indeks Infrastruktur Dasar	Poin	75,69	76,41	77,13	77,85	78,56	79,28	80,00
20	Indeks Konektivitas Wilayah	Poin	46,40**	50,00	52,50	55,00	57,50	60,00	62,50
21	Ekspor Barang dan Jasa	%	NA	55,62	55,90	56,18	56,46	56,74	57,02
22	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	87,58	88,02	88,46	88,90	89,34	89,79	90,24
23	Tingkat Inflasi (%)	%	NA	2±1	2±1	2±1	2±1	2±1	2±1
24	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4,47	5,49	5,55	5,60	5,66	5,72	5,77
25	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	5,01	6,16	6,22	6,28	6,34	6,41	6,47
26	Kontribusi PDRB KTT Terhadap Kalimantan Utara (%)	%	6,33	6,37	6,45	6,53	6,62	6,70	6,78
27	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Harga Berlaku	%	23,96	24,22	24,48	24,74	25,00	25,26	25,52
28	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	59,80	59,00	58,20	57,40	56,60	55,80	55,00
29	Persentase Desa Mandiri	%	18,75	21,88	25,00	28,13	28,13	28,13	31,26
30	Indeks Desa	Poin	NA	77,46	78,23	79,01	79,80	80,60	81,41
31	Indeks Zakat Nasional	Poin	0	0,20	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35
32	Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	3,37	3,46	3,51	3,56	3,60	3,65	3,67
IV	**Aspek Pelayanan Umum**								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	75,85	76,05	76,81	77,58	78,36	79,14	80,00
2	Indeks Reformasi Hukum	Poin	87,72	88,16	88,60	89,04	89,49	89,94	90,38
3	Nilai SAKIP	Poin	71,10	71,75	72,40	73,05	73,70	74,35	75,00
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	NA	2,58	2,70	2,83	2,95	3,07	3,19
5	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,81	3,89	3,97	4,05	4,13	4,21	4,29
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	Poin	85,30	86,08	86,87	87,65	88,43	89,22	90,00
7	Indeks Integritas Nasional	Poin	NA	75,22	75,99	76,76	77,53	78,30	79,07
8	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	NA	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
9	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,15	3,17	3,19	3,22	3,24	3,26	3,34

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Angka Konflik	Poin	NA	0,507	0,520	0,534	0,547	0,560	0,573
11	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	NA	63,72	64,59	65,46	66,33	67,20	68,07
12	Angka Kriminalitas	Kasus	14**	12	11	11	10	10	10
13	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	NA	21,24	23,85	26,47	29,08	31,69	34,30
14	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	%	NA	3.449.809	4.523.059	5.596.308	6.669.558	7.742.807	8.816.056
15	Total Kredit/PDRB	%	NA	12,00	14,86	17,72	20,58	23,44	26,30
16	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	NA	0,7	0,72	0,73	0,75	0,76	0,78
17	Laju Penurunan Pelanggaran Perda	%	NA	5,00	5,00	7,50	7,50	10,00	10,00
18	Indeks Rasa Aman	Poin	75,00	76,67	78,33	80,00	81,67	83,33	85,00
19	Persentase Nilai Kinerja Pemerintahan Desa	%	NA	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00
20	Indeks Ketahanan Ekonomi	Poin	NA	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
21	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	NA	3,08	3,43	3,78	4,12	4,47	4,82

**data tahun 2023*
***data tahun 2022*

4.2.5 Indikator Kinerja Kunci

Implementasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) memiliki peran penting dalam penyusunan RPJMD karena IKK berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah yang terstandarisasi secara nasional. Pemilihan dan penetapan IKK yang relevan dengan konteks dan prioritas Kabupaten Tana Tidung akan memastikan bahwa target-target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD dapat diukur secara objektif, dievaluasi kemajuannya secara berkala, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan demikian, implementasi IKK yang tepat akan meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel IV.6
Penetapan Indikator Kinerja Kunci
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	91,81	94,35	96,90	99,45	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98,96	99,05	99,14	99,23	99,32	99,41	99,50
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	18,71	19,47	20,23	21,00	21,76	22,52	23,28
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	54,76	57,26	59,76	62,26	64,76	67,26	69,76
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	47,64	50,54	53,44	56,34	59,24	62,14	65,04
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72,76	73,86	74,96	76,06	77,16	78,26	79,36
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63,60	65,10	66,60	68,10	69,60	71,10	72,60
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	61,90	62,32	62,73	63,14	63,55	63,96	64,37
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	67,90	71,20	71,95	72,70	73,45	74,20	74,95
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	73,60	74,50	75,40	76,30	77,20	78,10	79,00
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	73,00	74,50	76,00	77,50	79,00	80,50	82,00
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	69,97	70,97	71,97	72,97	73,97	74,97	75,97
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	72,10	73,10	74,10	75,10	76,10	77,10	78,10
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	56,20	58,70	61,20	63,70	66,20	68,70	71,20
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	58,00	60,40	62,80	65,20	67,60	70,00	72,40
b. Kesehatan									
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	NA	<3	<3	<3	<2	<2	<2
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	7,4	7,3	7,2	7,1	7,0	6,9	6,8
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	53,43	56,10	58,91	61,85	64,94	68,19	71,60
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	67,81	71,20	74,76	78,50	82,42	86,54	90,87
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	65,47	68,74	72,18	75,79	79,58	83,56	87,74
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	85,21	87,68	90,14	92,61	95,07	97,54	100,00

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	94,69	95,58	96,46	97,35	98,23	99,12	100,00
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	67,25	70,61	74,14	77,85	81,74	85,83	90,12
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	92,25	93,54	94,83	96,13	97,42	98,71	100,00
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	73,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	44,63	46,86	49,20	51,66	54,25	56,96	59,81
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	8,22	9,04	9,95	10,94	12,03	13,24	14,56
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	NA	32,73	35,19	37,98	40,86	42,93	44,82
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	45,38	65,74	67,45	69,17	70,88	72,59	74,30
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	69,41	75,91	76,68	77,45	78,22	78,99	79,76
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	NA	23,10	20,70	42,30	59,40	74,70	90,00
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	55,15	57,91	60,80	63,84	67,04	70,39	73,91
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	38,87	39,06	39,26	39,46	39,65	39,85	40,05

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	NA	100	100	100	100	100	100
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	NA	20	20	20	20	20	20
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	NA	60	70	80	85	85	85
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	0	0	0	0	0	0	0
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0	0	0	0	0	0
3	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	6,37	6,69	7,02	7,37	7,74	8,13	8,54
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	NA	16,20	11,16	14,18	18,29	23,88	34,58
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	59,1	59,69	60,29	60,89	61,50	62,11	62,74
e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	42,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	orang	NA	2	2	2	3	3	3
4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	NA	30	30	30	30	30	30
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	5,38	5,65	5,93	6,23	6,54	6,87	7,21

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	0	100	100	100	100	100	100
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	NA	100	100	100	100	100	100
11	Persentase penanganan pra bencana	%	NA	100	100	100	100	100	100
12	Persentase penanganan pasca bencana	%	NA	100	100	100	100	100	100
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	NA	100	100	100	100	100	100
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
f. Sosial									
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	19,35 = Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	40,50	45,00	49,50	54,00	58,50	63,00
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%		49,50	54,00	58,50	63,00	67,50	72,00
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%		36,00	40,50	45,00	49,50	54,00	58,50
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%		9,00	13,50	18,00	22,50	27,00	31,50
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	NA	45,00	54,00	63,00	72,00	81,00	90,00
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	NA	45,00	49,50	54,00	58,50	63,00	67,50
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	NA	54,00	63,00	67,50	72,00	76,50	81,00
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	NA	54,00	58,50	63,00	67,50	72,00	76,50
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDSyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	NA	54,00	63,00	67,50	72,00	76,50	81,00
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	NA	49,50	54,00	58,50	63,00	67,50	72,00
12	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	NA	54,00	58,50	63,00	67,50	72,00	76,50
13	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	NA	40,50	45,00	49,50	54,00	58,50	63,00
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	NA	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
a. Tenaga Kerja									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	5,21	5,47	5,74	6,03	6,33	6,65	6,98
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/Orang	NA	640	645	650	655	660	665
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	48,88	49,37	49,86	50,36	50,86	51,37	51,89
b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	79,56	80,36	81,16	81,97	82,79	83,62	84,45
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,448	0,439	0,431	0,422	0,414	0,405	0,396
3	Persentase ARG Daerah	%	12,29	12,79	13,29	13,79	14,29	14,79	15,29
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	70,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
c. Pangan									
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	143,05	144,48	145,93	147,38	148,86	150,35	151,85
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai	80,5	81	81,43	81,86	82,29	82,72	83,15
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	NA	15,72	14,82	13,81	12,97	12,04	12,04
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	NA	58,18	58,18	67,97	67,97	77,67	77,67
d. Pertanahan									
1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	%	0	0	0	0	0	0	0
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	NA	20	21	22	23	24	25
3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	%	NA	20	21	22	23	24	25
4	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	%	NA	20	21	22	23	24	25
5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	NA	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
7	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	NA	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	NA	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
9	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	NA	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
e. Lingkungan Hidup									

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Nilai	72,55	73,38	73,48	73,59	73,69	73,79	73,90
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%	66,39	68,05	69,75	71,49	73,28	75,11	76,99
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	0	84,24	84,29	84,33	84,38	84,42	84,47
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	99,72	99,77	99,81	99,86	99,91	99,95	100,00
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	95	95,83	96,67	97,50	98,33	99,17	100,00
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	96,9	97,42	97,93	98,45	98,97	99,48	100,00
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0	3,13	6,25	9,38	12,50	15,63	18,75
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga emasyarakatan Desa	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	1,78	1,77	1,76	1,75	1,74	1,73	1,72
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	69,16	69,85	70,55	71,26	71,97	72,69	73,41
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,29	5,98	5,68	5,39	5,12	4,87	4,62

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 -19 tahun	NA	2	2	2	1	1	1
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	NA	71,56	71,80	72,05	72,30	72,56	72,81
i. Perhubungan									
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	56,80	57,37	57,94	58,52	59,11	59,70	60,29
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	NA	70	70	70	75	75	75
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	NA	40	40	50	50	55	55
j. Komunikasi dan Informatika									
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	64,7	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	NA	50	50	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	NA	50	50	100	100	100	100
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	NA	18,65	18,84	19,03	19,22	19,41	19,61
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	NA	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	18,47	18,65	18,84	19,03	19,22	19,41	19,61
l. Penanaman Modal									
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-11,17	10	12	14	16	18	20
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	NA	60	65	70	75	80	85
m. Kepemudaan dan Olahraga									
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/ training dan memperoleh sertifikat	%	NA	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	NA	2	2	2,5	2,5	3	3
n. Statistik									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	NA	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3
o. Persandian									
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	NA	40,00	55,00	70,00	80,00	90,00	100,00
p. Kebudayaan									
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	39,28	41,24	43,31	45,47	47,75	50,13	52,64

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	NA	60	60	60	60	60	60
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan	%	NA	5	5	7,5	7,5	10	10
q. Perpustakaan									
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	80,54	81,35	82,16	82,98	83,81	84,65	85,49
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	49	49,94	50,44	50,95	51,45	51,97	52,49
r. Kearsipan									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	NA	30,15	35,55	40,65	45,25	50,50	55,54
3. Urusan Pilihan									
a. Kelautan dan Perikanan									
1	Produksi Perikanan Tangkap	%	102,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Produksi Perikanan Budi Daya	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b. Pariwisata									
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	NA	7,3	7,35	7,4	7,45	7,5	7,55
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	-50%	1,65	1,66	1,67	1,68	1,69	1,70
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
c. pertanian									
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	NA	0,50	1,50	2,50	3,50	4,50	5,50
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	NA	0,50	1,50	2,50	3,50	4,50	5,50
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	NA	0,70	0,76	0,78	0,81	0,83	0,85
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%	NA	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	NA	15,42	15,30	15,45	16,55	16,71	16,81
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	17,04	16,19	15,38	14,61	13,88	13,19	12,53
d. Kehutanan									
e. Energi dan Sumber Daya Mineral									
f. Perdagangan									

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	NA	20	20	22	22	25	25
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	63,92	67,12	70,47	74,00	77,70	81,58	85,66
g. Perindustrian									
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi:								
	1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	NA	5	5	5	5	5	5
	2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota	%	NA	2,02	2,26	2,49	2,73	2,96	3,20
	3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	NA	10	10	10	10	10	10
	4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	NA	1	1	1	1	1	1
	5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	NA	2,02	2,26	2,49	2,73	2,96	3,20
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	NA	10	12	14	16	18	20
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	%	NA	0	0	0	0	0	0
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	%	NA	10	10	15	15	15	15
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
h. Transmigrasi									
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
a. Perencanaan									
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b. Keuangan									
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	12,10 = Rasio Belanja	<30	<30	<30	<30	<30	<30

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan						
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	2,86	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	131,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	0,27	0,30	0,33	0,36	0,40	0,45	0,50
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	50,17	50,67	51,17	51,67	52,17	52,67	53,17
6	Persentase Penurunan SILPA	%	0,41	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan									
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	indeks	NA	60,00	65,00	65,00	70,00	75,00	80,00
d. Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	NA	8,18	12,27	16,36	20,45	24,95	28,63
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	NA	76,50	77,40	78,30	79,20	80,10	81,90
e. Fungsi Pengawasan									
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	NA	2,97	3,02	3,06	3,11	3,15	3,20
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	NA	3,02	3,06	3,11	3,15	3,20	3,24
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	NA	4	4	4	4	4	4
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	NA	76,50	76,50	77,40	78,30	79,20	80,10
f. Fungsi Pengadaan									
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	NA	23,40	23,40	24,30	24,30	25,20	26,10
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	NA	7,20	9,00	13,50	13,50	18,00	22,50
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	NA	32,40	32,40	33,30	33,30	34,20	35,10
g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah									
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	NA	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	NA	100	100	100	100	100	100
h. Pelayanan Publik									

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	NA	83,00	83,00	83,25	83,61	84,06	84,42
Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)									
Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Ibu Menyusui									
1	Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK	%	NA	75,60	76,50	77,40	79,20	81,00	81,90
2	Pemberian Tablet Tambah Darah/MMS sebanyak 180 butir selama masa kehamilan	%	NA	81,00	82,80	84,60	86,40	90,00	90,00
3	Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil	%	NA	74,70	75,60	76,50	79,20	81,00	81,00
4	Pemeriksaan kehamilan 6 kali selama masa kehamilan	%	NA	72,00	73,80	76,50	79,20	81,00	85,50
5	Pelayanan KB pasca persalinan	%	NA	1,71	1,80	3,60	3,78	4,05	4,50
	Anak Usia 0–23 Bulan								
1	Praktik Inisiasi Menyusui Dini	%	NA	45,00	49,50	54,00	58,50	67,50	76,50
2	Bayi usia <6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	%	NA	65,70	68,40	71,10	73,80	76,50	76,50
3	Anak usia 6–23 bulan mendapatkan MPASI beragam	%	NA	65,70	68,40	71,10	73,80	76,50	76,50
4	Anak usia 6–23 bulan masih mendapat ASI	%	NA	65,70	68,40	71,10	73,80	76,50	76,50
5	Anak usia 0–23 bulan gizi buruk mendapat tata laksana	%	NA	81,90	82,80	83,70	84,60	85,50	85,50
6	Anak usia 0–23 bulan dipantau pertumbuhan & perkembangan	%	NA	45,00	49,50	54,00	58,50	63,00	67,50
7	Anak usia 0–23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	%	NA	58,50	63,00	67,50	72,00	76,50	81,00
8	Anak usia 0–23 bulan mendapat imunisasi rutin lengkap	%	NA	63,00	67,50	72,00	76,50	81,00	81,00
9	Anak usia 6–23 bulan diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar	%	NA	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50
10	Anak usia 6–23 bulan mendapat obat cacing (POPM)	%	NA	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50
	Anak Usia 24–59 Bulan								
1	Gizi buruk mendapat tata laksana	%	NA	81,90	82,80	83,70	84,60	85,50	86,40
2	Dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	NA	45,00	49,50	54,00	58,50	63,00	67,50
3	Gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	%	NA	58,50	63,00	67,50	72,00	76,50	81,00
4	Diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar	%	NA	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50
5	Terpantau kasus pneumonia	%	NA	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50
6	Mendapat obat cacing (POPM)	%	NA	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50
	Remaja Putri								
1	Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	%	NA	56,70	58,50	60,30	63,00	67,50	72,00
2	Skrining anemia	%	NA	67,50	69,30	72,00	74,70	76,50	81,00
	Calon Pengantin								
1	Pemeriksaan kesehatan	%	NA	45,00	49,50	54,00	58,50	63,00	67,50
2	Bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	%	NA	45,00	49,50	54,00	58,50	63,00	67,50

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Rumah Tangga Masyarakat								
1	Akses terhadap air minum aman	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Akses terhadap sanitasi aman	%	NA	75,91	76,68	77,45	78,22	78,99	79,76
3	Kepemilikan JKN	%	NA	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
4	Kelompok sasaran mendapat pendampingan	%	NA	75,42	75,60	75,62	75,64	75,65	75,67
5	Anak usia 0–59 bulan mendapat akta lahir dan KIA	%	NA	84,38	84,74	85,19	85,46	85,82	86,27
6	Pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga	%	NA	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
	Indikator Rencana Induk Bidang Kesehatan								
1	Usia harapan hidup	Tahun	73,51	73,57	73,61	73,66	73,70	73,75	73,79
2	*Total Fertility Rate* (Angka kelahiran total)	%	1,78	1,77	1,76	1,75	1,74	1,73	1,72
3	Angka kematian ibu	Per 100.000 KH	NA	195	185	175	165	155	145
4	Angka kematian balita	Per1.000 KH	20	17	15	13	10	9	6
5	Prevalensi stunting	%	7,4	7,3	7,2	7,1	7,0	6,9	6,8
6	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	0	45	50	55	61	70	80
7	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	62,40	80,00	85,00	90,00	93,00	95,00	95,00
8	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	92,79	93,29	93,79	94,29	94,79	95,29	95,79
9	Angka keberhasilan pengobatan TB	%	40,43	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	73,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	40,00	66,00	68,00	70,00	75,00	80,00	85,00
12	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	%	NA	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
13	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	NA	76,50	81,00	85,50	90,00	90,00	90,00
14	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	%	NA	11,70	12,51	12,60	12,69	12,78	12,78
15	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	NA	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
16	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	NA	78,30	80,10	81,90	83,70	85,50	90,00
17	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	NA	76,50	78,30	81,00	83,70	85,50	90,00
18	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	NA	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
19	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	NA	27,00	27,00	27,00	27,00	31,50	31,50
20	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	NA	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
21	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	NA	67,50	69,30	71,10	72,90	74,70	76,50
22	Persentase merokok penduduk 10–21 tahun	%	NA	11,16	10,26	9,36	8,46	7,56	6,66
23	Cakupan penemuan kasus TB	orang	NA	427,5	367,2	316,8	280,8	253,8	232,2
24	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	NA	31,50	4,50	49,50	54,00	58,50	63,00
25	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	NA	40,50	45,00	49,50	58,50	63,00	67,50
26	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	NA	30,00	31,50	3,60	40,50	4,50	49,50
27	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (*proportion of demand satisfied by modern methods*)	%	69,16	69,85	70,55	71,26	71,97	72,69	73,41
28	Angka kelahiran menurut usia tertentu / *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) 15–19 tahun	%	NA	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
29	Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	%	NA	1,71	1,80	3,60	3,78	4,05	31,50
30	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	NA	67,50	72,00	76,50	81,00	85,50	85,50
31	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	NA	63,00	67,50	70,20	72,00	76,50	81,00
32	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	NA	67,50	70,20	72,00	74,70	76,50	81,00
33	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	NA	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
34	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	NA	75,60	75,60	76,50	76,50	77,40	77,40

4.2.6 Indikator Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) memiliki peran penting sebagai instrumen kebijakan yang menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat melalui pelayanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya SPM, pemerintah memiliki standar yang jelas terkait jenis, mutu, dan cakupan layanan minimal yang harus diberikan, sehingga masyarakat di seluruh wilayah dapat merasakan pemerataan kualitas layanan tanpa terkecuali. Oleh karena itu, evaluasi capaian SPM menjadi kewajiban dalam rangka melihat keberhasilan program-program yang dijalankan. Dalam evaluasi tersebut, perlu dirumuskan target capaian indikator SPM Kabupaten Tana Tidung dengan rincian sebagai berikut.

Tabel IV.7
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2030

No	Mutu Layanan SPM	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendidikan									
1	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	89.4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar jenjang SD/MI	%	99.86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Precentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar jenjang SMP/MTs	%	99,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Precentase Pendidikan Kesetaraan (Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)	%	30.77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kesehatan									
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	62,2	68,50	74,80	81,10	87,40	93,70	100,00
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	74,25	78,54	82,83	87,13	91,42	95,71	100,00
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	72,37	76,98	81,58	86,19	90,79	95,40	100,00
4	Pelayanan Kesehatan Balita	%	88,96	90,80	92,64	94,48	96,32	98,16	100,00
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	64,54	70,45	76,36	82,27	88,18	94,09	100,00
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	64,76	70,63	76,51	82,38	88,25	94,13	100,00
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Mutu Layanan SPM	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sosial									
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah WN	127	127	127	127	127	127	127
2	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah WN	1	1	1	1	1	1	1
4	Persentase (%) annak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah WN	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202
6	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandang pengemis terlantar di luar panti	Jumlah WN	1	1	1	1	1	1	1
8	Persentase (%) gelandang pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten	Jumlah WN	50	50	50	50	50	50	50
10	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelahtanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	91,67	93,06	94,45	95,84	97,22	98,61	100,00
Pekerjaan Umum									
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum (SPAM) Sehari-hari	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perumahan Rakyat									
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TRANTIBUMLINMAS									
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	%	87,78	89,82	91,85	93,89	95,93	97,96	100,00

No	Mutu Layanan SPM	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Pelayanan informasi rawan bencana	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	95	95,83	96,67	97,50	98,33	99,17	100,00
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	97,08	97,57	98,05	98,54	99,03	99,51	100,00



BAB 5
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari milestone pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Tidung periode 2025-2045. RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Tana Tidung serta kerjasama dengan stakeholders pembangunan lainnya.

Dokumen ini juga merupakan implementasi dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dalam koordinasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

5.1. Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Tana Tidung maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah

kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.

2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.
3) RKPD masa transisi di tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode saat ini 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 memuat hingga tahun 2030.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Dalam rangka menjamin konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan jangka menengah, maka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD menjadi bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi RPJMD dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan oleh perangkat daerah dan Bappelitbang sebagai koordinator. Terkait dengan perubahan RPJMD, Permendagri 86 Tahun 2017 memperkenankan perubahan RPJMD apabila terjadi kondisi-kondisi tertentu yang signifikan, seperti:

1. Terjadi **perubahan mendasar** yang berpengaruh terhadap asumsi dalam RPJMD;
2. Terjadi **bencana alam, krisis ekonomi, konflik sosial**, atau kondisi luar biasa lainnya;
3. Adanya **perubahan kebijakan nasional atau provinsi** yang berdampak langsung terhadap arah pembangunan daerah;
4. **Perubahan struktur organisasi perangkat daerah** yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan strategis;
5. Hasil **pengendalian dan evaluasi** menunjukkan bahwa indikator kinerja tidak dapat dicapai.

Proses perubahan RPJMD harus melalui mekanisme yang diatur, termasuk konsultasi dengan DPRD dan mendapatkan evaluasi dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Substansi yang dapat diubah dalam RPJMD meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja daerah. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD. Dengan pengendalian, evaluasi, dan mekanisme perubahan yang tertib dan terstruktur, pemerintah daerah dapat menjaga fleksibilitas serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5.3. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu,

konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 sebagai aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Tidung. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Tana Tidung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Seluruh OPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029, Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
4. Setiap OPD berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
5. RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun selama 5 tahun masa kepemimpinan bupati yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
6. Terhadap perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan nomenklatur urusan pemerintahan yang terbentuk setelah RPJMD ditetapkan, maka RPJMD dapat dirubah terhadap nomenklatur program, urusan dan OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD;
8. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung serta melaporkan hasilnya kepada Bupati; dan

Dalam pelaksanaan RPJMD memperhatikan konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan

yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah. Sedangkan jika terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BUPATI TANA TIDUNG

IBRAHIM ALI